

PEREMPUAN DAN POLITIK
PEREMPUAN INDONESIA PADA MASA JEPANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SITI FATIMAH

PEREMPUAN DAN POLITIK
PEREMPUAN INDONESIA PADA MASA JEPANG



PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2020

PEREMPUAN DAN POLITIK
PEREMPUAN INDONESIA PADA MASA JEPANG
Copyright© Siti Fatimah, 2020

Diterbitkan oleh Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2020
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55599
Tlp. 082221483637; WA. 082137666614
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
facebook: Penerbit OmbakTiga
website: www.penerbitombak.com

PO.875. 08. '20

Penulis: Siti Fatimah
Penyunting: Gusti Asnan dan Tim Ombak
Tata letak & desain sampul: Aditya P.

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
PEREMPUAN DAN POLITIK
PEREMPUAN INDONESIA PADA MASA JEPANG
Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020
xii + 203 hlm.; 15 x 23 cm
ISBN: 978-602-258-575-6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ x

BAB I PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF SEJARAH ~ 1

- A. Peran Perempuan dalam Historiografi ~ 1
- B. Perempuan di dalam Sejarah (*Women In History*) ~ 3
 - 1. Sejarah Perempuan (*Women's History*) ~ 6
 - 2. Kesalahan Metodologi? ~ 8
 - 3. Sejarah tentang Perempuan (*The History Of Women*) ~ 10
- C. Kajian tentang Perempuan dan Perannya dalam Konteks Sejarah ~ 12
- D. Interpretasi Sejarah dan Analisis Peran Perempuan dalam Konteks Politik pada Zaman Jepang di Indonesia ~ 15
 - 1. Interpretasi Sejarah ~ 15
 - 2. Standar Berpikir Historis ~ 18

BAB II TEORI-TEORI TENTANG BUDAYA DAN PERAN SOSIAL PEREMPUAN ~ 25

- A. Gender ~ 25
 - 1. Pendahuluan ~ 25
 - 2. Kajian tentang Gender ~ 27
 - 3. Teori Partisipasi Sosial Perempuan dan Politik ~ 28
 - 4. Kesetaraan Gender (*Gender Equity*) ~ 31
- B. Teori-teori Gender ~ 32
 - 1. Teori Struktural-Fungsional (Kelembagaan) ~ 33
 - 2. Tokoh-tokoh Teori Struktural Fungsional ~ 34
 - 3. Teori Konflik ~ 36
- C. Feminisme ~ 39
 - 1. Pengertian Feminisme ~ 39
 - 2. Ciri-ciri Feminisme ~ 41

- D. Teori-teori Feminisme ~ 41
 - 1. Teori Feminisme Liberal ~ 41
 - 2. Teori Feminisme Marxis-Sosialis ~ 42
 - 3. Teori Feminisme Radikal ~ 43
 - 4. Feminisme Anarkis ~ 43
 - 5. Feminisme Post-Modern ~ 44
 - 6. Teori Ekofeminisme ~ 44
 - 7. Teori Psikoanalisis ~ 45
- E. Feminisme Pascakolonial ~ 46
 - 1. Kolonialisme dan Pascakolonialisme ~ 48
 - 2. Diskursus Feminisme Pascamodern dan Pascakolonialisme ~ 49
- F. Gender dan Politik ~ 53

BAB III PEREMPUAN DALAM KONTEKS SEJARAH SOSIAL BUDAYA JEPANG ~ 56

- A. Pendahuluan ~ 56
- B. Perempuan Jepang di Zaman Edo ~ 57
- C. Perempuan dalam Perspektif Budaya dan Sejarah Jepang ~ 59
- D. Perempuan Jepang sebelum Zaman Meiji ~ 61
- E. Perempuan Jepang Pasca-Zaman Meiji ~ 72
- F. Perempuan Era Meiji (1868–1912) dan Sesudahnya ~ 73
 - 1. Zaman Taishō ~ 77
 - 2. Masa Perang/Awal Showa ~ 79
 - 3. Masa Pasca-Perang ~ 80

BAB IV KONDISI OBJEKTIF DUNIA PEREMPUAN PADA MASA KOLONIAL ~ 84

- A. Sikap Sosial terhadap Perempuan pada Zaman Kolonial (Era sebelum Kartini) ~ 84
- B. Sikap Sosial terhadap Perempuan pada Zaman Kolonial (Era sesudah Kartini) ~ 91

BAB V PEREMPUAN DAN KEDATANGAN JEPANG DI INDONESIA ~ 100

- A. Organisasi Perempuan sebelum Kedatangan Jepang ~ 100

- B. Indonesia Sekitar Kedatangan Jepang ~ 106
- C. Sistem Pemerintahan Pendudukan Jepang di Indonesia ~ 111
- D. Kebijakan Politik Perang Jepang terhadap Perempuan ~ 116
- E. Organisasi Perempuan pada Pendudukan Jepang ~ 125

BAB VI "FUJINKAI" ORGANISASI PEREMPUAN CIPTAAN JEPANG ~ 128

- A. Terbentuknya *Fujinkai* ~ 128
- B. Struktur Organisasi *Fujinkai* ~ 139
- C. Aktivitas-aktivitas Perempuan/*Fujinkai* pada Masa Pendudukan ~ 143
- D. *Fujinkai* dan Lembaga-lembaga Buatan Jepang Lainnya ~ 154
 - 1. *Fujinkai*, *Seinendan* (Barisan Pemuda) dan *Keibodan* (Barisan Pembantu Polisi) ~ 155
 - 2. *Fujinkai* (Organisasi Perempuan) dan *Tonarigumi* (Rukun Tetangga) ~ 158
 - 3. *Fujinkai* dan Beberapa Perkumpulan Puteri ~ 163

BAB VII BEBERAPA HASIL PENELITIAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP ORGANISASI PEREMPUAN ~ 171

BAB VIII PENUTUP ~ 176

DAFTAR PUSTAKA ~ 178

GLOSARIUM ~ 187

INDEKS ~ 201

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Nyai, Belanda, Istri Pribumi ~ 6
- Gambar 1.2. Joan Wallach Scott, 2013 ~ 7
- Gambar 1.3 Sekolah Kartini (Kartinischool), 1918 ~ 9
- Gambar. 1.4 Lukisan Basuki Abdullah, tentang Nyi Roro Kidul ~ 11
- Gambar 1.5 Analisa sejarah dan Interpretasinya menurut John Bullock (2015) ~ 16
- Gambar. 2.1 Kartini, Pustaka Feminisme Poskolonial yang Terlupakan ~ 47
- Gambar 3.1 Geisha ~ 58
- Gambar 3.2 Amaterasu, dewa matahari yang berjenis kelamin perempuan ~ 62
- Gambar 3.3 Perempuan Jepang Zaman Muromachi ~ 63
- Gambar 3.4 Perempuan elite golongan "samurai" di Jepang ~ 66
- Gambar 3.5 Industri Sutera Suzaka pada puncaknya dan berdirinya Kerajaan Pabrik Sutera Yamamaru Kumi. Wanita Jepang banyak dipekerjakan di pabrik sutra pada era Meiji ~ 78
- Gambar 4.1 Hiratsuka, Raicho, (1886 - 1971) ~ 118
- Gambar 6.1 Seinendan atau Korps Pemuda dibentuk pada 29 April 1943. Tujuannya, mendidik dan melatih pemuda pribumi agar dapat menjaga pertahanan ~ 156
- Gambar 6.2 Sumber: <https://www.edukasinesia.com/> ~ 157
- Gambar 6.3 Laskar Putri Indonesia ~ 164

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Kepentingan-Kepentingan Pokok Dalam Konflik dan Perebuatan Kekuatan Yang Terjadi di Dalamnya ~ 37

DAFTAR BOX

- Box.1.1 Siapakah Nyi Loro Kidul? ~ 11
- Box 2.1 Hak dan Kedudukan Para Perempuan Indonesia di Era Masa Kolonial (Resensi) ~ 52
- Box. 3.1 Zaman Meiji (1867-1912) ~ 76
- Box. 6.1 Barisan Srikandi: Laskar yang Lahir dari Propaganda Jepang ~ 165
- Box. 6.2 Inilah 5 Organisasi Militer Indonesia Bentuk Jepang yang Dikenal Sangat Gahar Oleh: Adi Nugroho ~ 167

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Perempuan dan Politik Perempuan Indonesia pada Masa Jepang* yang penulis tulis berdasarkan hasil penelitian yang didanai oleh Sumitomo Foundation pada tahun 1997 bisa diselesaikan. Kemudian, naskah ini disempurnakan berdasarkan penelitian-penelitian lainnya tentang relasi gender perempuan dan politik, termasuk dari materi dan pengalaman selama mengajar. Adapun buku ini mencoba membahas masalah sejarah, relasinya dengan corak organisasi dan mobilisasi perempuan pada zaman itu.

Jepang menduduki Indonesia selama tiga setengah tahun pada masa Perang Dunia II. Kebijakan Jepang terhadap masyarakat pribumi tidak lain bertujuan untuk memperoleh sumber daya ekonomi dan manusia guna mendukung operasi militernya. Pemerintah militer Jepang membuat berbagai program untuk menarik dukungan rakyat, sekaligus membentuk pemikiran dan tingkah laku mereka.

Berbagai media propaganda digunakan, dan program-program “latihan” dijalankan melalui berbagai kelompok yang dibentuk dalam masyarakat kelas bawah.

Pemerintah Jepang mendirikan perkumpulan-perkumpulan militer untuk putri, seperti *Barisan Srikandi*, *Yoshi Seinendan*, dan *Yoshi Seishintai* di Jawa. Dalam mengerahkan tenaga perempuan untuk bekerja, Pangreh Praja bekerja sama dengan Fujinkai, karena secara struktur organisasi *Fujinkai* mempunyai tanggung jawab untuk menyukseskan program-program yang telah diatur oleh pemerintahan Jepang.

Dengan demikian, buku ini dibuat bagi pembaca yang tertarik untuk membahas apa yang terjadi di zaman Jepang, khususnya

tentang kebijakan Jepang yang merupakan perpaduan antara "kontrol" dan "mobilisasi". Hal ini yang mengakibatkan masyarakat mengalami kegoncangan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Penting untuk diketahui bahwa tindakan Jepang pada masa itu menyebabkan perubahan-perubahan sosial-ekonomi serta dampak psikologis yang terjadi dalam masyarakat selama masa pendudukan itu.

Adapun isi buku ini adalah sebagai berikut. Bab I Fenomena Perempuan dalam Perspektif Sejarah. Bab II Teori-Teori tentang Budaya dan Peran Sosial Perempuan. Bab III Perempuan dalam Konteks Sejarah Sosial Budaya Jepang. Bab IV Kondisi Objektif Dunia Perempuan pada Masa Kolonial. Bab V Perempuan dan Kedatangan Jepang di Indonesia, Bab VI "Fujinkai" Organisasi Perempuan Ciptaan Jepang. Bab VII Beberapa Hasil Penelitian dan Pemahaman terhadap Organisasi Perempuan. Bab VIII Penutup.

Dengan hadirnya buku ini, diharapkan dapat dibaca oleh pembaca yang tertarik pada studi-studi yang berhubungan dengan relasi gender, perempuan, dan politik dalam kancah sejarah sosial dan politik. Di samping itu, buku ini juga diharapkan untuk memperkaya referensi ilmiah khususnya kajian sejarah sosial, politik, dan gender yang terjadi di Indonesia.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini terutama kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan sokongan. Tanpa bantuan moral dari semuanya maka buku ini tidak bisa tuntas dan terpakai dengan baik. Demikian juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Phil., Gusti Asnan, MA. yang menjadi editor utama buku ini dan bantuan Bapak Drs. Nasbahry Couto, M.Sn, untuk melayoutnya menjadi buku. Terima kasih yang tidak terlupakan untuk mentor penulis Prof. Dr. Mestika Zed (alm.), yang sudah membimbing penulis dalam penelitian semenjak menulis proposal untuk The Sumitomo Foundation. Namun, buku ini baru bisa diselesaikan setelah almarhum meninggalkan kami. Tidak lupa ucapan terima kasih, penulis ucapkan kepada teman-teman di Jurusan Sejarah, FIS, UNP Padang, LP2M yang membantu untuk penerbitan

buku ini, berikutnya kepada Rektor UNP Padang, Prof. Drs. Ganefri, Ph.D, beserta jajarannya yang telah memberikan sokongan terhadap hadirnya buku ini. Kritik dan saran yang konstruktif, bersifat ilmiah, dan membangun sangat diharapkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan keilmuan secara umum khususnya bidang sosial dan sejarah gender. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi perkembangan ilmu pendidikan, khususnya bagi pengembangan disiplin ilmu-ilmu sosial dan sejarah.

Padang, 2020

Penulis

Dr. Siti Fatimah M.Pd., M.Hum.

BAB I

PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

A. Peran Perempuan dalam Historiografi

Menurut Satker, dalam *Why Women's History?*,¹ sejarah membantu kita belajar tentang siapa diri kita (sebagai perempuan), tetapi ketika kita tidak tahu sejarah kita sendiri, kekuatan dan impian kita segera berkurang. Menurutnya, kaum perempuan multikultural Amerika telah diabaikan dalam sebagian besar pendekatan arus utama untuk sejarah Amerika, sehingga Proyek *National Woman's History Alliance* (NWHHA) bertujuan memperjuangkan prestasi mereka, untuk memimpin mendorong, agar perempuan mencatat dan menulis "mereka" ke dalam sejarah. Agar mengakui pencapaian perempuan dalam semua aspek kehidupan baik dalam sains, komunitas, pemerintah, sastra, seni, olahraga, kedokteran—agar memiliki dampak besar pada pengembangan harga diri dan peluang baru bagi anak perempuan dan perempuan muda, yaitu dengan penekanan pada teladan peran positif dan pentingnya perempuan dari semua latar belakang. Tercatat bahwa NWHHA telah mengembangkan konstituen bagi guru, siswa, orang tua, karyawan publik, bisnis, organisasi, dan individu di seluruh negeri yang mengkritik dan memahami serta mengetahui peran perempuan yang bersejarah dan membuat perbedaan positif di dunia saat ini.

¹ Sadker, M. P. (t.thn.). *Why Women's History?* Dipetik April 4, 2018, dari *National Women's History*: <https://nationalwomenshistoryalliance.org/why-womens-history/storyalliance.org/why>

Selanjutnya, mengutip apa yang dikatakan oleh Rahayu, Ruth, (2009)² dalam sebuah esainya, sejarah perempuan di Indonesia sebenarnya cukup menarik untuk dibahas. Namun ada kekurangannya, sebab penulisan sejarah maupun analisisnya masih mengarah untuk menggunakan pendekatan lama seperti sebelum kemerdekaan, yaitu pendekatan analisis yang kolonialistik.³ Tulisan mengenai gerakan perempuan di Indonesia masih sedikit sekali. Bukan saja terbatas pada jumlah perempuan yang berminat untuk menulis sejarah tersebut, tetapi karena sejarah Indonesia didominasi sejarawan laki-laki. Dapat diduga hasilnya sejarah itu seakan Indonesia hanya dihuni oleh laki-laki. Cerita sejarah yang berpusat pada laki-laki ini disebut *androsentris*⁴ dan selama ini telah kita anggap sebagai kebenaran adanya sejarah manusia, khususnya manusia yang menghuni ruang bernama Indonesia.

Realitas ini diakui oleh Bambang Purwanto (2006)⁵ bahwa ternyata "...baik secara sadar atau tidak, realitas historis perempuan telah diabaikan sebagai bagian dari proses sejarah Indonesia." Hingga tak mengherankan jika penulisan sejarah gerakan perempuan di Indonesia tertinggal jauh dari perkembangan historiografi Indonesia.

Menurut Rahayu,⁶ yang menjadi tantangan untuk membahas gerakan perempuan di Indonesia bukan untuk membuat sebuah kronologi yang memuat sederet nama organisasi perempuan berdasarkan periodisasi sejarah Indonesia. Sumber yang dibaca, baik

² Ruth Indiah Rahayu adalah peneliti yang berfokus pada isu politik perempuan, perburuhan, dan reproduksi sosial, berdomisili di Jakarta. Tulisannya (2018) adalah tentang *Gerakan Perempuan Indonesia dalam Belenggu Historiografi Indonesia-Androsentris*, Sumber: <https://www.jogloabang.com/perempuan/gerakan-perempuan-indonesia-dalam-belengguhistoriografi-indonesia-androsentris>.

³ *Ibid.*

⁴ *Androsentrisme* adalah sebuah pemahaman yang menjadikan laki-laki sebagai pusat dari dunia. Lelaki dipahami sebagai patokan untuk memandang tentang dunia, tentang kebudayaan, dan tentang sejarah. Pemahaman ini juga menjadikan lelaki atau pengalaman lelaki sebagai norma bagi perilaku manusia.

⁵ Bambang Purwanto, 2006, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2006).

⁶ Rahayu, *op.cit.*

berupa teks maupun lisan, dan reinterpretasi para penulis terhadap sumber-sumber tersebut menentukan seperti apa pemberian makna atas tempo lalu dan atau atas gerakan perempuan Indonesia.

Sekali pun makna perempuan terhadap sejarahnya bukanlah sebuah reinterpretasi tunggal, menurutnya pendekatan untuk menulis dan membaca gerakan perempuan di Indonesia berdasarkan kesenjangan sebagai (1) *women in history* (perempuan di dalam sejarah), (2) *women's history* (sejarah perempuan) atau (3) *the history of women* (sejarah tentang perempuan).⁷

B. Perempuan dalam Sejarah (*Women In History*)

Orientasi sejarah Indonesia yang *androcentris* tentu saja akan menempatkan perempuan dalam peran sebagai tokoh yang dipahlawankan. Gejala seperti ini terlihat pada tulisan-tulisan yang mengaitkan perempuan pada Revolusi Nasional yang oleh Frederick & Soeroto (1982) digolongkan kepada dua peran.⁸

Pertama, menurut Soeroto, perempuan yang berperan sebagai panglima militer yang melawan, memusuhi, dan menentang penjajahan Belanda. Tulisan-tulisan seperti ini misalnya yang melukiskan kepahlawanan Tjut Nya' Dien, Tjut Mutia, Nyi Ageng Serang, Christina Martha Tiahahu. Meskipun panglima militer perempuan ini pada akhirnya ditangkap, dibuang, dipenjara seumur hidup dan dipandang sebagai pemberontak tetapi sungguh kebiasaannya yang menyimpang dari tradisi (laki-laki) itu telah menarik perhatian para penulis sejarah Belanda.⁹

Yang kedua adalah jenis perempuan yang telah menarik hati penulis sejarah Belanda dan memiliki pemikiran serta kegiatan yang sejalan dengan politik etis Belanda pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 untuk memberi kesempatan perempuan pribumi memperoleh pendidikan 'modern'. Para perempuan perintis dan

⁷ *Ibid.*

⁸ Lihat William H. Frederick, Soeri Soeroto (editor), *Pemahaman sejarah Indonesia: sebelum dan sesudah revolusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005).

⁹ *Ibid.*

penyelenggara pendidikan ini adalah Kartini, Dewi Sartika, Maria Walandau Maramis, Nyi Hadjar Dewantoro, Rahmah El Yunusiyah, dan sebagainya. Apa yang ditulis Belanda tentu saja juga menarik untuk penulisan perempuan dalam sejarah Indonesia dan dilanjutkan dengan mempelajarinya serta dipergunakan dalam kurikulum sejarah nasional untuk menggambarkan adanya perempuan yang anti kolonial.

Namun demikian, yang menjadi paradoks, menurut Frederick & Soeroto,¹⁰ penulisan sejarah seperti ini seakan sebuah pengakuan bahwa dalam penulisan perempuan dalam sejarah Indonesia pada dasarnya masih menggunakan perspektif kolonial. Unit analisis "perempuan" yang dipergunakan oleh penulis Belanda tersebut adalah seorang tokoh yang dilahirkan dari keluarga berdarah biru dan yang kemudian menanggalkan kenikmatan status kekuasaannya dan berbalik untuk berjuang melawan kolonial. Sebaliknya pula, *fantasi kolonial* terhadap para perempuan yang *dihierokan* itu adalah seksualitas pribumi Hindia Belanda yang digambarkan jelita, gagah tetapi lembut dan menawan.

Sesuatu yang paradoksal adalah penulisan perempuan dalam sejarah Indonesia itu adalah hasil rekonstruksi sejarah tentang Indonesia tempo lalu setelah Indonesia merdeka. Dimana yang terjebak oleh pemikiran dekolonisasi historiografi yang sempit, karena selalu memuja kejayaan tempo lalu (*glorifikasi*) dengan pemeran utama para pahlawan yang tentu saja elitis.

¹⁰ Lihat William H. Frederick, Soeri Soeroto (editor), *loc.cit.* Buku ini adalah sebuah gambaran tentang sejarah sebagai buah pemikiran dan juga sejarah sebagai hasil rekonstruksi masa lampau bangsa Indonesia oleh para penulis Indonesia sendiri. Penulisan sejarah Indonesia selama ini diintervensi rezim yang berkuasa, penggiringan opini publik sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Buku-buku sejarah yang diberikan di sekolah-sekolah adalah versi resmi yang dikeluarkan oleh aparat keamanan dan pemerintah. Proses pelurusan sejarah marak pascakejatuhan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, karena pada zaman kepemimpinannya di bawah Orde Baru penulisan sejarah bersifat monolitik. Yang boleh diketahui masyarakat hanyalah sejarah versi pemerintah. Pelurusan sejarah pasca kejatuhan Soeharto pula hendaknya tidak dianggap sebagai akhir dan keputusan final. Karena penulisan pelurusan sejarah ini pun biasanya sarat akan muatan kepentingan dari sang penulis atau kelompok yang diwakilinya. Namun setidaknya kita bisa membandingkan sejarah dari keduanya, dan tentunya akan memunculkan reaksi pro dan kontra.

Perspektif ini menurut Rahayu,¹¹ sebenarnya dapat mengacaukan perspektif *waktu dan geografis* yang disebut Indonesia. Rahayu (2009) mengakui bahwa dia cukup lama meyakini bahwa Christina Martha Tiahahu ataupun Tjut Nya' Dien adalah pelaku "gerakan perempuan Indonesia". Pandangannya berubah ketika dia membaca lebih saksama bahwa kata "Indonesia" baru saja dilontarkan sebagai wacana politik pergerakan intelektual pada awal abad ke-20. Dalam kenyataannya di saat kedua perempuan ini melawan kolonial, "Indonesia" sebagai konsep bangsa dan negara sebenarnya "belum ada".

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut gerakan perempuan dalam bentuk organisasi barulah dikenal oleh perempuan pribumi pada awal abad ke-20. Ketika Tjut Nya' Dien maupun Christina Martha Tiahahu berperan sebagai panglima militer dalam perang melawan Belanda belumlah dapat digolongkankan sebagai gerakan perempuan Indonesia dalam konteks bangsa.

Oleh karena itu, sangatlah diragukan peran perempuan dalam sejarah Indonesia yang ditampilkan dari pusat kekuasaan dan berdarah biru. Hal ini berbeda dengan cerita rakyat lokal tentang perempuan jelata yang membangun gerakan perempuan. Seperti di Biak, ada semacam gerakan *mesianis* para perempuan desa sekitar saat pendudukan Jepang, gerakan para perempuan di Tondano (Minahasa) angkat senjata melawan pada saat perang Belanda, gerakan buruh perempuan pada saat pra-pendudukan Jepang di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan banyak cerita lainnya yang belum dituliskan dalam wacana sejarah lokal maupun nasional. Dengan gambaran seperti itu jelaslah bahwa "perempuan dalam sejarah" (*women in history*) Indonesia telah direduksi oleh kepentingan (kekuasaan) membangun identitas politik dan nasionalisme yang pada dasarnya masih dipengaruhi oleh pemikiran "post-kolonial".

¹¹ Rahayu, *et. al.*

1. Sejarah Perempuan (*Women's History*)

Orientasi penulisan sejarah yang berpusat pada laki-laki (*androsentrisme*) tentu saja akan menghilangkan eksistensi perempuan dalam kancah sejarah Indonesia. Namun demikian kritik *androsentrisme* ini tidak dinyatakan oleh sejarawan perempuan akademik tetapi diungkapkan oleh sejarawan laki-laki seperti Kuntowijoyo, Bambang Purwanto, dan Asvi Warman Adam. Ketiga penulis ini menawarkan penulisan sejarah Indonesia yang *androgyn*, yang secara adil menempatkan perempuan dan laki-laki eksis dalam kejadian dan peristiwa sejarah. Namun demikian, Kuntowijoyo menolak penulisan sejarah yang *gynosentris*, yakni yang berpusat pada perempuan.



Keterangan; Sejarah Perempuan: Perempuan Indonesia juga punya sejarah gelap di Zaman Kolonial, misalnya sisi gelap pergundikan yang dijalankan oleh para lelaki kulit putih dengan perempuan pribumi di tanah Hindia.

Gambar 1.1. Nyai, Belanda, Istri Pribumi. Sumber: <https://historia.id/kultur/articles/>

Seperti yang diketahui, di kalangan akademik Amerika dan Eropa terdapat gerakan yang dilakukan oleh *feminist historian*¹²

¹² Sejarah feminis mengacu pada membaca kembali sejarah dari perspektif perempuan. Ini tidak sama dengan *sejarah feminisme*, yang menguraikan asal-usul dan evolusi gerakan feminis. Ini juga berbeda dari *sejarah perempuan*, yang berfokus pada peran perempuan dalam peristiwa sejarah. Tujuan dari sejarah feminis adalah untuk mengeksplorasi dan menerangi sudut pandang perempuan tentang sejarah melalui penemuan kembali penulis, seniman, filsuf

untuk membangun konstruksi teoretis penelitian dan penulisan sejarah yang berpusat pada perempuan (*gynocentris*). Scott (1988)¹³ merekonstruksi berbagai esai *feminist historian* tentang eksplorasi metodologis *feminist history* yang berimplikasi melahirkan “sejarah baru”. Ia mengutip pandangan sejawatnya yang menyatakan:

... that the writing women into history necessarily involves redefining and enlarging traditional notions of historical significance, to encompass personal, subjective experience as well as public and political activities. It is not too much to suggest that however hesitant the actual beginnings, such a methodology implies not only a new history of women, but also a new history.



Gambar 1.2. Joan Wallach Scott, 2013 (Wikipedia)

perempuan, dll. Untuk memulihkan dan menunjukkan pentingnya suara dan pilihan perempuan di masa lalu.

¹³ Joan Wallach Scott (lahir 18 Desember 1941) adalah sejarawan Amerika Prancis dengan kontribusi dalam sejarah gender. Dia adalah Profesor Emerita di Sekolah Ilmu Sosial di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey. Scott dikenal karena karyanya dalam sejarah feminis dan teori gender, melibatkan teori post-struktural pada topik-topik ini. Secara geografis, karyanya berfokus terutama pada Prancis, dan secara tematis ia membahas bagaimana kekuatan bekerja, hubungan antara bahasa dan pengalaman, dan peran serta praktik para sejarawan. Karyanya bergulat dengan aplikasi teori untuk peristiwa sejarah dan saat ini, berfokus pada bagaimana istilah didefinisikan dan bagaimana posisi dan identitas diartikulasikan. (<https://en.wikipedia.org>)

Pada tulisan Esai Scott (1996) yang lain, ia menawarkan "gender" sebagai golongan penelitian sejarah analitik agar dapat menguak tabir ketidakadilan dalam berbagai relasi perempuan dengan modal, militer, kehancuran ekologi, dan sebagainya. Ia dan sejawatnya memilih istilah *feminsit history* ketimbang *women's history* karena hendak menggali akar ketidakadilan yang tersembunyi dalam sejarah sosial yang lebih lengkap, secara detail dan majemuk.

2. Kesalahan Metodologi?

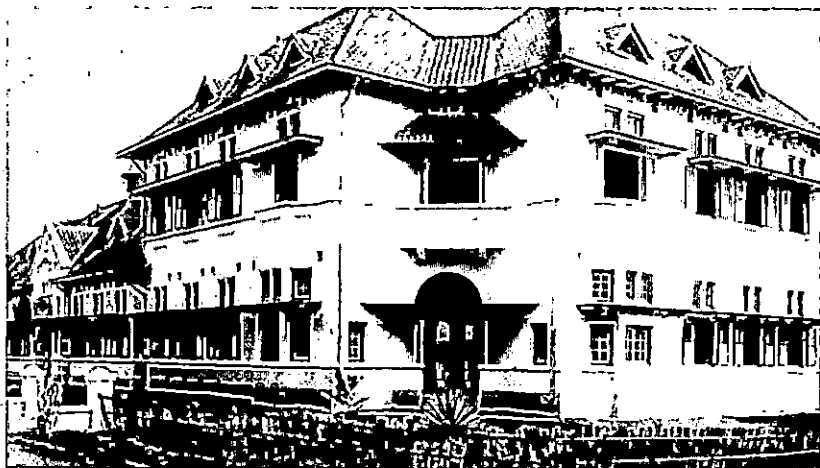
Meskipun istilah *feminist history* mungkin tepat, tetapi itu hanya lebih mudah disebutkan di tingkatan akademik atau intelektual. Istilah ini mungkin tidak sepopuler istilah *woman history*, kemudian yang lebih penting lagi kemauan untuk menulis historiografi Indonesia yang tak sekadar memberi ruang kepada penulisan sejarah perempuan, karena substansi masalahnya terletak pada metodologi yaitu bagaimana metode yang dipakai untuk membongkar *androsentrisme* dalam historiografi.

Sebagai contoh adalah sejarah pergerakan nasional Indonesia akan terasa berbeda jika membacanya menurut *model* gerakan perempuan. Cora Vreede de-Stuers (1960)¹⁴ yang mengambil kurun 1900 misalnya, untuk memasukkan gerakan perempuan ke dalam sejarah Indonesia, karena pada saat itu kesadaran perempuan untuk memerdekakan diri dari belenggu patriarki keluarga dan penjajahan mulai bangkit.

Artinya, adanya kebangkitan nasional *model* gerakan perempuan dalam hal memerdekakan perempuan dari keadaan buta huruf, perkawinan dini dan *poligami*. Oleh karena kegiatan organisasi perempuan akan terlihat lebih bersifat sosial ketimbang politik, maka penulisan sejarah pergerakan nasional yang *androsentris* akan menafikan (menyangkal) sejarah seperti ini. Sebab pergerakan nasional dalam perspektif laki-laki adalah kegiatan politik (kekuasaan), sehingga gerakan dan kegiatan sosial perempuan tidak dapat dimasukkan ke dalamnya.

¹⁴ Lihat Cora Vreede-De Steurs, *The Indonesian Women Struggle and Achievements* (the Hague: Mouton, 1960).

Contoh lain tentang hal ini adalah tentang gerakan pendidikan. Meskipun gerakan perempuan tentang pembebasan buta huruf melalui pendirian sekolah-sekolah perempuan sudah lama yaitu sejak 1900-an, tetapi yang diakui sejarah Indonesia hanya "bapak pendidikan" yaitu Ki Hadjar Dewantoro yang mulai justru pada tahun 1928. Belum ada yang disebut 'ibu pendidikan' di Indonesia.



Gambar 1.3 Sekolah Kartini (Kartinischool), 1918. FOTO/commons.wikimedia.org

Keterangan: Sekitar awal 1912, terbentuklah sebuah komite yang bertugas merumuskan model pendidikan perempuan Jawa. Komite ini secara penuh digerakkan oleh mereka yang sejak lama bergelut dengan urusan negeri jajahan sekaligus orang-orang yang dekat dengan pemikiran Kartini, seperti di antaranya pasangan suami-istri Abendadon dan Deventer. (*Het gebouw van de Kartinischool*)

Jadi, pendidikan yang menjadi awal dari bangkitnya gerakan perempuan untuk merdeka itu dianggap bukan sesuatu yang politik [jadi tidak perlu di catat dalam sejarah], kegiatan sosial perempuan tentunya termasuk untuk memerangi perkawinan dini, dan sesuatu yang bersifat sosial dan domestik itu bukan politik. Padahal aktivitas sosial dan domestik yang dikerjakan oleh gerakan perempuan itu adalah untuk pembebasan yang sifatnya majemuk dan ganda: gerakan perempuan yang membebaskan diri dari adat dan kolonial. Contoh-contoh di atas menegaskan bahwa *tafsiran* terhadap kegiatan,

kejadian dan peristiwa sangat berperan menentukan *seleksi historis*.¹⁵ Termasuk penulisan biografi aktivis perempuan di zaman lalu yang saat ini mulai banyak dikerjakan oleh para individu, kolektif atau oleh lembaga.

3. Sejarah tentang Perempuan (*The History Of Women*)

Seperti yang diketahui, *The history of women* banyak ditulis oleh *feminist historian* yang tertarik untuk menyingkap kejadian dewi-dewi (*goddess*) pada abad sebelum Pertengahan. Kekuasaan dewi-dewi atas manusia dan alam seperti sungai, hutan, pertanian, kecantikan, kebijakan, dan sebagainya menyiratkan adanya kekuasaan perempuan dalam hal kejadian penciptaan atau sebagai sumber yang mengawali terjadinya keberadaan kehidupan di bumi.

Cerita tentang sejarah atau dongeng tentang sejarah perempuan cukup banyak di Indonesia, misalnya cerita tentang para dewi dan *dahyang*, cerita tentang peri, atau perempuan yang menghasilkan lahirnya sebuah alam, manusia dan kebudayaan.

¹⁵ Tulisan para perempuan tentang gerakan perempuan seperti yang telah dikerjakan Cora Vreede de-Stuers, Saskia Eleonora Wieringa (1995), Susan Blackburn (2004), Elizabeth Martyn (2005 dan Sukanti Suryocondro, 1984), adalah sebuah usaha untuk memaknai sesuatu yang telah dikerjakan aktivis perempuan di masa lalu sebagai "sejarah perempuan" di Indonesia.

Box.1.1 Siapakah Nyi Roro Kidul ?



Gambar. 1.4 Lukisan Basuki Abdullah, tentang Nyi Roro Kidul

Nyi Roro Kidul telah hidup lama dalam ingatan masyarakat Jawa. Ia disebut memiliki hubungan dengan para raja Jawa. Konon, setiap penobatan raja Jawa sekaligus ritual pernikahan mistis dengan Ratu Pantai Selatan itu. Siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul? Asal usulnya ada beberapa versi.

Antropolog Robert Wessing dalam "A Princess from Sunda: Some Aspects of Nyi Roro Kidul," *Asian Folklore Studies* Vol. 56 tahun 1997, menyatakan bahwa Ratu Kidul ini mulanya adalah putri dari Kerajaan Galuh, sekitar abad 13. Ada pula versi yang menyebut dia adalah keturunan penguasa Pajajaran. Kemudian ada yang mengatakan dia keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan, bahkan masih ada yang mengaitkannya dengan Raja Kediri Jayabaya.

Dikisahkan, Ratu Ayu dari Galuh melahirkan seorang bayi perempuan. Keanehan muncul, bayi perempuan itu bisa bicara dan mengatakan bahwa dia adalah penguasa semua *lelembut* di tanah Jawa dan akan berdiam di Pantai Selatan. Bersamaan itu pula, roh Raja Sindhula dari Galuh pun muncul dan bersabda bahwa cucunya tersebut tak akan bersuami untuk menjaga kesucian dirinya, dan jika bersuami pun kelak hanya bisa dikawini oleh raja-raja Islam di Jawa.

Sumber: <https://historia.id/kuno/articles/siapakah-sebenarnya-nyiroro-kidul-vVeVp>

Banyak cerita rakyat tentang asal-usul identitas sebuah komunitas berpola cerita sama: selalu berasal dari perempuan. Contohnya, di Nias terdapat cerita bahwa penguasa teknologi api bernama *Sapaputi* adalah perempuan, dan kemudian keahliannya

itu dicuri dengan tipu muslihat oleh *Marao* (laki-laki) yang selama itu tergantung padanya. Di Jawa Tengah, hidup cerita tentang Dewi Nawangwulan, bidadari yang dikawini oleh Joko Tarub yang mempunyai kesaktian menanak sebulir padi menjadi sekuali nasi.

Namun demikian dalam kenyataannya *sejarah Indonesia belum mau mengakui cerita rakyat ini sebagai sejarah*, karena adanya perdebatan mengenai mite dan legenda rakyat yang disampaikan secara lisan (tutur) bisa dianggap sebagai sumber sejarah yang sah atau tidak.

Oleh karena itu wilayah studi ini lebih produktif di lingkup antropologi, yang pada dasarnya dipandang sebelah mata oleh sejarawan Indonesia karena tidak memiliki dimensi politik, irasional dan sulit dipertanggungjawabkan secara metodologi sejarah.

Contoh yang menarik ketika akhir dekade 1950-an terjadi krisis ekonomi, sebuah organisasi perempuan (Gerwani) melakukan gerakan "Seribu Satu Macam" untuk menanam sayur di pot-pot halaman rumahnya, menyelenggarakan bazar pakaian murah yang diperoleh dari pakaian anggota dari strata sosial atas, kemudian dijual murah kepada anggota atau masyarakat umum yang strata sosialnya lebih miskin. Pun belum banyak yang menyadari ketika gerakan perempuan/ibu membuka dapur umum dan memberi nasi bungkus kepada gerakan mahasiswa 1998 dapat dimaknai sebagai "ibu yang memberi makan anak-anaknya". Secara politik, dalam analogi perang misalnya, gerakan nasi bungkus itu dapat dimaknai sebagai institusi sumber logistik bagi tentara yang sedang berperang.

Jadi "sejarah tentang perempuan" (*the history of women*) lebih dekat kehidupannya sebagai pencipta dan pelestari kehidupan yang memiliki daya *survival* yang khas demi kelangsungan kehidupan itu sendiri.

C. Kajian tentang Perempuan dan Perannya dalam Konteks Sejarah

Menurut penulis, kajian tentang sejarah perempuan adalah suatu fenomena yang menarik, sebab, studi perempuan dengan pendekatan sejarah dan politik masih amat langka ditemui di Indonesia. Mengenai pemakaian kata *perempuan* dan bukan wanita,

adalah sebuah analisis gender. Persoalan ini sebetulnya lebih banyak pada pertimbangan *etimologi* (asal-usul kata) dan budaya. Ahli feminis menganggap bahwa kata “wanita” berhubungan metatesis dengan “betina”. Sementara dalam bahasa Jawa, betina artinya “*wani ditata*” atau “berani diatur”, sedangkan perempuan dianggap bermakna lebih positif. Pertimbangan lain lebih adalah alasan politis, karena kata wanita telah sering diobral dalam wacana “pembangunanisasi” (Budiman 1992:72-73).¹⁶

Meskipun banyak studi tentang perempuan, namun masih terbatas dan didominasi dengan tema-tema pemberdayaan perempuan bukan *women history*. Studi-studi tentang perempuan di Indonesia, pada umumnya memfokuskan pada studi *pemberdayaan perempuan*, seperti perempuan dalam sektor ekonomi, yang meliputi disparitas gender dalam upah dan ketenagakerjaan, perempuan dan budaya seperti, masalah reproduksi, perempuan dan kekerasan, dan seterusnya.¹⁷

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, studi-studi tentang sejarah Indonesia “bias gender”. Artinya, hampir keseluruhan peristiwa dari periode sejarah Indonesia *didominasi oleh pria sebagai aktor utamanya*. Satu kritik yang menarik dilontarkan oleh sejarawati Christian Dobbin atas tiga karya sejarah terkenal tentang sejarah sosial dan politik Indonesia abad ke-20.¹⁸ Ketiga karya tersebut menurut Dobbin mengabaikan perempuan sebagai bagian dari proses historis, baik pada saat awal pergerakan nasional, tahun 1930-an maupun pada saat revolusi Indonesia yang dikaji oleh para penulisnya (Dobbin, Cristian, 1990:6).

¹⁶ Lihat Kris Budiman, “Subordinasi perempuan dalam bahasa Indonesia”, dalam *Citra Wanita dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 72-73.

¹⁷ Hasil penelitian penulis di lapangan menunjukkan terdapat sekitar 96 hasil penelitian yang membahas di sekitar tema-tema tersebut, sementara penelitian tentang perempuan dengan perspektif sejarah dan politik amat langka ditemui. (dalam: Siti Fatimah, Pentingnya Sejarah Androgenous, Makalah, Seminar Nasional P3SI, 30 April 2008)

¹⁸ Ketiga karya tersebut adalah: Robert Van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesia Elite* (the Hague, 1970); John Ingleson, *Road to Exile: the Indonesian Nationalist Movement, 1927-1934* (Singapore, 1979); dan Benedict R.O.G. Anderson, *Java in Time Revolution Occupation and Resistance, 1944-1946* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1972).

Hal yang sama juga terjadi pada periode Jepang. Beberapa tulisan berkenaan dengan perempuan pada masa Jepang yang mengarah untuk menonjolkan keterlibatan laki-laki sebagai agensinya, sementara itu juga mengabaikan perempuan sebagai pelaku sejarah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisan yang hadir pada periode ini, seperti: Ben Anderson, Anton E. Lucas, Sartono Kartodirdjo, Aiko Kurasawa dan penulis-penulis lain yang tertarik kepada periode ini (Hartono, A. Budi dan Juliantoro, Dadang, 1997:51).

Bébeda dengan kemajuan studi sejarah perempuan di luar negeri, seperti di Eropa, Amerika dan Australia, studi sejarah perempuan adalah suatu bentuk penulisan sejarah baru (sosial) yang berkembang pesat pada akhir abad ke-20, tepatnya semenjak 1970-an. Sejarah perempuan melihat perkembangan penting terutama dalam metode sejarah kebudayaan Lynn Hunt (1989: 18-22) misalnya melihat bagaimana pentingnya peran gender dalam sejarah sosial dan kebudayaan.

Pertanyaan-pertanyaan tentang bukti-bukti yang terpercaya muncul pada saat itu, umpamanya: kenapa perempuan hilang dalam catatan sejarah, apakah memang tidak terdapat sumber-sumber dan dokumen yang mampu membuktikan kehadiran mereka pada saat lampau, atau karena perempuan dianggap hanya berurusan dengan kehidupan *private*, sementara sebagian besar dokumen berurusan dengan persoalan-persoalan *public*, yang didominasi oleh dunia pria, sehingga perempuan tidak memiliki sejarah pada saat lampau.¹⁹

Secara metodologis, di samping sejarah perempuan adalah bagian dari sejarah sosial dan sejarah kebudayaan, studi sejarah perempuan sangat terkait erat dengan peristiwa politik sebagai pokok persoalan (*subject matter*)²⁰, termasuk bagaimana kebijakan negara terhadap perempuan. Dalam perkembangan sejarah organisasi perempuan di Indonesia, terdapat spektrum atau pasang surut dari berbagai

¹⁹ Beverly Boutilier, "Women's History: Concept and Approches", makalah disampaikan pada seminar presentation to Semiloka "10 tahun kajian perempuan sampai di mana?" Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta 10 November 2000.

²⁰ *Ibid.*

organisasi tersebut. Bila ditinjau lebih jauh, perkembangan tersebut adakalanya mencerminkan *prototipe* yang sama pada periode yang berbeda.

D. Interpretasi Sejarah dan Analisis Peran Perempuan dalam Konteks Politik pada Zaman Jepang di Indonesia

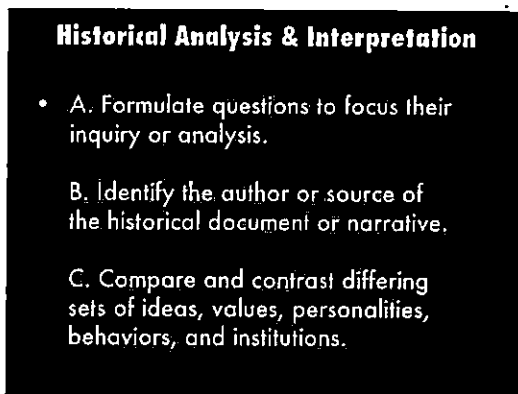
Seerti yang diketahui, episode sejarah Asia Tenggara semenjak zaman kolonial sampai saat ini dapat dilihat dari berbagai perspektif. Analisis sejarah mengenai peristiwa tertentu pada dirinya memiliki dimensi objektif dan sekaligus dimensi subjektif.

1. Interpretasi Sejarah

Yang pertama, menggali realitas sejarah berdasarkan struktur ruang, yang mana pelbagai struktur fisik seperti: (1) organisasi, (2) pola-pola perilaku (tindakan), (3) kelembagaan dan institusi adalah perwujudan tetap dan mekanistik (*sinkronik*), atau yang terstruktur sedemikian rupa.

Yang kedua, menggali realitas sejarah menurut urutan waktu (*diakronik*), yang mana perubahan struktur dalam kurun waktu sangat ditentukan oleh perilaku manusia yang mengisinya.²¹ Bila yang pertama lebih menekankan struktur, yang berlaku secara kontinu, yang kedua lebih menekankan *aspek kultural*, artinya kenyataan yang isinya tergantung kepada subjek (manusia) yang berada di dalamnya.

²¹ Analisis struktural melihat bahwa perubahan sosial atau struktur disebabkan oleh tindakan-tindakan konkrit dan *observable* dari individu maupun kelompok yang berasal dari struktur sosial itu sendiri, oleh karenanya metode struktural berusaha menampilkan manusia sebagai penentu nasib sendiri. Pembahasan yang komprehensif tentang metodologi struktural dapat disimak dalam, Christopher Lloyd, *The Structures of History* (Oxford UK & Cambridge: Blackwell, 1993), khususnya bab 3, tentang "Methodological Structuralism in Historical Explanation".



Gambar 1.5 Analisa sejarah dan Interpretasinya menurut John Bullock (2015), sumber: <https://www.haikudeck.com/historical-thinking-uncategorized-presentation>

Untuk mengkaji, *Perempuan dan Politik pada Masa Jepang di Indonesia*, dapat dilihat dengan kedua pendekatan di atas. Jika pendekatan historis dispesifikasikan secara lebih jauh, maka akan ditemukan dua momen kesadaran historis yang dapat dibedakan satu sama lainnya. *Pertama*, momen ilmiah yang menganalisis dengan cermat perubahan sejarah yang terjadi (sosial, budaya dan politik). *Kedua*, momen intuitif, kesadaran sejarah membentuk masa depan. Momen ini ditangkap menurut pengalaman pelakunya melalui *expressed intentions*.²²

Hal ini dapat dilihat dari berbagai hal yang ditinggalkan oleh pelakunya, terutama dalam bentuk dokumen-dokuman. Sehubungan dengan pendekatan yang pertama, analisis feminisme tentang negara mencoba mengembangkan berbagai macam pendekatan dalam melihat hubungan negara dengan perempuan.

1. *Pertama*, pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan politik yang berlaku saat itu yang memberi kontrol terhadap perempuan.
2. *Kedua*, pendekatan yang berhubungan dengan institusi-institusi ideologi negara, seperti; media massa, sekolah, partai politik, gereja dan pesantren.

²² *Ibid.*

3. *Ketiga*, pendekatan yang berhubungan dengan respons kekuasaan politik yang berlaku terhadap organisasi-organisasi perempuan berikut ini; bagaimana negara melihat, mengontrol, dan menginstitusikan bermacam-macam aktivitas perempuan, terutama yang berkenaan dengan organisasi perempuan itu sendiri.
4. *Keempat*, ketidakseimbangan perlakuan politik terhadap perempuan dalam memosisikan perempuan²³.

Pendekatan ini sangat relevan untuk dimanfaatkan dalam penulisan sejarah ini di samping mencoba untuk mengolaborasikannya dengan pendekatan sejarah dan ilmu sosial lainnya, antara lain.

1. Membandingkan dan membedakan ide, nilai, kepribadian, perilaku, dan institusi yang berbeda dengan mengenali persamaan dan perbedaan.
2. Membedakan antara fakta sejarah dan interpretasi historis tetapi diakui bahwa keduanya terkait; bahwa fakta-fakta yang dilaporkan sejarawan dipilih dan karenanya mencerminkan penilaian sejarawan tentang apa yang paling signifikan tentang masa lalu.
3. Mempertimbangkan berbagai perspektif dari berbagai bangsa di masa lalu dengan menunjukkan motif, kepercayaan, minat, harapan, dan ketakutan mereka yang berbeda.
4. Menganalisis hubungan sebab dan akibat dan sebab-akibat berganda, termasuk pentingnya individu; pengaruh gagasan, minat manusia, dan kepercayaan; yang tidak disengaja dan tidak rasional; dan peran peluang
5. Menantang argumen tentang keniscayaan sejarah dengan merumuskan contoh-contoh kontingensi historis, tentang bagaimana pilihan yang berbeda dapat menyebabkan imbas yang berbeda.
6. Membandingkan narasi sejarah yang bersaing dengan membandingkan pilihan pertanyaan sejarawan yang berbeda,

²³ Henrietta L. Moore, *Feminism and Anthropology* (Cambridge: Polity Press, 1988), khususnya bab. 5 tentang "Women and State".

dan penggunaan sumber-sumber yang mencerminkan pengalaman, sudut pandang, kepercayaan, dan sudut pandang yang berbeda, dan dengan menunjukkan bagaimana penekanan pada penyebab yang berbeda berkontribusi pada interpretasi yang berbeda.

7. Mempertahankan interpretasi sejarah sebagai tentatif, dapat berubah sewaktu informasi baru ditemukan, suara baru didengar, dan interpretasi baru disinggung.
8. Mengevaluasi debat-debat besar di antara para sejarawan tentang interpretasi alternatif masa lalu.
9. Menghipotesiskan pengaruh masa lalu, termasuk keterbatasan dan peluang yang dimungkinkan oleh keputusan zaman lalu.

Meskipun konsep tentang politik memiliki banyak perbedaan, baik tentang fungsi, bentuk dan hubungan, namun dalam konteks ini, politik adalah negara yang dapat diartikan sebagai sebuah badan yang menguasai segala pranata (administratif, politik dan yuridis), yang mengatur jalur kekuasaan, pembagian sumber daya, dan mengawasi semua aparat yang memiliki kemampuan koersif.²⁴ Untuk melihat hubungan politik dan perempuan dalam kasus ini, penulis menggunakan teori yang korporatif.

2. Standar Berpikir Historis

Menurut UCLA History, ada lima standar penulisan sejarah.²⁵ Prinsip-prinsip literasi historis dalam mengharuskan penulis dan mahasiswa sejarah untuk menentukan dan mengevaluasi ide-ide dan konsep-konsep kunci dari sebuah teks; untuk memahami bagaimana konteks historis dapat memengaruhi penilaian suatu sumber; untuk menilai argumen dan menilai dan menarik informasi yang relevan; dan untuk mencapai kemampuan membaca dan memahami teks-teks sejarah.

Standar "Berpikir Historis" juga merinci dan bagaimana

²⁴ Ratna Saptari, Brigitte Hotzer, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Kaliyanamitra, 1997), hlm. 212.

²⁵ Lihat <https://phi.history.ucla.edu/nchs/alignment-common-core-standards/>

mengembangkan tidak hanya literasi sejarah tetapi juga pemikiran dan pemahaman historis, meneliti, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan zaman lalu dengan mempelajari berbagai dokumen dan sumber sejarah. Sejarawan biasanya mengumpulkan data historis dari berbagai sumber, termasuk arsip, buku, dan artefak. “

Dengan demikian keterampilan berpikir historis adalah alat penting untuk mempelajari konten sejarah. Dengan menumbuhkan keterampilan berpikir sejarah, siswa dan mahasiswa dapat dengan cermat memeriksa catatan sejarah yang menjadi dasar narasi sejarah apa pun, menilai validitas dan sudut pandang narasi tersebut. Pemikiran historis juga melibatkan keterampilan penelitian, belajar untuk mencari bukti sejarah, menganalisis catatan sejarah, dan membangun narasi berbasis penelitian. Standar Berpikir Historis selaras dengan standar Umum untuk literasi historis adalah:²⁶

Standar 1. Memahami dan berpikir Kronologis

Standar 2. Memahami Sejarah

Standar 3. Analisis dan Interpretasi Historis

Standar 4. Kemampuan Penelitian Historis

Standar 5. Analisis-Analisis Sejarah dan Pengambilan Keputusan

a. Standar Satu: Berpikir Kronologis

1. Bedakan antara zaman lalu, sekarang, dan zaman depan.
2. Identifikasi dalam narasi sejarah struktur temporal dari narasi atau cerita sejarah: awal, tengah, dan akhirnya (yang terakhir diinterpretasikan sebagai hasil dari permulaan tertentu).
3. Membangun tatanan sementara dalam membangun narasi sejarah mereka sendiri: bekerja maju dari beberapa awal hingga perkembangannya, ke beberapa tujuan atau hasil; bekerja mundur dari beberapa masalah, masalah, atau peristiwa untuk menjelaskan asal-usulnya dan perkembangannya dari waktu ke waktu.
4. Mengukur dan menghitung waktu kalender: SM (sebelum Kristus) dan AD (Anno Domini, dalam kalender Gregorian dan penunjukan sekuler kontemporer untuk tanggal yang sama ini,

²⁶ Lihat <https://phi.history.ucla.edu/nchs/alignment-common-core-standards/>

SM dan CE (753 SM, pendirian kota Roma) dan Muslim (622 M, hegira).

5. Menafsirkan data yang disajikan dalam garis waktu dan membuat garis waktu dengan menetapkan interval waktu yang sama dan merekam peristiwa sesuai dengan urutan waktu di mana mereka terjadi.
6. Merekonstruksi pola suksesi dan durasi historis di mana perkembangan sejarah telah terjadi, dan menerapkannya untuk menjelaskan kesinambungan dan perubahan sejarah.
7. Bandingkan model-model alternatif untuk periodisasi dengan mengenali prinsip-prinsip pengorganisasian yang menjadi dasar masing-masing.

b. Standar Dua: Pemahaman Historis

1. Rekonstruksi makna literal dari sebuah petikan sejarah dengan mengenali siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana itu terjadi, peristiwa apa yang menyebabkan perkembangan ini, dan apa efek atau hasil yang diikuti.
2. Identifikasi pertanyaan utama (s) alamat naratif historis dan tujuan, perspektif, atau sudut pandang dari mana ia telah dibangun.
3. Bacanarasi sejarah secara imajinatif, dengan mempertimbangkan apa yang diungkapkan oleh narasi tentang kemanusiaan individu dan kelompok yang terlibat-nilai-nilai, pandangan, motif, harapan, ketakutan, kekuatan, dan kelemahan mereka yang mungkin.
4. Bukti perspektif historis-kemampuan (a) menggambarkan zaman lalu dengan caranya sendiri, melalui mata dan pengalaman mereka yang ada di sana, sebagaimana diungkapkan melalui literatur, buku harian, surat, debat, seni, artefak, dan sejenisnya; (B) mempertimbangkan konteks historis di mana acara tersebut dibuka-nilai, pandangan, opsi, dan kemungkinan waktu dan tempat itu; dan (c) menghindari "pikiran zaman kini," menilai masa lalu semata-mata dalam hal norma dan nilai saat ini.
5. Gambarkan data dalam peta historis untuk mendapatkan atau mengklarifikasi informasi tentang pengaturan geografis di mana

peristiwa sejarah terjadi, lokasi relatif dan absolutnya, jarak dan arah yang terlibat, fitur alami dan buatan tempat itu, dan hubungan kritis dalam pembagian spasial fitur-fitur tersebut dan peristiwa bersejarah yang terjadi di sana.

6. Manfaatkan data visual dan matematis yang disajikan dalam bagan, tabel, diagram pie dan bar, diagram alir, diagram venn, dan grafik organisator lain untuk memperjelas, mengilustrasikan, atau menguraikan informasi yang disajikan dalam narasi sejarah.
7. Gambarlah sumber visual, sastra, dan musik termasuk: (a) foto, lukisan, kartun, dan gambar arsitektur; (b) novel, puisi, dan drama; dan, (c) musik rakyat, musik populer dan klasik, untuk memperjelas, mengilustrasikan, atau menguraikan informasi yang disajikan dalam narasi sejarah.

c. Standar Tiga: Analisis dan Interpretasi Historis

1. Identifikasi penulis atau sumber dokumen sejarah atau narasi
2. Membandingkan dan membedakan *set* ide, nilai, kepribadian, perilaku, dan institusi yang berbeda dengan mengenali persamaan dan perbedaan.
3. Bedakan antara fakta sejarah dan interpretasi historis tetapi akui bahwa keduanya terkait; bahwa fakta-fakta yang dilaporkan sejarawan dipilih dan karenanya mencerminkan penilaian sejarawan tentang apa yang paling signifikan tentang masa lalu.
4. Pertimbangkan berbagai perspektif dari berbagai bangsa di masa lalu dengan menunjukkan motif, kepercayaan, minat, harapan, dan ketakutan mereka yang berbeda.
5. Menganalisis hubungan sebab dan akibat dan sebab-akibat berganda, termasuk pentingnya individu; pengaruh gagasan, minat manusia, dan kepercayaan; yang tidak disengaja dan tidak rasional; dan peran peluang
6. Tantang argumen tentang keniscayaan sejarah dengan merumuskan contoh-contoh kontingensi historis, tentang bagaimana pilihan yang berbeda dapat menyebabkan efek yang berbeda.
7. Bandingkan narasi sejarah yang bersaing dengan membandingkan pilihan pertanyaan sejarawan yang berbeda, dan penggunaan

sumber-sumber yang mencerminkan pengalaman, sudut pandang, kepercayaan, dan sudut pandang yang berbeda, dan dengan menunjukkan bagaimana penekanan pada penyebab yang berbeda berkontribusi pada interpretasi yang berbeda.

8. Pertahankan interpretasi sejarah sebagai tentatif, dapat berubah sewaktu informasi baru ditemukan, suara baru didengar, dan interpretasi baru disinggung.
9. Mengevaluasi debat-debat besar di antara para sejarawan tentang interpretasi alternatif masa lalu.
10. Menghipotesiskan pengaruh masa lalu, termasuk keterbatasan dan peluang yang dimungkinkan oleh keputusan masa lalu.

d. Standar Empat: Kemampuan Penelitian Historis

1. Merumuskan pertanyaan sejarah dari pertemuan dengan dokumen sejarah, catatan saksi mata, surat, buku harian, artefak, foto, situs bersejarah, seni, arsitektur, dan catatan lain dari masa lalu.
2. Dapatkan data historis dari berbagai sumber, termasuk: koleksi perpustakaan dan museum, situs bersejarah, foto historis, jurnal, buku harian, laporan saksi mata, surat kabar, dan sejenisnya; film dokumenter, kesaksian lisan dari saksi yang hidup, sensus, catatan pajak, direktori kota, kompilasi statistik, dan indikator ekonomi.
3. Menginterogasi data historis dengan menyingkap kejadian konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana ia diciptakan; menguji sumber data untuk kredibilitas, otoritas, keaslian, konsistensi internal, dan kelengkapannya; dan mendeteksi dan mengevaluasi bias, distorsi, dan propaganda dengan kelalaian, penindasan, atau penemuan fakta.
4. Identifikasi kesenjangan dalam catatan yang tersedia, pengetahuan kontekstual marshal dan perspektif waktu dan tempat, isi kesenjangan secara deduktif, dan bangun interpretasi historis yang kuat.
5. Gunakan analisis kuantitatif untuk mengeksplorasi topik-topik seperti perubahan ukuran dan komposisi keluarga, pola migrasi, pembagian kekayaan, dan perubahan ekonomi.

e. **Standar Lima: Masalah Analisis Sejarah dan Pengambilan Keputusan**

1. Identifikasi masalah dan masalah di masa lalu dan analisis minat, nilai, perspektif, dan sudut pandang orang-orang yang terlibat dalam situasi tersebut.
2. Bukti dari keadaan sebelumnya dan faktor kontemporer yang berkontribusi terhadap masalah dan tindakan
3. Identifikasi tindakan alternatif yang relevan, dengan mengingat informasi yang tersedia pada saat itu, dalam hal pertimbangan etis, kepentingan mereka yang terkena dampak keputusan, dan efek jangka panjang dan jangka pendek dari masing-masing tindakan.
4. Merumuskan posisi atau arah tindakan pada suatu masalah dengan mengenali sifat masalah, menganalisis faktor-faktor mendasar yang berkontribusi pada masalah, dan memilih solusi yang masuk akal dari pilihan opsi yang dievaluasi dengan cermat.
5. Mengevaluasi pelaksanaan keputusan dengan menganalisis kepentingan yang dilayaninya; memperkirakan posisi, kekuatan, dan prioritas masing-masing pemain yang terlibat; menilai dimensi etis dari keputusan; dan mengevaluasi biaya dan manfaatnya dari berbagai perspektif.
6. Mendukung penafsiran dengan bukti historis untuk membangun argumen yang beralasan dan bukan pendapat yang mudah.

Studi sejarah, seperti disebutkan sebelumnya, bertumpu pada pengetahuan tentang fakta, tanggal, nama, tempat, peristiwa, dan ide. Selain itu, pemahaman historis yang sejati menuntut seseorang untuk terlibat dalam pemikiran historis: untuk mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan bukti yang kuat untuk mendukung jawaban mereka; untuk melampaui fakta-fakta yang disajikan dalam buku teks mereka dan memeriksa catatan sejarah untuk diri mereka sendiri; untuk berkonsultasi dengan dokumen, jurnal, buku harian, artefak, situs bersejarah, karya seni, data kuantitatif, dan bukti lain dari masa lalu, dan untuk melakukannya secara imajinatif—dengan mempertimbangkan konteks historis di mana catatan-catatan ini

dibuat dan membandingkan berbagai titik pandangan orang-orang di tempat kejadian pada saat itu.

Pemahaman historis yang nyata mengharuskan seseorang memiliki kesempatan untuk membuat narasi sejarah dan argumen mereka sendiri. Narasi dan argumen semacam itu dapat mengambil banyak bentuk—esai, debat, dan editorial, misalnya. Mereka dapat diinisiasi dengan berbagai cara. Namun, tidak satu pun, yang lebih kuat memprakarsai pemikiran historis daripada masalah-masalah itu, di zaman lalu dan sekarang, yang menantang siswa/mahasiswa untuk memasukkan pengetahuan ke dalam catatan sejarah dan untuk membawa perspektif historis yang baik untuk ditelaah dalam analisis masalah.

Pemahaman historis juga mengharuskan seseorang membaca dengan cermat narasi sejarah yang dibuat oleh orang lain. Narasi sejarah yang ditulis dengan baik adalah interpretatif, menguak dan menjelaskan koneksi, perubahan, dan dampaknya. Mereka juga analitis, menggabungkan dongeng dan biografi yang hidup dengan analisis konseptual yang diambil dari semua disiplin ilmu yang relevan. Narasi semacam itu meningkatkan keterampilan penting dalam pemikiran sejarah.

Membaca narasi semacam itu mengharuskan seseorang untuk menganalisis pernyataan asumsinya dan tidak dinyatakan dari mana narasi dibangun dan menilai kekuatan bukti yang disajikan. Ini mensyaratkan bahwa untuk mempertimbangkan pentingnya apa yang penulis masukkan serta pilih dan yang lain untuk dihilangkan. Selain itu, diperlukan untuk memeriksa sifat-sifat interpretatif sejarah, membandingkan, misalnya, narasi sejarah alternatif yang ditulis oleh para sejarawan yang telah memberikan bobot yang berbeda dengan penyebab peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan/atau teknologi dari peristiwa dan yang telah mengembangkan interpretasi yang dapat bersaing dari pentingnya peristiwa-peristiwa itu.

BAB II

TEORI-TEORI TENTANG BUDAYA DAN PERAN SOSIAL PEREMPUAN

A. Gender

1. Pendahuluan

Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (seks), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian.

Secara etimologis kata 'gender' berasal dari bahasa Inggris yang berarti 'jenis kelamin' (Echols dan Shadily 1983:265). Kata 'gender' bisa diartikan sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku' (Neufeldt (ed.) 1984:561). Secara terminologis, 'gender' bisa diinterpretasikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Lips 1993:4).

Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, 'gender' adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Showalter (ed.) 1989: 3). Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Umar 1999: 34). Lebih tegas lagi disebutkan dalam *Women's Studies Encyclopedia*, sebagaimana dikutip oleh Siti Musdah, bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Mulia 2004:4).

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968). Gender adalah suatu *konsep kultural*¹ yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Istilah gender belum masuk dalam perbendaharaan kata *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tetapi dalam pemakaian berikutnya istilah ini selalu dikaitkan dengan budaya. Istilah gender lebih banyak menunjuk kepada perbedaan status dan peranan laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam proses sosial dan budaya yang panjang.²

Gender—A way of looking at society which focuses on women's roles and responsibilities in relation to those of men. Gender—is not a property of individuals but an on going interaction between actors and structures with tremendous variation across men's and women's lives "individually over the life course and structurally in the historical context of race and class. (Ferree 1990 dalam Lloyd et al. 2009:8).

Di dalam buku yang berjudul *Seks and Gender* yang ditulis oleh Hilary M. Lips, mengartikan bahwa gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat, misalnya bahwa perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki sebaliknya, yaitu dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu adalah sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengenali perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Gender berbeda dengan seks, meskipun secara

¹ Azyumardi Azra, *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Kemasyarakatan* (Bandung: Angkasa, 2008), hlm. 315.

² Sinulingga, R. Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Agama Kristen; dalam *Jurnal Wawasan*, Juni, Volume 12, Nomor 1, Medan: USU 2006, h. 47.

etimologis artinya sama dengan seks, yaitu jenis kelamin (Echols dan Shadily 1983:517).

Secara umum seks digunakan untuk mengenali perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak memusatkan perhatian kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Kalau studi seks lebih menekankan kepada perubahan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang.

Persoalan gender bukanlah persoalan baru dalam kajian-kajian sosial, hukum, keagamaan, maupun yang lainnya. Namun demikian, kajian tentang gender masih tetap aktual dan menarik, mengingat masih banyaknya masyarakat khususnya di Indonesia yang belum memahami persoalan ini dan masih banyak terjadi berbagai disparitas dalam penerapan gender sehingga memunculkan terjadinya ketidakadilan gender.

2. Kajian tentang Gender

Kajian-kajian yang sering digunakan untuk memahami persoalan gender adalah kajian-kajian dalam ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi. Dari berbagai kajian sosial inilah muncul berbagai teori sosial yang kemudian dijadikan sebagai teori-teori gender atau sering juga disebut teori-teori feminisme. Sebenarnya masih banyak lagi kajian yang bisa digunakan untuk mendekati persoalan gender di samping kajian-kajian sosial, misalnya kajian *antropologis dan kajian psikologis, kajian ekonomis*, meskipun tidak sedominan kajian-kajian sosial. Tulisan singkat ini mencoba memaparkan beberapa teori gender yang dibangun berdasarkan teori-teori yang berkembang dalam sosiologi dan psikologi. Tulisan ini diharapkan memberi penjelasan awal tentang berbagai teori gender yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis gender terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Teori-teori ini juga diharapkan dapat mendasari para pengkaji dan para pengambil kebijakan dalam persoalan gender untuk memecahkan persoalan disparitas gender yang masih terus muncul di tengah-tengah kehidupan kita di Indonesia.

3. Teori Partisipasi Sosial Perempuan dan Politik

Dengan mengutip Davis dan Newstrom (1993), Setiawaty (2017) menjelaskan bahwa partisipasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterlibatan warga komunitas dalam lingkungannya. Menurut Davis dan Newstrom bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab untuk mencapainya.

Cary (1995) berpendapat bahwa partisipasi adalah kebersamaan atau saling memberikan sumbangan untuk kepentingan dan masalah-masalah bersama yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat itu sendiri. Partisipasi dalam konteks pembangunan, menurut Oakley (1991) mengandung empat pernyataan berikut ini.

- a. Suatu sumbangan sukarela dari orang per orang atau kepada program publik yang berkontribusi pada pembangunan nasional.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan pedesaan.
- c. Usaha yang terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan sumber-sumber dan lembaga-lembaga pemerintah.
- d. Proses aktif dari kelompok tertentu yang diuntungkan untuk memengaruhi arah dan pelaksanaan program pembangunan.

Secara umum, partisipasi perempuan tidak bisa dipisahkan dari tujuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena perempuan bagian dari masyarakat. Menurut Taliziduhu (1990) partisipasi masyarakat dalam pembangunan bertujuan sebagai berikut: (1) Menumbuhkan kemampuan untuk mengusahakan, memelihara atau untuk merawat segenap sumber, aset, dan sarana yang ada, baik fisik maupun non-fisik. (2) Menumbuhkan kemampuan untuk bangkit kembali dari kemerosotan atau kemunduran sebagai akibat kekeliruan yang pernah ditempuh. (3) Menumbuhkan kemampuan untuk mengembangkan serta meningkatkan sumber, aset, atau peralatan yang ada. (4) Menumbuhkan kemampuan untuk memberikan jawaban yang positif terhadap setiap perubahan yang tengah berlangsung.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara: (1) Adanya kontak dengan pihak lain adalah titik awal perubahan sosial. (2) Menyerap atau memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat atau menolaknya. (3) Turut dalam perencanaan pembangunan serta pengambilan keputusan. (4) Menumbuhkan kemampuan untuk memberikan jawaban yang positif terhadap setiap perubahan yang tengah berlangsung. (5) Turut menerima, memelihara, dan mengembangkan pembangunan. (6) Menilai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan hasilnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan *Women in Development* (WID) adalah proses pengintegrasian perempuan dalam program pembangunan. Menurut Burhanuddin dan Faturrahman (2004) pendekatan ini berangkat dari ideologi *develop-mentalism*, yaitu pembangunan adalah wujud pemikiran modern atau terjadinya modernisasi pemikiran tentang pembangunan di negara-negara dunia. Sehingga pembangunan adalah proses kemajuan yang bergerak secara linear dan pasti. Hanya saja, perempuan tetap masih berada dalam posisi terbelakang, baik sebagai pelaku, objek maupun pemanfaat pembangunan. Penyebabnya adalah perempuan tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan, baik karena alasan klasik seperti peran bagian penentu perempuan maupun alasan-alasan yang berkaitan dengan sosial budaya.

Kedua, pendekatan *Woman And Development* (WAD) adalah tindak lanjut dari pendekatan terdahulu. Dalam WID antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan, kesempatan, dan peran yang sejajar. Pendekatan WAD dianggap lebih kritis, namun terbentur pada hubungan patriarki yang terjadi dalam corak produksi masyarakat. Untuk itu, pendekatan WAD harus ditunjang oleh struktur politik yang lebih stabil dan merata pada skala nasional dan internasional sehingga dalam implementasinya WAD memfokuskan pada pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan.

Ketiga, pendekatan *Gender And Development* (GAD) lebih menekankan pada orientasi hubungan sosial dalam pembangunan. GAD memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan sosial. GAD berasumsi bahwa persoalan mendasar dalam pembangunan adalah adanya hubungan gender yang tidak adil. Menurut Darwin (2003) situasi inilah yang menghalangi pemerataan pembangunan dan partisipasi penuh perempuan. Pendekatan GAD dipandang strategis dalam kegiatan pembangunan. Kemudian diperkuat dengan *Gender Mainstreaming* (GM) atau Pengarus Utamaan Gender (PUG). GM bertujuan menjadikan gender sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan. Sasaran GM adalah kebijakan (negara), aksi (masyarakat), serta intuisi (negara dan masyarakat). Oleh karena itu, PUG adalah proses reorganisasi, pengembangan dan evaluasi kebijakan sehingga kesetaraan gender dapat diintegrasikan pada kebijakan-kebijakan di semua tingkatan oleh para pengambil keputusan.

Sekalipun pendekatan tersebut telah berlangsung lama, namun partisipasi perempuan dalam bidang kehidupan belum menunjukkan sesuatu yang signifikan. Sebagaimana halnya dengan partisipasi politik perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 65, ayat 1 menjelaskan bahwa peningkatan partisipasi politik perempuan dapat dilakukan dengan cara pemberian kuota 30% kepada perempuan untuk menduduki kursi lembaga legislatif, bahkan kuota tersebut dipersyaratkan pula kepada setiap partai politik untuk memasukkan perempuan sebagai calon legislatifnya.

Agar perempuan dapat memenuhi kuota yang telah ditetapkan secara yuridis tersebut, maka menurut Nadiroh (2008) dibutuhkan *performance* politik perempuan yang memfokuskan pada aspek rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, terbuka, rasional, jujur, dan adil. Di sisi lain, perempuan harus memiliki kompetensi politik yang mencakup aspek mental dan moral (budi pekerti, disiplin, demokratis) dan intelektual (keterampilan berpikir logis, luwes, orisinal, dan elaborasi wawasan, profesionalisme serta kreativitas). Setiawati (2017) dengan mengutip Marwah Daud

(1996) menjelaskan bahwa figur seperti Melly G. Tan tidak terlepas dari beberapa hambatan mendasar yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi di dalamnya, yaitu: (a) hambatan fisik, (b) hambatan psikologis, perempuan dipandang sebagai makhluk yang dicipta untuk lelaki, (c) hambatan sosial budaya, (d) hambatan sikap pandang, dan (e) hambatan historis.

Oleh karena itu, Bamberger and Shams (1991) mengemukakan beberapa langkah yang diperlukan untuk menaikkan tingkat partisipasi perempuan sehingga mereka memiliki inisiatif sendiri untuk mengambil bagian dalam aktivitas pembangunan. Langkah-langkah yang dimaksud adalah (1) tahap penyebarluasan informasi, (2) tahap konsultasi, (3) tahap pengambilan keputusan, dan (4) tahap inisiatif.

Lebih jauh, Ani Soejipto (2006) mengemukakan beberapa contoh temuan di lima negara Asia (Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand) tentang krusialnya partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan. *Pertama*, tiada satu pun negara di Asia yang menjadi objek penelitian, mampu mencapai angka keterampilan yang mendekati 30%. *Kedua*, hambatan sosial budaya masih menjadi kendala terbesar bagi perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik. *Ketiga*, transisi demokrasi yang berlangsung di negara-negara Asia termasuk Indonesia gagal melakukan perubahan substansi dalam proses demokratisasi yang berjalan. *Keempat*, isu politik dan perempuan masih menjadi isu yang datang dan hilang dari gerakan perempuan di banyak negara Asia termasuk Indonesia. *Kelima*, di lima negara Asia yang menjadi objek penelitian, pemerintahannya masih melihat isu perempuan sebagai persoalan kesejahteraan. *Keenam*, jalan menuju partisipasi yang adil dalam bidang politik dan pengambilan keputusan masih menjadi tantangan berat yang harus dilalui.

4. Kesetaraan Gender (*Gender Equity*)

Dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender adalah bentuk kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai peran yang dikonstruksi oleh sosial budaya masyarakat seharusnya terlepas dari

tindakan diskriminasi sehingga laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengapresiasi kewajiban dan haknya.

Kesetaraan dan keadilan gender yang ingin dicapai menjadi prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan, berupa jaminan akses secara menyeluruh terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Untuk itu langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah; (a) mengamankan hak-hak asasi perempuan dan anak serta mengakhiri seluruh kekerasan yang menimpa mereka, (b) mempromosikan partisipasi aktif perempuan dalam seluruh aspek ekonomi, politik, sipil, sosial dan budaya, (c) memperjuangkan keluarga dan menjamin keamanan dan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga.

Perempuan memiliki kesamaan arti dengan wanita yang muncul akibat pendikotonomian manusia atas seks biologis yang berdampak pada pembagian perannya dari segi budaya. Namun, apresiasi terhadap hak-hak perempuan sebagai makhluk individual, sosial, dan budaya senantiasa meningkat dan semakin membuka peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk berperan di wilayah publik.

Partisipasi perempuan yang dimaksudkan adalah bentuk kesediaan perempuan secara sukarela dalam menunjang program-program baik atas inisiatif masyarakat lokal maupun pemerintahan yang tercermin dari pikiran, sikap, dan tindakan mereka baik sifatnya individual maupun kolektif dalam model kerangka partisipasi yang dikembangkan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pengambilan manfaat dari program-program yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka.

B. Teori-teori Gender

Sebenarnya tidak ditemukan teori khusus yang membicarakan masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini umumnya diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Oleh karena itu, teori-teori yang digunakan untuk

mendekati masalah gender ini banyak diambil dari teori-teori sosiologi dan psikologi. Cukup banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli, terutama kaum feminis, untuk memperbincangkan masalah gender, tetapi dalam kesempatan ini akan dikemukakan beberapa saja yang dianggap penting dan cukup populer.

1. Teori Struktural-Fungsional (Kelembagaan)

Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama *norma, adat, tradisi, dan institusi*.

Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai “organ” yang bekerja demi berfungsinya seluruh “badan” secara wajar.³ Dalam arti paling mendasar, istilah ini menekankan “upaya untuk menghubungkan, sebisa mungkin, dengan setiap *fitur, adat, atau praktik*, dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif.” Bagi Talcott Parsons, “fungsionalisme struktural” mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis ilmu sosial, bukan sebuah mazhab pemikiran.

Dengan demikian, teori atau pendekatan struktural-fungsional adalah teori sosiologi yang diterapkan dan berpedoman kepada institusi (lembaga) keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengenali fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons (Megawangi 1999:56).

³ Lihat John Urry, “*Metaphors*”. *Sociology beyond societies: mobilities for the twenty-first century* (Routledge, 2000), hlm. 23.

Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini adalah sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi sosial pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi sekretaris atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat (Megawangi 1999:56).

2. Tokoh-tokoh Teori Struktural Fungsional

Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu *August Comte*, *Émile Durkheim* dan *Herbet Spencer*. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut adalah hasil atau dampak agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lain, pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial.

Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, di mana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan *requisite functionalism*, di mana ini menjadi panduan bagi analisis substantif Spencer dan penggerak analisis fungsional.

Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat pada terminologi organismik tersebut. Durkheim menyingkap bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan ketika di dalamnya

terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut interdependensi satu sama lain dan fungsional sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional-Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern.

Selain dari Durkheim, teori struktural fungsional ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber. Secara umum, dua aspek dari studi Weber yang mempunyai pengaruh kuat adalah:

- a. Visi substantif mengenai tindakan sosial, dan
- b. Strateginya dalam menganalisis struktur sosial.

Pemikiran Weber mengenai tindakan sosial ini berguna dalam perkembangan pemikiran Parsons dalam menjelaskan mengenai tindakan pelaku dalam menginterpretasikan keadaan.

Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat pra-industri yang terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menghasilkan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat ini tingkatan peran gender sangat ditentukan oleh seks (jenis kelamin).

Menurut para penganutnya, teori struktural-fungsional tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parsons dan Bales menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah suatu yang wajar (Umar 1999:53). Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-istri bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antarfungsi, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan.

Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula.

Teori struktural-fungsional ini mendapat kecaman dari kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik dan perempuan diposisikan dalam urusan domestik, terutama dalam masalah reproduksi. Menurut Sylvia Walby teori ini akan ditinggalkan secara total dalam masyarakat modern. Sedang Lindsey menilai teori ini akan melanggengkan dominasi laki-laki dalam tingkatan gender di tengah-tengah masyarakat (Umar 1999:53).

Meskipun teori ini banyak memperoleh kritikan dan kecaman, teori ini pada dasarnya masih tetap bertahan terutama karena didukung oleh masyarakat industri yang cenderung tetap memertahankan prinsip-prinsip ekonomi industri yang menekankan aspek produktivitas. Jika pelaku produksi diutamakan, maka nilai manusia akan tampil tidak lebih dari sekadar alat produksi. Nilai-nilai fundamental kemanusiaan cenderung diabaikan.

Karena itu, tidak heran dalam masyarakat kapitalis, “industri seks” dapat diterima secara wajar. Yang juga memperkuat pemberlakuan teori ini adalah karena masyarakat modern-kapitalis, menurut Michel Foucault dan Heidi Hartman (Umar 1999:60), cenderung mengakomodasi sistem pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Akibatnya, posisi perempuan akan tetap lebih rendah dan dalam posisi marginal, sedang posisi laki-laki lebih tinggi dan menduduki posisi sentral.

3. Teori Konflik

Kehadiran konflik dalam kehidupan sosial bertujuan untuk menghasilkan fungsi sosial yang ideal. Berpijak kepada kerangka dasar inilah Plummer⁴ mengutarakan bahwa Thomas Hobbes (1588–1679) telah tenggelam dalam perdebatan mengenai perang sipil dan revolusi ketika menulis buku yang berjudul “The Leviathan”

⁴ Ken Plummer, *Sosiologi The Basic*, terj., (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 45.

pada tahun 1651. Hobbes dalam pandangannya menjelaskan bahwa demi menghasilkan fungsi sosial yang ideal diperlukan adanya pemerintahan yang kuat. Tanpa pemerintahan yang kuat—dibiarkan dalam sebuah negara yang alami—maka kehidupan mereka akan terencil, miskin, rapi, kasar, dan tidak panjang umur.

Meskipun jika kepentingan pribadi masyarakat dapat ditekan, pemerintah yang kuat tetap dibutuhkan demi terciptanya fungsi sosial ideal. Perdebatan muncul hingga mencapai puncaknya pada konflik berikutnya dalam Revolusi Rusia dan Prancis; dan menghasilkan keadaan yang banyak menjadi perdebatan hingga sekarang, yaitu demokrasi. Mengamati secara mendasar kehadiran konflik di tengah-tengah kehidupan sosial, Plummer⁵ menegaskan bahwa embrio kehadirannya ada di setiap jenjang kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, konflik akan muncul karena esensi dasar dari penciptaan manusia itu sendiri adalah perbedaan. Aneka ragam kehidupan secara esensi menjadi dasar faktual bahwa konflik itu akan muncul dan terjadi dalam kehidupan sosial. Fakta ini diketengahkannya melalui sistematika berikut ini.

Tabel 2.1 Kepentingan-kepentingan Pokok dalam Konflik dan Perebutan Kekuatan yang Terjadi di dalamnya

Unsur	Bentuk-bentuk Stratifikasi
1. Ekonomi	1. Kelas, kasta, perbudakan, kesenjangan global
2. Kesukuan	2. Ras, rasialisme, rasisme
3. Jenis kelamin	3. Patriarki, tingkatan jenis
4. Usia	4. Generasi dan pembagian usia
5. Bangsa dan negara	5. Penjajahan, pemusnahan terhadap suatu bangsa, peperangan
6. Seksualitas	6. Heteroseksisme, homofobia
7. Kesehatan	7. Penyakit, kecacatan

Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal pembagian sumber daya yang terbatas. Sifat pementingan diri, menurutnya, akan menyebabkan

⁵ *Ibid.*

diferensiasi kekuasaan yang ada sehingga menyebabkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Perbedaan kepentingan dan pertentangan antarindividu pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dalam suatu organisasi atau masyarakat (Megawangi 1999:76).

Dalam masalah gender, teori sosial-konflik terkadang dianalogikan dengan teori Marx, karena begitu kuatnya pengaruh Marx di dalamnya. Marx yang kemudian dilengkapi oleh F. Engels, mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan disparitas gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi adalah bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan laki-laki-perempuan (suami-istri) tidak ubahnya dengan hubungan proletar dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, disparitas peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh para pengikut Marx seperti F. Engels, R. Dahrendorf, dan Randall Collins.

Asumsi yang dipakai dalam pengembangan teori sosial-konflik, atau teori determinisme ekonomi Marx, bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktural-fungsional, yaitu berikut ini. 1) walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial secara sistematis menghasilkan konflik; 2) maka konflik adalah suatu yang tak terhindarkan dalam semua sistem sosial; 3) konflik akan terjadi dalam aspek pembagian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan; dan 4) konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat (Megawangi 1999:81).

Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi adalah sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-olah Engels mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan (Umar 1999:62).

Menurut teori ini, keluarga bukan sebuah kesatuan yang normatif (harmonis dan seimbang), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Keragaman biologis yang menghasilkan peran gender dianggap sebagai konstruksi budaya, sosialisasi kapitalisme, atau patriarkat. Menurut para feminis Marxis dan sosialis, institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama, sehingga usaha untuk menghasilkan *perfect equality* (kesetaraan gender 50/50) adalah dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menghasilkannya (Megawangi 1999:91).

Teori sosial-konflik ini juga mendapat kritik dari sejumlah pakar, terutama karena teori ini terlalu menekankan pelaku ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Dahrendorf dan R. Collins, yang tidak sepenuhnya setuju dengan Marx dan Engels, menganggap konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan istri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya (Umar 1999:64). Meskipun demikian, teori ini banyak diikuti oleh para feminis modern yang kemudian banyak memunculkan teori-teori baru mengenai feminisme, seperti feminisme liberal, feminisme Marxis-sosialis, dan feminisme radikal.

C. Feminisme

1. Pengertian Feminisme

Feminisme adalah *ideologi atau sebuah paham* yang menyatakan persamaan hak antara pria dengan wanita atau laki-laki dan perempuan. Secara bahasa, feminisme berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata "femina" yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Feminisme sering juga diartikan sebagai gerakan emansipasi perempuan yang vokal tentang perbaikan kedudukan perempuan dan menolak perbedaan derajat antara perempuan dengan laki-laki.

Orang yang berpegang pada ideologi feminisme disebut feminis. Persamaan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan dalam paham ini berlaku dalam segala hal. Pada masa awal kehadirannya, paham feminisme analog dengan “perjuangan kaum perempuan” tetapi saat ini feminisme sudah berkembang dan mulai diartikan “perjuangan terhadap segala bentuk ketidakadilan”.

Dalam sejarah ada banyak sumber tentang gerakan perempuan dalam memperjuangkan haknya, tetapi yang paling sering menjadi rujukan ialah gerakan yang berkembang pada abad ke-15-18 M di Eropa. Pergerakan paling awal yang ditemukan ialah oleh Christine de Pizan yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami perempuan.

Kemudian pada abad ke-18 pergerakan yang cukup signifikan mulai tumbuh. Dua tokoh utama pergerakan ini adalah Susan dan Elizabeth. Mereka ketika itu telah berhasil memperjuangkan hal politik yaitu hak untuk memilih bagi perempuan. Kemudian memasuki abad ke-19 dengan dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet, gerakan ini terus berkembang hingga sampai ke negara-negara penjajahan Eropa, secara bersamaan, gerakan mereka disebut sebagai “Universal Sisterhood”. Dalam perkembangannya, ada tiga gelombang pergerakan feminisme.

1. Gelombang Pertama “Woman Voice” (Suara Perempuan). Gerakan ini dipelopori oleh aktivis sosialis Charles Fourier tahun 1837. Pada gelombang ini pergerakan yang awalnya berpusat di Eropa pindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak adanya publikasi buku berjudul *The Subjection of Women* “1869” karya John Stuart Mill. Perjuangan kaum perempuan dalam menuntut revolusi sosial dan politik terhadap hak perempuan mulai membuahkan hasil sekitar tahun 1830-1840. Seiring dengan pemberantasan praktik perbudakan hak-hak kaum perempuan mulai diperhatikan.
2. Gelombang Kedua. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan lahirnya negara-negara baru setelah mereka terbebas dari penjajahan bangsa Eropa, gerakan feminisme mencapai puncaknya. Mereka mulai vokal tentang hak suara perempuan dalam hak suara parlemen “pihak yang ikut menjalankan sistem pemerintahan”. Peningkatan dan semangat

kaum perempuan dalam memperjuangkan haknya memuncak pada awal tahun 1970. Tokoh utama yang sering dikaitkan dengan gerakan feminisme gelombang kedua ini ialah para feminis Prancis seperti Helene Cixous (Yahudi kelahiran Algeria yang menetap di Prancis) dan Julia Kristeva (orang Bulgaria yang menetap di Prancis). Tujuan utama gerakan feminisme kedua ialah untuk menuntut kebebasan bagi wanita yang sering dipandang rendah dan diperlukan dengan tidak layak.

3. Gelombang Ketiga. Gelombang ketiga ini berkaitan dengan gelombang kedua. Pada gelombang ketiga feminis lebih berfokus untuk mendapatkan posisi dalam sistem pemerintahan negaranya. Mereka beranggapan bahwa bidang politik adalah tempat yang harus memiliki perwakilannya agar hak-hak perempuan dapat terus dijaga. Hingga sekarang, feminisme masih ada dan aktif dalam mengampanyekan berbagai isu sosial seperti pornografi, hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan atau hak-hak legal perempuan. Kaum Feminis juga ikut terlibat dalam memperjuangkan gerakan sosial yang serupa seperti gerakan kaum lesbian dan gay.

2. Ciri-ciri Feminisme

Feminisme memiliki beberapa ciri, antara lain sebagai berikut.

- a. Menyadari adanya perbedaan atau ketidakadilan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.
- b. Menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
- c. Laki-laki dianggap kaum yang lebih mementingkan dirinya.
- d. Gerakannya didominasi oleh perempuan.

D. Teori-teori Feminisme

1. Teori Feminisme Liberal

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap

ada kesenjangan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa efek logis dalam kehidupan bermasyarakat (Megawangi 1999:228).

Teori kelompok ini termasuk paling moderat di antara teori-teori feminisme. Pengikut teori ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukanlah penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik.

2. Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Feminisme ini bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan *division of labour*, termasuk di dalam keluarga.

Gerakan kelompok ini mengadopsi teori praksis Marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka adalah 'kelas' yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit untuk mengubah keadaan (Megawangi 1999:225). Berbeda dengan teori sosial-konflik, teori ini tidak terlalu menekankan pada faktor akumulasi modal atau pemilikan harta pribadi sebagai kerangka dasar ideologi. Teori ini lebih menyoroti faktor seksualitas dan gender dalam kerangka dasar ideologinya.

Teori ini juga tidak luput dari kritikan, karena terlalu melupakan pekerjaan domestik. Marx dan Engels sama sekali tidak melihat nilai ekonomi pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik hanya dianggap pekerjaan marginal dan tidak produktif. Padahal semua pekerjaan publik yang mempunyai nilai ekonomi sangat bergantung pada produk-produk yang dihasilkan dari pekerjaan rumah tangga, misalnya makanan yang siap dimakan, rumah yang layak ditempati, dan lain-lain yang memengaruhi pekerjaan publik tidak produktif. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan kaum perempuan melalui pekerjaan domestiknya telah banyak diperhitungkan oleh kaum

feminis sendiri. Kalau dinilai dengan uang, perempuan sebenarnya dapat memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dari sektor domestik yang dikerjakannya (Megawangi 1999:143).

3. Teori Feminisme Radikal

Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Meskipun teori ini hampir sama dengan teori feminisme Marxis-sosialis, teori ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki) sehingga perempuan tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan. Elsa Gidlow mengemukakan teori bahwa menjadi lesbian adalah telah terbebas dari dominasi laki-laki, baik internal maupun eksternal. Martha Shelley selanjutnya memperkuat bahwa perempuan lesbian perlu dijadikan model sebagai perempuan mandiri (Megawangi 1999:226).

Karena keradikalannya, teori ini mendapat kritikan yang tajam, bukan saja dari kalangan sosiolog, tetapi juga dari kalangan feminis sendiri. Tokoh feminis liberal tidak sepenuhnya setuju dengan teori ini. Persamaan total antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya akan merugikan perempuan sendiri. Laki-laki yang tidak terbebani oleh masalah reproduksi akan sulit diimbangi oleh perempuan yang tidak bisa lepas dari beban ini.

4. Feminisme Anarkis

Feminisme anarkis juga adalah salah satu paham feminisme ekstrem. Mereka menganggap bahwa negara dan laki-laki adalah pusat segala permasalahan yang dialami kaum perempuan. Oleh karena itu, tujuan feminisme anarkis ialah untuk menghancurkan negara dan kaum lelaki serta mewujudkan mimpi supaya perempuan memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur sosial.

5. Feminisme Post-Modern

Feminisme post-modern adalah feminisme yang mulai terlihat perkembangannya saat ini. Feminisme post-modern adalah gerakan feminisme yang anti dengan sesuatu dengan sifat absolut dan anti dengan otoritas. Tokoh feminisme post-modern menghindari adanya suatu kesatuan yang membatasi perbedaan. Artinya, kaum feminis boleh menjadi apa pun yang mereka inginkan dan tidak ada rumus "feminis yang baik".

Namun, kaum feminisme post-modern memiliki tema atau orientasi dalam pergerakannya. Mereka menyebutkan bahwa seksualitas dikonstruksikan oleh bahasa. Kehidupan manusia terbentuk karena bahasa, maka lewat bahasa pula kita dapat mengatasi ketidakadilan terhadap perempuan. Bahasa yang dimaksud di sini ialah argumen, opini, tulisan, dll.

6. Teori Ekofeminisme

Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok. Teori ini mempunyai konsep yang bertolak belakang dengan tiga teori feminisme modern. Teori-teori feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Sedangkan teori ekofeminisme melihat individu secara lebih lengkap, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya (Megawangi 1999:189).

Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin yang tadinya didominasi oleh laki-laki adalah tidak lagi menonjolkan kualitas femininnya, tetapi justru menjadi *male clone* (tiruan laki-laki) dan masuk dalam perangkat sistem maskulin yang hierarkis. Masuknya perempuan ke dunia maskulin (dunia publik umumnya) telah menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin. Akibatnya, yang terlihat adalah kompetisi, *self-centered*, dominasi, dan eksploitasi. Contoh nyata dari cerminan memudarnya kualitas feminin (cinta, pengasuhan, dan pemeliharaan) dalam masyarakat adalah semakin rusaknya alam, meningkatnya kriminalitas, menurunnya solidaritas

sosial, dan semakin banyaknya perempuan yang menelantarkan anak-anaknya (Megawangi 1999:183).

7. Teori Psikoanalisis

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856–1939). Teori ini menyingkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun atas tiga struktur, yaitu id, ego, dan superego. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur itu. Id sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis sejak lahir. Id bagaikan sumber energi yang memberikan kekuatan terhadap kedua sumber lainnya. Ego bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari id. Ego berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif individual dan tuntutan objektif realitas sosial. Superego berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian dan selalu mengingatkan ego agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol id (Umar 1999:46).

Menurut Freud kondisi biologis seseorang adalah masalah takdir yang tidak dapat diubah. Pada tahap *phallic stage*, yaitu tahap seorang anak memperoleh kesenangan pada saat mulai mengenali alat kelaminnya, seorang anak memperoleh kesenangan erotis dari penis bagi anak laki-laki dan klitoris bagi anak perempuan. Pada tahap ini (usia 3–6 tahun) perkembangan kepribadian anak laki-laki dan perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini melahirkan kesenjangan formasi sosial berdasarkan identitas gender, yakni bersifat laki-laki dan perempuan (Umar 1999:41).

Pada tahap *phallic*, seorang anak laki-laki berada dalam puncak kecintaan terhadap ibunya dan sudah mulai mempunyai hasrat seksual. Ia semula melihat ayahnya sebagai saingan dalam memperoleh kasih sayang ibu. Tetapi karena takut ancaman dari ayahnya, seperti dikebiri, ia tidak lagi melawan ayahnya dan menjadikannya sebagai idola (model). Sebaliknya, ketika anak perempuan melihat dirinya tidak memiliki penis seperti anak laki-laki, tidak dapat menolak kenyataan dan merasa sudah “terkebiri”. Ia menjadikan ayahnya sebagai objek cinta dan menjadikan ibunya sebagai objek iri hati.

Pendapat Freud ini mendapat protes keras dari kaum feminis, terutama karena Freud menyingkapkan kekurangan alat kelamin perempuan tanpa rasa malu. Teori psikoanalisis Freud sudah banyak yang didramatisasi kalangan feminis. Freud sendiri menganggap kalau pendapatnya masih tentatif dan masih terbuka untuk dikritik. Freud tidak sama sekali menyudutkan kaum perempuan. Teorinya lebih banyak didasarkan pada hasil penelitiannya secara ilmiah. Untuk itu, teori Freud ini justru dapat dijadikan pijakan dalam mengembangkan gerakan feminisme dalam rangka mencapai keadilan gender. Karena itu, penyempurnaan terhadap teori ini sangat diperlukan agar dapat ditarik kesimpulan yang benar.

Itulah beberapa teori-teori gender yang dapat digunakan untuk memahami berbagai persoalan gender dalam kehidupan kita. Tentu saja masih banyak lagi teori atau pendekatan-pendekatan lain yang bisa digunakan untuk memahami persoalan gender, misalnya pendekatan fenomenologis, pendekatan agama, teori-teori ekonomi, dan teori-teori sosial lainnya.

Daripada kajian singkat tentang teori-teori gender, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan berikut ini. (1) Secara etimologis makna gender serupa dengan makna seks yang berarti jenis kelamin. Sedang secara terminologis gender dan seks memiliki makna yang sangat berbeda, meskipun masih memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. (2) Tidak ada satu pun teori yang khusus digunakan untuk mengkaji permasalahan gender. Teori-teori yang dikembangkan untuk gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama teori-teori sosiologi dan teori psikologi. Teori-teori dimaksud adalah Teori Struktural-Fungsional, Teori Sosial-Konflik, Teori Feminisme Liberal, Teori Feminisme Marxis-Sosialis, Teori Feminisme Radikal, Teori Ekofeminisme, dan Teori Psikoanalisis.

E. Feminisme Pascakolonial

Dasar pandangan ini berakar pada penolakan universalitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga (koloni/bekas koloni) berbeda dengan perempuan berlatar belakang dunia pertama.



Gambar. 2.1 Kartini, *Pustaka Feminisme Poskolonial yang Terlupakan*, sumber: <https://www.quareta.com/>

Keterangan: Jauh sebelum Edward Said, Leela Gandhibahwa, Gayatri Spivak bicara tentang teori-teori poskolonialisme, Kartini pada tahun 1900 telah berbicara tentang feminisme poskolonialisme yang menembus tembok batas kolonialisme.

Kartini bicara dan berdialog secara lantang tentang stuktur yang membelenggu hak-hak wanita. Kartini berbicara dengan penguasa dirinya yakni suaminya sendiri Bupati Rembang Adipati Djojo Adiningrat dan Penguasa Belanda Dr. J. H. Abendanon tentang hak-hak dan kebutuhan wanita melalui surat-suratnya.

Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antarbangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme poskolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat.

Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme poskolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat. Beverley Lindsay dalam bukunya *Comparative Perspectives on Third World Women: The Impact of Race, Seks, and Class* menyatakan, "... hubungan ketergantungan yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan."

1. Kolonialisme dan Pascakolonialisme

Hal yang utama dalam membicarakan feminisme dan wacana pascakolonialisme adalah mengetahui letaknya dalam pohon pengetahuan. Dalam teori feminisme, feminis pascakolonial masuk dalam gelombang ketiga yang merupakan cabang dalam bidang wacana dan identitas budaya (Karima 2019).

Feminisme pascakolonial bergerak dalam ranah identitas sebagai alat perjuangan, tetapi seharusnya tidak menutup mata terhadap sejarah. Kenapa disebut pascakolonialisme? Karena wacana ini hendak memeriksa penindasan dan disparitas yang masih terjadi pasca gelombang kemerdekaan negara-bangsa pasca Perang Dunia Kedua.

Dalam wacana pascakolonialisme, kolonialisme adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat feodalisme, rasisme dan imperialisme yang membuat sebuah negara-bangsa menderita secara terstruktur. Umumnya kaum sejarawan untuk menganalisis tentang kolonialisme di Indonesia sepakat bahwa bahwa kolonialisme dimulai dengan imperialisme dan bisa bercokol lama di Indonesia karena feodalisme. Feodalisme adalah struktur pembagian kekuasaan terpusat antara kelompok bangsawan yang awalnya berbentuk monarki.

Bentuk kerajaan-kerajaan dan kesenjangan hierarki antarmanusia berdasarkan darah keturunan menjadi penyokong munculnya feodalisme. Feodalisme juga bisa berbentuk hubungan *patron-client*, seorang hamba dan majikan yang membuat majikan bisa terus mengeksploitasi si hamba dan hamba menganggap hal tersebut sebagai sebuah kewajaran dan pengabdian. Seperti yang kita ketahui kekuasaan kolonial di Nusantara awalnya berjalan *direct-rule* dan berubah pada akhir abad ke-18 menjadi *indirect-rule* dengan menggaji para bangsawan menjadi pegawai pemerintahan kolonial.

Hal ini beralasan karena rakyat jelata mengikuti dan menghamba kepada pemimpin bangsanya yang pribumi yang memiliki posisi jabatan lebih tinggi untuk diberikan hasil bumi (pajak) dan kerja paksa daripada kulit putih asing. Singkatnya, bangsawan menggunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi rakyat dan kolonial

menggunakan posisi bangsawan untuk mengeruk keuntungan untuk negaranya. Novel karangan Mutatuli berjudul *Max Havelaar* yang dielu-elukan sebagai karya sastra menolak kolonialisme, mengkritik tentang praktik tanam paksa dan korupsi birokrat yang menyebabkan kelaparan dan kemiskinan di tanah jajahan.

Feodalisme seperti ini terus dipelihara dan tumbuh. Dan disparitas sosial akibat kolonialisme tidak saja dipelihara oleh kulit putih pemilik modal dari Eropa/Amerika, tapi terus berjaring dengan keluarga bangsawan dan para birokratnya di Indonesia.

Dalam diskursus feminisme pascakolonialisme di Indonesia, kolonialisme diartikan sama dengan rasisme. Diskursus feminis pascakolonial menjadi sebatas kerugian hubungan romansa personal asimetris karena masalah warna kulit. *Binaritas* antara lelaki penjajah (kulit putih) berbanding dengan perempuan yang dijajah (berkulit cokelat). Pemikiran sempit ini menghilangkan upaya sejarawan untuk menerangkan bahwa kolonialisme dan rasisme adalah dua hal yang berbeda, dan mengkerdikan analisis pos-kolonialisme tentang disparitas struktural sosial-ekonomi global.

Isu pascakolonial sebenarnya sangat berhubungan dengan sirkulasi disparitas ekonomi negara dijajah-terjajah. Seperti tambang semen di Kendeng, penderitaan kerusakan alam dialami oleh penduduk sekitar, tetapi keuntungan dari eksploitasi alam dan penjualan semen masuk ke kantong pemilik saham PT Heidelberg Cement, Jerman. Isu budaya yang harusnya jadi pascakolonialisme adalah menolak kebencian terhadap kelompok LGBT yang diwariskan oleh kolonial Belanda. Sebab, pascakolonialisme berarti mengecek sisa-sisa kolonialisme yang bercokol, penindasan yang masih berlangsung dan keuntungan ekonomi bagi suatu golongan. Tidak selalu berkulit putih karena pelaku kolonialisme bisa saja mereka para elite yang melanggengkan sistem.

2. Diskursus Feminisme Pascamodern dan Pascakolonialisme

Isu tentang feminisme pascakolonialisme memang bisa menjadi diskursus tersendiri. Sebab dikursus pascakolonialisme terlihat hanya sebatas pertentangan Barat-Timur sudah lama usang dan

tuduhan bahwa hanya kulit putih yang bisa menjajah dibantah habis oleh Frans Fanon (1952) dalam bukunya *White Skin in The Black Mask*.⁶

Jika memang feminis poskolonial mau bergerak dalam wacana poskolonial, harusnya mulai bergerak dari akar (radikal) seperti epistemologi ilmu pengetahuan karena pembahasan tentang konstruksi pengetahuan dan tema-tema yang kita gunakan hari ini adalah warisan kolonial seperti yang diceritakan Ann Stoler dalam *Rethinking Colonial Categories: European Communities and the Boundaries of Rules*.

Dengan memahami bahwa kolonialisme adalah sistem dan berbeda dengan rasisme, harusnya para feminis juga dapat melihat dari sisi lain bahwa apa yang dilakukan orang Indonesia di tanah Papua juga bisa dikatakan kolonialisme. Oleh karena itu, Karina (2019) berpendapat binaritas antara penjajah-terjajah sudah lama usang dalam feminisme dan kita menggunakan tubuh perempuan sebagai alam/bangsa adalah sebuah analogi, sebuah siasat dalam gerakan feminisme yang bukan untuk ditelan mentah-mentah, melainkan sebuah kait supaya kita tertarik untuk mempelajari dan menganalisis lebih banyak tentang lapisan-lapisan penindasan terhadap perempuan dan sejarahnya.

Analisis pascakolonial ala feminis “egois” ini dangkal sebab tidak menyertakan analisis ekonomi dan sejarah Indonesia.⁷ Wacana poskolonialisme adalah penjelasan budaya tentang apa yang terjadi hari ini. Mengapa ada pandangan bahwa kulit putih itu superior dan kulit berwarna dan dipandang wajar? Mengapa sirkulasi ekonomi mengalir dan terpusat pada negara-negara bekas penjajah dan negara terjajah terus berada dalam golongan *under development* dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi?

⁶ Frantz Fanon (1925-1961) lahir di Martinik dan belajar kedokteran di Prancis, berspesialisasi dalam psikiatri. Dikirim ke rumah sakit di Aljazair, ia menemukan simpatinya beralih ke Gerakan Nasionalis Aljazair, yang kemudian ia ikuti. Dia dianggap sebagai salah satu ahli teori terpenting dari perjuangan Afrika untuk kemerdekaan dan psikologi ras.

⁷ *Ibid.*

Hal ini disangkutkkan dengan melihat gambaran yang lebih besar: sirkulasi ekonomi kepada negara-negara bekas penjajah, sehingga isu pascakolonialisme yang seharusnya muncul adalah tentang disparitas ekonomi, akses kerja, dan lingkungan hidup. Bagaimana mungkin negara-negara di Eropa menikmati alamnya yang asri dan udara yang bersih sedangkan produksi bahan mentah dan ekstraksi yang menghasilkan banyak limbah terus dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia.

Poin terakhir yang tidak kurang pula pentingnya, adalah penguasaan sejarah Indonesia dalam pergerakan feminisme itu sendiri. Sebab kehadiran feminisme/emansipasi terjadi pada kurun awal pergerakan perempuan bersamaan dengan semangat anti-kolonialisme. Hanya perempuan bumiputra yang dicatat dan boleh ikut dalam gerakan perempuan nasional sementara perempuan Tionghoa, perempuan Indo, dan perempuan lain tidak diikutsertakan. Penyertaan berbagai identitas kelompok perempuan memperkaya diskursus feminisme sehingga wacana feminisme di Indonesia nantinya tidak terbatas pada dirinya sendiri sebagai perempuan kota kelas menengah terdidik saja.

Box 2.1**Hak dan Kedudukan Para Perempuan Indonesia di Era Masa Kolonial (Resensi)**

Oleh: Reggie Bay, (2010) *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*, terbitan Komunitas Bambu, Mei 2010.

Pada awalnya, VOC perusahaan dagang yang memusatkan perhatian pada perdagangan rempah-rempah seperti merica, cengkeh dan pala di Timur. Namun, perdagangan berkembang dengan cepat hingga ke sutra, katun, kopi, nila, tembaga dan timah (di luar rempah-rempah). Demi memenuhi kebutuhan perdagangan tersebut, diciptakanlah jaringan kantor dagang dan gudang di Asia. Di sanalah para pegawai (yang mayoritas adalah para pria, pada zaman itu perempuan masih langka bekerja) bekerja. Mereka membeli dan mengatur pencatatan barang-barang untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam gudang-gudang. Di samping itu, ditempatkan juga para serdadu yang tidak hanya bertugas menjaga gudang-gudang penyimpanan tapi juga seluruh pemukiman. Di sana juga ada banyak awak kapal yang bekerja mengatur transportasi barang dagang yang bernilai tinggi. Daerah-daerah pendudukan di Asia dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat laki-laki dan kebanyakan adalah pegawai VOC berpangkat rendah yang masih lajang. Saat itu, terjadi kekurangan besar perempuan Eropa di daerah pendudukan. Kebanyakan laki-laki Eropa sebagai solusi menyelesaikan permasalahan tersebut dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologisnya dengan mengambil gundik perempuan Asia. Perempuan-perempuan yang dijadikan gundik ialah para budak perempuan di rumah tangga Eropa yang kebanyakan melakukannya secara terpaksa dikarenakan tidak punya pilihan lagi untuk menentukan nasibnya. Pada kenyataannya, terkadang sukar untuk menunjukkan garis pemisah antara pergundikan dengan pelacuran, hukum pun tidak ada mengatur persoalan itu. Garis pemisah ini diperlukan untuk menunjukkan keadaan yang telah bertahan cukup lama. Persoalan pergundikan tersebut kemudian menjadi suatu permasalahan gejala sosial di masyarakat. Para gundik bukanlah budak perempuan Jawa. Karena khawatir akan munculnya sabotase, maka diputuskan bahwa orang Jawa tidak boleh menjadi budak di daerah-daerah pendudukan di Jawa. Oleh karena itu, mereka diambil dari tempat-tempat lain di antaranya dari India, Filipina, dan juga Sumatra serta Bali.

Sumber: Resensi isi buku terjemahan, karangan Reggie Bay, *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*, terbitan Komunitas Bambu, Mei 2010. <https://www.kompasiana.com/> di akses 28 Juli 2019

F. Gender dan Politik

Perempuan dalam proses konstruksi sosial di masyarakat. Peran perempuan bersifat domestik sehingga timbul adanya isu ketidakadilan gender atau diskriminasi gender. Namun, perubahan kebijakan melihat kebutuhan bahwa perempuan semakin dituntut untuk memasuki dunia publik karena pemikirannya juga dibutuhkan, sementara laki-laki juga perlu peka dan lebih intensif terlibat pada kegiatan yang bersifat domestik, karena keduanya memiliki nilai yang sama.⁸

Menurut Mariana Amiruddin (2013), terlihat kuota 30% perempuan untuk menduduki partai politik memberikan harapan kepada perempuan untuk ikut andil dalam pembangunan. Peran perempuan yang sejatinya, reproduksi (ibu + istri), produksi (pencari nafkah tambahan), masyarakat (pengelolaan masyarakat dan layanan sukarela misalnya menjadi kader kesehatan), dapat juga menyelesaikan problem-problem perempuan dengan adanya kuota 30%. Mengapa kuotanya 30%? Mengapa tidak 20%, 50%, 70%, dan sebagainya? Karena perempuan tidak lepas dari peran utamanya sebagai ibu rumah tangga. Peran total diberikan kepada laki-laki, karena peran laki-laki adalah reproduksi (ayah), produksi (mencari nafkah), dan masyarakat (kepemimpinan, politik, pertahanan, dan sering kali bersifat formal dan dibayar).

Peran gender tersebut tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan. Ada wilayah-wilayah yang bisa dilakukan laki-laki tetapi tidak bisa dilakukan perempuan. Misalnya, banyak pekerjaan laki-laki yang bisa dilakukan perempuan seperti kenek bus, sekuriti, sopir, tukang bangunan, politik, pabrik garmen, pabrik rokok, mol-mol, sekretaris, dan sebagainya sudah banyak yang melibatkan perempuan. Sementara itu, pekerjaan yang biasanya dilakukan perempuan bisa dilakukan laki-laki seperti koki, pekerja salon, dan sebagainya. Peran gender dapat dipertukarkan dan berubah tergantung konstruksi sosial budaya masyarakat.

⁸ Amiruddin Mariana, "Perempuan dan Partai Politik: Fenomena Kuota 30%", *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Media Indonesia*, Jumat, 8 Maret 2013 dan Senin, 11 Maret 2013.

Dalam jurnal disebutkan, *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2008, justru perempuan yang menghidupkan sektor perikanan di Indonesia yang mencapai 2,3 juta orang. Perempuan Indonesia banyak yang bertanggung jawab dalam produksi pangan, baik petani maupun nelayan, tetapi akses mereka masih terbatas terhadap sumber produksi seperti air, lahan, sarana produksi pertanian atau perikanan, dan sulit mengakses pasar, dan sering terlupakan dalam program bantuan dan kredit perbankan. Bukan hanya itu, Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa perempuan banyak bekerja di sektor informal yang umumnya tidak tercatat. Padahal peran mereka mencapai 70% untuk usaha mikro dan kecil. Bahkan dari sisi tenaga kerja Indonesia, 70% lebih perempuan telah mengirimkan devisa bagi Indonesia atau uang bagi kehidupan keluarganya mencapai US\$5,7 miliar. Angka ini tentu semakin menguatkan mengapa keterwakilan perempuan di politik sangat penting untuk memperhatikan masyarakat perempuan di Indonesia yang banyak memberikan kontribusi untuk negara.

Persoalan dalam pembangunan yaitu komunikasi dan partisipatif masyarakat. Menurut Ginanjar Kartasasmita (1955) "pembangunan memang dapat juga berjalan dengan mengandalkan kekuatan yang ada pada pemerintah. Namun, hasilnya tidak akan sama jika dibandingkan dengan pembangunan yang mendapat dukungan dan partisipasi rakyat". Gender sangat berpengaruh dalam pembangunan. Gender dan jenis kelamin (seks) adalah hal yang berbeda, tetapi mempunyai suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Gender yang terkait dengan tingkah laku dan pembagian fungsi ke dalam bentuk feminin dan maskulin berbeda dengan jenis kelamin (seks) yang lebih mengklasifikasikan manusia berdasarkan struktur dan ciri biologis.

Gender sebagai proses 'konstruksi sosial' di dalam masyarakat. Konstruksi sosial adalah pembentukan dari sistem konseptual kebudayaan dan linguistik. Gender juga adalah alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum. Ditegaskan bahwa gender adalah pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya.

Ternyata, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, konstruksi, sosial budaya bahkan melalui kekuasaan negara. Sedemikian panjang dan lamanya proses "genderisasi" secara sosial budaya tersebut sehingga lambat laun perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi sosial budaya menjadi seolah-olah ketentuan dari Tuhan, atau bersifat kodrati dan biologis yang tidak dapat diubah lagi. Peran gender tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan. Ada wilayah-wilayah yang bisa dilakukan laki-laki tetapi tidak bisa dilakukan perempuan, demikian sebaliknya ada wilayah yang bisa dilakukan perempuan tetapi tidak bisa dilakukan laki-laki, seperti halnya kuota 30% perempuan dalam parpol.

BAB III

PEREMPUAN DALAM KONTEKS SEJARAH SOSIAL BUDAYA JEPANG

A. Pendahuluan

Untuk memahami bagaimana sikap orang Jepang terhadap perempuan Indonesia, maka harus kita kaji terlebih dahulu tentang budaya Jepang terhadap perempuan. Hal ini karena terdengar banyak sekali keses yang ditimbulkan pada saat pendudukan Jepang yang singkat itu (1942–1945). Baik yang bersifat positif maupun negatif.

Seperti yang diketahui, Jepang adalah negeri Asia pertama yang memodernisasi dirinya. Sejak awal abad ke-20 Jepang telah diakui negara Barat setara dengan mereka, dengan memberi mereka hak yang sama dalam hal hukum. Sepanjang sejarah Jepang modern, salah satu hal yang ikut berubah dalam masyarakat Jepang adalah peran perempuan.

Perempuan di Jepang memiliki peran dan status yang berubah-ubah. Di saat awal sejarahnya Jepang sempat memiliki kaisar perempuan pada abad ke-8 Masehi (era Heian). Mereka juga dapat menerima warisan dan memiliki hak milik sendiri. Namun di zaman sesudahnya, terutama era Edo status dan hak mereka berkurang.¹ Tentu saja bagaimana peran, status, dan hak perempuan di Jepang dari zaman ke zaman dapat menjadi bahasan sejarah yang menarik.²

¹ "Women in Japan", Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Japan (diakses 5 Desember 2019).

² Lihat Roosiani, Indun. 2017. "Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Jepang" *Jurnal Wahana*, Volume 1, No. 13, Genap, Tahun Akademik 2016/2017.

B. Perempuan Jepang di Zaman Edo

Pada zaman Edo kelas militer yang disebut *bushi* adalah kelas yang dominan di Jepang. Dominasi kelas dengan peran maskulin ini menyiratkan turunnya status dan peran wanita dalam masyarakat. Kepercayaan asli Jepang (Shinto) yang menjadikan figur perempuan sebagai unsur sakral³ dan sejarah penyatuan Jepang yang dimulai oleh Ratu Himiko tergeser perannya oleh konfusianisme yang secara praktis berguna bagi pemerintahan bakufu⁴.

Dalam konfusianisme terdapat hierarki status yang meminta ketundukan terhadap kepala, baik kepada kepala negara maupun kepala keluarga⁵. Ketundukan istri kepada kepala keluarga dengan ini menempatkan mereka pada peran domestik di dalam rumah.

Namun secara ganjil unsur Shinto yang tidak mentabukan seks di luar nikah bertahan di era Edo. Mereka menempatkan suatu lokalisasi (*pleasure quarter*) sebagai tempat aktivitas ini dapat dilakukan. Di *pleasure quarter* ini lama-kelamaan tidak hanya seks yang dijual, tetapi hiburan lain yang diberikan oleh seniman-seniman ternama yang disebut *oiran*. Sebagai pendamping *oiran* inilah muncul seniman-seniman pria yang disebut *geisha*.⁶

Profesi *geisha* ini kemudian diambil para perempuan penghibur, mereka memilih sebagai seniman tinggi daripada menjadi pekerja seks. Secara budaya, *geisha* ini menjadi kontras terhadap konsep ideal para istri. Para *geisha* menunjukkan keahlian dan sifat yang terlihat bebas sementara para istri bersikap rendah hati dan bijak⁷. Dari kehadiran *geisha* kita melihat kontradiksi bahwa masyarakat Jepang mengharapkan para perempuan untuk berperan domestik, namun masyarakat ini mengizinkan munculnya profesi *geisha*.

³ "Woman in Japan", *loc.cit.*

⁴ Lihat Ryosuke Ishii, *Sejarah Institusi Politik Jepang* (Jakarta: Gramedia, 1989), mengenai sejarah awal Jepang hlm. 1-11 dan mengenai peran konfusianisme bagi bakufu hlm. 91.

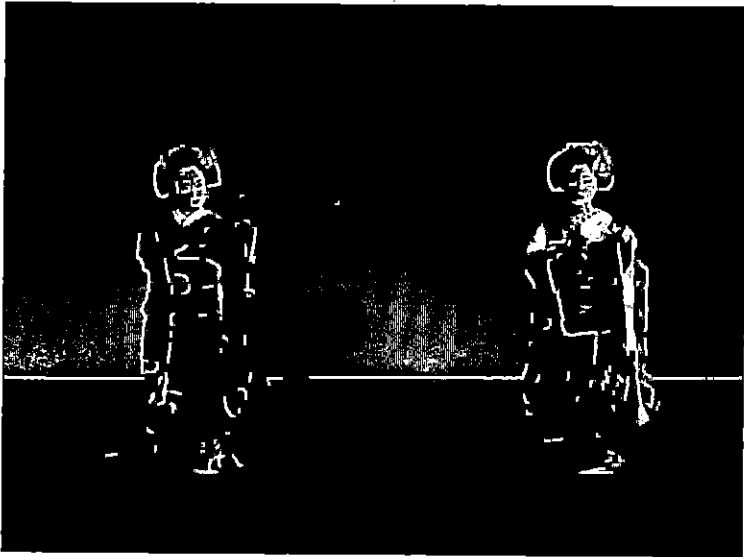
⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Dalam perkembangan sejarah di Jepang, selain agama Buddha, kepercayaan Shinto, dan Konfusianisme sangat memengaruhi kehidupan masyarakat Jepang. Ketiga keyakinan tersebut, selain digunakan sebagai alat pemersatu bangsa Jepang, juga dijadikan sebagai alat untuk melindungi dan mendukung otoritas Kaisar dan Shogun pada saat itu. Salah satu dampak terbesar dalam pengaruh ketiga keyakinan tersebut adalah dalam hal kedudukan perempuan Jepang.

Sejak awal zaman Meiji (1868–1912) sampai Perang Dunia Kedua, pertanian adalah pekerjaan hampir selama hidupnya bagi 5,5 juta keluarga atau 13,7 juta penduduk. Sejak tahun 1870 petani adalah 80% tenaga kerja, tetapi dengan penambahan penduduk, jumlahnya terus menurun, meskipun jumlah petani secara absolut tetap sama (Fukutake 1989:1).



Gambar 3.1 Geisha, sumber: <https://www.idntimes.com/>

Keterangan: Banyak yang mengira geisha sama dengan pekerja seks. Apalagi setelah melihat *Memoirs of a Geisha* pasti ikut mengira seperti itu. Padahal *geisha* memiliki peran penting dalam kebudayaan seni di Jepang. *Geisha* berusaha keras untuk menguasai semua jenis seni di antaranya musik klasik, tarian, permainan, dan percakapan.

Dalam keluarga petani, kelangsungan hidup secara ekonomi menjadi pertimbangan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perkawinan menjadi salah satu cara untuk merekrut anggota

keluarga baru untuk membantu pekerjaan keluarga. Prasyarat yang sangat penting untuk menjadi seorang istri adalah kapasitasnya untuk mampu bekerja keras dan kemampuannya untuk merawat anak yang dilahirkannya.

Terjadinya Restorasi Meiji (1868) yang memfokuskan pada pencapaian industrialisasi turut mengubah sebagian besar keluarga, khususnya perempuan yang tinggal di pedesaan. Kondisi pertanian yang tidak stabil memaksa mereka untuk melakukan eksodus ke perkotaan untuk mencari penghidupan yang baru, yakni bekerja di sektor manufaktur. Banyak perempuan dan gadis-gadis Jepang yang ditempatkan di pabrik tekstil, namun dengan upah yang sangat rendah. Dapat dikatakan kedudukan perempuan secara sosial dan ekonomi telah mengalami perubahan sebagai dampak peristiwa Restorasi Meiji.

C. Perempuan dalam Perspektif Budaya dan Sejarah Jepang

Dalam sejarah Jepang kuno terdapat ciri yang khas, yakni perempuan memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini dapat diketahui dari berbagai naskah kuno yang menyatakan bahwa Negara Matahari Terbit ini pernah diperintah oleh seorang kaisar perempuan hingga awal periode Muromachi. Dalam masyarakat Jepang kuno terdapat ciri yang khas, yakni masyarakat matriarkal. Pada zaman ini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai pemimpin politik dan agama (Reischauer 1982:269).⁸

Selama abad ke-7 dan 8 keadaan di Jepang mengalami perubahan yang besar-besaran sebagai akibat masuknya budaya Cina yang diikuti dengan munculnya ajaran Konfusianisme dan agama Buddha. Dalam tatanan kehidupan masyarakat, kaum aristokrat militer mulai bermunculan dengan hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah. Hingga akhir periode Heian, ketika terjadi peperangan antarkaum aristokrat militer, sedikit demi sedikit kedudukan

⁸ *Ibid.*; Rosiani, *loc.cit.*

perempuan mengalami pergeseran, karena perempuan dipandang tidak memiliki kekuatan fisik untuk berperang. Lambat laun status perempuan dikeluarkan dari struktur feodal dan menerima peran yang tidak penting dan hanya sebagai pelengkap kaum pria saja (Reischauer 1982:270).

Moore (1998:135) menyatakan bahwa kolonialisme dan kapitalisme mengubah ekonomi tradisional sedemikian rupa sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi perempuan, berdasarkan pembagian kerja secara seksual, dan terhadap berbagai bentuk pilihan ekonomi dan politik yang masih terbuka bagi perempuan.

Lebih lanjut Ortner (1974:72) mengatakan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan hanya berarti (signifikan) dalam sistem nilai yang diberi makna tertentu secara kultural dan menempatkan ketidaksetaraan seksual pada tingkat ideologi dan simbol kebudayaan. Dalam pandangan Ortner hanya ada satu hal yang sesuai dengan penggambaran tersebut, dan itu adalah 'alam' dalam pengertian yang paling umum (dalam Moore 1998).

Kebudayaan mengenal dan membuat perbedaan antara masyarakat manusia dan alam dunia. Kebudayaan berusaha mengontrol dan menguasai alam, untuk memanfaatkannya demi kepentingan sendiri. Kebudayaan, karenanya lebih superior daripada alam dunia dan berusaha untuk menyosialisasikan alam, dalam upaya untuk mengatur dan mempertahankan hubungan antara masyarakat dengan kekuatan serta kondisi lingkungan. Ortner berpendapat bahwa perempuan diidentifikasi atau secara simbolis diasosiasikan dengan alam, sedangkan pria diasosiasikan dengan kebudayaan. Oleh karena kebudayaan berusaha untuk mengontrol dan menguasai alam, maka adalah suatu hal yang 'alami' pula bahwa perempuan, karena hubungannya yang dekat dengan alam, juga harus dikontrol dan dikuasai (Moore 1998:31).

Dalam argumentasinya Ortner menjelaskan bahwa fisiologis perempuan dan fungsi reproduksinya yang khas membuatnya lebih dekat dengan alam. Pria, tidak seperti perempuan, harus mencari sarana penciptaan budaya-teknologi, simbol-simbol, sedangkan

daya kreativitas perempuan alami dapat dipenuhi melalui proses melahirkan. Pria, lebih dihubungkan dengan kebudayaan, dan dengan daya penciptaan yang diberikan oleh kebudayaan sebagai lawan dari alam. Perempuan secara alami menghasilkan dari keberadaan dirinya sendiri, sedangkan pria bebas atau dipaksa untuk menghasilkan secara fiktif, yakni melalui sarana kebudayaan dan dengan cara yang sedemikian untuk mempertahankan kebudayaan (dalam Moore 1998:32).

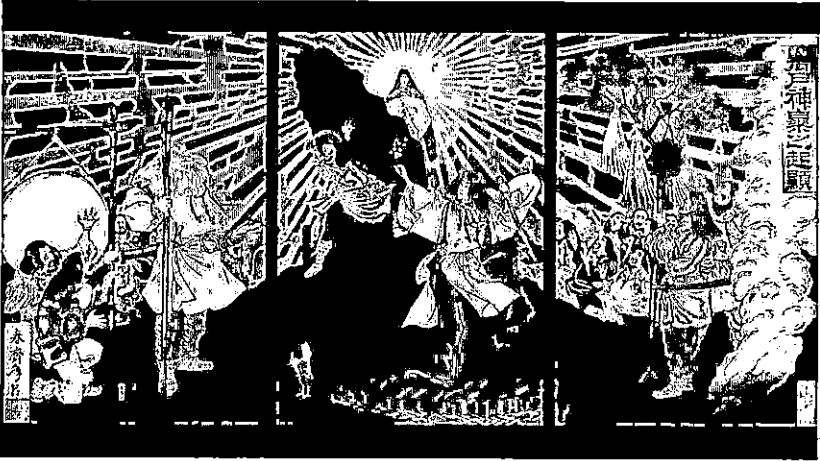
Dalam ranah domestik, perempuan terutama dihubungkan dengan pengasuh anak. Ortner (1974) mengemukakan bahwa hubungan yang tersirat antara anak dengan alam, adalah gambaran penting dalam sejumlah masyarakat. Karena perempuan dibatasi dalam konteks domestik, maka lingkup kegiatan utama mereka menjadi *intra* dan *inter* hubungan keluarga. Sebaliknya, pria diidentifikasi dengan masyarakat dan kepentingan umum/publik, sedangkan wanita tetap diasosiasikan dengan keluarga, dan karenanya dengan urusan yang khusus serta permasalahannya yang terpisah secara sosial (dalam Moore 1998:32).

D. Perempuan Jepang sebelum Zaman Meiji

Dalam mitologi Jepang kuno dikenal adanya kepercayaan atas pemujaan Amaterasu, yakni dewa matahari yang berjenis kelamin perempuan.

Pada saat itu perempuan dianggap memiliki kekuatan supranatural khusus, diberkahi kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Konsep keyakinan ini berlangsung sampai awal zaman Muromachi sehingga pada zaman ini Jepang dikenal sebagai masyarakat matriarkal.

Dalam sektor peternakan, perikanan, dan perdagangan yang menguasai lebih dari 80 % kehidupan masyarakat Jepang pada masa itu, perempuan biasa dapat menikmati kebebasan dalam sektor-sektor tersebut, termasuk dalam masalah perkawinan. Kesetaraan dan kekuasaan juga mereka dapatkan karena sebagian besar mereka bekerja dengan kondisi yang sama dengan laki-laki.



Gambar 3.2 Amaterasu, dewa matahari yang berjenis kelamin perempuan
sumber: <https://commons.wikimedia.org/>

Setelah zaman Muromachi, kehidupan masyarakat Jepang lambat laun mengalami perubahan. Hal ini terutama ditandai dengan berubahnya kedudukan perempuan dalam masyarakat semenjak Jepang memasuki zaman pemerintahan Tokugawa. Pada zaman ini pemerintah membagi masyarakatnya ke dalam kelas-kelas, apalagi kelas petani kedudukannya di bawah kelas samurai meskipun petani menduduki jumlah mayoritas dalam masyarakat Jepang. Di Jepang, masyarakat petani menduduki kelas kedua setelah masyarakat samurai. Petani di Jepang disebut *hyakusho*, memiliki arti konotasi kemiskinan dan status sosial yang rendah.



Gambar 3.3 Perempuan Jepang Zaman Muromachi
sumber: <https://i.pining.com/originals>

Oleh karena itu, petani dianggap sebagai kelas yang bernasib malang. Kaum perempuan dari golongan petani miskin diharuskan membantu pekerjaan di ladang setelah pekerjaan domestik rumah selesai dikerjakan. Keterlibatan mereka di ladang memberikan simbol bahwa perempuan sebagai calon ibu yang melahirkan anak adalah lambang kesuburan. Di dalam masyarakat petani, anak-anak perempuan dianggap sebagai beban keluarga. Status anak perempuan sangat rendah, karena mereka adalah calon istri yang akan "dijual" ketika akan menikah dan pergi menuju rumah tangganya yang baru.

Sebelum perang, perkawinan bukanlah permulaan keluarga baru, tapi lebih menggambarkan masuknya anggota baru ke dalam keluarga suami. Secara tradisional, keluarga petani Jepang berdasarkan prinsip bahwa keluarga baru yang akan mewarisi ladang kelak, hidup bersama di bawah satu atap dengan generasi yang lebih tua, orang tua suami serta kakek dan neneknya dari pihak ayahnya (Fukutake 1989:31). Pernikahan di Jepang memiliki tiga fungsi. *Pertama*, dari sudut pandang rumah tangga pernikahan adalah

cara untuk menarik anggota baru dalam rumah tangga. Seorang pengantin perempuan diharapkan akan mengisi posisi sebagai *shufu* (nyonya rumah) dan pengantin laki-laki sebagai *shujin* (tuan rumah). *Kedua*, dari sudut pandang struktur “pohon keluarga” pengantin perempuan dan pengantin laki-laki diperlukan bagi penerus garis keturunan. Kedudukan istri akan terancam apabila ia belum juga melahirkan seorang anak.

Fungsi *ketiga*, adalah penyatuan dua keluarga dari kedua belah pihak. Pernikahan menyatukan dua *ie* untuk membentuk *shinseki* yang saling menguntungkan keduanya (Lebra 1990:28).

Keluarga lebih dari sekadar anggota-anggotanya. Kata “*ie*” menjelaskan esensi bahwa keluarga sebagai satu entitas yang berlangsung terus dan dilestarikan melalui garis bapak dari generasi ke generasi (patrilineal) (Fukutake 1989:31). Dalam sistem *ie* yang dijalankan hampir di seluruh pedesaan di Jepang, harmoni menjadi hal yang dipertahankan bukan dengan mengorbankan individu, tetapi dengan menjalankan suatu sistem yang tidak memberikan kesempatan kepada pribadi-pribadi untuk berkembang.

Kedudukan perempuan sebelum perang berada jauh di bawah laki-laki. Perempuan tidak diberi kesempatan untuk sejajar dengan laki-laki. Terutama dalam masalah perkawinan, tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Dalam keluarga petani, hal terpenting bagi seorang laki-laki yang hendak menikah adalah keterampilan dan kesanggupannya dalam mengatur istri untuk mau bekerja keras di ladang.

Keadaan pribadi calon pengantin perempuan kurang dianggap penting daripada mempertemukan dua keluarga yang kira-kira sama kedudukan sosialnya, atau dengan kata lain bagaimana caranya supaya dapat menemukan calon pengantin perempuan yang kekayaannya sedikit di bawah calon pengantin laki-laki. Pertemuan antara kedua mempelai bukanlah menjadi kesempatan bagi mempelai perempuan untuk mengenal pribadi calon suaminya. Calon mempelai perempuan hanya untuk dilihat saja tanpa diberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginan tentang perkawinannya. Fungsi perempuan dalam *ie* secara praktis adalah melahirkan pewaris

berikutnya dan menambah tenaga kerja keluarga. Perempuan yang menikah dan masuk ke dalam keluarga suaminya tidak dianggap sebagai istri anaknya atau menantu, melainkan bagian *ie* suaminya. Calon pengantin perempuan harus lebih tunduk kepada kepala rumah tangga daripada kepada suaminya. Ia harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan keluarga sebagai menantu perempuan dan bukan sebagai istri. Apabila ia gagal, kepala rumah tangga atau orang tua suami dapat secara sepihak memintakan cerai.

Sangat jarang terjadi bahwa segera setelah menikah, nama calon pengantin langsung didaftarkan ke dalam keluarga suaminya. Apabila ia sudah dapat menunjukkan kesesuaian dengan lingkungan keluarga dengan melayani ibu dan bapak mertua, atau setelah ia melahirkan anak, barulah status perkawinannya menjadi sah. Kelahiran anak adalah langkah awal untuk menjamin kelestariannya dengan keluarga itu (Fukutake 1989:41).

Banyak sekali adat kebiasaan sosial yang terungkap dalam pepatah, "orang tua tidak dapat diganti, tetapi istri dapat diganti kapan saja bila diinginkan". Oleh karena itu sebagai seorang istri, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk dapat melayani mertua perempuan dan tidak membuat marah saudara-saudara perempuan suaminya. Apabila ia gagal maka statusnya sebagai istri akan susah dipertahankan. Akibatnya, rasa kasih sayang antara suami istri hampir tidak ada, cukuplah sebuah perkawinan hanya gambaran persetujuan kepala rumah tangga atau orang tua saja. Sebagai istri, ia harus tidur paling akhir dan bangun paling awal. Ia harus menyiapkan segala keperluan *ie* suaminya, terutama pelayanannya kepada mertua. Dalam segi kehidupan sehari-hari, misalnya kebiasaan makan dan mandi dapatlah tergambar betapa rendahnya kedudukan perempuan dalam keluarga.

Dalam masa pertanian yang sibuk, seorang istri sering sangat kelelahan dan hari ketika ia berkesempatan bertemu dengan orang tuanya adalah saat yang dinanti, bukan hanya untuk melepaskan kelelahannya secara fisik, tapi juga menjadi penghiburan secara psikologis dalam melepaskan beban sementara dalam keluarga suaminya. Keadaan ini akan sedikit berubah manakala ia melahirkan

anak dan waktunya akan tercurah sebagai ibu baru, serta hatinya akan sedikit terhibur dengan kelahiran anak.

Dengan kelahiran anak maka kehidupan sebagai 'pengantin muda' akan berlalu. Suaminya yang sudah menjadi kepala rumah tangga, dan ia sendiri menjadi ibu rumah tangga, secara otomatis kedudukannya akan aman. Menjadi ibu rumah tangga adalah sejajar dengan digantikannya bapak oleh anaknya, dan ini berarti istri akan menyandang kewajiban dan hak matriarkal dari *ie*. Hari-hari bekerja di ladang dan di rumah telah membuahkan kedudukan penting ini. Namun, ia harus tetap taat kepada suaminya, dan meskipun ia telah menjadi ibu rumah tangga, kedudukannya masih jauh lebih rendah daripada kekuasaan kepala rumah tangga. Hal yang jauh lebih penting adalah apabila ia sudah menjadi tua dan mencapai kedudukan sebagai nenek yang sudah pensiun, atau apabila suaminya meninggal dan anaknya menjadi kepala rumah tangga, maka kedudukannya dalam keluarga akan turun lagi (Fukutake 1989:43). Kini ia harus menuruti perintah kepala rumah tangga yang baru, yaitu anaknya dan dari istri anaknya, dahulu si pengantin yang berada di bawah kekuasaannya.



Gambar 3.4 Perempuan elite golongan "samurai" di Jepang.
sumber: <https://media.japanpowered.com>

Berbeda halnya dari kedudukan perempuan dari golongan samurai. Selama berabad-abad kehidupan perempuan elite (terutama samurai) diatur oleh etika Konfusianisme. Pengaruh ajaran Konfusianisme dari Cina menempatkan perempuan pada kedudukan yang rendah, diskriminasi antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Jepang dirasakan sangat kuat pada zaman feodal atau sebelum Restorasi Meiji. Meskipun setelah Perang Dunia Kedua ditetapkan Undang-Undang baru yang secara tegas tidak membenarkan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, namun kenyataannya hukum ini berjalan sangat lamban.

Hubungan Cina-Jepang dimulai pada abad ke-5, apalagi pada zaman ini kebudayaan dari Cina Selatan masuk ke Jepang seperti kesusastraan, ilmu falak, barang-barang Cina dan sistem menenun. Agama Buddha yang masuk dalam waktu yang sama pun turut memengaruhi kehidupan rakyat Jepang. Dari berbagai pengaruh tersebut, filsafat Konfusianisme yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Jepang, terutama peranan perempuannya. Ajaran Konfusianisme memberikan tekanan pada corak kehidupan patriarkal, apalagi perempuan hanya dipandang sebagai sosok yang melahirkan anak, melanjutkan keturunan daripada sebagai teman hidup. Tetapi perempuan dari kalangan petani dianggap lebih memiliki kebebasan daripada perempuan dari kalangan atas, yang sepenuhnya menjadi pelayan yang patuh dan menjadi permainan pria. Seks semata-mata hanya dianggap sebagai mekanisme untuk mempertahankan kelanjutan keluarga sehingga menurut ajaran ini perempuan adalah kaum yang lemah, tidak berdaya dan hanya penerus keturunan. Dalam Reishauer (1982:270) dikatakan:

Filsafat Kong Fu Tse membatasi kebebasan kaum wanita, dan memaksa mereka untuk tunduk sepenuhnya kepada kaum pria. Kaum wanita, yang dalam zaman kesatria ternyata kurang mampu bertempur dibandingkan dengan pria, berangsur-angsur dikeluarkan dari stuktur feodal dan menerima peran yang tidak penting serta hanya sebagai pelengkap kaum pria. Ajaran Kong Fu Tsé yang merupakan warisan masyarakat patriarkal kuat didominasi oleh kaum pria di Cina.

Ajaran Konfusianisme menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang tinggi. Mereka mempunyai tugas mulia yang tidak dapat digantikan oleh perempuan, misalnya dalam melakukan upacara penghormatan kepada leluhur. Pengaruh ajaran tersebut akan tampak pada kenyataan bahwa mempunyai anak, terutama laki-laki bukan hanya memberikan kepuasan secara emosional, namun kehidupan akan dianggap gagal apabila tidak ada penerus yang akan mewariskan garis keluarga.

Okamura (1983:1) menyatakan bahwa pada hakikatnya perempuan berderajat lebih rendah daripada laki-laki sehingga peranan perempuan adalah untuk mengabdikan kepada laki-laki. Robin Moowry (1983:20) menambahkan pada sebuah ilustrasi karya moral gaya Konfusianisme yang terkenal, yakni Onna Daigaku yang ditulis pada 1672 oleh Kaibara Ekiken, dijadikan sebagai pedoman bagi kaum perempuan Jepang pada zaman feodal, berisikan doktrin tiga kepatuhan (*sanju kun*):

Seorang wanita tidak memiliki jalan kemerdekaan sepanjang hidupnya. Ketika ia muda, ia harus patuh kepada ayahnya. Ketika ia menikah, ia harus patuh kepada suaminya, dan ketika ia menjanda ia harus patuh kepada anak laki-lakinya.

Gagasan tentang Onna Daigaku masih terus berlaku, baik secara sadar maupun tidak dalam sikap dan sifat sebagian besar perempuan dewasa Jepang. Di dalam Onna Daigaku terdapat lima macam kelemahan paling buruk yang harus dihindari oleh perempuan, yaitu ketidaktaatan, sikap tidak puas, fitnah, sifat cemburu dan kebodohan.

Dalam kehidupan tradisional, perempuan Jepang sejak kecil selalu dididik untuk tugas-tugas domestik seperti menenun, menjahit, memasak, dan mencuci. Dalam bidang kesenian mereka juga diajarkan beberapa keahlian khusus seperti membakar dupa, merangkai bunga dan upacara minum teh. Kaum perempuan selalu dinasihati agar senantiasa mengembangkan "hati yang bijak" untuk berusaha mencapai "satu-satunya kualitas yang layak bagi seorang perempuan", yaitu kepatuhan yang lembut, kesederhanaan, kemurahan hati, dan ketenangan. Konfusianisme hanya menyisahkan

ruang kecil bagi perempuan yang memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk menjamin keturunan.

Perkawinan pada zaman feodalistik biasanya tidak berkaitan dengan cinta dan kasih sayang, melainkan lebih kepada unsur politik. Hal ini disebabkan laki-laki dapat mencari cinta dan kasih sayang di tempat yang lain. Peran seorang istri sebagai gambaran dari "perut yang dipinjam untuk melahirkan seorang putra". Pada zaman feodal seorang anak perempuan benar-benar dididik tentang etika-etika feodal dan dijaga secara ketat oleh orang tuanya agar kelak tidak mempermalukan orang tuanya, suami, beserta keluarganya. Ia harus selalu ingat bahwa seorang istri harus memandang suami sebagai tuannya dan harus melayaninya dengan seluruh kebaktian dan ketundukannya, tidak memandang rendah atau menganggap remeh suaminya.

Sebagai seorang istri ia harus bangun lebih pagi daripada anggota keluarga yang lain dan tidur larut malam setelah semua urusan pekerjaan rumah tangga selesai. Ia yang harus menggelar dan menggulung tempat tidur (*futon*) setelah selesai digunakan oleh seluruh anggota keluarganya. Selain itu, ia juga yang harus mencuci dan memasak untuk seluruh anggota keluarganya. Pada waktu makan bersama keluarga, seorang istri dan anak perempuan lainnya akan mengambil posisi duduk di dekat pintu yang menghadap ke jalan masuk atau di belakang mengelilingi tungku masakan, dan akan memakan makanan sisa dari suaminya. Posisi suami sebagai kepala rumah tangga menjadikan ia sebagai laki-laki yang harus diutamakan, dan seluruh anggota keluarga wajib menunjukkan rasa hormat terhadap suaminya. Seorang istri harus mengabdikan dirinya kepada suami, tanpa memikirkan kepentingan dirinya demi kesejahteraan suami dan keluarga suami di bawah pengawasan yang ketat dari ibu mertua.

Di dalam masyarakat tradisonal Jepang, meskipun sudah menikah biasanya seorang suami masih diperbolehkan mencari kesenangan biologisnya di tempat yang lain tanpa harus sembunyi-sembunyi. Mereka diizinkan memelihara seorang pelacur, baik di dalam maupun di luar rumah, sepanjang dia tidak melalaikan

kewajibannya kepada keluarganya, sementara seorang istri harus setia kepada suami dan membiarkan suaminya berbuat yang menyenangkan hatinya. Bahkan seorang istri harus rela menyiapkan pakaian dan membayar rekening suaminya untuk kunjungannya ke tempat-tempat pelacuran.

Pada periode Tokugawa, kondisi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lazim dilakukan. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki hak yang lebih luas daripada istri. Misalnya seorang istri tidak diperbolehkan berzina, dan jika hal itu terjadi kemudian diketahui oleh suaminya, maka hukumannya adalah perceraian atau kematian.

Dapat dikatakan perkawinan dilakukan berdasarkan kebutuhan keluarga, dan bukan berdasarkan cinta. Kasih sayang suami istri tidak diutamakan dalam kehidupan perkawinan. Dalam hal ini kesetiaan perempuan ditempatkan dalam tataran rumah tangga (domestik). Jika perempuan berhasil dalam lingkungan domestik, yakni mengurus rumah tangga, mendidik anak dengan baik, maka secara tidak langsung ia telah memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi negara (kaisar). Seorang perempuan yang menikah lalu memiliki anak, maka peranan dalam merawat anaknya adalah pengorbanan yang penting bagi identitasnya sebagai seorang ibu. Seorang perempuan harus mampu menjadi istri yang baik dalam melayani dan menyenangkan suaminya, serta menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Di sepanjang hidupnya perempuan Jepang melaksanakan loyalitas untuk keluarga. Dia mengemban tugas yang sangat berat dan bukan sesuatu yang dianggap mudah untuk dilaksanakan. Tanggung jawab untuk menahan diri dan sikap pengorbanan telah ditanamkan pada dirinya sejak dini. Pengetahuan yang mereka dapatkan secara turun-temurun bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan menjadikan anak-anaknya menjadi generasi yang berkualitas.

Perempuan dalam Konsep Ajaran Buddha

Ketika Agama Buddha masuk ke Jepang pada abad ke-6 (538 Masehi) dari Cina melalui Korea, pada teks-teks Buddhis yang asli selalu menunjukkan ambivalensi tentang perempuan. Beberapa teks

terkesan menunjukkan persamaan perempuan, sedangkan yang lainnya menyatakan bahwa perempuan secara inheren tidaklah suci dan harus direinkarnasi sebagai laki-laki sebelum mencapai nirwana. Perempuan-perempuan yang sudah tercerahkan kemudian muncul sebagai penyokong Buddhisme di sutra-sutra. Namun, dalam tulisan-tulisan sutra ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan berikutnya memberikan penekanan untuk mendukung ajaran patriarki.

Meskipun memiliki dukungan terhadap perempuan, namun kaisar-kaisar dalam periode Nara ternyata telah mengesampingkan kaum perempuan dari harapan mencapai surga. Hal ini berarti bahwa pada diri perempuan terdapat kerusakan dan kotoran yang harus dibersihkan. Seiring dengan perkembangan sekte-sekte Buddhis yang baru, doktrin-doktrin Buddhis juga dimodifikasi yang kemudian mengizinkan perempuan untuk mencapai kebuddhisan. Namun, mereka masih sangat dibatasi ruang gerakannya. Seperti yang dikatakan oleh Pendeta Shinran pada abad ke-13:

Selama zaman feodalistik, kaum wanita selalu diberikan doktrin-doktrin mengenai kedudukan mereka menurut ajaran Buddha. Sekte Jodo dan Sodo Shin mengajarkan bahwa pada hakikatnya semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan status sosial, seks maupun moral untuk mencapai reinkarnasi menuju surga suci, namun hal ini hanya dapat terjadi apabila mereka terpenggil dalam Kasih Amidha Buddha.

Ada pula doktrin yang mengajarkan sebagai berikut ini.

Sekalipun suamimu tampak lebih rendah daripada kamu, tetapi laki-laki merupakan penjelmaan (personifikasi) dari Buddha dan memiliki rasa pengharapan dan hukuman serta rasa terima kasih. Kamu harus selalu ingat bahwa kamu telah menikahi Shanto Buddha (Robin-Mowry 1983:23).

Kaum perempuan pada dasarnya memiliki sifat dengki dan jahat. Oleh karena itu, mereka harus membersihkan diri dari sifat berdosa ini. Tanpa upaya ini, mereka tidak dapat diterima ke dalam dunia Buddhis.

E. Perempuan Jepang Pasca-Zaman Meiji

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1898 telah ditetapkan hak kepala rumah tangga dalam keluarga-keluarga Jepang. Kepala rumah tangga memiliki kuasa penuh dalam mengontrol aset kekayaan keluarga dan mengatur seluruh anggota keluarga. Sistem pewarisan keluarga diturunkan oleh anak laki-laki tertua. Istri tidak memiliki kewenangan secara hukum dan praktik suami untuk memelihara selir dilegalkan secara hukum. Hal ini memungkinkan bagi suami untuk bertindak sesuai dengan hukum, yakni mencari kesenangan dengan perempuan lain tanpa persetujuan istri, sampai apabila terjadi kelahiran anak dari perempuan yang bukan dari istri sahnya. Hal ini bukan hanya menjadi sesuatu yang legal bagi laki-laki untuk merendahkan perempuan, namun juga menjadi kesenangan seksual bagi laki-laki. Lebih jauh lagi dalam hukum pidana yang ditetapkan pada tahun 1908 dikatakan bahwa perzinahan dianggap sebagai sebuah kejahatan. Dalam kasus apalagi seorang istri terlibat dalam perzinahan, dia dan pasangannya akan dihukum berdasarkan laporan pengaduan suaminya. Namun sebaliknya, bila suami terlibat perzinahan, dia tidak dihukum meskipun pasangannya berstatus istri orang lain. Jika pasangannya bukan istri orang lain, perbuatan seksual suaminya tersebut akan diberikan sanksi apabila terdapat buktinya (Yoshimi 1995:201)

Standar ganda yang memungkinkan seorang laki-laki mengumbar seksual namun menuntut kesucian perempuan memunculkan pembagian kerja secara seksual pula. Aturan bahwa laki-laki tidak dapat memiliki hubungan seksual dengan perempuan yang sudah menikah—namun seiring dengan pengakuan hukum selir, menjadikan sistem prostitusi yang diabadikan dalam hukum negara—adalah warisan yang tidak dapat dihindari mulai awal zaman modern. Dalam perspektif ini, perempuan dipaksa untuk diasumsikan dalam hal berikut, yakni istri sebagai perempuan yang melahirkan, pelacur sebagai kesenangan dan selir sebagai orang yang berada di antara istri dan pelacur. Karayukisan menggambarkan perwujudan dari perempuan Jepang yang hidup dalam penderitaan di bawah tekanan dua sistem ganda, yaitu masalah gender dan perbedaan kelas.

Akar dari tekanan ini adalah ajaran dari Konfusianisme mengenai sistem patriarki, yang berasal dari Cina dan masuk ke Jepang pada abad ke-7. Pemikiran Konfusianisme memberikan pengaruh pada struktur sosial mulai abad ke-17, dan hal ini menjadi kerangka pemikiran pada seluruh hubungan sosial di bawah pemerintahan Tokugawa (1600–1868). Konsep Konfusianisme baru diadopsi oleh rezim Tokugawa yang menekankan pada pemenuhan satu kewajiban sosial dalam bentuk lima hubungan dasar, yakni tuan dan pengikut, ayah dan anak, suami dan istri, saudara yang lebih tua dengan saudara yang muda serta hubungan antarteman. Semua saudara kandung harus patuh dan mengabdikan kepada anak laki-laki tertua, yakni seseorang yang diharapkan dapat menjadi pewaris keluarga dan menangani masalah-masalah keluarga. Kepatuhan seorang perempuan yang pertama harus diberikan kepada ayah, kemudian kepada suami, dan setelah ia tua kepada anak laki-lakinya.

Sistem superioritas seorang laki-laki dalam ajaran ini mengizinkan dia untuk mengeksploitasi seluruh kekuatan perempuan dalam hal finansial, fisik, seksual, dan emosi.

F. Perempuan Era Meiji (1868–1912) dan Sesudahnya

Di era Meiji yang menandai awal modernisasi Jepang, bagaimanapun budaya kelas samurai pada zaman modern telah merambah ke seluruh masyarakat dan perbedaan kelas yang kaku secara resmi dihapuskan. Sebagai akibatnya, laki-laki secara keseluruhan kehilangan kekuasaan dan memiliki kesetaraan dengan perempuan. Dengan modernisasi, integrasi dan sentralisasi, masyarakat Jepang berkembang, dan laki-laki mendominasi, masyarakat secara vertikal terstruktur menjadi mapan, meninggalkan perempuan keluar *mainstream*, meskipun mereka terus memainkan peran yang kuat dalam masyarakat.

Analisis terhadap masyarakat Jepang telah cenderung terfokus pada masyarakat sesuai dengan struktur dominan ini dan sering mengabaikan peran perempuan. Nakane Chie, seorang ahli yang meneliti tentang struktur masyarakat Jepang menjelaskan bahwa masyarakat Jepang tersusun sangat terintegrasi dan hierarkis (vertikal). Dalam kehidupan kelompok atau organisasi, nilai-nilai yang dianut

adalah dominasi kehidupan laki-laki dan mengabaikan kehidupan perempuan. Kesadaran akan keluarga yang semakin menurun membawa surutnya kekuasaan kepala *ie* yang pada zaman sebelumnya menjadi wakil keluarga maupun pemimpin anggota-anggota keluarga itu. Peralihan dari "kepala keluarga" (*koshu*) menjadi "kepala rumah tangga" (*setainushi*) adalah gambaran yang berkaitan dengan runtuhnya posisi dominan kepala patriarkal, ayah dan anak laki-laki. Dalam peralihan dari keluarga yang berorientasi pada anak laki-laki kepada keluarga yang berorientasi pada hubungan suami istri dengan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan sebagai pedoman dasarnya, maka kedudukan perempuan pada umumnya meningkat. Walaupun perempuan belum mencapai kedudukan yang sama seperti laki-laki, tetapi dalam keluarga kedudukan perempuan menjadi lebih kuat daripada sebelum perang. Selain secara tegas memberikan jaminan terhadap persamaan hak di muka hukum dan menentang kesenjangan hukum berdasarkan jenis kelamin, Undang-Undang Dasar Jepang yang menandai perubahan ke arah yang lebih modern juga memberikan tempat terhadap hak perseorangan dan persamaan hak di antara laki-laki dan perempuan di lingkungan keluarga. Dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Jepang disebutkan bahwa:

Perkawinan seyogianya didasarkan hanya atas dasar persetujuan bersama dan seyogianya dipelihara atas dasar kerja sama hak antara suami dan istri. Sehubungan dengan pemilihan pasangan, penetapan hak milik, warisan, pemilihan tempat tinggal, perceraian dan berbagai persoalan lain yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga, hukum-hukum akan dilaksanakan berdasarkan penghormatan atas perorangan dan persamaan hak antara kedua jenis kelamin (Okamura 1980:4)

Pasal ini memberikan dorongan terhadap usaha untuk mengubah bagian-bagaian tertentu dalam bab-bab tentang "Keluarga dan Warisan" dari hukum sipil yang dinilai bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar tersebut. Meskipun Hukum Tentang Keluarga telah diresmikan pada tahun 1898 dan pemerintah Meiji berusaha keras mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara konstitusi modern Jepang, namun isi dari Hukum Tentang Keluarga tidaklah bersifat modern. Hal ini disebabkan kelas yang berkuasa pada saat itu berasal dari kelas kesatria zaman lampau dan

80% masyarakat Jepang adalah petani. Kerangka perubahan dari bagian-bagian Hukum Sipil tentang "Keluarga dan Warisan" secara jelas telah diuraikan di dalam ke-10 pasal Undang-Undang untuk Penetapan Sementara Hukum Sipil bagi Pelaksanaan Konstitusi Nasional Jepang. Ke-10 pasal tersebut meliputi berikut ini.

1. Memberikan landasan sementara bagi penetapan Hukum Sipil yang didasarkan atas penghormatan hak perorangan dan persamaan hak di antara laki-laki dan perempuan.
2. Menghapuskan semua ketentuan tentang ketidakmampuan para istri dan praktik diskriminasi yang terjadi dalam penetapan hak kaum ibu.
3. Menghapuskan ketentuan tentang adanya kepala rumah tangga dan sistem kekeluargaan patriarkal.
4. Menghapuskan adanya keharusan persetujuan orang tua bagi perkawinan atau perceraian di antara perorangan yang akil balig, termasuk mereka yang diadopsi.
5. Menetapkan bahwa pemilihan tempat tinggal didasarkan atas persetujuan bersama suami istri, bahwa hak milik dan hak warisan untuk kedua jenis kelamin berkedudukan sama, dan kedudukan kedua jenis kelamin dalam masalah perceraian adalah sama.
6. Kedua suami istri mempunyai hak yang sama sebagai orang tua. Dalam kasus perceraian, apabila ayah menuntut haknya terhadap anak, keputusan tentang siapa yang memperoleh hak tersebut ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama ayah dan ibu, dan apabila persetujuan tidak tercapai maka keputusan terakhir ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan berhak mengadakan perubahan terhadap hak orang tua demi terpeliharanya kepentingan anak.
7. Ketentuan tentang penggantian kepala keluarga dihapuskan, sedangkan ketentuan tentang hak milik diadakan.
8. Penetapan tentang sistem pewarisan bersama. Suami atau istri adalah pewaris.
9. Penetapan sistem pembagian warisan.
10. Semua ketentuan dari berbagai hukum lainnya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum ini dinyatakan tidak berlaku (Okamura 1980:6).

Box. 3.1**Zaman Meiji (1867 – 1912)**

Masa meiji (1867 – 1912) adalah salah satu periode yang paling istimewa dalam sejarah Jepang. Di bawah pimpinan kaisar Meiji, Jepang bergerak maju sehingga hanya dalam beberapa dasawarsa mencapai pembentukan suatu bangsa modern yang memiliki perindustrian modern dan lembaga-lembaga politik modern. Pada tahun-tahun pertama pemerintahannya, kaisar Meiji memindahkan ibu kota kekaisaran dari Kyoto ke Edo. Edo pun berganti nama baru menjadi Tokyo (ibu kota Timur). Diumumkanlah undang-undang dasar yang menetapkan sebuah kabinet dan badan-badan legislatif. Golongan-golongan masyarakat selama zaman Edo yang membuat masyarakat menjadi terbagi berdasarkan kasta pun dihapuskan. Kaisar Meiji membawa pencerahan dalam membimbing bangsanya melewati peralihan yang sangat cemerlang. Lalu, berakhir pada saat wafatnya kaisar Meiji pada tahun 1912.

Surajaya, I Ketut (ed.). 2001. "Pengantar Sejarah Jepang". Jakarta.

Dalam ketetapan yang baru tersebut menetapkan bahwa hak milik adalah kepemilikan pribadi masing-masing, dan dalam hal kepemilikan yang tidak jelas, maka kepemilikan tersebut dikuasai bersama. Untuk pasangan yang telah menikah, masalah tempat tinggal bukan lagi menjadi keputusan suami, namun sudah menjadi keputusan bersama. Selain itu, dalam hukum yang lama dasar perceraian adalah apabila istri melakukan perzinaan, akan tetapi dalam kasus sang suami hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Kedudukan perempuan mulai meningkat dan perkawinan membawa suasana baru bagi pasangan pengantin. Makin banyak perkawinan yang berdasarkan cinta kasih dan didahului dengan saat pengenalan. Banyak pasangan yang menyelenggarakan pesta perkawinan di balai pertemuan atau hotel di kota dalam suasana yang meriah. Selain itu, makin banyak pasangan pengantin baru yang melakukan bulan madu, untuk menguatkan hubungan cinta dan merundingkan masa depan bersama suami. Kedudukan istri yang lebih kuat juga adalah dukungan yang penting untuk perkembangan kepribadian anak-anaknya.

Meskipun telah muncul aliran demokratis pada zaman Meiji dan Taisho (1868–1925) dan sejak berakhirnya Perang Dunia II, pengabdian dan kesetiaan kepada kepala rumah tangga adalah hal yang dianggap wajar dan bernilai tinggi. Pada tahun 1948 barulah seorang perempuan diberi jaminan persamaan hak dengan kaum laki-laki dalam lingkungan kehidupan keluarga. Selain itu, dalam kehidupan suami istri yang baru menikah, telah terjadi perubahan pada saat tinggal di rumah keluarga suami. Makin banyak kaum istri yang tidak pernah mengalami hidup di bawah tekanan ibu mertua, karena sebagian besar pasangan yang telah menikah langsung menempati rumah tinggal yang baru. Tetapi di Jepang, secara keseluruhan membangun rumah sendiri setelah menikah belumlah sepenuhnya adalah cara hidup yang mapan. Oleh karena itu, banyak dari perempuan Jepang yang sudah menikah memutuskan untuk bekerja demi mencari biaya tambahan bagi rumah tangganya.

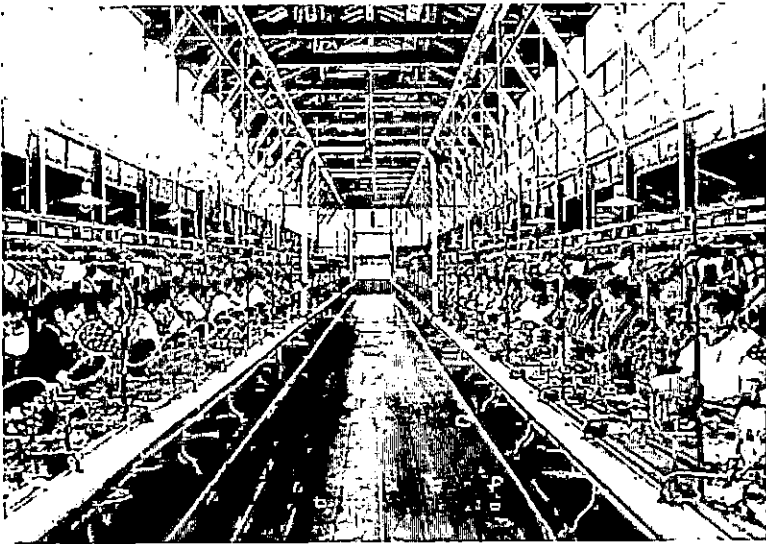
1. Zaman Taishō

Zaman Taishō (大正) atau Periode Taishō (30 Juli 1912–25 Desember 1926) adalah salah satu nama zaman pemerintahan Kaisar Jepang sewaktu Kaisar Taishō (Yoshihito) memerintah Jepang, sesudah zaman Meiji dan sebelum zaman Shōwa. Kaisar Yoshihito tidak berada dalam kondisi kesehatan yang baik, sehingga terjadi pergeseran kekuatan politik dari negarawan senior (*genrō*) ke Parlemen Jepang dan partai-partai politik. Oleh karena itu, periode ini juga disebut kurun gerakan liberal yang disebut demokrasi Taishō. Istilah demokrasi Taishō dipakai untuk membedakan periode ini dari kekacauan zaman Meiji dan paruh pertama zaman Shōwa ketika Jepang jatuh ke dalam militerisme.

Dapat disimpulkan bahwa pada era Meiji secara resmi wanita kehilangan hak legal mereka sebagai pribadi. Melalui sistem *ie* yang diberlakukan melalui hukum perdata 1898 mereka tunduk pada kepala keluarga masing-masing. Perkawinan dilaksanakan atas kepentingan *ie* (keluarga) dan seorang wanita yang menikah memasuki *ie* suaminya. Kehendak orang tua, terutama kepala

keluarga adalah pertimbangan utama.⁹

Meski secara hukum kedudukan mereka bergantung pada kepala keluarga namun Amino seperti dikutip *Wikipedia* menyatakan bahwa secara umum wanita memiliki status yang setara. Sistem ini tidak lain adalah sebuah sandiwara di depan umum saja. Era Meiji melalui deklarasi pemerintahannya menyatakan bahwa semua kelas akan mendapat kesempatan untuk mencapai cita-cita yang adil dan rasa puas¹⁰. Namun pada pemerintahan Meiji justru para petani mendapati hidup mereka mengalami kesulitan yang hebat. Dari kesulitan inilah muncul *karayukisan*, pelacur-pelacur Jepang di berbagai negeri Asia Timur dan Asia Tenggara.¹¹



Gambar 3.5 Industri Sutra Suzaka pada puncaknya dan berdirinya Kerajaan Pabrik Sutra Yamamaru Kumi. Wanita Jepang banyak dipekerjakan di pabrik sutra pada era Meiji.

<https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=594b26ca5ffd9>

⁹ Tadashi Fukutake, *Masyarakat Jepang Dewasa Ini* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 41-45.

¹⁰ Ishii, *Sejarah Institusi Politik Jepang*, hlm. 127.

¹¹ Sri Pangestoeti, "Dari Kyushu ke Ran'in: Karayuki-san dan Prostitusi Jepang di Indonesia 1880-1920," *Humaniora* Volume 21, Nomor 2 (Juni 2009), hlm. 141.

Pelacuran ini tentu membawa malu bagi Jepang yang sedang berusaha mengejar bangsa Barat sehingga pemerintah Jepang berusaha menghentikan pengiriman *Karayukisan* sejak 1920-an. Meskipun begitu *karayukisan* membuka jalan bagi penetrasi ekonomi Jepang ke Asia Tenggara pada dekade sesudahnya.¹²

Pada waktu kurun ini perempuan selain bekerja dalam usaha keluarga juga mulai bekerja di pabrik-pabrik. Namun kesempatan kerja mereka terbatas, hanya pabrik-pabrik sutra saja yang menerima mereka. Pada 1929 ketika Amerika menghentikan impor sutra dari Jepang mereka kehilangan pekerjaannya. Ini menyebabkan kesulitan keuangan bagi banyak keluarga.¹³

Pada waktu kurun ini terlihat kontradiksi. Budaya patriarki Jepang dilegalkan oleh hukum perdata dengan konsep *ie*. Dalam praktiknya wanita dipaksa bekerja untuk mencukupi keluarga, bahkan menjadi eksploitasi untuk keluarga¹⁴. Hal ini tentu bertentangan dengan ide patriarki bahwa wanita seharusnya berperan domestik dalam keluarga.

2. Masa Perang/Awal Showa

Pada awal waktu kurun Showa Jepang berada dalam peperangan. Pemerintahan sipil yang diambil alih oleh militer mengalihkan perhatian kepada usaha-usaha penaklukan (perang) Asia Timur. Secara hukum tidak ada perubahan signifikan terhadap hak-hak perempuan. Justru terjadi eksploitasi perempuan (sebagaimana warga negara lainnya) oleh negara atas nama mobilisasi nasional untuk perang.

Tugas domestik perempuan tidak pernah lepas. Mereka adalah yang menyiapkan para pemuda yang nantinya dikirim untuk perang ke luar negeri. Jenderal Hideki Tojo pernah berkomentar bahwa ibu yang bangun pukul empat untuk mempersiapkan anaknya sekolah

¹² "Karayuki-san," Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Karayuki-san> (diakses 3 Desember 2015).

¹³ Jery Korn dkk, *Jepang Tersulut Perang* (Jakarta: Tira Pustaka, 1986), hlm. 13.

¹⁴ Tadashi Fukutake, *loc.cit.*

adalah "Tbu seperti itulah yang akan memenangkan perang."¹⁵ Di kota-kota diselenggarakan lomba bayi sehat untuk meningkatkan dan menegaskan peran mereka sebagai ibu.¹⁶

Namun peran domestik sebagai ibu saja tidak cukup. Jepang telah kehilangan tenaga kerja prianya yang harus dikirim berperang ke berbagai penjuru Asia Timur dan Asia Tenggara. Maka para ibu dan orang tua harus masuk dalam perkumpulan rukun tetangga *tonarigumi* yang bertugas menjaga keamanan dan sebagai pemadam kebakaran. Di sisi lain, pekerjaan kasar para pria mulai dikerjakan oleh para perempuan, baik yang sudah dewasa maupun yang masih bersekolah.¹⁷

Ini memunculkan ungkapan mengenai kedudukan perempuan "sejak perang kaos kaki nilon dan perempuan semakin kuat."¹⁸ Perempuan-perempuan Jepang memang memiliki status baru yang lebih baik dalam keluarga, namun tidak dapat dimungkiri ini terjadi dalam mobilisasi untuk perang.

3. Masa Pasca-Perang

Mobilisasi pada saat perang menjadikan perempuan-perempuan Jepang terbiasa bekerja di luar rumah. Sekembalinya para pria mereka tidak begitu saja bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga lagi. Hal ini bersamaan dengan kebijakan nasional Jepang yang menginginkan pemulihan cepat pascaperang yang membutuhkan tenaga kerja yang besar.¹⁹ Hal ini mendorong para perempuan untuk tetap bekerja.

Kazuko Sato dkk. berpendapat bahwa era pascaperang adalah era modern sebenarnya bagi para perempuan sebab baru pada saat ini kesetaraan hak mereka dijamin oleh konstitusi. Dengan ini hak sipil

¹⁵ Jerry Korn dkk, *op.cit.*, hlm. 55.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.72.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.114-121.

¹⁸ Fukutake, *op.cit.*, hlm. 43.

¹⁹ "Kyariaūman," Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Kyariaūman> (diakses 6 Desember 2019).

mereka yang sebelumnya bergantung pada *ie* menjadi hak pribadi masing-masing individu. *Ie* yang ialah keluarga tiga generasi (orang tua, anak, dan cucu) pecah dan terbentuk keluarga inti dengan suami dan istri yang kedudukannya setara.²⁰

Pasca-perang di Jepang para perempuan mendapatkan kesempatan karier, namun kesempatan ini tidaklah setara. Melalui UU Standar Pekerja, para pekerja perempuan mendapatkan perlindungan dari kerja lembur dan bahaya serta mendapat libur menstruasi. Ini menghalangi promosi namun memudahkan perempuan yang hanya bekerja sebelum menikah.²¹

Selain hambatan akibat kesempatan yang hilang tadi, banyak perusahaan tidak memberikan jalan promosi kepada perempuan. Pelatihan ketika bekerja (*in-job training*) dalam berbagai pekerjaan yang menjadi prasyarat promosi hanya diberikan pada karyawan pria. Bahkan bila diperlukan perusahaan akan mengirim mereka pada pendidikan lanjutan (S-2). Namun pekerja perempuan diharapkan berhenti ketika menikah sehingga tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Mereka yang mengharapkan promosi serupa harus mengorbankan kesempatannya untuk menikah.²²

Kemajuan ekonomi dan teknologi Jepang memberikan kemudahan bagi para ibu rumah tangga. Tugas-tugas domestik mereka menjadi ringan dengan adanya alat elektronik, para ibu rumah tangga kini memiliki banyak waktu luang. Maka muncullah ibu pendidikan (*kyoiku mama*), para ibu yang mencurahkan perhatiannya pada pendidikan anak²³. Perempuan (ibu rumah tangga) yang tidak berkerja menunjukkan kelas sosial mereka yang lebih terjamin.

²⁰ Kazuko Sato, Mitsuyo Suzuki dan Michi Kawamura, "Changing Status of Women in Japan," *International Journal of Sociology of the Family*, Volume 17, Nomor 1 (Musim Semi 1987), hlm. 88.

²¹ "Kyariaūman," Wikipedia.

²² Patricia G. Steinhoff dan Kazuko Tanaka, "Women Managers in Japa," *International Studies of Management & Organization*, Volume 16, Nomor 3/4 (Musim Gugur, 1986 - Musim Dingin, 1987), hlm. 111-112.

²³ Fukutake, *op.cit.*, hlm. 49.

Di sisi lain, terdapat pula keluarga yang menerima gaji lebih rendah sehingga suami dan istri harus bekerja. Apakah istri boleh bekerja atau tidak bukanlah pertanyaan, sang istri harus ikut menutup kekurangan pendapatan suaminya. Ia dapat bekerja setidaknya dari rumah atau kembali ke perusahaan setelah anaknya memasuki usia sekolah. Ini menyebabkan munculnya fenomena "Kurva M," yang menunjukkan turunnya persentase perempuan yang bekerja pada usia mengurus anak.²⁴ Bila sang ibu bekerja di luar maka muncullah "anak-anak kunci," anak-anak yang membawa kunci rumahnya untuk kemudian menunggu kepulangan orang tua mereka di rumah.²⁵

Selain bekerja sebagai pegawai, ada pula perempuan yang bekerja pada usaha keluarga. Bila mereka mendirikan usaha tersebut bersama suami atau kerabatnya, dengan aturan hukum Jepang pasca-perang mereka dapat mewarisi peran sebagai pemilik dan pengelolanya. Pada umumnya sebagian besar perempuan yang menduduki posisi manajer di Jepang adalah dari usaha keluarga yang tidak terlalu besar.²⁶

Kini dengan perkembangan pendidikan dan keterbukaan Jepang sudah banyak perempuan di Jepang yang memperoleh kedudukan sebagai manajer dalam perusahaan-perusahaan besar. Meskipun pada 1986 kurang dari separuh dari hasil survei adalah manajer dari perusahaan yang berada di bursa saham (sebagai acuan ukuran perusahaan). Namun, bila dibandingkan dengan total pegawai dari perusahaan-perusahaan besar tersebut perempuan yang menjadi manajer hanyalah 3%.²⁷

Di sisi gelap masyarakat Jepang, hingga kini Jepang masih mengizinkan *industri seks*. Industri seks ini berbeda dengan pelacuran yang dilarang oleh Undang-Undang, dalam pelacuran terjadi

²⁴ "Kyariaūman," *Wikipedia*.

²⁵ Fukutake, *op.cit.*, hlm. 50.

²⁶ Patricia G. Steinhoff dan Kazuko Tanaka, "Women Managers in Japan," hlm. 126-127.

²⁷ Patricia G. Steinhoff dan Kazuko Tanaka, "Women Managers in Japan," hlm. 116.

hubungan seks, sedangkan industri seks memberikan berbagai jasa kecuali hubungan seks tersebut. Pada umumnya perempuan-perempuan dari keluarga yang rentan terperangkap dalam industri seks ini.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa status dan peran perempuan Jepang selalu berubah-ubah. Pada zaman Edo perempuan diarahkan pada peran domestik dan harus taat pada kepala keluarga. Hal ini semakin ketat pada era Meiji dan Taisho dengan UU Perdata yang mengesahkan sistem *ie*. Pada saat perang para perempuan dikerahkan untuk bekerja di lingkungan dan pabrik-pabrik. Ini memperkuat posisi mereka yang berlanjut pada saat pascaperang. Pada saat pascaperang para perempuan mendapatkan peran dan status baru. Di dunia kerja mereka dapat mencapai posisi manajerial meski amat sulit sementara mereka yang tidak perlu bekerja menandakan status sosial lebih tinggi.

²⁸ "Women in Japan," *Wikipedia*.

BAB IV

KONDISI OBJEKTIF DUNIA PEREMPUAN PADA MASA KOLONIAL

A. Sikap Sosial terhadap Perempuan pada Zaman Kolonial (Era sebelum Kartini)

Jika orang Barat ingin mengerti benar akan kedudukan hukum perempuan dalam pergaulan hidup Indonesia di Hindia Belanda, maka pertama-tama harus disadari adanya kenyataan, bahwa pergaulan hidup Indonesia di Hindia Belanda memberikan gambaran yang berbeda sekali serta mempunyai ciri yang sama sekali berbeda daripada pergaulan hidup Barat.

Pergaulan hidup di Jawa yang berbeda itu telah mengakibatkan, bahwa kedudukan perempuan dalam pergaulan hidup tersebut berlainan daripada kedudukan perempuan Eropa dalam pergaulan hidup Barat.¹ Kedudukan seorang perempuan pada zaman kolonial sebelum adanya tokoh perjuangan perempuan Kartini sungguhlah begitu memprihatinkan, sangat banyak perempuan yang buta akan pendidikan dan terkekang karena kebijakan pihak penjajah yang sangat membatasi pendidikan untuk perempuan.²

¹ F.D. Holleman, *Kedudukan Hukum Wanita Indonesia dan Perkembangannya di Hindia Belanda*, terj. (Jakarta: Bhratara, 1971), hlm. 9.

² Adrian Vickers, *Sejarah Indonesia Modern*, terj. (Jakarta: Insan Madani, 2012), hlm. 62.

Kedudukan seorang perempuan pada masa itu, sebelum adanya Kartini sangat mengharukan terutama masyarakat pribumi yang dibedakan dalam bidang pendidikan. Anak-anak perempuan pribumi boleh dikatakan tidak punya kesempatan menempuh pendidikan formal saat itu. Di kalangan pribumi, hanya anak kaum bangsawan/pamong praja yang bisa bersekolah, itu pun biasanya hanya yang laki-laki saja.

Pada tahun 1799 terjadi perubahan besar di Indonesia, yakni adanya pergantian kekuasaan dari pemerintahan VOC kepada pemerintahan Hindia Belanda yang disebabkan VOC mengalami keruntuhan akibat dari kekosongan kas negara dan utang yang besar. Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mengangkat Gubernur Jenderal yang baru untuk Indonesia yaitu Johannes Van den Bosch yang dikenal dengan sistem kebijakan Tanam Paksa (*cultuurstelsel*), kebijakan tersebut dianggap dapat mendatangkan pemasukan yang besar bagi pemerintah Hindia Belanda.³

Dengan adanya program Tanam Paksa yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda telah memaksa pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang bumiputra. Pada dasarnya sistem Tanam Paksa adalah sistem eksploitasi apalagi setiap penduduk diwajibkan menanam tanaman untuk komoditas ekspor serta harus mempekerjakan sejumlah besar orang bumiputra sebagai pegawai rendahan yang murah guna menjaga agar perkebunan pemerintah berjalan lancar. Pegawai rendahan yang dimaksud sedapat mungkin dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah memiliki kekuasaan tradisional untuk menjamin keberhasilan kekuasaan.

Van Den Bosch sebagai pencipta Tanam Paksa ketika menjadi Gubernur Jenderal mulai dapat merasakan bahwa, tanpa bantuan penduduk bumiputra yang terdidik baik untuk administrasi pemerintahan maupun pekerja bawahan, pembangunan ekonomi di Hindia Belanda tidak akan berhasil. Maka diadakanlah pendirian

³ Poesponegoro, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 3.

sekolah bagi anak bumiputra meskipun pada awalnya hanya terbatas untuk anak-anak kaum ningrat.⁴

Sistem pendidikan bagi penduduk Indonesia mengalami perkembangan yang lebih pesat baru tampak selama zaman Liberal. Di mana pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1870 menerapkan sistem politik liberal yang membawa pengaruh dalam komposisi masyarakat Jawa, juga membawa pengaruh dalam situasi dan kondisi ekonomi bagi masyarakat Jawa.⁵

Pada waktu itu selain mengusahakan sekolah-sekolah bagi laki-laki, juga mengusahakan pendidikan bagi kaum perempuan. Karena kaum perempuan masih terasa sulit untuk dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan laki-laki. Bagi perempuan, situasinya benar-benar berbeda, apalagi dikemukakan pendidikan yang belum merata pada kaum perempuan Jawa. Disebutkan bahwa pendidikan para "gadis Jawa" hanya memikirkan anak-anak perempuan dari kalangan bangsawan atau priayi, bukannya gadis-gadis miskin di desa atau di kampung, yang bekerja di sawah sejak subuh hingga senja dan hanya memiliki sedikit waktu untuk menikmati indahny pendidikan.⁶

Salah satu faktor penghambat lainnya adalah tidak meratanya pendidikan bagi perempuan Jawa ketika banyak sekolah-sekolah yang mayoritas peserta didiknya anak laki-laki yang lebih besar jumlahnya daripada anak perempuan. Hal ini disebabkan karena orang tua Jawa keberatan jika anak perempuan mereka satu kelas dengan anak laki-laki sehingga semakin sulit bagi perempuan Jawa untuk dapat menikmati pendidikan.⁷

Masa penjajahan orang asing yang datang ke Indonesia sangat banyak peraturan yang mengekang warga Indonesia sehingga

⁴ Hajjah Ani Idrus, *Wanita Dulu Sekarang dan Esok* (Medan: Waspada, 1980), hlm. 45.

⁵ Adji, K. Bayu, *Istri-istri Raja Jawa* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2018), hlm. 115.

⁶ *Ibid.*

⁷ Taruna, *Ciri Budaya Manusia Jawa* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 34.

menghasilkan sebuah kelas-kelas tertentu. Salah satu dari peraturan mengatakan bahwa seorang yang terpancang yang menjabat sebagai pemimpin harus menikahi seorang yang berdarah ningrat. Dalam hal ini dapat disimpulkan ada kelas-kelas tertentu yang mempunyai keistimewaan, sedangkan para kaum pribumi yang tak mempunyai kekuasaan hanya dapat menerima apa yang ditentukan oleh pihak penjajah.⁸

Ketika itu, ibu dari seorang Kartini yang dari keluarga biasa dinikahi seorang pemimpin. Dalam peraturan awal telah tertera bahwa harus menikah dengan orang yang mempunyai derajat lebih tinggi, dan secara tidak langsung ayah Kartini harus menikah lagi dengan orang yang sebanding dengan dia, yang dinilai dengan kekuasaan dan kekayaan, dan akhirnya dampak yang tragis kembali lagi kepada perempuan yang akhirnya dipoligami.

Mengenai kedudukan sosial kaum perempuan Indonesia pada zaman kolonial, ternyata sangat memprihatinkan. Mereka dianggap sebagai kaum yang lemah. Tidak mengherankan jika dalam status sosial masyarakat feodal, kedudukan perempuan berada di bawah kaum laki-laki. Rendahnya status sosial perempuan tersebut diperburuk oleh adat, khususnya yang menyangkut budaya pingitan yang menutup ruang gerak mereka. Perlakuan lainnya adalah jika poligami dipaksakan (kawin paksa) untuk dijadikan selir dan perkawinan muda. Poligami pada waktu itu tidak hanya dijadikan istri ke-2, 3, atau 4, melainkan lebih dari itu. Ketika Indonesia memasuki zaman penjajahan, kedudukan perempuan Indonesia sampai akhir abad ke-19 belum membawa perubahan berarti. Bahkan, kebijakan kolonial juga seolah membedakan antara kedudukan perempuan dan laki-laki.⁹

Dalam konstruk budaya Jawa peranan perempuan hanya berkisar pada tiga kawasan, yaitu di sumur (mencuci dan bersih-bersih), di dapur (memasak), dan di kasur (melayani suami). Atau

⁸ Cora Vreede-De Steurs, *Sejarah perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaiannya*, terj. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2017), hlm. 133.

⁹ Vickers, *op.cit.*, hlm. 65.

dengan perkataan lain peranan perempuan adalah *macak*, *masak*, dan *manak*. Lebih jauh gambaran perempuan Jawa adalah sebagai *konco wingking*, yaitu sebagai pembantu yang melayani suami untuk urusan belakang. Karena peranannya yang marjinal tersebut maka perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi.¹⁰

Keadaan perempuan Indonesia, khususnya di Jawa sebelum adanya Kartini hampir tidak ada atau sedikit sekali gadis-gadis yang pergi ke sekolah. Semua kebebasan yang dimiliki gadis-gadis hilang lenyap pada usia menjelang kawin, yaitu pada usia sepuluh atau dua belas tahun. Ketika itu perempuan sangat terkekang dalam adat budaya Jawa yang harus dianut. Dari situ adat budaya Jawa memunculkan sedemikian kuat sebuah ketidakadilan gender yang berdampak pada perempuan seolah-olah perempuan tidak mempunyai peran penting dan hanya bisa melakukan kegiatan yang sesuai dengan peraturan budaya Jawa.¹¹

Semakin luasnya kekuasaan kolonial di Indonesia maka untuk mempertahankan dan menjalankan struktur dan tugasnya, pemerintah kolonial memanfaatkan potensi manusia Indonesia. Kebutuhan akan tenaga kerja manusia yang profesional, setidaknya tenaga kerja yang bisa membaca dan menulis semakin dibutuhkan. Keadaan tersebut semakin diperkuat keberadaannya setelah adanya tuntutan perbaikan nasib bangsa, terutama dalam bidang pendidikan dan wawasan bangsa Indonesia dari golongan humanis, akhirnya mendorong pemerintah kolonial untuk mengadakan pendidikan bagi kaum pribumi.¹²

Pelaksanaan politik pendidikan oleh pemerintah kolonial pada awalnya bertujuan untuk menyiapkan individu yang bisa membaca dan menulis, sehingga nantinya bisa dipekerjakan pada perkebunan-perkebunan atau perusahaan-perusahaan industri. Tenaga kerja yang bisa membaca dan menulis ini biasanya ditempatkan sebagai

¹⁰ Hilderd Geertz, *Keluarga Jawa*, terj. (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), hlm. 129-134.

¹¹ Chodijah, *Rintihan Kartini* (Jakarta: Ikhwan, 1986), hlm. 57.

¹² Stuers, *op.cit.*, hlm. 93.

mandor yang mengawasi para pekerja atau buruh lainnya. Meskipun membuat kebijakan seperti itu, sebenarnya para penjajah hanya ingin mengambil keuntungan dan masyarakat Indonesia dianggap sebagai budak mereka.

Seorang perempuan yang semakin terjajah ketika itu hanya dapat diarahkan sebagai buruh oleh penjajah, karena tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan masyarakat pribumi memang masih dikelabui oleh tradisi-tradisi yang ada di tempat tinggalnya. Kaum perempuan Indonesia dibelenggu dengan aturan-aturan tradisi dan adat yang cenderung membatasi peran mereka dalam kehidupan masyarakat. Kaum perempuan Indonesia lebih banyak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pelayan suami di rumah. Kebebasan perempuan pun sangat terbatas, mulai dari tutur kata, gerak gerik, bahkan sampai dengan pemikiran pun turut dibatasi dengan tidak mengizinkan seorang perempuan untuk duduk di bangku sekolah.¹³ Dunia mereka hanyalah sebatas tembok rumah. Masih pada masa lalu, apalagi seorang perempuan juga selalu berada di bawah ketidakadilan bahkan hampir tidak diakui keberadaannya. Hal ini semacam diskriminasi gender antara seorang perempuan dan seorang laki-laki.

Perempuan pada waktu itu tidak mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan. Pendidikan yang mereka peroleh hanya terbatas pada usaha untuk mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu. Kaum perempuan Indonesia juga tidak memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri. Peran perempuan sangat terbatas, bahkan terpinggirkan, yaitu hanya sebagai ibu rumah tangga, melayani suami bahkan di kalangan ningrat terkenal dengan tradisi "pingit".¹⁴

Budaya poligami, pingitan, perjodohan, dan berbagai perlakuan tidak adil lainnya dialami oleh mereka. Sistem adat yang sarat dengan ideologi patriarki membuat perempuan Jawa menjadi kaum yang tertindas. Di Indonesia terdapat 3 sistem adat kekerabatan

¹³ Adji, *op.cit.*, 124.

¹⁴ *Ibid.*, 130.

yakni sistem matrilineal, sistem patrilineal, dan sistem bilineal. Semua sistem kekerabatan itu bersintesis dengan Islam kemudian memproduksi hukum untuk mengatur perempuan dalam perkawinan. Ketiga sistem adat itu sama-sama menempatkan perempuan sebagai "penjaga rumah", tetapi tidak berarti mempunyai pengambilan keputusan atas properti, yakni harta kekayaan, termasuk anak, yang memberi status sosial sebuah keluarga.¹⁵ Terdapat dua permasalahan yang cukup krusial bagi kaum perempuan. *Pertama*, berhubungan dengan berbagai soal di seputar perkawinan dan yang *kedua* berkenaan dengan tidak adanya hak untuk mengenyam pendidikan. Titik krusial dari urusan perkawinan tersebut adalah poligami dan hak perempuan yang tersingkir jauh dari pengambilan keputusan untuk kawin, cerai, dan pewarisan. Terdapat asumsi bahwa jika perempuan bersekolah maka usia perkawinannya dapat ditunda dan sekaligus mereka tahu kedudukannya dalam hukum perkawinan.¹⁶

Problem itulah yang mengawali pertumbuhan organisasi perempuan pada awal abad ke-20 pada saat itu. Sejak dulu laki-laki adalah kaum yang diprioritaskan daripada kaum perempuan karena kaum laki-laki dianggap memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik dan dianggap lebih layak melakukan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran. Sementara perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap kehidupan semata. Perempuan hanya dianggap sebagai budak yang harus menurut kata suami dan diam di dapur tanpa didengar aspirasinya, pernyataannya, maupun ide-idenya.

Akibatnya, perempuan harus terkurung dan terkucilkan dari dunia luar dan menerima apa yang diperintahkan kepada mereka. Perempuan juga harus rela menya-nyaiakan masa sekolah untuk memenuhi yang dianggap kodrat mereka sebagai seorang perempuan yang diartikan oleh masyarakat dulu sebagai budak suami, yaitu seorang perempuan yang harus menuruti setiap perkataan suami tanpa kecuali. Mereka harus rela diam di dapur untuk membantu ibu mereka tanpa mengetahui bagaimana cara membaca dan menulis

¹⁵ Stuers, *op.cit.*, 97.

¹⁶ Alwi, As, *Jawaban Terhadap Alam Fikiran Barat yang Keliru Tentang Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1981), hlm. 129.

yang dipelajari oleh kaum laki-laki. Mereka tidak mengetahui bagaimanakah keadaan dunia luar yang akan menunggu mereka dan permasalahan-permasalahan yang mungkin saja dapat terpecahkan oleh ide-ide perempuan yang cerdas dan dianggap sebelah mata oleh kaum lelaki ini.¹⁷

Ketika kondisi perempuan yang memprihatinkan membutuhkan figur seseorang yang dapat mendobrak dialah Raden Ajeng Kartini yang sontak menggegerkan pemerintah kolonial Hindia Belanda karena perjuangannya melawan diskriminasi terhadap kaumnya. Belanda bingung, mengapa seseorang yang dibesarkan oleh kultur budaya patriarki dan berada di bawah jajahannya, bisa memiliki pemikiran semodern dan semaju itu. Tapi, itulah Kartini yang dapat menjunjung tinggi derajat perempuan dan menginspirasi perempuan masa kini.¹⁸ Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan.

B. Sikap Sosial terhadap Perempuan pada Zaman Kolonial (Era sesudah Kartini)

Kartini adalah seorang tokoh perjuangan perempuan. Ia adalah tokoh perempuan yang sangat terkenal di Indonesia. Karena mampu berbahasa Belanda, Kartini menulis surat pada teman-teman korespondensinya yang berasal dari Belanda. Salah satu di antaranya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran-koran, dan majalah-majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Dari bacaan-bacaan yang dilahapnya, hasrat Kartini untuk memajukan perempuan pribumi yang berada pada status sosial rendah itu mulai timbul.¹⁹

¹⁷ Maria Ulfa Subadio, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia* (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 1994), hlm. 97.

¹⁸ E.D. Holleman, *op.cit.*, hlm. 41.

¹⁹ Chodijah, *op.cit.*, hlm. 68.

Kartini banyak membaca surat kabar Semarang, *De Locomotief*, yang diasuh oleh Pieter Brooshoof. Kartini juga menerima *Leestrommel*, paket majalah yang diedarkan toko buku pada pelanggan. Di antaranya, terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat serta majalah perempuan Belanda *De Hollandsche Lelie* dan dimuatnya.²⁰

Dari surat-suratnya terkesan bahwa Kartini telah membaca apa saja dengan penuh kecermatan. Perhatiannya bukan sekadar persoalan perempuan, namun juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan perempuan agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20 tahun, antara lain berikut ini. *Max Havelaar*, "*Surat-surat Cinta*" karya Multatuli, *De Stille Kraacht* Louis Coperus, serta karya dari Van Eeden, Augusta de Witt, Goekoop de-jong Van Bee, dan Berta Voin Suttner.²¹

Kartini menikah dengan Bupati Rembang yakni Adipati Ario Singgih Djojo Adiningrat pada 12 November 1903. Oleh suaminya, Kartini diberi kebebasan dan didukung untuk mendirikan sekolah perempuan di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor kabupaten Rembang yang kini dijadikan sebagai gedung pramuka. Berkat kegigihan Kartini, kemudian didirikan sekolah perempuan oleh Yayasan Kartini.

Setelah Kartini wafat (1904), Abendanon mengumpulkan surat-surat yang dikirimkan Kartini pada teman-temannya di Eropa. Terbitnya surat-surat Kartini sangat menarik perhatian bagi masyarakat Belanda. Melalui surat-surat Kartini tersebut mulai dapat mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menginspirasi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia, semisal W.R Supratman yang menghasilkan lagu

²⁰ Katoppo, Aristides, *Satu Abad Kartini* (Jakarta: Sinar Harapan, 1979), hlm. 148.

²¹ Rosyadi, Imron, *R.A Kartini Biografi Singkat 1879-1904* (Yogyakarta: Garasi, 2010), hlm. 10.

berjudul "Ibu Kita Kartini."²²

Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikiran tentang kondisi sosial, terutama kondisi perempuan pribumi saat itu. Sebagian surat-suratnya berisi keluhan-keluhan dan gugatan terhadap budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Kartini menginginkan perempuan memiliki kebebasan dalam belajar dan menuntut ilmu. Gagasan dan cita-cita Kartini tersebut terangkum dalam *Zelf-ontwikkeling*, *Zelf onderricht*, *Zelf Vertrouwen*, *Zelf werkaanmheid*, dan *Solidariteit*.²³

Pandangan-pandangan lain yang diungkap Kartini melalui surat-suratnya adalah kritik terhadap agamanya. Kartini mempertanyakan mengapa kitab suci harus dihafalkan tanpa wajib dipahami. Kartini menyingkapkan pandangannya, bahwa dunia akan lebih damai jika tidak ada agama yang sering menjadi alasan manusia untuk berselisih, terpisah, dan saling menyakiti. Kartini mempertanyakan tentang agama yang dijadikan pembenaran bagi kaum laki-laki untuk berpoligami.²⁴

Kartini adalah gambaran tragis perempuan di awal abad ke-20, ketika harkat perempuan dimaknai sebatas *kanca wingking*, yang berkutut di sumur, dapur, dan kasur. Riwayat hidupnya menggambarkan penderitaan perempuan Jawa yang terpasung dalam tembok tradisi dan adat-istiadat masyarakat feodal-patriarkal Jawa yang begitu angkuh dan kukuh serta membatasi ruang gerak mereka, mulai dari pelarangan belajar, adanya pingitan, hingga harus siap dipoligami dan tunduk pada seorang suami yang telah dinikahinya.²⁵

Kartini ingin mendobrak tradisi feodal-patriarkal yang menghambat kemajuan kaumnya menuju masa depan yang lebih

²² Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Kalyanamitra, 1997), hlm. 57.

²³ Rosyadi, *op.cit.*, hlm. 54.

²⁴ Asvi Warman Adam, *Seabad Kontroversi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007), hlm. 15.

²⁵ Idrus, *op. cit.*, hlm. 65.

cerdas, bebas, aktif, dan merdeka sebagai perempuan yang tidak terjajah. Untuk itu, pendidikan mutlak diperlukan perempuan untuk mengangkat derajat seorang perempuan agar tidak terjajah dan dapat berpikiran maju dan dapat mengangkat martabat Indonesia sebagai bangsa, pengajaran kepada perempuan secara tidak langsung akan meningkatkan derajat bangsa.

Kedudukan seorang perempuan ketika muncul seorang pejuang Kartini sungguhlah sangat membantu dalam sebuah kemajuan perempuan. Dalam sebuah bait-bait suratnya ia menuliskan sebuah pemikiran modern yang ingin mendobrak sebuah pemikiran para perempuan yang ada pada masa itu, karena ketika itu perempuan sangat dibedakan dalam hal apa pun dengan lelaki. Perempuan saat itu hanya dapat mengikuti dan menurut dalam adat Jawa, yang benar-benar mengekang perempuan sehingga tidak bisa berpikir maju dan ujungnya perempuan hanya menjadi bawahan lelaki.²⁶

Dengan adanya Kartini saat itu, sedikit demi sedikit perubahan terjadi karena Kartini ingin memajukan dan mengangkat derajat perempuan sehingga memunculkan sebuah pemikiran bahwa Kartini adalah tokoh perjuangan perempuan yang dapat disebut dengan feminisme.

Di Indonesia sendiri feminisme sudah berkembang sebelum kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan Kartini yang mengusung tema emansipasi perempuan. Perjuangan Kartini secara tidak langsung membuat banyak perempuan terinspirasi olehnya dan mulai memunculkan gerakan-gerakan yang mengusung kesetaraan gender.²⁷

Gagasan-gagasan Kartini menginginkan pendidikan bagi perempuan. Menurut Kartini, perempuan itu bisa dikatakan merdeka di saat perempuan mengenyam pendidikan yang layak.²⁸

²⁶ Poesponegoro, *op. cit.*, hlm. 403.

²⁷ Syahfitri Anita, *Gerakan Perempuan: Tinjauan Sejarah (Sebagai Pengantar Diskusi Lingkar Studi Perempuan)*, Jakarta (2006), hlm. 3.

²⁸ Sitisemandiri Soeroto, *Kartini Sebuah Biografi* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), hlm. 320.

Kartini adalah seorang perempuan Jawa yang senantiasa gelisah berada di dalam kerangkeng budaya patriarki kaum priayi. Semangat untuk memperjuangkan emansipasi di kalangan perempuan yaitu melalui dunia pendidikan. Kartini menaruh harapan untuk kemajuan kaum perempuan. Untuk merombak kultur feodal patriarki yang selama berabad-abad membelenggu kaum perempuan, apalagi kaum hawa hanya dibatasi pada sektor domestik, antara dapur, sumur, dan kasur. Kaum perempuan sangat sulit menduduki bangku sekolah sehingga perempuan tidak bisa mengembangkan kemampuannya. Ini semua stereotip masyarakat yang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah hanya sebagai pendamping laki-laki.²⁹

Kartini adalah satu di antara sekian banyak tokoh perempuan Indonesia yang telah mendapat perhatian. Hal ini karena semata-mata dia meninggalkan pemikiran-pemikiran yang dapat dianalisis dari surat-suratnya yang telah dibukukan. Perjuangannya yang begitu gigih untuk memerdekakan perempuan sangatlah tidak mudah. Kartini mencoba memberikan pandangan terhadap kaum perempuan agar dapat keluar dari sebuah kungkungan adat dan lebih berpikir maju dengan cara mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.

Sebuah keadaan yang sangat memprihatinkan terhadap perempuan pada saat itu muncullah seorang Kartini yang ingin memperjuangkan perempuan agar tidak ketinggalan zaman dan dapat berpikiran maju seperti perempuan di Eropa yang dapat berpikir modern dan bisa mengenyam pendidikan yang sesuai. Dalam sebuah kejadian pada masa itu terjadi sebuah konflik yang sangat signifikan menurut Kartini dalam diri seorang perempuan ketika itu, seperti konflik yang dalam pemikiran Kartini adalah ketidakadilan terhadap perempuan atau ketidaksetaraan gender dalam hal seperti aspek pendidikan, sosial, budaya. Keadaan itu menjadi sebuah pendorong bagi Kartini untuk mendobrak dan menjunjung tinggi martabat seorang perempuan.

²⁹ Rosalin Horton dan Sally Simmons, *Wanita-wanita yang Mengubah Dunia* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 216.

Faktor yang mendorong Kartini ingin memperjuangkan hak seorang perempuan karena yang pertama para perempuan pada zaman itu tidak mendapat pendidikan yang layak sehingga perempuan hanya menurut dan tak berpikiran maju yang hanya mengadakan sebuah adat istiadat yang dianut oleh para kaum pribumi.³⁰ Hal lain yang menjadi perhatian Kartini tentang ketidakadilan terhadap perempuan adalah berkembang suburnya poligami.

Kartini berpendapat bahwa poligami adalah salah satu bentuk kesewenang-wenangan pria terhadap perempuan. Kartini melihat dan merasakan betapa besar penderitaan dan pengorbanan kehidupan perempuan yang dimadu oleh suaminya, hal ini pun dilakukan oleh orang tuanya. Menurut Kartini, gadis-gadis tersebut tidak dapat dipersalahkan karena pada umumnya mereka adalah anak-anak dari keluarga yang melarat yang terdiri dari petani dan buruh pabrik.

Mereka berangan-angan mendapat kemewahan, kehormatan, dan kenikmatan duniawi lainnya. Dikawini oleh bangsawan adalah anugerah yang membuka jalan bagi mereka untuk mobilitas sosial secara vertikal. Mereka akan menjadi putri-putri kabupaten, kepangeranan, atau kesultanan yang bergelimang dengan kemewahan. Kartini melihat dan mencatat kejadian-kejadian tersebut dalam hati sanubarinya. Ia merasakan betapa getir nasibnya nanti apabila dirinya akan mengalami nasib seperti gadis-gadis tersebut.

Faktor lain dalam perjuangan Kartini adalah Kartini berkorespondensi langsung dengan tokoh feminis Belanda, Stella Zeehandelaar, secara tidak langsung telah terpengaruh oleh konsep-konsep feminisme liberal.³¹ Hal ini dapat dilihat dari program utamanya yaitu membebaskan perempuan dari kebutaan pendidikan atau pengetahuan dengan mendirikan sekolah khusus, agar hak perempuan untuk mengikuti pendidikan setara dengan hak pendidikan.

³⁰ Aristides Katoppo, *op.cit.*, hlm. 25.

³¹ Rosyadi, *op. cit.*, hlm. 78.

Kartini menyadari bahwa untuk membuat bangsanya maju, khususnya kaum perempuan, maka tidak bisa tidak dengan jalan belajar dari dunia Barat. Peradaban Barat yang demikian gemilang menyilaukan semangat Kartini untuk belajar demi pembebasan dari kungkungan feodalisme budaya yang timpang itu.

Dijadikannya R.A. Kartini sebagai pahlawan bangsa Indonesia dilatarbelakangi oleh faktor pendorong Kartini yang ingin memperjuangkan hak-hak perempuan seperti pemikiran-pemikiran dan perjuangan terhadap kaumnya.³² Pribadinya yang lembut dan santun, tanpa meninggalkan sifat keperempuanannya (feminin) mencoba mendobrak kungkungan dirinya dan kaum perempuan pada masa itu. Sebagai catatan bagi kita bahwa ia tidak bergerak dengan sifat-sifat kelelakian (maskulin), seperti halnya perempuan-perempuan Barat, namun ia bergerak dengan kelembutan dan penanya. Dengan penanya, Kartini banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam tulisan-tulisan tangannya. Adapun pemikiran-pemikiran tersebut menceritakan tentang kondisi sosial pada waktu itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi.³³ Kartini menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan, dan bersedia dimadu, sehingga Kartini menuntut bahwa budaya Jawa dianggap sebagai penghambat kemajuan perempuan. Pergerakan yang dilakukan untuk melepas kungkungan adat tersebut, bisa dipahami dari cita-citanya yang luhur yaitu menggagas pembebasan perempuan, dengan mendirikan sekolah bagi para perempuan bumiputra saat itu.³⁴ Kartini begitu sangat antusias ingin memajukan pendidikan di Indonesia terutama kepada perempuan. Ia seorang pejuang yang berpikiran modern, sangat jarang seorang perempuan mempunyai pemikiran seperti itu. Kartini ingin melihat seorang perempuan pribumi seperti orang-orang perempuan yang ada di Barat yang sangat berpikiran maju, ia selalu membaca buku-buku

³² Horton, *op. cit.*, hlm. 217.

³³ Kuncoro Hadi dan Sustianingsih, *Pahlawan Nasional* (Yogyakarta: Familia, 2013), hlm. 7.

³⁴ *Ibid.*, 76.

dan majalah tentang dunia luar dan buku-buku orang luar sehingga dia terinspirasi mempunyai pemikiran semodern itu sampai dia dalam bait-bait suratnya menjelaskan tentang pergolakannya terhadap budaya Jawa yang mengukung keberadaan perempuan.³⁵

Dia sebenarnya menentang budaya Jawa karena menurutnya budaya Jawa tersebut sangat mengekang kehidupan seorang perempuan sehingga memunculkan ketidaksetaraan gender. Kartini bermaksud mengubah adat lama yang menghalangi kemajuan bagi kaum perempuan, ia mengawalinya dengan memperjuangkan kemajuan dan kedudukan perempuan bangsawan karena perempuan golongan biasa dengan sendirinya akan meniru kemajuan perempuan bangsawan. Dalam mengejar cita-citanya, Kartini mendirikan sekolah untuk gadis bangsawan dengan maksud para gadis pribumi di kemudian hari dapat memperbaiki kedudukan kaum perempuan. Cita-cita dan semangatnya tertuang dalam surat-surat yang ditulis dan dikirimkannya kepada sahabat-sahabatnya sejak umur 20 tahun, termasuk kepada pasangan Abendanon.

Perempuan Indonesia memiliki peranan dan kedudukan sangat penting sepanjang perjalanan sejarah. Kiprah perempuan di atas panggung sejarah tidak diragukan lagi. Gerakan kebangkitan nasional berhubungan dengan politik etis Hindia Belanda yang memberi kesempatan bagi para bumiputra untuk bersekolah.³⁶ Sebenarnya maksud pemerintah Hindia Belanda adalah untuk menghasilkan buruh-buruh terdidik, guru-guru, birokrat rendahan yang cukup terdidik, dokter-dokter yang mampu menangani penyakit menular pada bangsa pribumi. Tindakan ini dilakukan karena Hindia Belanda harus menekan biaya operasional tanah jajahan Indonesia yang terlalu mahal bila menggunakan tenaga impor dari Belanda.

Meskipun yang diizinkan memasuki sekolah Belanda saat itu hanyalah kaum bangsawan, priayi, dan kaum elite. Seorang pejuang perempuan, yaitu R.A. Kartini (1879–1904) adalah pelopor dan pendahulu perjuangan untuk pendidikan perempuan dan persamaan

³⁵ Hadi, *ibid.*, hlm. 77.

³⁶ Poesponegoro, *op. cit.*, hlm. 24.

hak perempuan. Kartini berpendapat bahwa bila perempuan ingin maju dan mandiri, maka perempuan harus mendapat pendidikan. Kartini selama ini kita kenal sebagai seorang pejuang emansipasi perempuan, terutama di bidang pendidikan. Kartinilah yang membangun pola pikir kemajuan, dengan cara menggugah kesadaran orang-orang sezamannya, bahwa kaum perempuan harus bersekolah. Tidak hanya di Sekolah Rendah, melainkan harus dapat meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi, sejajar dengan saudara-saudaranya yang laki-laki.³⁷

Bagi Kartini, perempuan harus terpelajar sehingga dapat bekerja sendiri, mencari nafkah sendiri, mengembangkan seluruh kemampuan dirinya, dan tidak bergantung pada siapa pun, termasuk suaminya. Mengingat suasana pada waktu itu, ketika adat feodal masih sangat kental di sekeliling R.A. Kartini, maka dapat dibayangkan, betapa maju dan progresif pikirannya. Selain itu, meskipun dalam situasi pingitan, terisolasi, dan merasa sunyi, Kartini mampu membangun satu gagasan politik yang progresif pada zaman itu, baik untuk kepentingan kaum perempuan maupun bagi para kawula miskin di tanah jajahan.³⁸

Faktor pendorong yang telah dijelaskan di atas yang sangat menggugah sanubari Kartini terhadap seorang perempuan tidaklah sia-sia. Kartini telah membuka jendela pemikiran para gadis ketika itu agar serentak memajukan pola pikir mereka terutama dalam pendidikan, karena dari situ dapat mengubah kehidupan seorang perempuan menjadi lebih baik agar tidak memprihatinkan dan tragis seperti yang dialami sebelum-sebelumnya. Telah banyak terjadi perubahan kepada para perempuan saat itu, ketika Kartini mencoba untuk membuka sebuah pemikiran baru dan mendobrak pemikiran perempuan Jawa, yang hanya terpaku pada suatu adat yang menjadi panutan mereka.

³⁷ Sutrisno, *op. cit.*, hlm. 169.

³⁸ Idrus, *op. cit.*, hlm. 50.

BAB V

PEREMPUAN

DAN KEDATANGAN JEPANG DI INDONESIA

A. Organisasi Perempuan sebelum Kedatangan Jepang

Munculnya kesadaran berorganisasi pada perempuan Indonesia sebetulnya sudah diawali sebelum diadakannya Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928.¹ Aktivitas gerakan perempuan pada awalnya menekankan pada urusan-urusan kesejahteraan perempuan dan sosial, misalnya menjahit, memasak, menenun dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerumahtanggaan (*private*). Organisasi perempuan pertama yang memberi kesempatan bagi perempuan untuk bertindak di luar rumah (*public*) dipelopori oleh Poetri Mardika, atas prakarsa Boedi Oetomo, yang berdiri di Jakarta pada 1912.² Organisasi ini,

¹ Sebelum berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, telah terdapat lebih kurang 100 perkumpulan wanita di Indonesia. Namun yang sempat hadir pada saat itu hanya 30 utusan dari organisasi yang ada di Indonesia. *Verslag van het CONGRES PEREMPOEAN INDONESIA gehouden te Jogjakarta van 22 tot 25 Desember 1928*. Arsip Nasional, 2/Afs Monlr no. 62/29.

² Organisasi ini diketuai oleh R.A. Theresia Sabaroeddin, yang beranggotakan 132 orang. Perkumpulan ini bertujuan memberikan pendidikan, kesempatan perempuan bertindak di luar rumah dan menyatakan pendapatnya di muka umum dan menyatakan persamaan derajat dengan laki-laki. Perkumpulan ini telah berhasil memberikan 2 beasiswa kepada perempuan di HBS, 1 di sekolah Belanda, 3 di Bataviasche Kartinschool, dan

bertujuan memperjuangkan emansipasi perempuan dengan cara memberikan beasiswa untuk anak perempuan agar bisa melanjutkan sekolah mereka. Pada tahun 1913, organisasi ini mulai menerbitkan majalah mingguan yang berjudul "Surat Kabar Memperhatikan Kaum Perempuan Bumi Putera di Indonesia".

Kemudian, pada tahun 1912 itu, juga di Jakarta, menyusul organisasi perempuan yang bernama Keutamaan Isteri. Pada tahun 1915 dibentuk organisasi perempuan Payiwatan Wanita di Magelang, dan Wanita Hano di Jepara bersamaan pada tahun itu juga. Tahun 1918 dibentuk Wanita Susilo di Pematang, dan di Surabaya berdiri organisasi perempuan Putri Sejati.³

Organisasi semacam ini juga lahir di luar Jawa. Di Kota Gadang, Bukit Tinggi, didirikan organisasi perempuan Kerajinan Amai Satia pada tahun 1914. Di Padang Panjang, didirikan Keutamaan Isteri Minangkabau. Persatuan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Sumatra disebut Serikat Ibu Sumatra, dengan kantor pusat di Bukit Tinggi. Serikat itu mempunyai badan penerbitan khusus "Al-Syarq", yang pernah menerbitkan majalah dengan nama Suara Perempuan di Padang dan di Medan dengan nama Perempuan Bergerak. Di Minahasa berdiri organisasi perempuan dengan nama Pengasih Ibu Kepada Anak Turunan yang kemudian disebut dengan PIKAT. Pada tahun 1917 organisasi tersebut menerbitkan majalah dengan nama yang sama.⁴

Pada Kongres Pemuda Indonesia I, 28 Oktober 1928 di Jakarta, yang juga diikuti oleh kaum perempuan telah memacu semangat mereka untuk menentukan langkah berikutnya.⁵ Pembicaraan

1 di sekolah partikulir. Poetri Mardika, no. 5, Agustus 1915; Lihat juga Ruth Indah Rahayu, "Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan sejak tahun 1980-an", *Prisma*, no. 5, 1996.

³ Cora Vreede-De Steurs. *The Indonesian Women Struggle and Achievements* (the Hague: Mouton, 1960), hlm. 61-63.

⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

⁵ Pada Kongres Pemuda Indonesia I, pokok persoalan mengenai kedudukan perempuan dalam masyarakat Indonesia dibicarakan oleh tiga pemakalah; Bahder Djohan, Nona Stien Adam dan Djohar Diponegoro. Laporan Kongres

masalah perempuan dalam Kongres Pemuda Indonesia I itu menandai tahap kedua gerakan perempuan yang dari pemikiran perorangan beralih ke organisasi politik, terutama mereka yang sejak lama telah menjadi bagian dari Serikat Islam, PKI, dan PNI, yang mengikuti jejak pergerakan nasional.⁶ Atas inisiatif dari tujuh organisasi perempuan, akhirnya terselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22–25 Desember 1928 di Yogyakarta.⁷ Ki Hadjar Dewantara menyebut Kongres Perempuan Indonesia I ini sebagai “Tonggak Sejarah Pergerakan Wanita Indonesia”, dan mengakhiri sambutannya pada saat itu dengan tembang *witing klop*, yang melambangkan perempuan sebagai makhluk yang sanggup dan mampu mengatur masyarakat.⁸

Hasil Kongres terpenting adalah pembentukan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), sebuah federasi organisasi perempuan yang beranggotakan 20 perkumpulan perempuan. Pada tahun 1929, PPPI melakukan kongres dan mengubah namanya menjadi PPII (Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia).⁹ Pada tahun

Pemuda Indonesia I (1928): 67–84, dalam laporan asli bahasa Belanda, hlm. 29–47. Abdurrachman Surjomihardjo, *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta 1880-1930* (Yogyakarta: Yayasan Adikarya dan the Ford Foundation, April 2000), hlm. 149.

⁶ *Ibid.*

⁷ Dalam kongres tercatat dihadiri oleh 30 organisasi perempuan, dengan jumlah peserta 600 orang, sebagian besar anggota Aisyiah. Kongres ini diadakan atas inisiatif 7 organisasi Wanita Indonesia; Wanita Oetomo, Wanita Taman Siswa, Putri Indonesia, Aisyiah, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Wanita Katolik dan Jong Java bagian Wanita. *Verslag van het Congres Perempoean Indonesia gehouden te Jogjakarta van 22 tot 25 Desember 1928*, hlm. 2–3.

⁸ Ny. Sujatin Kartowijoyo. *Perkembangan Pergerakan wanita Indonesia* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1982), hlm. 6.

⁹ Versi lain menyebutkan sampai tahun 1942, perjuangan kaum perempuan berhasil menghimpun 160 organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Berhasil melaksanakan Kongres Perempuan Indonesia selama empat kali. Kongres I di Yogyakarta tahun 1928, Kongres II di Jakarta tahun 1935, Kongres III di Bandung tahun 1938, Kongres IV di Semarang tahun 1941. Riyadi Gunawan, “Dimensi-dimensi Perjuangan Kaum Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sejarah” dalam Fauzie Ridjal, dkk. (ed.), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 102.

1930, PPII mendirikan satu Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (BPPPA) yang diketuai oleh Ny. Soekemi. Di samping itu, juga melakukan pemberantasan praktik *Cina mindring* yang meminjamkan uang kepada petani dengan bunga yang sangat tinggi sehingga tidak mampu dikembalikan oleh petani yang kerap kali anak gadis petani dijadikan penebus utang.¹⁰ Bagian yang terpenting sejak berdirinya PPPI adalah pergerakan perempuan Indonesia sudah menjadi bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Selain menerbitkan berbagai surat kabar, mendirikan *studi fonds*, masalah-masalah politik dan hukum mulai menjadi perhatian kaum perempuan. Para pemimpin kaum perempuan mulai memperhatikan nasib para buruh perempuan yang bekerja di pabrik-pabrik rokok, pakaian, dan batik maupun makanan. Para buruh perempuan tersebut diberi berbagai penyuluhan mengenai hak dan kewajiban mereka. Dalam memberikan pengajaran agar lebih teratur dan terarah, penyuluhan biasanya diadakan di kantor penyuluhan perburuhan.¹¹

Antara Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928 dengan Kongres Perempuan Indonesia II tahun 1935, telah diadakan empat kali Kongres PPPI/PPII (Kongres PPII tahun 1929; Kongres PPII tahun 1930; Kongres PPII tahun 1932; Kongres PPII tahun 1933). Hal yang selalu mendapat perhatian setiap Kongres adalah:

- a. Kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan (Islam);
- b. Perlindungan perempuan dalam perkawinan dan anak-anak;
- c. Mencegah perkawinan anak-anak;
- d. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia, terutama bagi anak-anak gadis yang tidak mampu membayar biaya sekolah.¹²

¹⁰ Ny. Sujatin Kartowijoyo, *op.cit.*, hlm. 7.

¹¹ Agar lebih terarah dan teratur, penyuluhan biasanya diadakan di kantor penyuluhan perburuhan. Untuk pembinaan dalam bidang kesehatan dibentuk suatu organisasi untuk menyelidiki dan memberi laporan tentang kesehatan di kampung-kampung dan jumlah kematian bayi. S.K. Trimurti, wawancara, Jakarta, 20 Agustus 1998.

¹² KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 56.

Hal yang terpenting dalam perkembangan PPPI/PPII adalah keputusan bahwa kesatuan pergerakan perempuan Indonesia berasaskan kebangsaan dan menyatakan diri sebagai bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia.¹³

Setelah Kongres PPII terakhir, timbul kembali inisiatif dari organisasi-organisasi perempuan Indonesia untuk mengadakan kembali Kongres Perempuan Indonesia seperti tahun 1928, dengan alasan banyaknya organisasi-organisasi perempuan yang baru, yang tidak terakomodir dalam PPII. Kemudian, diadakanlah Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta, dengan lebih menekankan pada persatuan dan kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Pada bulan September 1935 PPII dibubarkan. Sedangkan, yang menjadi perhatian utama dalam Kongres Perempuan Indonesia II ini adalah masalah buruh perempuan, sehubungan dengan masalah yang terjadi di perusahaan batik Laweyan, di mana buruh perempuan telah diperlakukan secara tidak wajar.¹⁴

Pada tahun 1937 atas usaha beberapa perkumpulan perempuan didirikan "Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia" (KPKPAI). Kemudian, pada tanggal 23-27 Juli 1938, diadakan Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung di bawah pimpinan Ny. Emma Puradirejo. Setelah itu, diikuti dengan Kongres Perempuan Indonesia IV di Semarang, pada tanggal 25-28 Juli 1941 dan dipimpin oleh Ny. Soenaryo Mangoenpoesito. Kongres Perempuan Indonesia IV mengusulkan kepada anggota-anggota bangsa Indonesia yang ada dalam Dewan Rakyat (*Volkstraad*), supaya bahasa Indonesia dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib pada semua sekolah menengah. Tuntutan "Indonesia Berparlemen" juga adalah salah satu keputusan kongres. Kongres juga mendukung GAPI (Gabungan Politik Indonesia) untuk menolak terhadap "Rancangan Ordonansi Wajib Militer" yang ditawarkan Pemerintah Hindia Belanda.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

Pada Kongres Perempuan Indonesia di Semarang ini, juga direncanakan Kongres Perempuan Indonesia berikutnya di Surabaya. Kongres Perempuan Indonesia V yang sudah diputuskan ternyata tidak dapat dilaksanakan karena pada tahun 1942, tentara Jepang telah menduduki Hindia Belanda. Dari usaha-usaha yang telah dilakukan perempuan Indonesia di masa pergerakan, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas-aktivitas gerakan perempuan pada masa itu meliputi bidang pendidikan, sosial, budaya, hukum, dan politik. Keharmonisan hubungan dan kerja sama yang baik antara masing-masing organisasi sangat tampak pada saat itu.

Di antara berbagai organisasi perempuan melakukan koordinasi yang baik dan berlomba-lomba melaksanakan berbagai kegiatan dengan berkompetisi secara sehat. Pada tahun 1930 organisasi perempuan Aisyiah mengadakan kursus bahasa Indonesia di berbagai cabang perkumpulan sampai ke daerah.¹⁵ Wanita Taman Siswa membantu Ki Hadjar Dewantara dalam menentang *Wilde Schoolen Ordonantie* atau undang-undang sekolah liar pada tahun 1932.¹⁶ Perkumpulan Istri Sedar yang didirikan di Bandung pada tahun 1930 dengan gigih membantu Taman Siswa untuk menyokong programnya dalam pendidikan nasional yang berdasarkan kebutuhan kaum melarat dan atas dasar-dasar kemerdekaan dan kepercayaan kepada diri sendiri.¹⁷

Jika diamati lebih jauh perkembangan organisasi perempuan pada masa pergerakan, dapat digolongkan kepada beberapa tipe tertentu. *Pertama*, bertipe nasionalis yang terintegrasi dalam pergerakan nasional secara langsung, yang menerima anggota dari

¹⁵ KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 59.

¹⁶ Kegiatan ini adalah perjuangan yang amat gigih untuk mempertahankan pendidikan nasional yang dirintis oleh Ki Hadjar Dewantara dan Nyi Ki Hadjar Dewantara. B.S. Dewantara, *Nyi Ki Hadjar Dewantara* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 117.

¹⁷ Istri Sedar yang berkedudukan di Jakarta mendapat pengawasan yang ketat dari Kepolisian Tinggi Hindia Belanda, akibatnya sekolah-sekolah yang dikelola Istri Sedar di Bandung "Institute Tjahaya" terpaksa diserahkan kepada Taman Siswa, Sumbangsihku, Buku V, hlm. 207.

berbagai unsur dan golongan. Contoh tipe ini adalah Poeteri Mardika (1912), Wanita Oetomo (1921), Wanita Taman Siswa (1926), Poeteri Indonesia (1927) dan Isteri Indonesia (1925). *Kedua*, tipe religius, yaitu; Asyiah (1917), Serikat Perempuan Islam Indonesia (1925), Muslimat (Wanita NU), Wanita Katolik (1924), dan Jong Islamiten Bond bagian putri. *Ketiga*, tipe sosialis. Organisasi perempuan bertipe ini lebih radikal dibanding organisasi perempuan lainnya. Contoh dari tipe organisasi perempuan ini antara lain ialah Istri Sedar (1930) dan Wanita Marhain, kemudian Gerakan Wanita Komunis (1924). Di samping tiga tipe organisasi perempuan yang telah dibicarakan, terdapat pula organisasi-organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang sosial, misalnya Kartini Fonds (1912), Wanita Soesilo, Amai Setia (1914), Wanita Moelyo dan Poeteri Sedjati.¹⁸

B. Indonesia Sekitar Kedatangan Jepang

Awal kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia (Hindia Belanda) pada saat itu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rakyat bersikap simpatik ketika awal-awal kedatangan Jepang. *Pertama*, faktor internal, adanya ramalan Jayabaya sebagai ungkapan aspirasi dari rakyat biasa, bahwa pada suatu saat nanti sudah diramalkan oleh pujangga Jayabaya, seusainya jajahan Belanda, rakyat Indonesia akan dijajah oleh suatu bangsa cebol berkulit kuning yang berasal dari utara.¹⁹ Setelah itu bangsa Indonesia akan bisa meraih kemerdekaan dengan datangnya Ratu Adil. Rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa tidak bisa dilepaskan dengan kepercayaan seperti ini, terutama dengan ramalan Joyoboyo.

Kepercayaan semacam ini disikapi oleh Jepang dengan sangat bijak. Ketika Jepang mengumumkan Perang Pasifik, Jepang bertindak cekatan dengan menyatakan kepada orang-orang Jawa

¹⁸ Tipe organisasi wanita pada masa pergerakan ini, adalah analisis hasil penelitian penulis tentang "Women Organization in Indonesia and Malaysia..." bagian terakhir dari Bab III.

¹⁹ Irna H.N. Hadi Soewito dan Sri Riris Wahyu Widati, *Lasmijah Hadi Perjalanan Tiga Zaman* (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 73.

melalui pamflet-pamflet yang dijatuhkan dari pesawat udara, yang antara lain berbunyi sebagai berikut ini.

.... Kami mengumumkan kedatangan tentara Jepang. Tentara yang akan mendarat di Indonesia untuk memenuhi janji Yang Mulia Jayabaya. . Ingat! Yang Mulia Jayabaya mengatakan bahwa orang kulit kuning dari utara akan datang untuk membebaskan rakyat Indonesia dari perbudakan Belanda.²⁰

Kedua, faktor eksternal, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Faktor ini berperan sebagai sumber inspirasi bagi kaum nasionalisme Indonesia. Selain itu, orang Indonesia juga telah mengenal orang Jepang secara individu dalam bentuk tuan toko, yang memberikan pelayanan yang baik kepada orang-orang Indonesia.²¹ Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa orang masyarakat di Payakumbuh, Sumatra Barat "Sebelum Jepang masuk, kami sudah mengenal orang Jepang, mereka mempunyai toko di pasar, anehnya setelah Jepang mendarat, tuan-tuan toko yang ramah itu sudah menjadi serdadu saja."²²

Pada tanggal 8 Maret 1942 Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, atas nama seluruh Angkatan Perang Sekutu di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Imamura Hitoshi. Sejak itu, dengan resmi Indonesia berada di bawah kekuasaan Kemaharajaan Jepang. Pada tanggal 20 Maret 1942 diumumkan Undang-undang No. 3 yang melarang segala macam bentuk pertemuan, pergerakan, anjuran atau propaganda yang menyangkut hal-hal mengenai peraturan dan penyusunan negara. Undang-undang tersebut diberi penjelasan antara lain, menyatakan bahwa peraturan tersebut dibuat untuk sementara

²⁰ Brian May, *The Indonesian Tragedy* (London, Henley and Boston, 1978), hlm. 54.

²¹ Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia* (Jakarta, 1979), hlm. 13-14.

²² Wawancara dengan beberapa masyarakat di Payakumbuh ketika penulis melakukan penelitian tentang PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia tahun 2018).

waktu mencegah timbulnya kekuatan politik di Indonesia, dan agar rakyat memikirkan sedalam-dalamnya bagaimana cara bekerja sama dengan pemerintahan pendudukan.²³

Segera setelah kedatangan Jepang ke Indonesia, pada bulan Maret 1943 pemerintahan Jepang membubarkan organisasi politik yang ada, menghentikan seluruh perundingan, dan propaganda yang berhubungan dengan konstitusi atau struktur pemerintahan. Hanya organisasi-organisasi yang berhubungan dengan olahraga dan kesenian yang dibiarkan.²⁴ Sebagai contoh, seperti yang dikisahkan oleh Ny. Bintang Soedibjo (Ibu Soed) sebagai berikut ini.²⁵

Saya masih bersyukur karena dalam hal ini, Jepang memberikan kesempatan kepada kami para seniman musik untuk berkembang. Para seniman musik, seni lukis, dan seniman lainnya diberi wadah. *Keimin Bunka Shidosho* (kantor kesenian) bertempat di Harmoni. Untuk para musisi, gairah mencipta besar sekali. Lagu-lagu perjuangan mulai diciptakan. Pada masa inilah diciptakan lagu-lagu seperti; Menanam Jagung, Beca, Akulah Pahlawan dan lain sebagainya.

Hal semacam ini, tentu juga tidak terlepas dari maksud-maksud tertentu Jepang. Dengan membiarkan bidang-bidang kesenian berkembang akan mempermudah Jepang dalam melakukan propagandanya, terutama dengan membiarkan untuk menghasilkan berbagai lagu-lagu perjuangan tentu akan semakin memperkuat rasa patriotisme masyarakat sehingga dengan demikian, diharapkan akan menimbulkan sikap-sikap dan semangat perjuangan yang semakin kuat di kalangan masyarakat.

Kebijakan ini mengecewakan pemimpin-pemimpin Indonesia, karena mereka berpikir setelah hengkangnya Belanda dari tanah air mereka akan bebas melaksanakan aktivitas-aktivitas politik mereka. Secara politik, Jepang sangat mencurigai gerak-gerik Belanda, karena

²³ *Kan-Po*, no. Istimewa, 2602 (1942), hlm. 6-7.

²⁴ Oshamu seirai, no. 2. dalam F A Rachmat Ishaya, *Indonesian Womens...*, *op.cit.*, hlm. 2.

²⁵ Lasmidjah Hardi, *Sumbangsihku bagi Ibu Pertiwi: Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran*, Buku I (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 269.

mereka dianggap akan menggerakkan kembali pemerintahan, perdagangan dan industri di Indonesia. Lebih lagi, ketika Jepang mengetahui organisasi ilegal Belanda masuk untuk mengambil alih kekuasaan kembali setelah sampainya kekuatan sekutu, yaitu sekitar 120.000 orang-orang Belanda yang ditempatkan di kamp-kamp pengungsi.

Ketika kedatangan Jepang di Indonesia, terdapat dua sikap politik pemimpin-pemimpin Indonesia yang muncul pada saat itu. *Pertama*, melihat Jepang sebagai musuh yang dianggap fasis. Kelompok ini tidak bersedia bekerja sama dengan Jepang. Kelompok ini mengorganisir anggotanya untuk mempropagandakan sikap dan perasaan anti-Jepang. Contoh kelompok ini adalah kelompok Amir Syarifuddin, kelompok Syahrir, Barisan Kemerdekaan Rakyat Indonesia (BKRI), Komunis, Marheinis, kelompok "samari" di Jawa Tengah dan kelompok-kelompok Islam sejati.

Kategori pemimpin politik yang *kedua* adalah mereka yang menganggap situasi Indonesia sudah sangat kritis, sementara kekuatan masyarakat sangat lemah. Jika tidak bekerja sama dengan Jepang, ada kemungkinan Belanda akan bercokol kembali sehingga bekerjasama dengan Jepang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama, yaitu kemerdekaan bangsa. Contoh kelompok ini adalah Soekarno yang bersedia bekerja sama dengan Jepang. Menurut kelompok ini, bekerja sama dengan Jepang akan terhindar dari kepentingan yang tidak diinginkan dari *Kompeitai* (Korps Polisi Militer). Di samping itu, bagi pemimpin-pemimpin muslim yang mau bekerja sama dengan Jepang akan mampu untuk memberi pengaruh yang besar terhadap masyarakat.

Kerja sama ini diawali dengan tindakan pemerintahan pendudukan militer Jepang membebaskan pimpinan-pimpinan nasionalis Indonesia, yang sebelumnya ditawan oleh pemerintah Hindia Belanda, antara lain, Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir. Dalam pertemuan antara Mohammad Hatta dengan Wakil Kepala Staf Tentara Keenam Belas (Jenderal Harada), Hatta menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan pihak Jepang, setelah Harada menekankan bahwa tujuan pemerintahan Jepang

bukan untuk menjajah Indonesia, melainkan untuk membebaskan bangsa Asia dari dominasi negara Barat.²⁶

Meskipun terdapat perbedaan sikap dalam menghadapi Jepang, kedua kelompok ini sebetulnya memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Mereka selalu melakukan kontak satu sama lain untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kemerdekaan, terutama setelah dua tahun pendudukan Jepang.

Sebagaimana tokoh-tokoh politik lainnya, perempuan Indonesia juga dilarang melakukan berbagai aktivitas politik selama pendudukan Jepang. Pemerintah Jepang melancarkan propaganda terhadap perempuan Indonesia, bahwa sebagai perempuan Asia, perempuan Indonesia harus melihat ke perempuan Jepang. Perempuan mempunyai tanggung jawab besar terhadap keluarga dan masyarakat agar memenangkan peperangan Asia Timur Raya. Pada awal-awal kedatangan Jepang, perempuan Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan penuh sukacita. Hal demikian tentu tidak terlepas dari janji-janji serta harapan-harapan besar yang dilontarkan oleh pemerintahan Jepang, yang diawali dengan semboyan tiga A (Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia dan Jepang pelindung Asia). Semenjak tahun 1944 mobilisasi tenaga perempuan semakin dilipatgandakan. Tenaga perempuan mulai dikerahkan sebagai pengganti tenaga laki-laki, maka Fujinkai adalah sebagai pelopor dan tulang punggung dalam gerakan ini. Sebagai contoh pada saat itu, Fujinkai se-Jawa Timur mengadakan musyawarah khusus dengan mengambil keputusan siap untuk menggantikan tenaga laki-laki di perkantoran, perusahaan, rumah sakit, sekolah, ladang dan kebun-kebun.²⁷ Pengarahan tenaga laki-laki yang diutamakan untuk pekerjaan berkaitan dengan perang oleh pemerintahan Jepang dianggap lebih penting. Pada tahun 1944, pengerahan tenaga laki-laki meliputi seluruh lapisan seperti yang terjadi di Malang, dikeluarkan satu keputusan kepada semua majikan yang mempunyai pegawai laki-laki berumur 16-45 tahun termasuk tukang kebun dan

²⁶ Mohammad Hatta, *Memoir* (Jakarta, 1979), hlm. 400.

²⁷ *Asia Raya*, 27 November 1944.

jongos (pembantu) diharuskan menggantikan pegawainya dengan tenaga perempuan.²⁸ Sesuai dengan anjuran pemerintah tersebut, untuk menggantikan tenaga laki-laki dengan tenaga perempuan, maka bersamaan dengan pengumuman pemerintahan Agung di Tokyo tentang perkenanan Indonesia merdeka di kemudian hari, segerombolan anggota Fujinkai Malang telah mengajukan diri untuk bekerja sukarela di kantor Pos.²⁹

Dalam kehidupan sehari-hari, lama kelamaan sikap Jepang terhadap perempuan Indonesia jauh dari yang diagung-agungkan Jepang. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lebih rendah dari laki-laki. Banyak perempuan Indonesia yang tertipu, meskipun dijanjikan sebagai guru atau dilatih sebagai perawat, tetapi dalam kenyataannya Jepang banyak mempekerjakan mereka sebagai pekerja seks di rumah-rumah pelacuran militer Jepang.³⁰ Pengakuan beberapa pembesar Indonesia yang berada di bawah kekuasaan militer Jepang adalah ketidakmampuannya menolak, baik karena alasan pribadi maupun politik. Selain itu, dalam kenyataannya orang Indonesia yang diminta dukungan dan bantuannya dalam masalah ini adalah mereka yang menjadi pengurus dari salah satu organisasi yang dibentuk oleh Jepang.³¹

C. Sistem Pemerintahan Pendudukan Jepang di Indonesia

Pada tanggal 8 Maret 1942, hanya tujuh hari setelah tentara Jepang mendarat di Banten, Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Otomatis sejak saat itu wilayah Hindia Belanda, yang sekarang disebut Indonesia, dikuasai oleh pemerintahan militer Jepang. Pemerintahan pendudukan Jepang ini membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian. Pulau Sumatra

²⁸ *Asia Raya*, 28 November, 1944.

²⁹ "Kaoem wanita siap menggantikan tenaga laki-laki", *Ibid.*

³⁰ Wawancara, Ki. Nayono, Yogyakarta, 7 Februari 1999.

³¹ A Budi Hartono dan Dadang Juliantoro, *Derita Paksa Perempuan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), hlm. 69.

dan Jawa berada di bawah kekuasaan pemerintahan militer Angkatan Darat (*Rikugun*), sedangkan Kalimantan dan daerah yang sebelumnya disebut sebagai daerah "Timur Besar" (*Grote Oost*) dikuasai pemerintah militer Angkatan Laut (*Kaigun*).

Adapun pusat komando tentara Jepang di Asia Tenggara berada di Saigon. Di bawahnya terdapat pasukan yang disebut Komando Tentara Angkatan ke-7 dengan markas besar di Singapura. Ia membawahi Angkatan Darat ke-25 yang menguasai Sumatra dan bermarkas di Bukit Tinggi. Sementara Pulau Jawa dan Madura berada di bawah Angkatan Darat ke-16 yang bermarkas di Jakarta.

Pemerintahan militer Jepang menjalankan tiga prinsip utama dalam pemerintahannya. *Pertama*, mengusahakan mendapatkan dukungan rakyat untuk memenangkan perang dan mempertahankan ketertiban umum. *Kedua*, memanfaatkan sebanyak-banyaknya struktur pemerintahan yang telah ada. *Ketiga*, meletakkan dasar agar wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sebagai pusat persediaan makanan bagi wilayah selatan (*Nan-yo*).³²

Kebijakan pemerintah di daerah yang dikuasai Angkatan Darat (AD) dan Angkatan Laut (AL) sangat berbeda. Pulau Jawa yang diperintah oleh AD, dianggap sebagai daerah yang paling maju di bidang politik, namun secara ekonomi dianggap kurang penting. Penduduk Pulau Jawa yang melimpah adalah sumber daya utamabagi Jepang. Di wilayah yang dikuasai Angkatan laut, masyarakat dianggap terbelakang secara politik, namun penting secara ekonomi. Di sini pemerintah militer sangat menindas. Tujuan utama Jepang adalah menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan rencananya mendominasi ekonomi di Asia Timur dan Tenggara.³³

Pembagian administratif seperti ini sedikit banyak juga mencerminkan perbedaan kepentingan Jepang terhadap masing-

³² A.B. Lopian dan J.R. Chaniago (ed.), *Di bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya* (Jakarta: Arsip Nasional, 1989), hlm. 2.

³³ M.C. Riclefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (terj.), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 297-300.

masing wilayah, baik dari segi militer, politik, maupun ekonomi. Di Jawa, kekuasaan Jepang yang berada di bawah tentara ke-16, lebih mengutamakan kerja sama politik, di samping sumber tenaga kerja dan bahan makanan (beras) untuk diekspor ke seluruh Asia Tenggara.³⁴ Hal semacam ini akan memperlihatkan intensitas kebijakan pemerintahan militer di bidang-bidang tertentu terhadap masing-masing wilayah pendudukan. Karena di Jawa lebih mengutamakan sumber tenaga kerja dan kebutuhan bahan makanan, maka lembaga-lembaga seperti, *Keibodan* (Barisan Pembantu Polisi), *Seinendan* (Barisan Pemuda), *Tonarigumi* (Rukun Tetangga) termasuk *Fujinkai* (Oraganisasi Perempuan) lebih intensif keberadaannya di Jawa dan Madura dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

Pimpinan tertinggi pasukan Jepang juga menjadi pimpinan pemerintahan militer. Di Jawa, pemerintahan tentara ke-16 disebut dengan kode *Osamu*. Panglimanya dikenal dengan *Gunshireikan* atau *Saiko Shikikan*. Kegiatan pemerintahan militer sehari-hari dilaksanakan oleh kepala stafnya yang disebut dengan *Gunseikan*. Kedua pejabat pemerintah militer ini berhak mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh *Saiko Shikikan*, disebut *Osamu Seirei*. Yang dikeluarkan *Gunseikan* disebut *Osamu kanrei*. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditemui dalam *Kan-po* (berita pemerintah) yang merupakan organ resmi yang dikeluarkan *Gunseikanbu* (Kantor Kepala Pemerintahan Militer).

Selama 1943-1945, *Saiko Shikikan* dan *Gunseikan* di Jawa berganti tiga kali. *Saiko Shikikan* berturut-turut adalah Letnan Jenderal Yaichiro Nagano, *Gunseikannya* berturut-turut adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki, Mayor Jenderal Shinschichiro Kokubu, dan Mayor Jenderal Moichiro Yamamamoto.

Pada tanggal 7 Maret 1942, Panglima tentara ke-16 di Jawa mengeluarkan Undang-undang (UU) No. 1, yang di dalamnya terdapat

³⁴ Mestika Zed, (2005) *Giyugun: cikal-bakal tentara nasional di Sumatera*, Jakarta: LP3S, hal 13

empat pasal penting yang berhubungan dengan pemerintahan sementara di Indonesia. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa bala tentara Jepang melangsungkan pemerintahan militer sementara waktu di daerah-daerah yang telah diduduki agar mendatangkan keamanan dengan segera. Pasal 2 menyatakan bahwa pembesar bala tentara memegang kekuasaan yang dulu berada di tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pasal 3 menyatakan semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan hukum, serta UU dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan aturan pemerintahan militer. Sedangkan pasal 4 mengumumkan bahwa bala tentara Jepang akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia kepada Jepang.³⁵

Berdasarkan Undang-undang tersebut dibentuklah pemerintahan militer di tingkat pusat (*Gunseikanbu*) dan pemerintah militer di tiga tempat (Bandung, Semarang dan Surabaya) yang disebut *Gunseibu*. Kantor *Gunseikanbu* dipimpin oleh *Gunseikan* (Kepala Staf Tentara) dan membawahi sejumlah *bu* atau departemen, yaitu berikut ini.

1. Departemen Urusan Umum (*Somubu*)
2. Departemen Dalam Negeri (*Naimubu*)
3. Departemen Perekonomian (*Sangyobu*)
4. Departemen Keuangan (*Zaimubu*)
5. Departemen Kehakiman (*Shidobu*)
6. Departemen Kepolisian (*Keimubu*)
7. Departemen Lalu Lintas (*Kotsubu*)
8. Departemen Propaganda (*Sendenbu*)

Berbagai urusan yang tidak tercakup ke dalam departemen tersebut, misalnya pendidikan, perburuhan, sosial, dan sebagainya dimasukkan ke dalam Departemen Dalam negeri (*Naimubu*).³⁶

Pada bulan Agustus 1942 pemerintahan militer mengeluarkan UU No. 27 dan 28. Dengan demikian, pemerintahan sementara

³⁵ *Ibid.*

³⁶ A.B. Lopian dan J.R. Chaniago, *op. cit.* hlm. 16.

dihapuskan menurut UU No. 27, kemudian pemerintahan militer di Jawa dan Madura dibagi atas *Shu* (keresidenan) dan *Kochi* (daerah istimewa). *Shu* sama dengan keresidenan di zaman Hindia Belanda dan dibagi atas *Shi* dan *Ken*. *Shi* sama dengan kota praja, dan *Ken* setingkat dengan kabupaten. Di bawah *Ken* adalah *Gun*, *Son* dan *Ku*. *Gun* adalah kewedanaan, *Son* sama dengan kecamatan, dan *Ku* sama dengan kelurahan atau desa di zaman dulu. Dengan UU ini, bentuk *Gunseibu* dalam pemerintahan dihapus. Sedangkan pemerintahan pusat atau *Gunseikanbu* tetap berjalan seperti biasa.

Kemudian seluruh Jawa dibagi menjadi 17 *Shu* (keresidenan), yang meliputi Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura. Dengan dibentuknya *Shu* tersebut, kantor *Gunseikanbu-Naimubu* juga harus membentuk bagian khusus yang mengurus soal pemerintahan daerah. Daerah swatantra Yogyakarta dan Surakarta juga disebut *Shu*. Pemerintahannya tetap dipegang oleh pemerintah tradisional, yang masing-masing didampingi oleh seorang gubernur jabatan kepala bagian di tingkat pusat, residen dan gubernur diduduki oleh orang Jepang. Sementara jabatan Bupati ke bawah dipegang oleh kaum bumiputra. Sedikit berbeda dengan di Sumatra, pemerintahan militer di Sumatra dibagi menjadi *Shu* (keresidenan), *Bunsho* (kabupaten) atau *Afdeeling* pada zaman Belanda, *Gun* (kewedanaan), dan *Son* (Kecamatan).³⁷ Kemudian, pemerintah militer membagi Sumatra dalam sembilan *Shu*, yaitu, Sumatra Timur, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka-Belitung. Sedangkan Pemerintahan Militer Angkatan Laut membentuk *Minseifu* (Kantor Pemerintahan Sipil); yakni Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil, yang dibagi lagi menjadi *Shu*, *Ken*, *Bunken*, *Gun* dan *Son*. Semua jabatan dipegang oleh orang Jepang.³⁸

Pemerintahan pendudukan Jepang telah menimbulkan kesengsaraan yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Zaman

³⁷ Mestika Zed, *op cit.* hlm. 19.

³⁸ Arniati Prasedyawati Herkusumo, *op cit.* hlm. 11.

pendudukan Jepang adalah satu-satunya periode selama dua abad yang tidak berhasil meningkatkan jumlah penduduk Indonesia secara berarti. Suasana sehari-hari rakyat Indonesia diisi dengan kekacauan ekonomi, teror polisi militer (*Kempeitei*), kerja paksa dan penyerahan wajib beras, kesombongan dan kekejaman orang Jepang. Maka, seperti wilayah pendudukan lainnya, Indonesia menjadi suatu negeri yang tingkat penderitaan, inflasi, ketekoran, pencatutan, korupsi, pasar gelap, dan kematiannya mencapai tingkat paling tinggi.³⁹

D. Kebijakan Politik Perang Jepang terhadap Perempuan

Di Jepang, periode Tokugawa (1600–1868) disebut dengan periode feodal. Pada masa ini terjadi asimilasi dengan kebudayaan Cina dengan ideologi agama yang didominasi oleh Konfusianisme dan Buddhisme. Dalam ajaran Konfusius, perempuan diibaratkan sebagai *Yin*, yang memiliki sifat lembut, kalem, dan penurut. Sementara laki-laki dilambangkan sebagai *Yang*, yang berarti keras, berani, aktif, dan agresif. Dalam ideologi filosofi ini perempuan dianggap inferior dan subordinat.⁴⁰

Sebelum menikah, perempuan Jepang diatur oleh ayahnya. Setelah menikah, perempuan dikontrol oleh suaminya. Seperti yang diungkapkan oleh Kaibara Ekiken dalam bukunya *Onna Daigaku*:

*A women has no particular lord. She must took to her husband as her lord, and must serve him with all worship and reverence, not despising or thinking lightly of him. The great lifelong duty of a women is obedience.*⁴¹

Dalam konteks ini, jelas bahwa seorang perempuan Jepang harus menghamba dan mengabdikan seluruh kehidupannya kepada laki-laki, terutama suami.

³⁹ M.C. Ricklefs, *Op. cit.*, hlm. 300-301.

⁴⁰ Akiko Tokura, *The Rise of the Feminist Movement in Japan* (Tokyo: Keio University Press, 2000), hlm. 40.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 41.

Sehubungan dengan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, istri tidak diizinkan meninggalkan rumah. Istri yang gagal melayani suaminya berhak untuk dicerai. *Onna Daigaku* menyebutkan, ada tujuh alasan bagi istri dicerai: *disobedience, sterility, lewdness, jealous, contagious disease, verbosity, and theft*⁴² (tidak patuh, mandul, selingkuh, cemburu, penyakit menular, berbicara bertele-tele, dan mencuri). Sementara itu, perempuan juga tidak memiliki hak untuk minta cerai dan menceraikan. Dalam pendidikan keluarga, anak perempuan dibatasi memperoleh pendidikan kecuali pengetahuan yang berhubungan untuk persiapan setelah menikah agar menjadi seorang istri yang baik.

Ketika periode Meiji (1869-1912), terjadi perubahan besar-besaran dalam pemerintahan Jepang, termasuk terhadap perempuan. Di bidang politik, pemerintah Meiji memutuskan membentuk pemerintahan yang demokratis. Di bidang pendidikan, mengembangkan dan memperluas pendidikan termasuk bagi perempuan. Di bidang ekonomi, meningkatkan industri yang *profit-oriented* dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya dengan memberikan kesempatan yang sama baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk bekerja di luar rumah.⁴³

Setelah periode Meiji perempuan Jepang memperlihatkan perkembangan yang luar biasa dalam sejarah gerakan perempuan di Jepang. Gerakan-gerakan perempuan mulai mengambil tempat seperti, organisasi perempuan *Shin Fujin Kyokai (New Women's Association)* dan dipimpin oleh Hiratsuka Raicho, Ichikawa Fusae, dan Oku Mumeo yang didirikan pada bulan Desember 1919. Organisasi ini, telah berhasil merevisi *Public Order* dan *Police Law* pada bulan April 1922, yang memberi hak kepada perempuan untuk mengatur dan ambil bagian dalam seluruh pertemuan dan kebijakan politik di Jepang.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, hlm. 43.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 78.

⁴⁴ *Ibid.*



Gambar 4.1 Hiratsuka, Raicho, (1886 - 1971) <https://www.ndl.go.jp>; Ichikawa Fusae, Ichikawa Fusae (市川 房枝, May 15, 1893 – February 11, 1981); <https://en.wikipedia.org/>

Suasana perang telah menimbulkan atmosfir lain bagi perempuan. Kebutuhan perang telah menyebabkan kebutuhan yang luar biasa di bidang ekonomi dan politik yang harus melibatkan perempuan secara utuh dan tidak tanggung-tanggung. Fase ini disebut juga dengan fase mobilisasi bagi seluruh masyarakat termasuk perempuan. Perempuan mulai kembali diindokrinasi dengan peran-peran khusus yang sudah melekat pada dirinya, seperti: memasak, mencuci dan dunia profesi yang dianggap milik perempuan selama ini. Perempuan diilhami dengan keadaan yang mendesak tentang “hubungan politik dan dapur”.

Terdapat beberapa alasan penting yang menyebabkan perlunya mobilisasi perempuan di masa perang. Pertama, tuntutan masyarakat akan kebutuhan ekonomi industrialis dan kedua, pandangan asimilasi sektoral dalam masyarakat.⁴⁵ Masyarakat industri modern menuntut partisipasi perempuan dalam kebutuhan tenaga kerja buruh, terutama di waktu perang. Ketika laki-laki meninggalkan pekerjaannya maka perempuan siap dipekerjakan sebagai penggantinya. Di samping itu, munculnya patriotisme perempuan yang disebabkan propaganda perang mengharuskan perempuan masuk ke sektor tenaga kerja.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 213.

⁴⁶ Leila J. Rupp. *Mobilizing Women For War: German and American Propaganda*

Sebuah artikel yang menceritakan tentang perempuan Jepang, yang berjudul "Kaoem Perempuan Jepang di saat Perang Asia Timur Raya", yang ditulis oleh Nona Djoedjeoran dan Nona Saparsih,⁴⁷ menceritakan antara lain berikut ini. Ny. Sudjono istri Sudjono, residen (*Shuchocan*) di Jakarta bersama keluarganya pernah beberapa lama tinggal di Jepang. Mereka kembali ke Indonesia pada tahun 1942 bersama rombongan tentara Jepang dan dipimpin oleh Jenderal Imamura. Setelah tiba di Indonesia ia menceritakan bagaimana keadaan perempuan Jepang di masa perang. Di masa perang ini, pekerjaan yang masa damai dilakukan oleh kaum laki-laki sekarang dilakukan oleh kaum perempuan. Kaum laki-laki Jepang tidak perlu lagi memikirkan keadaan di tanah airnya, karena perempuan Jepang telah dapat menggantikannya.

Berawal dari kegagalan Jepang, Italia, dan Uni Soviet dalam Perang Dunia I, mengusulkan Jepang untuk menghasilkan AMO (*Administrated Mass Organization*), termasuk *AMO's Women*. Semenjak tahun 1930-an Jepang mempertunjukkan tiga AMO untuk perempuan. *The Great Japan Federated Women's Association* (*Dai Nippon Rengo Fujinkai*) untuk menggalakkan ekonomi rumah tangga, kesehatan dan moral selama depresi ekonomi; *the National Defense Women's Association* (*Kokubo Fujinkai*) di Osaka untuk membantu pasukan dalam pindah.⁴⁸ Dalam tahun 1942, muncul *The Great Japan Women's Association* yang ditargetkan sebagai organisasi perempuan tunggal. Dalam organisasi ini telah terdaftar 15,8 juta anggota yang terdiri dari perempuan yang berumur 20 tahun ke atas.⁴⁹ Dalam tahun 1942, setelah terjadi percekocokan di antara organisasi ini, pemerintah Jepang menggabungkan organisasi-organisasi ini ke dalam sebuah organisasi *Great Women Association*. Organisasi perempuan ini menggambarkan sari pati dari AMO's

1939-1945 (New Jersey: Princeton University Press, 1978), hlm. 4.

⁴⁷ "Kaoem Perempuan Jepang di saat Perang Asia Timur Raya" oleh Nona Djoedjeoran dan Nona Saparsih, *Pandji Poestaka*, no 8. 2602 (1942).

⁴⁸ Gregory J. Kasza, *The Conscript Society: Administreted Mass Organizations* (New Haven and London: Yale University Press, 1995), hlm. 87.

⁴⁹ *Ibid.*

Women. Ia ditargetkan sebagai organisasi perempuan satu-satunya, yang merekrut anggotanya, yang terdiri dari perempuan yang berumur di atas 20 tahun dan telah menikah, yang telah terdaftar sebanyak 15.8 juta anggota atau 78,4 % perempuan telah memenuhi persyaratan ini.⁵⁰

Pemerintah menempatkan organisasi perempuan ini di bawah enam kementerian. Jepang mempersiapkan beberapa pimpinan lokal sebelum merekrut para anggotanya. Ia adalah lembaga perantara untuk persiapan Jepang menghadapi perang massa. Perempuan mulai mendukung ekonomi perang dengan mengumpulkan uang untuk pesawat terbang, daur ulang sampah, mencuci pakaian di rumah sakit dan mempersiapkan makanan di daerah latihan pertahanan udara. Perempuan dianjurkan untuk memberantas hidup mewah, untuk menyederhanakan upacara perkawinan dan seremoni pemakaman. Mereka mengajarkan kepada kaum perempuan nilai-nilai makanan yang bergizi, murah dan sehat untuk dikonsumsi. Setiap bulan ibu-ibu harus berhemat dalam mengatur anak-anak mereka dengan semboyan *Rising Sun Lunch Box*, yaitu sepiring nasi dan seiris buah yang ditaruh di tengah piring, mirip seperti bendera Jepang.

Semenjak tahun 1940, perempuan telah membangkitkan tenaga kerja pedesaan, mereka memproduksi kebutuhan-kebutuhan perang di rumah, memproduksi obat nyamuk, sandal dan industri rumah tangga, mengumpulkan makanan ternak dan menanami wilayah yang kosong. Setelah tahun 1942, organisasi perempuan ini dijadikan sebagai perekrut tenaga kerja perempuan yang berumur dari 14-15 tahun oleh pemerintah. Awal tahun 1943 telah terkumpul tiga juta tenaga perempuan.⁵¹

Semenjak tahun 1940, banyak tokoh perempuan yang mendukung kebijakan pemerintah dalam mobilisasi tenaga perempuan ini, meskipun rezim selalu menekankan peran-peran tradisional istri dan ibu. Barangkali faktor rasa patriotisme lebih utama sebagai dasar pertimbangan oleh perempuan. Di samping

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 90-91.

⁵¹ *Ibid.*

itu tokoh-tokoh perempuan seperti, *Muneo Oka*, seorang aktivis perempuan terkenal di Jepang, melihat bahwa retorika pemerintah dalam hal ini sangat bertentangan. Perang telah membawa perempuan ke luar rumah untuk mengisi peran-peran publik, yang selama ini perempuan sedikit sekali mendapat tempat. Menurutnya, sebagai contoh, jumlah perawat meningkat sepuluh kali lipat hingga mencapai 33.949 orang.⁵²

Hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh *Shigeru Sato* dalam bukunya "War Nationalism and Peasants: Java under the Japanese Occupation 1942-1945" menyebutkan bahwa Jepang telah menghasilkan organisasi *Fujinkai*, *Keibodan* dan *Seinendan* untuk mendukung pemerintahan militer Jepang. Dari ketiga organisasi ini, organisasi perempuan *Fujinkai* telah memainkan peran penting dalam perang Jepang. Pada bulan Februari 1940, kabinet menggabungkan seluruh organisasi perempuan yang sudah ada ke dalam *the Great Japan's Women Association (Dai Nippon Fujinkai)* dengan keanggotaan wajib bagi perempuan yang berumur dua puluh tahun ke atas.⁵³ Pada bulan Juli 1945 dibentuk prajurit perempuan untuk bertempur di garis depan dengan menggunakan bambu runcing, adalah cabang dari *Fujinkai* yang khusus dipersiapkan sewaktu-waktu untuk melawan kekuatan musuh yang akan meyerang negeri Jepang.⁵⁴

Keberhasilan organisasi perempuan (*Fujinkai*) yang dibentuk di Jepang dijadikan contoh untuk diterapkan di Indonesia. Tahun 1943, pemerintah militer Jepang membentuk organisasi perempuan *Fujinkai*, yang strukturnya sama dengan yang dibentuk di Jepang. Organisasi ini, wajib diikuti oleh istri-istri para birokrat pemerintah. Kemudian dalam tahun 1944 *Fujinkai* dimasukkan dalam struktur organisasi propaganda Jepang *Jawa Hokokai*.⁵⁵

⁵² *Ibid.*, hlm. 92.

⁵³ *Shigeru Sato, War Nationalism and Peasants: Java Under the Japanese Occupation 1942-1945 (Asian Studies Association of Australia in association with ALLEN & UNWIN, 1994), hlm. 20.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Kekurangan tenaga laki-laki dan tuntutan perang menyebabkan Jepang membutuhkan tenaga perempuan, seperti yang terdapat dalam iklan sebagai berikut ini.

Ditjari:

100 perempoean berumur 17-25 tahun oentoek dikerdjakan di Tandjoeng Perioek

3 orang perempoean Indonesia/Tionghoa beroemoer 17-28 Sekolah Menengah Poeteri 2 atau 3 tahoen

4 peladjar perempoean beroemoer 15-16 tahoen beridjazah SR 6 tahoen

1 pendjaga telpon

Pelamar haroes datang sendiri ke Kali Besar Barat No. 18/16 Djakarta Kota.⁵⁶

Di samping itu, pemerintahan Jepang membuka Sekolah Kepandaian Putri di seluruh kota dan sekolah-sekolah yang mengajarkan dan memperkenalkan segala budaya Jepang sebagai "Saudaraku". Pembukaan sekolah-sekolah putri ini disponsori oleh *Gerakan Tiga A*, misalnya Sekolah Rakjat Poeteri Islam yang dibuka oleh Nj. Sitti Nurdjanah atas nama *Gerakan Tiga A*⁵⁷. Pada tanggal 3 November 1943 di Jakarta dibentuk *Tokobetsu Shi Fujinkai*, dan dipimpin oleh Ny. R.A. Abdurrachman.⁵⁸ Para pemimpin *Fujinkai* adalah istri-istri Bupati dari tingkat atas sampai di tingkat kecamatan. Tugas pokok *Fujinkai* adalah membantu penyiagaan di garis depan dengan memperkuat garis belakang. Untuk mengefektifkan pengerahan tenaga rakyat, seluruh cabang-cabang *Fujinkai* yang selama ini telah berdiri digabungkan ke dalam *Djawa Hokokai Fujinkai*, termasuk *Fujinkai* yang beranggotakan bangsa Tionghoa yang disebut *Fu Ni Fu*, disatukan ke dalam *Djawa Hokokai*. Peleburan organisasi *Fujinkai* ini tertuang dalam "Peratoeran-peratoeran *Djawa Hokokai*, Himpoenan Kebaktian Rakjat", khusus bagian IV yang mengatur tentang perkumpulan perempuan atau *Fujinkai* pasal 49.

⁵⁶ *Asia Raya*, 25 Agustus 1944.

⁵⁷ *Pandji Poestaka*, no. 17, 1 Juni 1942.

⁵⁸ *Pandji Poestaka*, no. 17, 1 November 1943.

"Huzinkai jang soedah dibentoeek menoeeroet tjara-tjara sebelum peratoeran ini, dipandang sebagai didirikan menoeeroet peratoeran choesoos ini."⁵⁹

Adapun tentang tujuan *Fujinkai* tertulis dalam Peratoeran-peratoeran *Djawa Hokokai* pasal 46, yaitu berikut ini.

*Hokokai Huzinkai haroes mendjalankan pekerdjaan Hokokai berdasarkan kewanitaan. Selain dari pada itu haroes melakoekan pekerdjaan jang memperbaiki kehidoepan, memelihara anak, mendjaga kesehatan, memilih makanan jang menjehatkan (menjelidiki pengganti makanan), merawat sementara waktoe terhadap ketjelakaan, manaboeng uang, mendidik dalam roemah tangga, memberantas boeta hoeroef dan lain-lain pekerdjaan jang pa-toet dilakoekan oleh wanita.*⁶⁰

Dengan demikian, jika dilihat dari aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintahan Jepang tentang *Fujinkai*, secara substansial baik *Fujinkai* di Jepang maupun *Fujinkai* yang diciptakan di Indonesia ternyata mempunyai kepentingan yang sama, yaitu untuk memobilisasi tenaga perempuan guna kepentingan perang Asia Timur Raya.

Pada tahun 1944, tenaga perempuan juga direncanakan untuk dikirim ke garis depan. Pemerintah mendirikan perkumpulan-perkumpulan militer untuk putri, seperti *Barisan Srikandi*, *Yoshi Seinendan*, dan *Yoshi Seishintai* di Jawa. Mereka diajarkan tentang kemiliteran, antara lain mempergunakan senjata yang terbuat dari kayu, keperawatan dan dapur umum. *Yoshi Seinendan* dididik selama 5-6 bulan dalam satu asrama. Mereka pada umumnya anak Pangreh Praja yang dikumpulkan oleh tentara Jepang.⁶¹ Para orang tua pada umumnya merasa khawatir untuk melepas anak perempuannya, namun pembentukan tentara putri adalah satu pemaksaan, karena setiap desa harus mengirimkan satu putri setiap kali latihan.⁶²

⁵⁹ Peratoeran Choesoos, Bagian IV, HOEZINKAI (perkoempoelan Kaoem Wanita), Almanak Asia Raya, 1944, p. 170-172.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Wawancara dengan Ny. Kalidjo, dalam Siti Husanah, *skripsi*, hlm. 104.

⁶² *Asia Raya*, 30 Maret 1944; Wawancara dengan Ki Najono, Yogyakarta, 20 Februari 1999.

Dalam mengerahkan tenaga perempuan untuk bekerja, Pangreh Praja bekerja sama dengan *Fujinkai*, karena secara struktur organisasi *Fujinkai* mempunyai tanggung jawab untuk menyukseskan program-program yang telah diatur oleh pemerintahan Jepang. Pangreh Praja tinggal memerintahkan apa yang harus dilakukan perempuan kepada *Fujinkai*. Kemudian *Fujinkai* meneruskannya kepada kaum perempuan di daerah-daerahnya. Seperti penanaman kapas, penanaman pohon jarak, menenun, mengumpulkan perhiasan untuk dana perang Jepang, semuanya dikoordinasi oleh *Fujinkai*, kemudian hasilnya diserahkan kepada Pangreh Praja sebagai wakil dari pemerintahan Jepang. Pangreh Praja adalah perpanjangan tangan dari pemerintahan pendudukan Jepang di desa-desa dan bagian dari organisasi *Djawa Hokokai* yang harus bekerja untuk kepentingan Jepang.

Sehubungan dengan kebijakan Jepang terhadap perempuan ini, terdapat beberapa tokoh perempuan Indonesia yang menentang kebijakan ini secara diam-diam-diam dan terang-terangan, antara lain, seperti: S.K. Trimurti, Herawati Daiyah, Sofia Sarwono dan lain-lain. Dalam suatu rapat yang diadakan oleh seksi propaganda yang dikepalai oleh *Simizhu* untuk membentuk *Fujinkai*, Ny. Sujatin Kartiwidjono dengan lantang menolak pembentukan tersebut, tetapi seketika setelah itu ia mendapat selembur kertas yang berisikan "awas kempeitai". Ternyata ia telah dibuntuti terus oleh seorang intel (tantara) karena telah termasuk dalam daftar hitam.⁶³ S.K. Trimurti masuk ke dalam tahanan *Kempetai* dengan mendapat hukuman yang berat di penjara Jurnaton, Semarang. *Kempetai* itu bernama Nedoci. Ia dianggap penentang kebijakan Jepang terutama dengan hadirnya organisasi perempuan *Fujinkai*. Ia disiksa dan dipukul kepalanya berulang kali sampai pingsan. Ia dapat diselamatkan atas jaminan Soekarno, kemudian pindah ke Jakarta dan berlingung di bawah organisasi Putera.⁶⁴

⁶³ Mama Ranke, *Sujatin Kartowidjojo Mencari Makna Hidupku* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 50.

⁶⁴ Soebagijo I.N., *S.K. Trimurti: Wanita Pengabdian Bangsa* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 60.; diperkuat dengan wawancara, Jakarta, 18 Agustus 1999.

E. Organisasi Perempuan pada Pendudukan Jepang

Organisasi-organisasi perempuan yang ada sebelum kedatangan Jepang dilebur menjadi satu dan bersifat "sentralistik", aktivitas lebih banyak berorientasi fisik yang disesuaikan dengan kepentingan politik perang Jepang. Hal ini berbeda dengan organisasi perempuan pada masa sebelum kedatangan Jepang, pada masa ini diwarnai dengan isu gerakan nasional, bersifat independen, beragam dan adakalanya terbatas pada lapisan dan kalangan tertentu.⁶⁵

Gemblengan fisik yang diajarkan Jepang melalui organisasi perempuan *Fujinkai* telah melahirkan cikal bakal berbagai laskar perempuan pada masa awal revolusi. Sebagai contoh, misalnya dengan lahirnya Laskar Wanita Indonesia (LASWI), Laskar Putri Indonesia Surakarta, Barisan Putri Indonesia, Barisan Putri Garut, Pemuda Putri Republik Indonesia (WAPP), dsb. Bahasan lengkap tentang perkembangan laskar-laskar ini dapat dilihat dalam (Soewiti, Irna H.N. Hadi, 1992).

Sementara apa yang terjadi dengan organisasi perempuan Dharma Wanita, khususnya di masa reformasi, memperlihatkan bentuk yang berbeda. Dengan memahami konsep kesadaran "spasial" (tempat) dan "temporal" (ruang), jelas bahwa kedua organisasi ini berada dalam ruang waktu yang berbeda. Maka, analisis sejarah komparatif⁶⁶ dan tanpa mengabaikan pendekatan lainnya dalam studi sejarah bisa melihat dan menjelaskan variasi atau perbedaan tersebut.

⁶⁵ Klasifikasi ini didasarkan atas temuan lapangan dari hasil penelitian penulis, *Women's Organizations during the Japanese Occupation in Indonesia and Malaysia 1942-1945: A Comparative Study*, (Sumitomo Project, 1999). Dalam disertasi ini dapat dilihat pada sub bagian tersendiri tentang "Organisasi Perempuan Sebelum Kedatangan Jepang di Indonesia."

⁶⁶ Beberapa bahasan tentang sejarah komparatif dapat disimak dari beberapa literatur berikut, antara lain: Charles Tilly, *Big Structures, Larger Processes, Huge Comparisons* (New York: Russell Sage Foundation, 1984); "Comparison Studies in Society and History", *An International Quarterly*, Volume 22, 1980; Amitai Atziami, *Comparative Perspective: Theory and Methods* (Boston: Little Brown and Company, 1970); Charles G. Ragin, *The Comparative Method moving beyond Qualitative and Quantitative Strategies* (London: University of California Press, 1987).

Pada awal tahun 1942, didirikan Gerakan Tiga A (Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia), dengan ketuanya Ny. Artinah Sjamsoeddin,⁶⁷ dan mempunyai sub bagian para pemuda yang dinamakan Barisan Poeteri Asia Raja. Gerakan Istri Tiga A tidak berlangsung lama, karena dibubarkan pemerintahan Jepang. Kemudian pada bulan Maret 1943 dibentuk Poetera (Poesat Tenaga Rakyat). Organisasi ini mempunyai bagian perempuan yang disebut Barisan Pekerdja Perempoean (BPP) Poetera, dan dipimpin oleh Ny. Soemardjo Mangunpoespito,⁶⁸ Ny. Sukarni,⁶⁹ Surjetjondro,⁷⁰ Ny. Joesoepadi⁷¹ dan Ny. S. K. Trimurti.⁷² Tujuan BPP adalah

⁶⁷ Lahir di Purwakarta 20-7-1913, pendidikan sekolah Kartini (1927), MULO (1930), K.S. (1931), Ketua Indonesia Muda bagian Keputrian cabang Jakarta 1931, Ketua Isteri Sedar cabang Bogor, Ketua Juru Rawat dalam perkumpulan orang sakit, ketua muda kaum perempuan di belakang garis peperangan, Ketua Gerakan Isteri Tiga A serta menjadi penasihat Kepoetrian Asia Raja. Tahun 1944 anggota pengurus *Fujinkai* Pusat, *Gunseikanbu*, *Orang Indonesia yang terkemuka di Jawa* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986), hlm. 477.

⁶⁸ Lahir 18 Desember 1907 di Yogyakarta, pendidikan HIS (1922), MULO Taman Siswa di Yogyakarta (1926). Beliau adalah seorang pendiri Badan Kongres Perempuan I di Yogyakarta, ketua besar pengurus *Jong Islamieten Bond Dames Afdeling* Jakarta (1930-1933), ketua pengurus besar Isteri Indonesia Jakarta dan Semarang (1934-1940), ketua Kongres Besar Isteri Indonesia IV di Semarang, Ketua pengurus pusat *Fujinkai* di Jakarta (1944-1945), *Ibid.*, hlm. 475.

⁶⁹ Lahir 5 Mei 1907 di Tuban, pendidikan HIS (1922), MULO (1926), Tahun 1930 wakil Indonesia di Kongres Wanita seluruh Asia di Lahore, Ketua Pengurus PPPPA (1931), Ketua Isteri Sedar (1932-1934) cabang Mataram, sebagai guru Taman Siswa tahun 1927-1943. *Ibid.*, hlm. 478.

⁷⁰ Lahir 4 Mei 1915 di Ponorogo, pendidikan ELS (1929), HBSV (1934), pengurus Indonesia Muda Bandung (1930-1935), pendiri *Studi club* Perempuan Indonesia (1938-1942), Pendiri Pelindung Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (1939-1940), Pengurus Barisan Pekerja Perempuan Poetera April 1943. *Ibid.*, hlm. 479.

⁷¹ Lahir 10 November 1911 di Cianjur, pendidikan HIS (1934), MULO (1928), Guru Taman Siswa Jakarta (1931), Ketua Isteri Sedar cabang Jakarta (1933-1934), pendiri Isteri Indonesia tahun 1939, redaktur surat kabar Kebangoenan Jakarta, pembantu surat kabar *Asia Raya* 1942 di Jakarta. *Ibid.*, hlm. 473.

⁷² Lahir 11 Juni 1914 di Boyolali, pendidikan HIS (1925), *Meisjeskeekschool* (1930), Redaksi Mingguan Bedoeg Solo 1935, Redaksi Mingguan Soeloeh Kita

mempersatukan kaum perempuan dan memberi dasar-dasar bekerja bagi kaum perempuan.

Pada masa pendudukan, organisasi-organisasi yang dianggap tidak mendukung kepentingan Jepang dibubarkan, termasuk organisasi perempuan. Untuk memobilisasi perempuan agar lebih terarah, pemerintah Jepang mendirikan organisasi perempuan "Fujinkai".⁷³ Ancang-ancang tentang pembentukan *Fujinkai* dimulai pada tanggal 11 September 1943 ketika pemerintah pendudukan mengeluarkan peraturan tentang pembentukan perkumpulan perempuan yang melibatkan seluruh perempuan dari berbagai lapisan sosial.⁷⁴

Setelah *Fujinkai* didirikan pada tanggal 3 November 1943, semua istri pejabat dan pegawai pemerintah wajib menjadi anggota *Fujinkai*. Istri-istri kepala daerah menjadi ketua *Fujinkai* di masing-masing daerah kekuasaan suaminya. Hal ini memiliki kemiripan dengan organisasi Dharma Wanita pada masa Orde Baru, tetapi berbeda dengan organisasi-organisasi perempuan sebelumnya, yang keanggotaannya bersifat sukarela.

Semarang 1937-1941. Setelah keluar dari penjara bekerja sebagai Barisan Pekerja Perempuan POETERA tahun 1943. *Ibid.*, hlm. 293.

⁷³ Dalam beberapa sumber tertulis terdapat beberapa ejaan mengenai *Fujinkai*. Ada yang tertulis *Huzinkai*, lihat *Djawa Baroe* jilid 5, no. 6. 15-3-2605; ada yang *Hoezinkai*, *Kam-po*; ada *Fujinkai*. Ejaan yang terakhir lazim digunakan dalam sumber-sumber tertulis.

⁷⁴ L.J. Bruggmans, et. al. "Nederlands Indie Japanese Bezetting" (1942-1945), hlm. 564-565, dalam Siti Fatimah, *Women Organizations...*, *op.cit.*, hlm. 29.

BAB VI

“FUJINKAI” ORGANISASI PEREMPUAN CIPTAAN JEPANG

A. Terbentuknya *Fujinkai*

Pada masa pendudukan Jepang, organisasi pertama yang dibentuk pemerintahan militer Jepang untuk memobilisasi orang Indonesia adalah Gerakan Tiga A pada bulan April 1942. Organisasi Gerakan Tiga A ini dipimpin oleh Mr. Samsuedin. moto dari gerakan ini adalah “Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia”. Gerakan Tiga A ini tidak berumur panjang, karena pada bulan September 1942 gerakan ini dibubarkan. Menurut George S. Kanahale, penyebab bubarnya gerakan ini adalah karena adanya perpecahan di antara penguasa Jepang.¹

Di samping Gerakan Tiga A, terdapat Gerakan Istri Tiga A dan dipimpin langsung oleh istri Samsuedin, yaitu Ny. Artinah Samsuedin.² Gerakan Istri Tiga A ini mempunyai sub-bagian yang

¹ Kanahale, George S., 1967, *The Japanese occupation of Indonesia, prelude to independence*. Cornell University, op cit. pp.43-49.

² Lahir di Purwakarta 20-7-1913, Pendidikan Sekolah Kartini (1927), MULO (1930), K.S. (1931), Ketua Indonesia Muda bagian Keputrian cabang Jakarta (1931), Ketua Istri Sedar cabang Bogor, ketua juru rawat dalam perkumpulan orang sakit, Ketua Muda Tenaga Kaum Perempuan di belakang Garis Perperangan dan Ketua Gerakan Istri Tiga A serta menjadi Penasihat Keputrian Asia Raya Tahun 1944 menjadi anggota pengurus Fujinkai pusat. Gunseikanbu. *Orang Indonesia yang terkemuka di Jawa* (Yogyakarta: Gajah Mada

adalah wadah bagi para pemudi, yang dikenal dengan nama Barisan Puteri Asia Raya.³ Namun Gerakan Isteri Tiga A mengalami nasib yang tidak berbeda dengan Gerakan Tiga A. Ia juga dibubarkan bersamaan dengan Gerakan Tiga A oleh pemerintahan militer Jepang. Akan tetapi, Barisan Puteri Asia Raya, yang adalah bagian dari Isteri Tiga A tetap dipertahankan sampai tahun 1944, yang kemudian pada tanggal 17 Maret 1944 dilebur ke dalam *Tokubetsu Shi Fujinkai*.⁴

Setelah Gerakan Isteri Tiga A dibubarkan, dibentuk Poetera (Poesat Tenaga Rakyat) pada bulan Maret 1943. Pimpinan organisasi ini lebih dikenal dengan nama empat serangkai, Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur.⁵ Organisasi ini mempunyai bagian perempuan yang disebut Barisan Pekerja Perempuan (BPP) Poetera dan dipimpin oleh Ny. Soenarjo Manoempoespito⁶ dan dibantu oleh Ny. Sukemi,⁷ Ny. Sukanti Surjotjondro,⁸ Ny. Joesopadi,⁹

University Press, 1986), hlm. 477.

³ KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 59.

⁴ *Asia Raya*, 18 Maret 1944.

⁵ Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Mata Hari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, (terj.) (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 187-188.

⁶ Lahir 28 Desember 1907 di Yogyakarta, pendidikan HIS (1922), MULO (1926), Taman Siswa di Yogyakarta (1926). Beliau adalah salah seorang pendiri Badan Kongres Perempuan I di Yogyakarta, ketua besar pengurus *Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling* di Jakarta (1930-1933), ketua pengurus besar Isteri Indonesia dan Semarang (1934-1940), Ketua Kongres Besar Isteri Indonesia IV di Semarang, ketua pengurus pusat *Fujinkai* di Jakarta (1944-1945), *Ibid.*, hlm. 475.

⁷ Lahir 5 Mei 1907 di Tuban, pendidikan HIS (1922), MULO (1926), tahun 1930 wakil Indonesia dalam Kongres Wanita seluruh Asia di Lahore, ketua pengurus PPPA (1931), ketua Isteri Sedar (1932-934) cabang Mataram, sebagai guru Taman Siswa tahun 1927-1943, *Ibid.*, hlm. 478.

⁸ Lahir 4 Mei 1915 di Ponorogo, pendidikan ELS (1929), HBSV (1934), pengurus Indonesia Muda Bandung (1930-1935), pendiri Studieclub Perempuan Indonesia (1938-1942), pendiri Pelindung Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (1939-1940), pengurus Barisan Pekerja Perempuan Poetra April 1943. *Ibid.*, hlm. 479.

⁹ Lahir 10 November 1911 di Cianjur, pendidikan HIS (1924), MULO (1928), guru Taman Siswa Jakarta (1931), ketua Isteri Sedar cabang Jakarta

dan Ny. S.K. Trimurti.¹⁰ Tujuan BPP Poetera adalah mempersatukan kaum perempuan dengan memberi dasar-dasar bekerja bagi mereka. Kegiatan organisasi ini antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang, seperti mempekerjakan perempuan untuk membuat kaos kaki bagi tentara-tentara Jepang.

Sementara Poetera dan Barisan Pekerja Perempuan Poetera belum dibubarkan, pemerintah Jepang mengambil kebijakan lain dengan mendirikan organisasi *Fujinkai*. Organisasi yang sama, sebelumnya sudah didirikan di Jepang pada Februari 1940, dengan nama *Dai Nippon Fujinkai (the Great Japan Women's Association)*. *Fujinkai* berasal dari kata *Fujin* dan *Kai*. *Fujin* berarti perempuan, sementara *Kai* berarti *association* atau semacam perkumpulan.

Rencana tentang pembentukan *Fujinkai* dimulai pada tanggal 11 September 1943, ketika pemerintah pendudukan mengeluarkan peraturan tentang pembentukan perkumpulan perempuan yang melibatkan seluruh perempuan dari berbagai lapisan.¹¹ Melalui peraturan itu bertepatan dengan hari raya *Mejijisetsu* (hari raya nasional rakyat Jepang), didirikanlah *Fujinkai* pada tanggal 3 November 1943 di Taman Raden Saleh. Pelantikan kepengurusan *Fujinkai* dihadiri oleh para pembesar Jepang di antaranya Josie (wali kota Jakarta) dan Togo dari kantor besar pengajaran, serta beberapa tokoh Indonesia.¹²

Acara pelantikan *Fujinkai* dipimpin oleh Ny. Supangkat dari kantor *Tokubetsi Shi*, dengan susunan acara sebagai berikut ini. Pertama-tama, hadirin dipersilakan berdiri, kemudian dipersilakan menghadap ke arah istana Kaisar di Tokyo diteruskan dengan

1933-1934, pendiri Isteri Indonesia tahun 1939, Redaksi Surat Kabar Kebangoenan Jakarta, pembantu Surat Kabar Asia Raya 1942 di Jakarta. *Ibid.*, hlm. 473.

¹⁰ Lahir 11 Juni di Boyolali, pendidikan HIS (1925), Meisjeskeekschool (1930), Redaksi *Mingguan Bedoeg Solo* 1935, Redaksi *Mingguan Soeloeh Kita Semarang* 1937-1941, setelah keluar dari penjara bekerja sebagai Barisan Pekerja Perempuan Poetera dalam tahun 1943. *Ibid.*, hlm. 293.

¹¹ L.J. Brigmans, et. al, "Nederlans Indie Japanese Bezetting" (1942-1945) dalam Siti Fatimah, *Women Organizations...*, *Ibid.*, hlm. 29.

¹² *Asia Raya*, 6 November 1943.

mengheningkan cipta. Setelah itu, upacara dilanjutkan dengan pidato dari Josie sebagai *Jakarta Tokubetsu Shicho* (wali kota Jakarta), kemudian diteruskan dengan penyampaian kata sambutan oleh ketua *Fujinkai*, terpilih Ny. Abdurrachman.¹³ Kata sambutan berikutnya disampaikan oleh Togo, wakil kantor besar pengajaran. Sementara kata sambutan terakhir disampaikan oleh Soewandi selaku penasihat pada kantor besar pengajaran, dan kemudian diakhiri dengan seruan *Banzai* (hidup) tiga kali berturut-turut.¹⁴

Dengan demikian, terbentuklah kepengurusan *Jakarta Tokubetsu Shi Fujinkai* pusat secara resmi dengan susunan sebagai berikut.

Badan Penasihat:	R. A. Koesoemo Oetoyo
	R. A. Mr. M. U. Santoso
	Ny. Noerjanah
Ketua :	Ny. R.A. Abdurrachman
Wakil ketua :	Ny. Mochtar Praboenegoro
	Ny. R. Syamsuddin
	Ny. R. Soebakti
Penulis/Sekretaris :	Ny. Sh. Saidi
Anggota :	R. A Soejono
	R.A. Soerachman
	Ny. Dhalan Abdoellah
	Ny. R.A. Slamet Soebadyo
	Ny. Goenawan
	Ny. Mohamad Yamin
	Ny. Ratulangi
	Ny. Syarifa Nawawi

Perkumpulan ini memiliki kantor di Jalan Gambir Timur no 18 Jakarta.

Dua bulan berikutnya *Fujinkai* dibentuk menjadi organisasi gerakan perempuan di seluruh Jawa dan Madura, setelah itu menyusul di seluruh wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Namun, intensitas dari aktivitas

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

organisasi ini berbeda di masing-masing wilayah di Indonesia. Organisasi ini lebih intensif keberadaannya di Jawa dan Madura dibanding wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Terdapat beberapa dugaan kenapa organisasi ini lebih eksis keberadaannya di Jawa dan Madura dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Hal ini antara lain karena disesuaikan dengan kebijakan politik perang Jepang, apalagi wilayah Angkatan Darat ke-16, yang berada di Pulau Jawa dan Madura dianggap Jepang sebagai daerah paling maju di bidang politik, namun secara ekonomi dianggap kurang penting. Di samping itu, penduduk pulau Jawa yang melimpah dengan sumber daya manusianya, bagi pemerintahan Jepang sangat dibutuhkan sebagai sumber tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintahan Jepang tidak menysia-nyikan kesempatan ini dengan mengaktifkan sumber daya manusia ini sebagai tenaga kerja yang potensial untuk memenuhi kebutuhan industri perang Jepang, untuk diekspor ke seluruh wilayah pertempuran khususnya di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, pada tanggal 8 Januari 1944 duumumkan berdirinya *Fujinkai* untuk seluruh Jawa dan Madura, yang diberi nama *Djawa Hokokai Fujinkai*, yang merupakan bagian perempuan dari *Djawa Hokokai*, dengan susunan pengurus pusat sebagai berikut ini.

Ketua	Ny. Soenarjo Mangoenpoespito
Wakil Katua	Ny. Mimi Ios Wiraatmadja
Wakil Ketua II	Ny. Djoehaeni Maskoen
Penulis I	Ny. Marjati Adnan
Penulis II	Ny. Rosnah Jamin
Anggota Pengurus	Ny. Siti Marjam
	Ny. Sutarman
	Ny. S. R. Tambunan
	Ny. Artinah Samsoedin
	Ny. Hafni Abu Hanifah.

Keseluruhan anggota dan pengurus pusat *Shi Fujinkai* ini ditunjuk oleh pemerintahan Jepang. Pada umumnya mereka berasal dari golongan tokoh agama, pamong praja dan cendekiawan.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Ny. Paramitha Abdurrachman, 15 Juni 1987 di

Sebagian besar di antara yang duduk sebagai pengurus atau anggota adalah mereka yang telah mempunyai pengalaman dalam organisasi perempuan pada masa pergerakan. Tujuan Jepang merekrut tokoh-tokoh perempuan yang telah berpengalaman dan telah dikenal masyarakat adalah agar dapat menarik simpati masyarakat untuk ikut serta dalam seluruh aktivitas *Fujinkai*. Di sisi lain, kesediaan mereka duduk sebagai pengurus maupun anggota dikarenakan tidak adanya organisasi perempuan lainnya yang diperbolehkan bagi mereka selain *Fujinkai*.¹⁶

Setelah secara resmi *Fujinkai* diperkenalkan oleh pemerintahan Jepang hampir ke seluruh wilayah Indonesia yang ketika itu bernama Hindia Belanda, kaum perempuan memperlihatkan sikap dan reaksi yang beragam terhadap kehadiran organisasi ini. Setidak-tidaknya dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok perempuan yang memberikan sikap dan reaksi terhadap dileburnya berbagai organisasi perempuan yang ada sebelumnya ke dalam *Fujinkai*. *Pertama*, mereka yang menerima *Fujinkai* dengan sukarela dan langsung aktif terlibat dalam kegiatannya. *Kedua*, mereka yang menerima kehadiran *Fujinkai* dengan ragu-ragu dan terpaksa, namun kemudian melihat bahwa setidak-tidaknya organisasi ini dapat dimanfaatkan bagi keperluan masyarakat. *Ketiga*, mereka yang secara terang-terangan menolak untuk bergabung dengan *Fujinkai*. Dari tiga kelompok ini, maka sikap yang kedua lebih banyak diambil oleh kaum perempuan Indonesia.

Dalam menyikapi kehadiran organisasi *Fujinkai* ini, tidak jarang terjadi kontradiksi di antara tokoh-tokoh perempuan. Sebagai contoh, dapat dicermati apa yang dituturkan oleh Ny. Hafni Zzahara Abu Hanifah, yang lebih memilih masuk *Fujinkai* secara sukarela. Sikap Ny. Hafni Zahara ini dapat digolongkan kepada kelompok perempuan yang pertama. Dia menceritakan pengalamannya saat ditentang oleh tokoh perempuan lainnya ketika memilih langsung masuk *Fujinkai*. Pengalaman tersebut dia tuturkan sebagai berikut.¹⁷

Jakarta, dalam Rita Lubis, *skripsi.....* hlm. 32.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ A.B. Lopian dan JR Chaniago, *op.cit.....*, hlm. 49.

Umumnya istri-istri pegawai yang bekerja pada pemerintahan Jepang telah menjadi anggota Fujinkai. Kami mengorganisir wanita. Jadi, saya mengerti seperti Maria Ulfah tidak mau masuk Fujinkai. Dia tetap marah sama saya. Kenapa tidak mau masuk Fujinkai kata saya, 'Ah!.. endak, saya ndak mau...anu...sama Jepang'. Tetapi prinsip saya pada waktu itu kalau tidak masuk tentu tidak kenal. Kebanyakan ibu-ibu masa bodoh, mereka mendaftarkan diri saja. Perkara... belakang dipikirkan prinsipnya!

Dari beberapa pengalaman tokoh perempuan yang masuk *Fujinkai* ternyata tidak seluruh mereka dengan mudah menerima organisasi ini. Banyak pertimbangan dan alasan mereka untuk terlibat dalam organisasi ini. Begitu pula bagi perempuan yang tidak mau terlibat dalam organisasi ini. Sikap ragu-ragu dan banyak pertimbangan ini, dikisahkan oleh Ny. Arini Soewandi ketika akan menjabat sebagai pemimpin *Fujinkai* di daerah Yogyakarta. Kisah yang dialami tersebut antara lain sebagai berikut ini.¹⁸

Suaminya ketika Jepang masuk menjabat sebagai Kepala Stasiun Tugu (Yogyakarta). Suatu ketika dia dan ibu Ruswo dipanggil pemerintah Dai Nippon (Jepang). Dengan hati berat dan bermacam-macam pertanyaan dalam hati kami menghadap. Tapi syukurlah bukan hukuman yang kami terima, melainkan tugas untuk memimpin Fujinkai di Yogyakarta. Mau tak mau kami menyanggupi tugas tersebut, dengan harapan jika Fujinkai berjalan kami bisa bertemu dengan tokoh-tokoh wanita, yang selama pendudukan Jepang tidak bertemu lagi. Ternyata harapan itu tidak sia-sia! Di dalam Fujinkai terdapat ibu-ibu dari kalangan Keraton, antara lain; B.R.A. Hadikusuma, G.K. Ratu Dewi, G.B.R.A. Hardjono. Meskipun dari kalangan bangsawan, mereka tidak segan-segan bekerja bersama kami untuk menjahit, menisik, memasang kancing untuk baju-baju serdadu Jepang. Karena mereka yakin dengan ramalan Joyoboyo, bahwa Jepang tidak akan lama, hanya seumur jagung.

Kisah yang hampir senada dituturkan oleh seorang aktivis perempuan, Ny. Soeratmi Imam Soedijat, yang mengalami bagaimana perkembangan organisasi perempuan pada masa pergerakan, masa Jepang, revolusi dan termasuk pada masa Orde Baru. Ny. Soeratmi menuturkan pengalamannya pada masa Jepang terhadap organisasi

¹⁸ Lasmidjah Hardi, *Sumbangsihku....*, Buku IV, *op.cit.*, hlm. 39.

perempuan adalah sebagai berikut.¹⁹

Tokoh-tokoh wanita zaman pergerakan umumnya tidak senang kepada Fujinkai, namun mereka tidak bisa berlutik. Kebanyakan tokoh pergerakan itu secara otomatis menjadi anggota Fujinkai, tapi bukan karena pilihan sendiri.

Di samping sikap pertama dan kedua dari tokoh-tokoh perempuan terhadap *Fujinkai*, terdapat tokoh-tokoh perempuan yang menentang dan menolak terlibat masuk ke dalam organisasi *Fujinkai*. Tokoh-tokoh tersebut antara lain adalah; S.K. Trimurti. Ketika diwawancarai, dia dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak pernah terlibat dalam organisasi *Fujinkai*, sementara dia mengakui bahwa dia tetap melakukan gerakan perempuan secara diam-diam (bawah tanah), dan selalu kucing-kucingan dengan Jepang.²⁰ Di antara tokoh lain lantang menolak bergabung dengan *Fujinkai* adalah Ny. Mantria Hutasoit,²¹ yang menuturkan pengalamannya sebagai berikut.²²

Ketika saya melihat kekejaman Jepang yang di luar batas kemanusiaan, di mana-mana orang lapar, sakit dan disiksa, barulah saya sadar apa arti hidup mereka, bebas dari penjajahan. Saya menolak masuk Fujinkai, karena Fujinkai adalah organisasi buatan Jepang, yang tentu terkontrol oleh Jepang.

Sikap tegas ini, disebabkan dia melihat secara langsung kekejaman Jepang di tempat suaminya bekerja di Perbaungan, dekat Medan. Di samping itu, dia merasa sakit hati karena perkumpulan perempuan yang didirikannya bernama *Ibu Sepakat* terpaksa bubar karena dilarang Jepang dan harus dilebur ke dalam *Fujinkai*. Akhirnya, dia pindah ke Tapanuli, ke daerah asal bapak mertuanya,

¹⁹ Wawancara dengan Ny. Soeratmi Imam Soedijat, Yogyakarta, 18 Februari 1999.

²⁰ Wawancara dengan Ibu S.K. Trimurti, di Jakarta, 20 Juli 1999.

²¹ Ny. Mantria Hutasoit, lahir di Bandung, 28 Agustus 1912. Ayahnya R. Kanduruan Djajawikarta, seorang pejabat pamongpraja di Bandung, sementara beliau adalah mantan anggota *Jong Java*, Solo dari tahun 1926-1930.

²² Ny. Mantria Hutasoit, "Wanita Pejoang adalah Wanita yang Kuat Kemauannaya" dalam Lasmdjah Hardi, Sumbangsihku..., Buku I, hlm. 161.

Bapak Hutosoit.

Tokoh perempuan lain yang sangat menentang kehadiran *Fujinkai* adalah Ny. Sujatin Katowijono, seorang pencetus gagasan Kongres Perempuan Indonesia Pertama. Dia mencoba menceritakan pengalamannya dalam suatu rapat dengan para pejabat Jepang, sebagai berikut.²³

Ketika tentara Jepang memasuki Indonesia, mulailah terasa tekanan 'Saudara Tua itu', yang kemudian berupa paksaan. Dalam sebuah rapat, kepala bagian propaganda Jepang, Shimitsu, mengajak perempuan Indonesia untuk membentuk perkumpulan Fujinkai. Secara spontan saya menolak ajakan itu dan menyarankan agar perkumpulan-perkumpulan perempuan yang telah ada diluaskan pengaruhnya supaya menjadi besar. Dari pihak pimpinan rapat saya menerima secarik kertas dengan tulisan 'hati-hati kempeitei'. Benar, dua hari setelah itu, nama saya sudah dimasukkan dalam 'daftar hitam' Jepang.

Terdapat sedikit perbedaan susunan kepengurusan antara *Fujinkai* di daerah dengan *Fujinkai* pusat (Jakarta). Pengurus atau pimpinan *Fujinkai* di daerah secara hierarki langsung disesuaikan dengan kedudukan suami sebagai pejabat pemerintah. Di kabupaten diketuai oleh istri bupati, di kecamatan diketuai oleh istri camat dan di kelurahan atau desa langsung diketuai oleh istri kepala desa atau lurah setempat. Namun, di Jakarta hanya pada kepengurusan inti yang kepengurusannya tidak otomatis mengikuti kedudukan suami, akan tetapi tetap ditunjuk atau diangkat oleh pemerintahan Jepang. Hal ini dikarenakan beberapa alasan tertentu, antara lain, untuk menarik rasa simpatik masyarakat, supaya tidak takut dan segan-segan untuk memasuki organisasi ini. Akan tetapi, di tingkat *Shi* (kota praja) tetap disesuaikan dengan hierarki kedudukan suami, seperti *Shiku* (kecamatan) Penyingan, Gambir, Tanah Abang, Mangga Besar, Pasar Senin, dan Tanjung Periuk yang berada di wilayah *Tokubetsu Shi*, perekrutan kepengurusannya sama dengan yang terdapat di daerah-daerah.

²³ Sujatin Kartowijono, *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1982), p. 7; Lihat juga, Lasmidjah Hardi, I..., Buku I, hlm. 284.

Pengurus dari masing-masing wilayah terdiri dari pengurus cabang dan ranting sehingga semua kegiatan yang berlangsung di cabang atau ranting harus mengikuti dan menaati peraturan dan keputusan yang telah ditentukan oleh *Jakarta Tokubetsu Shi Fujinkai* dan berkewajiban melaporkan satu bulan sekali kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.²⁴ Dengan demikian, setiap istri pejabat berkewajiban berperan aktif dalam segala program dan aktivitas *Fujinkai*.

Setiap anggota *Fujinkai* diwajibkan menaati peraturan sebagai berikut.

1. Anggota ikut memperjuangkan terlaksananya tujuan perkumpulan antara lain berikut ini.
 - a. Mengobarkan semangat cinta tanah air dan bangsa.
 - b. Menyiapkan tenaga-tenaga dan ikut serta di belakang garis peperangan.
 - c. Memupuk sikap suka berkorban, rela menderita untuk tanah air.
 - d. Mengembangkan kebiasaan hidup sederhana dan menghemat barang-barang yang dimiliki.
 - e. Memperbanyak hasil bumi dengan menanam semua tanah yang terluang.
 - f. Mempergunakan bahan-bahan yang bisa dipergunakan untuk bahan makanan dan pakaian.
 - g. Menghidupkan pekerjaan tangan dan industri rumah tangga.
2. Anggota dianjurkan membayar iuran sukarela dan tidak ditentukan jumlahnya untuk mengisi kas perkumpulan.²⁵

Program kesatu sampai keempat pada bagian tujuan perkumpulan ini, sangat berkaitan erat dengan suasana peperangan, dalam rangka menanamkan rasa patriotisme bagi kaum perempuan. Program kelima sampai keenam, erat kaitannya dengan kondisi Jawa yang sedang kekurangan sandang dan pangan. Kekurangan sandang

²⁴ Wawancara, Siti Rohana Kadam, 1 September 1987 di Jakarta.

²⁵ *Kan-po*, no 26, 1943.

ini demikian parah sehingga sangat banyak orang yang tidak mampu lagi memakai pakaian. Tak jarang warga di zaman pendudukan Jepang memakai baju dari goni dan bagor. Kekurangan sandang ini terjadi karena produksi bahan bakunya, yakni kapas yang memang langka didapatkan. Sejak zaman Hindia Belanda, seluruh pasokan kapas domestik hanya mampu memenuhi 6% permintaan, sisanya harus diimpor dalam bentuk serat kapas, kain, dan kapas mentah. Di zaman Hindia Belanda, produksi kapas di Jawa sangat sedikit. Areal tanam pada tahun puncak, yakni tahun 1937, hanya sekitar 2.500 hektar, dengan produksi kapas mentah 3.500 pikul atau setara dengan 219 ton. Sementara itu, konsumsi di Jawa diperkirakan mencapai 1.000.000 pikul, setara dengan 62.500 ton kapas mentah.²⁶ Oleh karena itu, pemerintah Jepang sangat memberikan perhatian khusus untuk penanaman pohon kapas di Jawa. Hal demikian, akan menjadi tugas utama *Fujinkai*, sebagaimana yang akan dibicarakan pada bagian aktivitas-aktivitas *Fujinkai* dalam bab ini.

Di samping kekurangan sandang, kekurangan pangan juga melanda rakyat karena produksi bahan makanan yang tersedia digunakan sepenuhnya untuk pasukan militer. Akibatnya, meskipun ketika zaman Hindia Belanda di Jawa mampu memenuhi kebutuhan bahan pokoknya, namun ketika zaman pendudukan Jepang rakyatnya mengalami kekurangan makanan. Pemerintah militer juga merampas beras milik rakyat lewat peraturan-peraturan khusus. Umpamanya, pemerintah tidak mengizinkan satu rumah tangga memiliki beras lebih dari empat kilogram. Jika memiliki beras lebih dari itu, pemiliknya ditangkap. Hal ini pernah dituturkan oleh Ny. Barkah Alganis Baswedan, sebagai berikut ini.

Waktu itu pemerintahan Jepang tidak mengizinkan orang di dalam rumah tangga mempunyai lebih dari empat kilo beras. Jadi, kalau ada pemeriksaan beras, di dalam rumah kami terdapat satu kuintal beras misalnya, kami ditangkap. Dan untuk mencari beras sulitnya bukan main.²⁷

²⁶ Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, terj. (Jakarta: Garamedia, 1993), hlm. 28.

²⁷ Wawancara Ny. Barkah Alganis Baswedan, 22 Agustus 1975, dalam A.B.

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anggota *Fujinkai* dibatasi sesuai dengan kepentingan-kepentingan pemerintahan Jepang, khususnya dalam menghadapi perang Asia Timur Raya. Anggota tidak mempunyai hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, tidak mempunyai hak dipilih dan memilih termasuk membela diri. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan organisasi ditentukan oleh pemerintah pendudukan.²⁸

Dengan demikian, perekrutan pengurus *Fujinkai* ditentukan oleh pemerintah, pendudukan tanpa mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman pengurus tersebut. Pada tingkat distrik atau kabupaten (*Ken*), sub-distrik/kecamatan (*Son*) dan desa (*Ku*) dilakukan oleh bupati (*Kentyo*) atau wali kota (*Sytio*). Sebagai gambaran dari sistem hierarki kepengurusan ini dapat dilihat pada *Fujinkai* cabang Bojonegoro, Surabaya, Jakarta, Banjarmasin dan wilayah Kebon Jahe.²⁹ Tidak lama setelah *Fujinkai* didirikan, dalam waktu yang singkat cabang-cabang *Fujinkai* didirikan di wilayah Indonesia; Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah-wilayah Indonesia lainnya.³⁰ Namun, dalam praktiknya aktivitas-aktivitas *Fujinkai* lebih banyak berada di Jawa, mulai dari kota-kota besar sampai ke wilayah-wilayah pedesaan.

B. Struktur Organisasi *Fujinkai*

Setelah *Fujinkai* resmi didirikan di Jawa dan seluruh wilayah lainnya di Indonesia, di tingkat kota organisasi ini disebut *Shi Fujinkai*, di kabupaten disebut *Ken Fujinkai*. Kepengurusan perkumpulan ini diatur sesuai dengan hierarki pemerintahan setempat. Istri pejabat setempat otomatis menjadi pimpinan organisasi ini. Pimpinan cabang *Fujinkai* membawahi pimpinan ranting *Fujinkai* di kabupaten.

Lapian dan JR Chaniago, *op cit.*, hlm. 27.

²⁸ Wawancara dengan beberapa pengurus dan anggota *Fujinkai* di Yogyakarta dan Jakarta.

²⁹ *Soera Asia*, 5 Desember 1943; *Pembangoenan*, 5 Januari 1944; *Borneo Shimbun*, 24 Juni 1943.

³⁰ F. A. Rachmat Ishaya, ... hlm. 51.

Pimpinan ranting membawahi pimpinan *Fujinkai* di kecamatan dan desa/lurah. Dengan demikian, seluruh perempuan dari kota sampai ke pelosok-pelosok dapat dikerahkan tenaganya oleh organisasi ini untuk kepentingan perang Jepang. Semua istri pejabat dan istri pegawai pemerintah wajib menjadi anggota *Fujinkai*. Istri-istri kepala daerah menjadi ketua *Fujinkai* di masing-masing daerah kekuasaan suaminya. Hal ini berbeda dengan keanggotaan dalam organisasi perempuan pada masa pergerakan (Hindia Belanda). Pada saat itu keanggotaan dalam organisasi perempuan bersifat sukarela.

Mengenai aturan kepengurusan ini dapat dilihat dalam *Kampo*, no. 26, 6203 (1943)³¹, sebagai berikut.

Pengoeroes diangkat dan diperhentikan oleh Syuutyookan (Kooti Zimukyoku Tyookan atau Tokubetsu Sityoo) menoeroet sjarat-sjarat sebagai berikoet:

- *Meiyo Kaityo (ketoea kehormatan): seorang, ialah Kentyoo atau Sityoo;*
- *Kaityoo (ketoea perkoempoelan): seorang (wanita penduduk asli);*
- *Huku Kaityoo (wakil ketua): paling banyak 2 orang;*
- *I-in (anggota pengoeroes):.....*
- *Kanzi (pengoeroes tata usaha):.....*
- *Meiyo Kaityoo memegang pimpinan oesaha Huzinkai dan tanggoeng djawab sepenoeh-penoehnja atas segala oesaha Huzinkai.*
- *Huku Kaityoo membantu Kaityoo dan salah seorang dari Huku Kaityoo itoe mewakili Kaityoo, apabila Kaityoo beralangan.*
- *I-in toeroet mengoeroes oesaha Huzinkai dan memadjoekan oesaha-oesaha kepada Meiyo Kaityoo serta bertanggung djawab atas hal melakoekan sesoeatoe oesaha Huzinkai jang diserahkan kepadanya.*
- *Kanzi mengoeroes pekerdjaan Huzinkai sehari-hari menoeroet perintah Kaityoo.*
- *Djika dipandang perloe, boleh diangkat Komon (penasihat). Komon memberi pertimbangan tentang oesaha Huzinkai jang penting atas pertanjaan Meiyo Kaityoo serta boleh memadjoekan oesoel kepada Meiyo Kaityoo dan Kaityoo.*

³¹ Dalam Anggaran untuk menyusun *Fujinkai*, *Kampo*, no. 26-6003.

Dalam kenyatannya, ketua kehormatan yang terdiri dari *Kentyoo* atau *Sityo* dipegang oleh orang Jepang, sementara *Kaityoo* (ketua perkumpulan) serta *Huku Kaityoo* (wakil perkumpulan) baru diserahkan kepada wanita penduduk asli. Mereka biasanya adalah istri-istri pejabat dari pemerintahan setempat, seperti yang terdiri dari istri-istri bupati atau wali kota, apabila bupati dan wali kotanya dipegang oleh orang Indonesia. Di tingkat kecamatan dan desa, ketua-ketua pengurus *Fujinkai* secara otomatis, langsung dipegang oleh istri camat dan istri kepala desa. Begitu juga dengan *Komon* (penasihat), biasanya dipegang oleh pejabat pemerintah Jepang di wilayah kekuasaannya. Selain susunan keorganisasiannya yang ketat dan hierarkis, Jepang juga sangat berhati-hati dalam memberikan tugas dan mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi ini.

Alasan bagi perempuan untuk menerima menjadi pengurus *Fujinkai* ini antara lain, di samping memenuhi keinginan pemerintah Jepang, juga untuk kepentingan kemajuan kaum perempuan itu sendiri, karena tidak ada organisasi lain yang diperbolehkan selain *Fujinkai* tempat perempuan melakukan aktivitasnya. Sementara, keanggotaan organisasi ini tidak terbatas pada kaum ibu-ibu saja. Remaja putri juga dianjurkan, karena keanggotaannya mulai dari yang berusia 14 tahun ke atas, seperti yang dituangkan dalam anggaran dasar *Hoezinkai* ayat 2, "Jang diterima mendjadi anggota *Hoezinkai* ialah kaoem wanita pendoeboek asli jang berada di Djawa dan beroemoer 14 tahoen ke atas".³²

Kontrol terhadap *Fujinkai* tampaknya dijalankan dengan ketat sehingga ada di antara anggota *Fujinkai* yang merasakan tidak punya hak apa pun. Seperti yang diutarakan oleh seorang anggota *Fujinkai*, Ny. Siti Rohana Kadam sebagai berikut.

"Anggota *Fujinkai* tidak mempunyai hak berbicara dan mengeluarkan pendapat; tidak mempunyai hak memilih dan dipilih; semua kebijakan organisasi ditentukan oleh pemerintah pendudukan Jepang."³³

³² Anggaran oentoek menjoesoen *Hoezinkai*, *Kan-Po*, no. 23, 2003 (1943), hlm. 34.

³³ Wawancara dengan anggota Jakarta Tokubetsu Shi *Fujinkai*, Ny. Siti

Di samping itu, pemerintahan Jepang juga cukup berhati-hati terhadap organisasi ini, terutama dalam rangka melakukan mobilisasi. Hal ini tercermin dalam "Peratoeran Choesoos Jawa Hokokai", Bahagian IV, *Hoezinkai* (Perkoempoelan Kaoem Wanita)³⁴ Di situ, dijelaskan bahwa anggota *Fujinkai* harus memenuhi syarat tertentu, yakni:

Pendoedoek wanita jang oemoernja genap 14 tahoen atau lebih mendjadi anggota Hokokai Hoezinkai (pasal 41).

Paberik atau peroesahaan jang menjoesoen Tokobetsoe Hokokai jang mempunjai pekerdja-pekerdja perempuan banjak dan dianggap perloe oleh Sjoe Hokokai Kaitjo (termasuk djoega Tokoebetsoe Si dan Kotji, selandjoetnya disebut Sjoe sadja) boleh membentoeok Hoezinkai di dalam Tokoebetsoe Hokokai itoe. Tentang soesoenan dan mendjalankan pekerdjaannya boleh ditetapkan oleh Tokoebetsoe Hokokai itoe dan haroes mendapat pengesjahan dari Sjoe Hokokai Kaitjo (pasal 42)

Pada Hokokai Hoezinkai boleh diadakan pengoeroes jang terdiri dari Kaitjo, Hoekoe Kaitjo, Komon, Rizi, Kanzi dan lain-lain. (pasal 43)

Pengoeroes dari Tokoebetsoe Hokokai Hoezinkai haroes diadakan menoeroet pasal 43 (pasal 44)

Pada asasnja anggota Hoezinkai haroes membangkitkan perikewanitaan pendoedoek di Djawa (pasal 45)

Hokokai Hoezinkai haroes mendjalankan pekerdjaan Hokokai berdasarkan kewanitaan. Selain dari pada itoe haroes melakukan pekerdjaan jang memperbaiki kehidoepan, memelihara anak, mendjaga kesehatan, memilih makanan jang menjehatkan (menjelidiki pengganti makanan), merawat sementara waktoe terhadap ketjelakaan, menaboeng uang, mendidik dalam roemah tangga, memberantas boeta hoeroef dan lain-lain pekerdjaan jang patoet dilakukan oleh wanita. (pasal 46)

Tentang pekerdjaan jang dilakukan oleh Tokoebetsoe Hokokai Hoezinkai haroes mendapat petoendjoek dari Sjoe-Ken atau Si-Hokokai Kaitjo (pasal 47)

Rohana Kadam, 1 September 1987 di Jakarta, dikutip dari Rita Lubis, Jakarta Tokubetsu Shi Fujinkai (1953-1945), *Skripsi*, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra UI, 1988, hlm. 42.

³⁴ Peratoeran Choesoos, Bagian IV, HOEZINKAI (perkoempoelan Kaoem Wanita), *Almanak Asia Raya*, 1944, hlm. 170-172.

Dari beberapa pasal yang terdapat dalam peraturan khusus *Djawa Hokokai* tersebut dapat dijelaskan bahwa *Fujinkai* adalah sebuah atau bagian dari himpunan *Djawa Hokokai*. Pasal 40 menyatakan bahwa setiap Kabupaten, Kota madya, Kecamatan dan Desa diharuskan untuk membentuk organisasi *Fujinkai*. Sedangkan Pasal 41 menjelaskan bahwa yang menjadi anggota *Fujinkai* terdiri dari perempuan yang telah berusia 14 tahun ke atas. Sementara Pasal 42 menyatakan bahwa jika ada pabrik atau perusahaan yang memiliki banyak pekerja perempuan, dianjurkan untuk membentuk organisasi *Fujinkai* tersendiri yang disebut dengan *Shuu* (*Shuu Fujinkai*). Kemudian *Shuu Fujinkai* ini harus mendapat pengesahan dari *Shuu Hokokai Kaityo* setempat. Struktur kepengurusannya harus menurut ketentuan yang sudah disebutkan dalam Pasal 43. Jika demikian, Pasal 42 dapat diartikan bahwa organisasi *Fujinkai* tidak saja meliputi organisasi pemerintahan, tetapi juga meliputi perusahaan-perusahaan swasta besar lainnya.

C. Aktivitas-aktivitas Perempuan/*Fujinkai* pada Masa Pendudukan

Setelah *Fujinkai* resmi didirikan pada tanggal 3 November 1943 oleh pemerintah Jepang dengan struktur kepemimpinan mengikuti hierarki pejabat-pejabat pemerintah, baik di kota-kota maupun di desa-desa hampir di seluruh wilayah Indonesia, kekuatan tenaga perempuan semakin terkoordinir secara intensif melalui organisasi *Fujinkai*, terutama di Pulau Jawa. Mereka mulai melakukan berbagai aktivitasnya sesuai dengan instruksi-instruksi yang sudah digariskan oleh pemerintah pendudukan. Pedoman tersebut dituangkan dalam anggaran dasar *Fujinkai* yang di antaranya berisi sebagai berikut.

1. Anggota harus mengutamakan kesederhanaan dan berusaha saling melatih sambil mempertinggi derajat kesusilaan wanita di Jawa.
2. Untuk membantu jalannya pemerintahan bala tentara, maka pada *Fujinkai* diadakan *Zigyoobu* (bagian usaha) yang tetap atau untuk sementara waktu dan badan itu boleh menjalankan pekerjaan yang perlu dalam lapangan memperbaiki kehidupan

- di belakang garis peperangan dan dalam lapangan usaha menabung, pendidikan, keselamatan umum, dan kesehatan.
3. Untuk turut bekerjasama dalam usaha memperbaiki dan memajukan kesehatan tubuh, maka *Fujinkai* boleh mengadakan rapat-pidato atau latihan tentang ilmu tubuh manusia atau kesehatan
 4. Untuk mendalami keinsafan kewajiban wanita dalam penjagaan negeri di waktu peperangan, terutama sekali untuk memberikan penerangan tentang pertolongan pertama, maka *Fujinkai* boleh mengadakan rapat-pidato dan kursus-kursus serta merapatkan hubungan serapat-rapatnya dengan *seinendan* dan *keibodan*, sambil melangsungkan latihan supaya kelak kemudian hari dapat mengerjakan pekerjaan itu sebaik-baiknya apabila ada serangan musuh.
 5. *Fujinkai* harus mengadakan hubungan rapat dengan sekolah-sekolah dan mengadakan rapat pidato dan latihan tentang pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak dan murid di luar sekolah dan dalam rumah tangga.
 6. Selain dari yang disebutkan di atas, *Fujinkai* boleh melakukan pekerjaan yang patut dikerjakan oleh kaum perempuan.³⁵

Dari hal-hal yang telah digariskan dalam anggaran dasar *Fujinkai* tersebut, dapat digambarkan bahwa tugas-tugas utama *Fujinkai* tersebut antara lain adalah; mengutamakan aktivitas bagaimana layaknya sebagai seorang perempuan. Dalam hal ini tentu sangat berhubungan erat dengan peran-peran tradisional perempuan seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sebagai implementasi dari tugas-tugas yang telah digariskan tersebut, dapat dilihat bagaimana praktik yang mereka lakukan, baik oleh *Fujinkai* di kota-kota maupun di desa-desa. Antara lain berikut ini di Jawa (Klaten).³⁶

Pekerjaan di desa setelah dikirimnya kaum laki-laki untuk pengerahan tenaga Romusha, kini diletakkan pada kaum perempuan. Di Klaten

³⁵ Anggaran oentoek menjoesoen Huzinkai, poit 4, *Kampo*, no. 26, 2603 (1943).

³⁶ *Djawa Baroe*, jilid 5, no. 11, (1945).

Ken yang dikenal dengan daerah subur, yang menjadi tulang punggung sebagian besar dari jumlah produksi padi di Surakarta Kooti telah lama kaum wanita menggantikan tanaga laki-laki sejak sebelum pemerintah menganjurkan hal itu. Yang merupakan pusat tumpuan itu adalah Fujinkai dan dipimpin oleh Ny. Kentyoo (Paduka Adinda dan S.P. Sobo Koo). Sebagai langkah pertama mereka melakukan pengerahan kaum wanita yang berjumlah 40.000 orang di dalam Ken (Kabupaten) tersebut. Mula-mula mereka berkinroo hoosi diwaktu panen. Kemudian berturut-turut dilakukan usaha-usaha seperti: Barisan Wanita Pencegahan Kebakaran, Barisan Wanita Pembelaan, mencukupi bahan pakaian sendiri, memperbanyak hasil makanan, kursus bahasa Jepang, kursus ibu, pertolongan pertama dan sebagainya.

Untuk meningkatkan hasil panen *Fujinkai* membuat perkumpulan "Gerakan Gugur Bunga" di berbagai cabang, yaitu dengan membuka wilayah baru penghasil makanan, menanam wilayah yang tandus dengan berbagai macam tanaman yang dapat menghasilkan, sebagai contoh berikut ini.

1. Menanam padi di Bondowoso, Banyuwangi, Cirebon dan Surakarta (Jawa); Palopo, Sinjai, dan Bulukumba (Sulawesi); Sumpuri (Kalimantan Selatan).
2. Menanam sayur-sayuran.
3. Beternak mujair seperti di Jakarta³⁷

Daerah lain umpamanya di Kota Solo, yang disebut dengan berikut ini.

Oesaha Oentoek memetjahkan soal makanan: doea matjam dapoer oemoem di kota Solo.

... Di Martolulutan, djoega di tempat terseboet menjadi pentas djalan dalam oesaha dapoer oemoem di Djawa ini. Badan itu didirikan oleh Fudjinkai bangsa Tionghoa oentoek memberi makanan kepada kaoem pekerdja Tionghoa dari pabrik bahan pakaian oentoek mencoekoeopi sendiri di kalangan bangsa Tionghoa.³⁸

Dari kutipan teks tersebut ternyata *Fujinkai* tidak hanya meliputi

³⁷ E.A. Rachmat-Ishaya, *Indonesian Womens...*, op.cit., hlm. 52.

³⁸ *Djawa Baroe*, Djilid 5, no. 10, 1945.

warga asli (Jawa), tetapi juga termasuk warga turunan seperti warga Tionghoa (Cina).

Di daerah-daerah berbeda di Indonesia, *Fujinkai* melakukan kegiatannya sesuai dengan kondisi setempat. Untuk kebutuhan serdadu Jepang, anggota *Fujinkai* direkrut untuk membuat kaos kaki, seperti: di Bekasi, Lumajang, Surakarta, Bandung, Salatiga, Madiun, Banyuwangi, dan lain-lain. Moh. Hatta memperkirakan, Jepang telah merekrut 4.000.000 perempuan berusia 6–12 tahun dan 17.000.000 perempuan berusia 13 tahun ke atas untuk meningkatkan produksi di berbagai bidang.³⁹ Data ini menunjukkan bahwa peran perempuan tidak hanya terbatas pada peran-peran domestik seperti yang ditekankan penguasa, tetapi perempuan telah menyumbangkan peran penting dalam bidang produksi (ekonomi), khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi perang.

Selain itu, aktivitas *Fujinkai* di luar Jawa pun tidak kalah pentingnya dengan apa yang dilakukan oleh *Fujinkai* di Jawa. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang tokoh pejuang perempuan dari Kalimantan, Ny. Gusti Noersehan, sebagai berikut:⁴⁰

Sewaktu di Banjarmasin suamiku aktif di Parindra Banjarmasin. Sedangkan aku memimpin Keputrian Parindra. Setelah suamiku meninggal aku pindah ke Amuntai. Pada saat itu Jepang masuk ke Indonesia. Semua organisasi harus dilebur ke dalam Fujinkai. Kegiatanku di Fujinkai adalah mengurus para pekerja paksa (pekerja rodi) yang dibawa dari Jawa untuk dipekerjakan di Kalimantan. Juga mengurus mereka apabila sakit dan meninggal.

Bila dicermati pengalaman dari tokoh perempuan Kalimantan ini, aktivitas *Fujinkai* di luar Jawa, khususnya pada daerah yang ditempatkan untuk pekerja-pekerja paksa oleh Jepang, sedikit berbeda dengan aktivitas *Fujinkai* di Jawa. Bila anggota-anggota *Fujinkai* di Jawa bekerja sama dengan *Tonarigumi* untuk membantu ibu-ibu agar melepaskan anaknya dikirim jadi *Rumusha* dan setelah itu menggantikan tugas-tugas mereka yang telah pergi, seperti

³⁹ Pakaian Rakjat oleh Moh. Hatta, (*Nishijima Collection*).

⁴⁰ *Sumbangsihku bagi Ibu Pertiwi: Kumpulan Pengalaman dan Pikiran*, Buku IV, hlm. 137.

di sawah, ladang dan kebun, maka *Fujinkai* di luar Jawa bertugas menolong para *Romusha* yang bermasalah.

Pengalaman yang hampir sama untuk *Fujinkai* di luar Jawa, di daerah Hulu Sungai, Kalimantan Timur, dituturkan oleh Ny. Rusinah sebagai berikut.⁴¹

Kegiatan yang kami lakukan dalam Fujinkai—yang merupakan leburan dari organisasi yang ada—semua program dan perintahnya berada di bawah penguasa Jepang. Aku berusaha mengumpulkan perhiasan, pakaian bekas, makanan dan lain-lain yang berupa keperluan hidup. Tetapi ini bukan hal yang mudah, karena sangat sulit mendapatkan bahan pangan dan pakaian, dan juga mengumpulkan dana bagi para romusha yang tertelentang sakit jauh dari sanak saudara. Mereka harus kami hibur dengan apa yang ada, pakaian sudah bukan terbuat dari bahan cita, tetapi apa adanya, adakalanya terbuat dari kain kasur, bahkan kain pembungkus atau sak gula, dan yang paling menyedihkan sampai kain goni kami gunakan untuk membuat celana. Aku sering kali mengadakan hubungan dengan Banjarmasin agar tidak ketinggalan berita mengikuti kegiatan-kegiatan yang dimotori oleh Ibu Gusti Noersehan. Kadang-kadang aku ke Banjarmasin sendirian untuk mengikuti pertemuan rahasia Parindra tanpa sepengetahuan Jepang.

Lain lagi dengan pengalaman Ny. Armistiani Soemarno, pada masa Jepang tinggal di Kandangan, Kuala Kapuas, mengisahkan pengalamannya sebagai anggota *Fujinkai* sebagai berikut.⁴²

Sebelum kedatangan Jepang aku sudah mendirikan 'Perkumpulan Isteri Kandangan', tetapi seperti organisasi lainnya harus dilebur menjadi Fujinkai dan harus mengikuti program yang sudah disodorkan oleh pemerintah Jepang, antara lain; menanam pohon jarak, kapas dan jagung untuk kepentingan Jepang. Bahkan kebutuhan hidup sukar didapat, demikian juga persediaan obat-obatan. Tak jarang suamiku memberikan resep tradisional kepada pasien, umpamanya perban pembalut luka dibuat dari pelapah pisang yang sudah dikeringkan.

Di kota-kota seperti, Medan, Pematang Siantar, Tapanuli di Sumatra; Amuntai di Kalimantan, *Fujinkai* mengumpulkan dana dan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 181.

⁴² *Ibid.*, hlm. 126.

perhiasan untuk disumbangkan ke pemerintah.⁴³ Di Jawa, Jepang membentuk anggota-anggota *Fujinkai* untuk meningkatkan produksi. Pada tanggal 10-16 Maret 1944 pemerintahan Jepang menetapkan pekan penanaman pohon jarak di Jawa. *Fujinkai* sangat berperan dalam menyosialisasikan penanaman jarak terutama di desa-desa.⁴⁴ Buah jarak dipergunakan untuk membuat minyak pelumas, untuk kebutuhan pesawat terbang, kereta api, otomobil, dan mesin-mesin halus lainnya. Di Surakarta anggota-anggota *Fujinkai* di kota-kota yang terdiri dari istri-istri pegawai pemerintah diperintahkan untuk turun ke desa-desa. Mereka bergabung dengan para petani untuk menanam padi di sawah. Pekerjaan ini dipimpin oleh Ny. G. R. A. Joedonegoro, selaku pemimpin *Fujinkai* Surakarta.⁴⁵ Dari kutipan ini, ternyata perang telah membawa suasana lain, seperti seorang bangsawan Surakarta yang tidak pernah menginjakkan kakinya ke 'tanah', sekarang harus turun ke sawah untuk memberikan contoh terhadap petani-petani di pedesaan.

Di Kabupaten Indramayu dua wakil *Fujinkai* di setiap kecamatan dikirim ke ibu kota kabupaten dan dilatih selama tiga bulan. Latihan diadakan oleh *Djawa Kokokai* dan *Fujinkai* dan dipimpin oleh istri Bupati. Peserta biasanya ditempatkan dalam satu asrama di dekat kantor kabupaten. Mereka mempelajari teknik pemisahan kapas (mengambil kapas dari bijinya) dan memintalnya jadi serat kapas.⁴⁶ Pada tanggal 4 Desember 1944 *Bogor Shi* (kota praja) juga mengadakan kursus penenunan kain dan pemintalan benang yang terdiri dari 44 orang perempuan dan 10 orang pimpinan *Fujinkai*. Setelah latihan mereka diminta menyelenggarakan pengajaran penenunan dan pemintalan di tingkat kecamatan untuk melatih wakil-wakil dari tingkat desa.⁴⁷ Bagaimanapun, sulitnya tugas-tugas yang diemban

⁴³ F. A. Rachmat Ishaya, *Indonesian Womens....* hlm. 52.

⁴⁴ Lihat artikel-artikel tentang penanaman jarak.

⁴⁵ Seorang turunan bangsawan Surakarta yang dulu tidak pernah menginjakkan kakinya ke sawah pun harus turut memberi contoh kepada para petani, *Asia Raya*, 15 Desember 1944.

⁴⁶ Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol.... op.cit.*, hlm. 32.

⁴⁷ *Asia Raya*, 4 Desember 1944.

oleh *Fujinkai*, setidaknya-tidaknya berbagai keterampilan yang telah diperoleh, juga memberikan dampak positif terhadap perempuan di kemudian hari, karena kaum perempuan telah mendapatkan berbagai bekal pengalaman, meskipun itu pada awalnya adalah untuk kepentingan Jepang.

Selain itu, tugas *Fujinkai* juga harus menanamkan cara hidup sederhana dan bagaimana menanamkan moralitas nilai-nilai sebagai perempuan, seperti yang sudah digariskan dalam program *Fujinkai*. Di samping itu, *Fujinkai* harus meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, dan mengorganisir kekuatan buruh untuk membantu di garis depan dalam peperangan terutama di wilayahnya. Organisasi ini juga bertugas agar mempropaganda giat menolong, mempromosikan pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Ia harus menginformasikan kepada kaum perempuan agar mau dilatih menjadi perawat kesehatan dan mengumpulkan makanan. Untuk pekerjaan seperti ini, *Fujinkai* bekerja sama dengan *Seinendan* dan *Keibodan*.

Selain aktivitas-aktivitas yang berbentuk fisik, *Fujinkai* juga melakukan musyawarah dan rapat-rapat besar dalam rangka semakin memperkuat kedudukan kaum perempuan dalam *Fujinkai*. Selain itu, tujuan rapat-rapat ini tentu untuk menanamkan rasa patriotisme dan semangat perjuangan di kalangan kaum perempuan, terutama dalam rangka menentang sekutu. Di Bandung misalnya diadakan Rapat besar *Fujinkai*, dengan bantuan para ulama setempat, sehingga masyarakat sangat antusias untuk berdatangan. Seperti yang diberitakan dalam *domei* (surat kabar) *Tjahaja*, Selasa 18 Shigatsu (April) 1944 sebagai berikut ini.

.... Sekali ini pendoeoek Bandoeng mendapat giliran dan kesempatan oentoek mendengarkan penerangan-penerangan Nj. Siti Noerdjannah (Propagandis dan pelopor Islam dari Fudjinkai Djakarta), meskipun hanya oentoek Fudjinkai tetapi perhatian dari kaoem laki-laki terutama para pembesar dan para pemoeka dari berbagai golongan ikoet hadir.⁴⁸

⁴⁸ *Tjahaja*, 18 April 1944.

Sebagaimana kebiasaannya, setelah mendengarkan kata sambutan dari ketua *Fujinkai* pusat, selanjutnya beliau menjelaskan tentang pekerjaan kaum perempuan dalam masa pancaroba ini, mendapat amanat dan kewajiban yang mahaberat, ikut menyumbangkan segenap tenaganya guna pembangunan masyarakat baru yang sempurna.

Satu bulan setelah itu juga diadakan Permusyawaratan *Fujinkai* bagi seluruh Jawa dan Madura. Permusyawaratan *Fujinkai* diselenggarakan oleh kantor besar *Djawa Hokokai*, mulai dari tanggal 28-30 Mei 2604 (1944) yang bertempat di gedung Kantor Besar Himpunan Kebaktian Rakyat, Jakarta, yang dihadiri oleh seluruh utusan dari *Ken* dan *Shi-Fujinkai* yang berjumlah kira-kira 200 orang.⁴⁹ Utusan itu ditempatkan dalam dua asrama dengan penginapan yang sangat sederhana, tidur di atas tikar dengan bantal yang bersarung tikar pula.

Pembukaan musyawarah dimulai tanggal 28 Mei yang dihadiri wakil Sosai (Paduka Toean Somabucho) serta beberapa pembesar Jepang dan Indonesia. Pada hari itu dimulai perundingan mengenai hal penting, yaitu a) menggiatkan tenaga perang untuk kemenangan akhir dan b) memperteguh susunan perhimpunan rakyat di dalam masa perang. Kemudian sorenya diadakan pidato oleh P.T. (Paduka Toean) Korematsu, Chuo Honbu Jicho, dan nona Onedera yang menguraikan tentang dunia kewanitaan di masa perang Nippon. Pada tanggal 29 Mei diadakan pidato tentang kesehatan rakyat pada masa perang oleh Dr. Mochtar dan tentang makanan sehat pada masa perang oleh Nj. Soekamto dan tentang bahaya udara oleh Dr. Soehardi. Pada tanggal 30 Mei malam harinya diadakan malam perpisahan. Pidato disampaikan oleh Ir. Soekarno. Pada tanggal 31 paginya para utusan pergi bertamasya ke Bogor, malam harinya *Djakarta Tokubetsu Fujinkai* mengadakan malam perpisahan, dengan mengumandangkan nyanyi-nyanyian yang bersemangat sehingga bertambah meriahlah malam perpisahan yang gembira itu, yang berakhir dengan rasa persaudaraan yang kekal.

⁴⁹ *Arsip Djawa Baroe*, jilid 3, 2604 (1944), hlm. 9; *Asia Raya*, Senin Legi, 29 Mei 1944.

Pada tanggal 28 bulan Mei 1944, seluruh perempuan yang hadir dalam musyawarah ini melakukan sumpah setia, "Soempah Bakti Kaoem Wanita", yang berisikan berikut ini.

Kami bersoempah akan bekerdja segiat-giatnja oentoek membela tanah air kami, sebagai satoe bahagian dari lingkoengan Asia Timoer Raja. Kami bersoempah, akan mendidik anak-anak kami, soepaja dapat berbakti kepada kepentingan tanah air dan bangsa. Kami selaloe akan menjokong dan mengandjoer-andjoerkan soeami kami, soepaja berani dan tetap setia melakoekan pekerdjaan dan kewadajiban sebagai perdjoeit bangsa dan tanah air, oentoek mendjoendjoeng tinggi deradjat bangsa Asia seloeroehnya. Kami akan menoeantoean keloearga kami, agar soepaja mereka soeka mengorbankan tenaganja, pikiranja dan djiwanja, onetoek kepentingan masjarakat. Kami kaoem wanita⁵⁰, sebagai anggota masjarakat, bersoempah akan berdaja-oepaja segiat-giatnja, soepaja keamanan masjarakat selaloe terdjaga, dengan mentjegah adanja peroesak masjarakat atau mentjegah adanja mata-mata moesoeh.

Jika dicermati lebih jauh beberapa poin dari sumpah perempuan ini, ternyata tugas perempuan masa ini cukup penting. Perempuan tidak hanya dikonstruksikan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab kepada keluarganya, tetapi juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membela dan mengamankan negara (Asia Timur Raya).

Beberapa bulan setelah mengadakan musyawarah besar untuk seluruh Jawa dan Madura, perempuan Indonesia mengadakan rapat umum di Taman Raden Saleh untuk menyatakan sikapnya di masa perang.⁵¹

.... Rapat umum Fujinkai itu berlangsung di Gedung Taman Raden Saleh pada hari Sabtu siang-ji dengan dapat kunjungan pelbagai golongan penduduk dan pembesar. Ruang pertemuan dihiasi bunga aneka warna yang luar biasa, pula dengan adanya bendera Hinomaru dan Indonesia, menimbulkan semaraknya suasana kegembiraan para hadirin....

Tepat pada jam 11 di bawah pimpinan Nj. Mochtar Praboe

⁵⁰ Isi lengkap dari teks dapat dilihat *Asia Raya*, 28 Mei 1944.

⁵¹ *Asia Raya*, Minggu 17 September 2604 (1944).

Mangkoenegeran dimulai acara penghormatan seperti biasa. Kemudian dilanjutkan dengan pidato Ny. R.A. Abdoerrachman selaku Ketua *Djakarta Tokubetsu Shi Fudjinkaichoo*, yang menerangkan antara lain berikut ini. "Bahwa kaum wanita belum puas bila tidak melakukan rapat sendiri untuk menyambut ketulusan hati perkenanan Indonesia Merdeka di kemudian hari." Setelah itu Nj. Dalima, anggota pengurus "Barisan Puteri" yang merupakan bagian dari *Fujinkai* menerangkan bahwa putri-putri Indonesia sanggup akan memperkuat semangat, membantu usaha-usaha *Fujinkai* ke arah cita-cita luhur. Selain itu, Barisan Puteri menyediakan diri membantu usaha putra-putra dengan seluas-luasnya, bila waktunya kemerdekaan sudah tiba.

Sebagai sambutan gembira oleh seluruh hadirin dilagukan nyanyi "Indonesia Raya", sebagai penutup diserukan *Dai Nippon Banzai!* (Hidup Jepang!), masing-masing di bawah pimpinan Ny. Aboerrachman dan *PT Djakarta Tokubetsu Shichoo*. Dalam rangka menyambut hari raya, *Fujinkai* telah menetapkan pula akan membagi-bagikan pakaian dari pemerintah 1.000 potong banyaknya. Pembagian ini akan diatur oleh masing-masing *Kanji* dengan bantuan para *Hanchoo* dan *Kumichoo* di masing-masing daerah.

Selain berbagai aktivitas yang telah dijelaskan, sesungguhnya aktivitas *Fujinkai* mencakup aspek ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pendidikan. Ny. E. Somanegara yang terpilih sebagai Ketua *Fujinkai* Jawa Barat, menyampaikan pemikiran-pemikiran tentang tugas-tugas perempuan (*Fujinkai*), sebagai berikut:

1. Di bidang ekonomi, ikut serta menggiatkan untuk menabung, mengawasi masalah pertokoan dan koperasi di Tonarigumi (Rukun Tetangga) serta memberantas perdagangan gelap;
2. Dalam bidang sosial, ikut serta mengurus kesehatan rakyat, menjaga bahaya udara dan kebersihan rakyat;
3. Di bidang kebudayaan, turut serta menjaga sopan santun dan kesusilaan;
4. Dalam bidang pendidikan, agar ibu menjadi pendidik yang baik bagi putri-putrinya agar kelak berguna bagi nusa dan bangsa.⁵²

⁵² *Peranan Wanita Indonesia dalam masa Pergerakan* (Jakarta: P7K, 1982),

Hampir semua kegiatan *Fujinkai* yang diberitakan oleh media massa disambut gembira dan dikerjakan secara sungguh-sungguh, terutama oleh kaum perempuan. Berita-berita kaum perempuan dan foto-fotonya dipampangkan dalam ukuran relatif besar di media massa. Seperti latihan serangan bahaya udara yang dilakukan sungguh-sungguh sehingga pada siang harinya didatangkan pesawat musuh tiruan yang akan melakukan pengeboman. Di malam hari kaum perempuan diminta untuk mengatur penerangan lampu agar jangan sampai sinarnya kelihatan dari luar rumah. Untuk pengaturan lampu, pemerintah menganjurkan penggunaan kertas hitam atau kukusan. Anjuran pemerintah selalu ditanggapi dengan penuh semangat oleh kaum perempuan seperti yang diberitakan oleh hampir semua media massa.

Berita mengenai betapa antusiasnya kaum perempuan mengikuti program-program pemerintah sangat sering dimuat di media massa. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Kaum perempuan pada umumnya tidak bertindak secara sukarela, apalagi penuh semangat. Mereka memenuhi anjuran pemerintah Jepang karena terpaksa dan takut akan siksaan dari *Kempeitai* yang terkenal kejam. Hal ini dituturkan oleh Ny. Djatmani Suparta, yang pernah menjabat sebagai sekretaris *Fujinkai* cabang Tulungagung, sebagai berikut.

*Banyak ibu-ibu yang seakan mati berdiri kalau datang perintah untuk membersihkan ulat dari tanaman jarak, berhubung Syochookan Kakka (residen) akan mengunjungi wilayahnya. Belum lagi hancurnya perasaan istri-istri Bupati dan Pating Tulung Agung serta ibu-ibu yang lain ketika harus menjahit celana dari bahan karung untuk para Romusha, setiap tusukan diiringi doa dan air mata.*⁵³

Kesaksian yang serupa disampaikan pula oleh Ibu Soepijah, mantan pimpinan Barisan Pelopor Puteri (BPP) yang sering

hlm. 39.

⁵³ Ny. Djatmani Suparta, "Sebutir Gabah dalam Lesung Perjuangan Bangsa" Lasmidjah Hardi, et al., *Sumbangsihku bagi Ibu Pertiwi, Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran*, Buku IV, (Jakarta: Sinar Harapan, dan Yayasan Wanita Pejuang, 1984), hlm. 77.

melakukan kegiatan bersama *Fujinkai*, dalam penanaman pohon jarak dan membuat celana untuk *Romusha*. Ia mengatakan: “BPP ditugaskan membuat celana dari karung untuk diberikan kepada *Romusha* yang bertugas di Pantai Selatan. Kepada anggota saya diinstruksikan agar bekerja secara perlahan-lahan saja sehingga tatkala tugas belum selesai, Jepang telah menyerah.”⁵⁴ Kadang-kadang pengurus *Fujinkai* juga tidak mengetahui kegiatan yang akan mereka lakukan. Asal ada perintah dari *Gunseikanbu*, mereka harus melaksanakannya. Pengalaman seperti ini disampaikan oleh Ny. Barkah Alganis Baswedan, sebagai berikut.

*Pernah satu kali ada telepon, dipanggil oleh kantor Gunseikanbu. Untuk apa, tidak diberi tahu. Kenapa, tidak diberi tahu. Kami bertanya dalam hati, disuruh apa. Kami dipanggil, dimasukkan ke dalam kamar dan ditutup pintu. Kira-kira setengah jam, datang lagi itu Jepang. Tepuk tangan lagi memanggil kami untuk menuruni tangga, dari atas loteng itu turun ke bawah. Ternyata ibu-ibu, tokoh-tokoh Indonesia sudah penuh di situ, masing-masing membawa bunga, dan kami pun diberi bunga...naik kendaraan untuk mengunjungi tentara Jepang yang sakit di rumah sakit. Tapi perasaan kami waktu itu mau ditangkap atau dikurung.*⁵⁵

Di samping itu, kadang-kadang tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh anggota *Fujinkai*, perintah yang datang dari *Gunseikan* adakalanya sangat mendadak sehingga anggota *Fujinkai* kewalahan untuk mengikutinya.

D. *Fujinkai* dan Lembaga-lembaga Buatan Jepang Lainnya

Semenjak masuknya Jepang ke Indonesia, pemerintah pendudukan mulai mendirikan berbagai macam lembaga masyarakat guna mendukung suksesnya Perang Asia Timur Raya. Lembaga-lembaga tersebut, antara lain: *Tonarigumi* (Rukun Tetangga), *Kumiai* (Koperasi), *Seinendan* (Barisan Pemuda Indonesia), *Keibodan*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

⁵⁵ Wawancara dengan Ny. Barkah Alganis Baswedan, 22 Agustus 1975, A.B. Lopian dan JR Chaniago, *op cit.*, hlm. 34.

(Organisasi Keamanan) dan *Jawa Hokokai* (Himpunan Kebaktian Rakyat), termasuk *Fujinkai* (Organisasi Perempuan). Dari berbagai lembaga buatan Jepang ini, organisasi *Fujinkai*, yang khusus dibentuk untuk memobilisasi tenaga perempuan, telah mempunyai peran penting dalam bekerja sama dengan beberapa lembaga tersebut.

1. *Fujinkai*, *Seinendan* (Barisan Pemuda) dan *Keibodan* (Barisan Pembantu Polisi)

Dalam berita pemerintah *Kan po*, no. 26, 1943, bagian 4 a, "Anggaran Dasar Menyusun *Fujinkai*" disebutkan:

Oentoek mendalamkan keinsjafan kewadajiban wanita dalam pendjagaan negeri di waktu peperangan, maka Fujinkai haroes merapatkan hoeboengan dengan Seinendan dan Keibodan, sambil melangoengkan latihan soepaja kelak kemoedian hari dapat mengerdjakan pekerdjaan itoe sebaik-baiknja apabila ada serangan moesoeh.

Seinendan dan *Keibodan* diperkenalkan kepada masyarakat pada hari ulang tahun Kaisar (29 April 1943), beberapa minggu setelah pembentukan Potera (Poesat Tenaga Rakjat)⁵⁶ Tujuan dan tugas *Seinendan* dinyatakan dalam *Kan po* sebagai berikut.

*.... Oentoek menginsjafkan pemoeda-pemoeda di Djawa soepaja giat bekerdja bersama-sama dengan pemerintah balatentara dan soepaja menjokong Pembangoenan Lingkoengan Kemakmoeran di Asia Raja, maka perloelah mereka itoe diberi pimpinan dan didikan.*⁵⁷

Agaknya tujuan pokok *Seinendan* adalah untuk memobilisasi pemuda demi tujuan-tujuan yang lebih pragmatis, seperti, peningkatan produksi dan pekerjaan umum serta memberikan latihan-latihan bagi mereka yang bekerja di bidang-bidang tersebut.⁵⁸

⁵⁶ Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan.....*, hlm. 341 dan 351.

⁵⁷ *Kan po*, no 8, 10 Desember 1942, hlm. 3.

⁵⁸ Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan...., op.cit.*, hlm. 343.



Gambar 6.1 Seinendan atau Korps Pemuda dibentuk pada 29 April 1943. Tujuannya, mendidik dan melatih pemuda pribumi agar dapat menjaga pertahanan.

Sumber: <https://www.edukasinesia.com/>

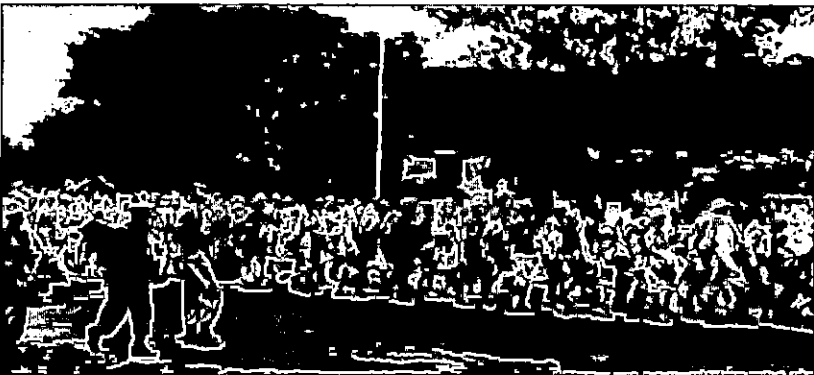
Keibodan adalah semacam organisasi keamanan di bawah kontrol Departemen Kepolisian, sementara *Seinendan* adalah semacam organisasi kepanduan yang berada di bawah Kantor Pengadjaran Departemen Dalam Negeri. *Keibodan* mempunyai peran sebagai tenaga bantu kepolisian yang bekerja untuk menjaga keamanan, sementara *Seinendan* lebih mengarah pada pemanfaatan bagi pekerja produksi, terutama dalam produksi pertanian.⁵⁹ *Seinendan* ditempatkan di bawah kontrol ketat pemerintah. Organisasi ini secara langsung diawasi oleh kantor pengajaran (*Bunkyo-kyoku*), Departemen Urusan Dalam Negeri. Sementara *Keibodan* dibentuk pada tingkat desa dengan kepala desa sebagai komandannya.

Secara struktur *Seinendan* memiliki beberapa kesamaan dengan *Fujinkan*, mulai dari komandan tertinggi masing-masing sampai ke cabang-cabang dan ranting-rantingnya (kota, kabupaten, kecamatan dan desa), yang dikepalai oleh kepala daerah setempat. *Fujinkai* dikepalai oleh istri kepala daerah setempat. Sementara *Keibodan* berada di bawah pengawasan kepolisian kecamatan. Kalau tidak terdapat kepolisian

⁵⁹ Bringmans, hlm. 519 dalam Aiko Kurasawa, *Mobilisasi...*, *op.cit.*, hlm. 351.

kecamatan, mereka diawasi oleh *soncho* (camat). Anggota-anggotanya dipilih oleh kepala desa dari kalangan penduduk pria desa yang berumur antara 23 sampai 35 tahun. Tugas dan fungsi *Keibodan* dirumuskan dalam "Anggaran Dasar Oentoek *Keibodan*"⁶⁰ sebagai berikut.

1. *Jang mengenai pendjagaan dan penjelidikan terhadap oesaha jang mengenai kabar jang penting dan tipoe moeslihat.*
2. *Jang mengenai oesaha pendjagaan bahaya oedara.*
3. *Jang mengenai pendjagaan jang haroes dilakukan di pantai laoet.*
4. *Jang mengenai pendjagaan dan pertolongan terhadap bahaya badai topan, bahaya bandjir, bahaya kebakaran, bahaya gempa boemi, dan mala petaka lain-lain.*
5. *Jang mengenai oesaha mendjaga dan mentjari penjamuan, pentjoeri dan pendjahat lain-lain.*
6. *Jang mengenai oesaha mengawasi kelana, orang jang patoet disangka karena tingkah lakoenja dan lain-lain orang jang kelakoeannja sedjenis itoe.*
7. *Jang mengenai pekerdjaan djaga malam jang kini dioeroes oleh ronda kampoeng dan*
8. *Pekerdjaan-pekerdjaan selain jang soedah diseboet dalam keterangan a sampai g di atas itoe jang perlu didjalankan oentoek mendjaga keamanan dan kesedjahteraan daerah.*



Keterangan: Jepang juga membentuk *Keibodan*, yang berfungsi sebagai pembantu polisi. *Keibodan* bertugas menjaga lalu lintas dan menjaga keamanan di desa. Awalnya, mereka yang direkrut *Keibodan* adalah yang berusia 20–35 tahun. Belakangan, diubah menjadi 25–35 tahun. Untuk menjadi anggota harus berbadan sehat dan berkelakuan baik.

Gambar 6.2 Sumber: <https://www.edukasinesia.com/>

⁶⁰ *Kan po*, no. 18, 10 Mei 1943, hlm.18.

Bila dihubungkan dengan *Fujinkai*, kedua organisasi ini, baik *Seinendan* maupun *Keibodan*, memiliki tujuan yang sama dengan *Fujinkai*. Yaitu bagaimana lembaga-lembaga ini diperalat untuk memobilisasi masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing oleh pemerintah Jepang. Perbedaan terutama sebetulnya hanya terletak pada status atau jenis kelamin, bukan pada jenis pekerjaan karena dalam kenyataan di lapangan banyak pekerjaan di antara lembaga ini yang tumpang tindih. Di pihak lain, secara tegas dinyatakan bahwa seluruh keanggotaan *Keibodan* adalah pria, meskipun *Seinendan* tidak ditegaskan secara nyata, tetapi dalam kenyataannya ia adalah organisasi pria (pemuda).

Dari kenyataan tugas-tugas atau pekerjaan sehari-hari yang dilakukan di lapangan adakalanya kegiatan-kegiatan *Seinendan* maupun *Keibodan* dikerjakan oleh *Fujinkai*, seperti, usaha-usaha dalam memobilisasi tenaga manusia (*Romusha*), meningkatkan produksi, kursus bahasa Jepang, latihan dalam berbagai keahlian pencegahan serangan udara dan kebakaran, peningkatan semangat kerja, mengumpulkan berbagai informasi tentang masyarakat dan sebagainya seperti yang sudah dijelaskan pada bagian-bagian aktivitas *Fujinkai*.

2. *Fujinkai* (Organisasi Perempuan) dan *Tonarigumi* (Rukun Tetangga)

Tonarigumi berasal dari perkataan *Tonari* dan *Gumi*. *Tonari* artinya tetangga dan *Gumi* artinya susunan. Jadi, *Tonarigumi* itu artinya susunan tetangga yang sifatnya seperti gotong royong di Indonesia.⁶¹ Sebelum Jepang memperkenalkan lembaga ini, terlebih dahulu penguasa Jepang menyelidiki dan mempelajari watak dan kebiasaan bangsa Indonesia. Berdasar pengamatan pemerintahan militer Jepang, bahwa bangsa Indonesia telah memiliki sikap gotong royong dan bekerja sama yang kuat semenjak dahulu. Namun, selama ini belum terorganisir secara baik. Di samping itu, lembaga seperti yang diinginkan Jepang ini sudah terbentuk di Jepang sebelumnya.

⁶¹ *Sinar Baroe*, 441. Senin 20 Djoeni 2063 (1943).

Sebagaimana yang diberitakan dalam *Pewartā Silebes*⁶² "Agar menjadi suatu organisasi yang memiliki semangat tolong-menolong maka harus diorganisir secara baik sehingga mampu secara efektif bekerja untuk kepentingan pemerintah dan tentara Jepang.

Tonarigumi atau rukun tetangga diperkenalkan di Jawa pada Januari 1944. Lembaga ini juga tiruan rukun tetangga Jepang pada masa perang.⁶³ *Tonarigumi* bertindak sebagai sarana efektif dalam melakukan kontrol atas penduduk di Jepang pada masa perang. Berdasarkan Konferensi Residen Seluruh Jawa, dikeluarkanlah sebuah program terperinci yang disebut: "Azas-azas oentoek Menjempoernakan Soesoenan Roekoen Tetangga"⁶⁴, yang berisikan:

Maksoed

Roekoen tetangga haroes mendjadi soeatoe badan oentoek bekerdja dengan boekti njata dalam hal membela tanah air, mengatoer perekonomian, dsb. ditempatnja masing-masing.

Roekoen Tetangga, sebagai soesoenan bawahan di dalam pemerintahan ditempatnja masing-masing, haroes melangsoengkan hal oesaha pemerintahan bala tentara kepada pendodoek.

Roekoen tetangga haroes berichtiar oentoek mendjalankan kewadajiban bersama-sama, misalnya tolong menolong, bantoe membantoe dsb. antara pendodoek, berdasarkan semangat gotong rojong, jang hidoep dalam masyarakat Djawa semendjak dahoeloe kala.

Bersamaan dengan itu juga disebutkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan *Tonarigumi*:

1. *Membantu Keibodan (organisasi Keamanan) dalam mempertahankan tanah air dan melawan serangan udara, kebakaran, mata-mata dan penjahat.*
2. *Memberi tahu rakyat mengenai dekrit, peraturan dan petunjuk pemerintah serta menyadarkan mereka.*
3. *Membantu peningkatan produksi dan penyerahan padi serta tanaman lain.*
4. *Memajukan gotong royong di kalangan penduduk.*

⁶² *Pewartā Selebes*, 8 April 1944.

⁶³ Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan...*, *op.cit.*, hlm. 195 dan 197.

⁶⁴ *Jawa Shinbun*, 11 Januari 1944; *Asia Raya*, 9 dan 10 Januari 1944.

Untuk melihat bagaimana struktur dan aktivitas *Tonarigumi* di lapangan, dicoba untuk mengutip beberapa pengalaman orang yang terlibat di dalamnya. Berikut ini, bagaimana pengalaman Bapak Zainal Simabangun yang pernah terlibat mengepalai *Tonarigumi* di daerah Salemba. Dia mencoba menuturkan pengalamannya sebagai berikut.⁶⁵

Sekitar tahun 1944 Bapak Zainal ditunjuk oleh masyarakat Salemba Matraman dengan sebutan Kumicho, untuk mengepalai Tonarigumi di daerah tersebut. Mengenai susunan Tonarigumi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi, seperti seksi kesehatan, keamanan, kewanitaan, dan lain-lain. Sedangkan tugas Tonarigumi membantu pemerintah Jepang dalam ketertiban dan keamanan di lingkungan, memelihara kehidupan sosial masyarakat, seperti di bidang kebersihan.

Organisasi ini terlepas dari struktur pemerintahan desa. Semua perintah dan peraturan diketahui dan dilaksanakan oleh rakyat, termasuk peraturan pemerintahan daerah setempat, disampaikan kepada rakyat melalui *Tonarigumi* dan dipimpin oleh *Kumicho*. Organisasi *Tonarigumi* biasanya mempunyai anggota tiga puluh sampai empat puluh keluarga. Pengurus *Tonarigumi* mengadakan pertemuan satu bulan sekali, sedangkan rapat anggota disesuaikan dengan kebutuhan, bila ada pengumuman yang harus disampaikan. Mengenai kepengurusan *Tonarigumi* ternyata dipilih oleh masyarakat, berbeda dengan lembaga lainnya seperti *Keibodan*, *Seinendan*, dan *Fujinkai* yang ditunjuk oleh masing-masing pejabat departemen yang berwenang. Biasanya setelah pengurus *Tonarigumi* terpilih kemudian baru dilaporkan ke kelurahan, dari kelurahan kemudian disampaikan ke kota praja.

Tentang aktivitas dan fungsi lain dari *Tonarigumi* dijelaskan bapak Zainal sebagai berikut.⁶⁶

⁶⁵ A.B. Lopian dan JR Chaniago, *Di bawah Pendudukan Jepang: Kenangan empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya*, Penerbitan Sejarah Lisan no. 4, (Jakarta: Arsip Nasional Indonesia, 1988), hlm. 21.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 22-23.

Karena Jepang menginginkan ketaatan dan kesetiaan rakyat kepada pemerintahan Jepang, maka Jepang menginginkan sebanyak-banyaknya Tonarigumi untuk membantu mereka. Mereka mengharapkan dibantu segala bidang tetapi dengan memeras tenaga rakyat. Selain anggota pria dewasa diwajibkan ronda malam dari jam delapan malam sampai pagi, juga bertugas mengatur pembagian makanan yang sulit didapatkan. Karena bahan makanan dikuasai Jepang, maka mengatur pembagian barang-barang, seperti; beras, gula, kopi, rokok ditugaskan melalui *Tonarigumi*. Masyarakat hanya diperbolehkan memiliki beras seperempat liter per orang. Masyarakat juga disuruh mengumpulkan besi-besi tua, dan membongkar paksa pagar-pagar rumah yang sudah ada.

Dari beberapa pengalaman Bapak Zainal sebagai pimpinan *Tonarigumi*, banyak kesan unik yang diperolehnya, antara lain berikut ini. "Adakalanya bila agak keras bertindak, maka dikomentari oleh masyarakat, 'Wah! Orang ini ke Jepang-jepangan bahkan lebih dari Jepang.' Padahal tindakan tersebut hanya untuk mengelabui Jepang, supaya Jepang beranggapan bahwa kita pro Jepang." Dia juga mengakui sangat sulit mengendalikan diri dalam mengatur mana yang kepentingan Jepang dan mana kepentingan masyarakat. Pengalaman Bapak Zainal ini, bukanlah hal yang aneh terjadi ketika suasana perang.

Pengalaman saling curiga ini pernah pula dialami oleh Bapak Zulkifli Lubis, yang menceritakan pengalamannya sebagai berikut.⁶⁷

Pada sekitar bulan Agustus 1945, saya datang ke kantor Kempei di Mardeka Barat untuk meminta mobil saya yang dicuri. Ketika itu, di sana ditahan beberapa orang teman, antara lain; Manaf, Sukarmen entah siapa lagi saya lupa katariya. Ketika dia diperintahkan oleh Bapak Wiranakusumah untuk membebaskan tawanan Manado yang ditawan oleh pejuang kita di Ceulengsi, dan dipimpin oleh gerombolan bernama Pak Macan. Kemudian mereka menawan saya, karena mereka mendapat informasi bahwa saya mata-mata Jepang. Saya disergap dan mau dihabsi. Untung saya bisa meyakinkan mereka dan sampai-sampai bersumpah jadi batu. Kemudian saya dibantu oleh Manaf Roni anak buah Pak Macan untuk menjelaskan bahwa saya bukan anggota 'Kipas Hitam' (mata-mata Jepang), tetapi secara kebetulan ketemu di markas Kempeitai itu untuk mengurus mobil saya yang hilang.

⁶⁷ H. Zulkifli Lubis, wawancara 17 Maret 1983; 23 September 1983, dalam A.B. Lopian dan JR Chaniago, *op.cit.*, hlm. 31.

Dalam berbagai kegiatan baik di kota maupun di desa *Fujinkai* selalu bekerja sama dengan *Tonarigumi*. Di wilayah perkotaan, kegiatan *Fujinkai* sering dilakukan dengan *Tonarigumi* sebagai unit dasarnya,⁶⁸ seperti kampanye cara menabung, membasmi buta huruf, memelihara kebersihan, dan sebagainya. Di Jawa, setelah *Tonarigumi* di Yogyakarta berjalan selama enam bulan, *Tonarigumi* Yogyakarta dicontohkan sebagai *Tonarigumi* seluruh Jawa.⁶⁹

Tonarigumi di *Jogja Kooti* memiliki beberapa bagian badan.

1. Pertama, Badan pembantu prajurit pembela Tanah Air.
2. Kedua, Penjagaan bahaya udara.
3. Ketiga, Urusan keamanan yaitu: mengurus penjagaan keamanan, seperti ronda, menjaga rumah kosong dan sebagainya.
4. Keempat, Urusan ekonomi, yaitu mengurus pembagian barang-barang, pengawasan harga, memajukan perusahaan, bercocok tanam, dan urusan-urusan ekonomi lainnya.
5. Kelima, Urusan masyarakat, yaitu mengurus pengajaran, seperti memberantas buta huruf, mengajarkan bahasa Nippon, kesehatan, kematian, selamatan, dsb.
6. Keenam, Urusan pemuda dan barisan kampung.
7. Ketujuh, Urusan propaganda, yaitu untuk menginsafkan penduduk akan keadaan baru agar mereka bekerja menurut panggilan zaman dan hidup selaras dengan keadaan masa.⁷⁰

Untuk tercapainya program-program *Tonarigumi*, *Fujinkai* adalah tulang punggung utama dalam pelaksanaannya. Karena itu, dalam *Tonarigumi*, *Fujinkai* menjadi sangat penting. Sementara bagi pemerintah Jepang, *Tonarigumi* adalah lembaga yang sangat efektif untuk mengontrol gerak-gerik masyarakat dalam politik, keamanan dan ekonomi. Beberapa contoh kerja sama yang baik antara *Tonarigumi* dan *Fujinkai* dapat dilihat dalam beberapa kutipan ini, terutama dalam rangka merekrut tenaga-tenaga perempuan untuk dididik sebagai pekerja sosial seperti juru rawat, tenaga produksi

⁶⁸ Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan... op.cit.*, hlm. 203.

⁶⁹ *Tjahaya*, 26 April, 1944.

⁷⁰ *Ibid.*

dan sebagainya. Dalam sebuah artikel yang berjudul "Sembadra dan Srikandi" dinyatakan sebagai berikut ini.

.... Setelah mendapat latihan kira-kira doea boelan lamanja, rombongan djoeroe rawat jang pertama akan melakukan kewadjabannja. Mereka diantar oleh keluarga dan pemimpin-pemimpin Fujinkai.⁷¹

Dalam artikel lain yang berjudul "Tonarogumi di keboen-keboen Pekarangan Roemah di kota-kota" disebutkan:

.... Besar soenggoeh harapan bahwa oesaha menanami pekarangan bertoemboeh madju, makin radjin orang mentjari harta jang terpendam di pekarangan itoe, makin sempoernalah -kehidupan orang. Alangkah baiknja bila Tonarogumi dan Fujinkai lebih giat lagi bekerdja kedjoeroesan ini.⁷²

3. Fujinkai dan Beberapa Perkumpulan Puteri

Ketika Jepang telah mulai merasa kehabisan tenaga laki-laki sebagai militer, pembantu militer dan *Romusha*, pemerintah Jepang semakin mengintensifkan tenaga-tenaga perempuan. Pemerintah mendirikan perkumpulan militer putri, seperti Sri Kandi dan semakin mengaktifkan Barisan-barisan Puteri yang sudah ada selama ini. Sebagaimana ditulis oleh Nj. Tabrani dalam surat kabar *Tjahaja*, Senin, 10 Shigatsu (April), 1944, sebagai berikut.

.... Barisan Srikandi itu untuk menyiapkan kaum putri supaya dapat membantu pekerjaan kaum laki-laki, di samping mendidik mereka menjadi ibu utama. Yang diterima adalah kaum putri yang berumur 15-20 tahun yang belum bersuami. Tiap desa di seluruh Djakarta Shu yang semua berjumlah 664 harus mengirimkan seorang remaja putri dalam tiap latihan dan begitu seterusnya, sehingga semua putri yang memenuhi syarat semuanya harus dilatih dalam Barisan Srikandi Latihan itu dipimpin oleh putrinya Djakarta Syuutyookan nona Sri Soedharti Soetardjo, dibantu oleh beberapa guru-guru putri, yaitu berikut ini. Lily Kartodirdjo, Nurdjanah Abdurrachman dan nona Zaidah Ramli....⁷³

⁷¹ *Djawa Baroe*, no. 17, 2604 (1944).

⁷² *Pandji Poestaka*, no. 6, 2605 (1945), hlm. 198.

⁷³ *Tjahaja*, Senin 10 Shigatsu (April), 1944.



Gambar 6.3 Laskar Putri Indonesia. FOTO/vredeburg.id/kebudayaan.kemdikbud.go.id

Perekrutan tenaga remaja putri ini dipertanggungjawabkan kepada *Fujinkai*, karena secara struktur *Fujinkai* adalah perpanjangan tangan dari pangreh praja yang harus bertanggung jawab terhadap pemerintahan Jepang. Oleh karena itu, pangreh praja akan memerintahkan apa yang harus dilakukan perempuan kepada *Fujinkai*.

Box. 6.1**Barisan Srikandi: Laskar yang Lahir dari Propaganda Jepang**

Oleh: Indira Ardanareswari - 2 September 2019

Sebelas hari setelah pemerintah kolonial Belanda menyerah pada bulan Maret 1942, Jepang dengan sigap menggulung habis partai-partai politik dan organisasi pergerakan di Indonesia. Organisasi perempuan yang saat itu tengah tumbuh tidak luput terkena imbasnya. Mereka dipaksa untuk menggabungkan diri ke dalam satu wadah bernama Fujinkai yang diresmikan pada 3 November 1943 di Jakarta.

Fujinkai pada esensi nya dibentuk memakai dasar-dasar perkumpulan perempuan militan Jepang yang bernama Dai Nippon Fujinkai. Di Jepang, anggota Fujinkai mencapai 15 juta perempuan berusia 20 tahun ke atas. Tugas mereka selalu berkaitan dengan pertahanan garis belakang, seperti mendukung perekonomian dan pengadaan peralatan perang.

Siti Fatimah dalam *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War* (2010: hlm. 292) menyebutkan bahwa sejatinya perempuan Indonesia awalnya tidak sudi bergabung dengan Fujinkai. Akan tetapi, seiring waktu mereka berharap dapat melanjutkan gerakan emansipasi perempuan melalui organisasi tersebut. Demikian negosiasi secara tidak langsung antara perempuan dengan pihak Jepang telah terjadi sedari awal.

Fujinkai pada esensinya dibentuk memakai dasar-dasar perkumpulan perempuan militan Jepang yang bernama Dai Nippon Fujinkai. Di Jepang, anggota Fujinkai mencapai 15 juta perempuan berusia 20 tahun ke atas. Tugas mereka selalu berkaitan dengan pertahanan garis belakang, seperti mendukung perekonomian dan pengadaan peralatan perang.

<https://tirto.id/barisan-srikandi-laskar-yang-lahir-dari-propaganda-jepang-ehhf>

Di samping Barisan Srikandi ada Barisan Pelopor Puteri, yang merupakan bagian dari *Djawa Hokokai Suishintai*, anggotanya terdiri dari perempuan yang berusia 17–25 tahun. Mereka umumnya juga adalah anggota-anggota *Fujinkai*. Pimpinan-pimpinan cabang

Barisan Pelopor Puteri ini sekaligus adalah pimpinan-pimpinan *Fujinkai*. Tugas-tugas mereka adalah:

1. Membantu permintaan militer Jepang
2. Mengumpulkan makanan
3. Mengumpulkan dana
4. Mengajarkan bahasa Jepang
5. Penyuluhan kesehatan, pertahanan garis depan
6. Menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi perang⁷⁴

Baik Barisan Srikandi maupun Barisan Pelopor Puteri, umumnya dilengkapi dengan latihan-latihan militer, karena pemerintahan Jepang telah merencanakan jika sewaktu-waktu nanti mereka harus berada tidak lagi di garis belakang, melainkan di garis depan.

Dalam sebuah artikel *Taman Isteri* yang berjudul "Srikandi dan Sembadera", dinyatakan berikut ini.

*.... Wanita haroes tahu hak dan kewadjabannja dan batas-batas pekerdjaan dalam mendjalankan dalam segala roepa perdjoeangan membantoe laki-laki agar soepaja tetap wanita itoe membantoe kemadjoean masjarakat dengan tak melewati batas-batas kewanitaannja, dan sesuai dengan chodrat-chodratnja. Tetapi haroes diperhatikan poela bahwa dunia tak akan sempoerna dengan adanja Srikandi sadja, doenia memboetoehkan djoega Sembadera, ialah kaoem wanita jang dapat mendjadi iboe sedjati, pendidik jang sempoerna, soepaja dapat melahirkan djohan pahlawan jang akan mendjadi tiang masjarakat Indonesia dan meroepakan benteng Asia pada oemoemnja.*⁷⁵

Dari kutipan tersebut, ternyata perempuan tidak hanya dituntut dengan peran-peran domestik di satu pihak, melainkan juga dipihak lain harus berjuang sama sebagaimana laki-laki.

⁷⁴ F. A. Rachmat-Ishaya, *Indonesian Womens...op.cit.*, hlm. 58.

⁷⁵ *Tjahaya*, Sabtoe 4 Sangatsu (Maret) 2604 (1944).

Box. 6.2**Inilah 5 Organisasi Militer Indonesia Bentukan Jepang yang Dikenal Sangat Gahar**

Oleh: Adi Nugroho

Setelah merebut Indonesia dari tangan Belanda, Jepang melakukan berbagai taktik untuk memanfaatkan Nusantara secara maksimal. Dengan segala ide dan kecerdikan, Jepang memutuskan untuk membuat organisasi militer dan semimiliter yang nantinya bisa berguna ketika sekutu datang dan ingin mengembalikan kejayaan kolonial Belanda.



Organisasi militer bentukan Jepang ini diikuti oleh banyak sekali pemuda di Indonesia. Mereka tertarik bergabung karena Jepang memberikan banyak sekali propaganda, salah satunya adalah Gerakan 3A. Berikut uraian lengkap organisasi militer Indonesia bentukan Jepang itu.

1. Heiho, Pasukan Pembantu Prajurit Jepang

Heiho adalah pasukan yang sengaja dibentuk Jepang untuk membantu pasukan Angkatan Laut, Darat dan Kepolisian ketika sekutu datang. Pemuda berusia 17-25 tahun yang sehat secara jasmani dan rohani dilatih dan dididik ala militer Jepang agar bisa berperang. Mereka dimasukkan ke kamp militer dan ditekan hingga mencapai batas tertinggi dari kekuatan fisik dan mentalnya.



Heiho

Setelah menjalani latihan yang sangat ketat. Pasukan ini akan dipekerjakan seperti layaknya pasukan Jepang, Mereka akan berpatroli, dan berperang karena sudah diajarkan menggunakan senjata dengan benar. Anggota Heiho yang berhasil direkrut oleh Jepang kala itu sebanyak 42.000 orang.

2. PETA, Pembela Tanah Air

Pembentukan Heiho dipandang masih kurang memadai oleh pemerintah Jepang kala itu. Akhirnya berdasarkan instruksi dari Letnan Jenderal Kumakichi Harada, Dibentuklah PETA yang beranggotakan pemuda-pemuda di Indonesia. Berbeda dengan Heiho yang anggotanya susah naik pangkat dan tidak mungkin memiliki jabatan tinggi, PETA mengizinkan anggotanya mendapatkan jabatan tinggi hingga setingkat perwira.

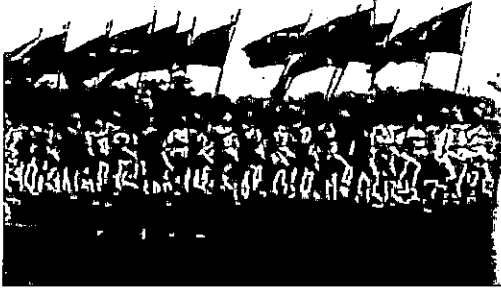


Pasukan PETA dan Bendera Peta

Kebebasan ini membuat PETA menjadi sangat diminati hingga anggotanya meledak mencapai 57.000 orang. Tentara PETA juga dilatih secara maksimal oleh Jepang untuk berperang. Sayangnya, di beberapa daerah PETA justru melakukan pemberontakan seperti yang dilakukan oleh Supriyadi di Blitar. Akhirnya, PETA menjadi salah satu ujung tombak kemerdekaan Indonesia dalam melawan penindasan Jepang.

3. Seinendan, Korps Pemuda

Seinendan dibentuk Jepang dengan tujuan agar pemuda di Indonesia mampu melindungi tanah airnya sendiri. Meski organisasi ini hanya semimiliter, latihan yang diberikan juga cukup berat. Di masa lalu, anggota Seinendan sangatlah banyak. Bahkan mencapai sekitar 500.000 jiwa yang tersebar di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.



Seinendan

Meski fungsi awal dari Seinendan adalah untuk menjaga tanah air. Jepang punya misi lain yang tentu saja dirahasiakan. Misi itu adalah menggunakan pemuda yang berusia 17-24 tahun ini sebagai cadangan untuk peperangan. Saat sekutu masuk dengan kekuatan yang sangat tinggi, para Seinendan ini bisa berjaga di belakang agar kekuatan semakin besar.

4. Keibodan, Korps Kewaspadaan

Berbeda dengan Seinendan, Keibodan lebih banyak berisi pria dewasa dengan umur sekitar 25-35 tahun. Mereka dilatih militer untuk menjaga desa-desa yang menjadi *base* pertahanan Jepang. Mereka dipersiapkan sebagai pasukan yang akan selalu waspada dengan ancaman dari luar atau pun dalam Indonesia. Setiap ada hal-hal aneh, Jepang meminta mereka untuk melapor.

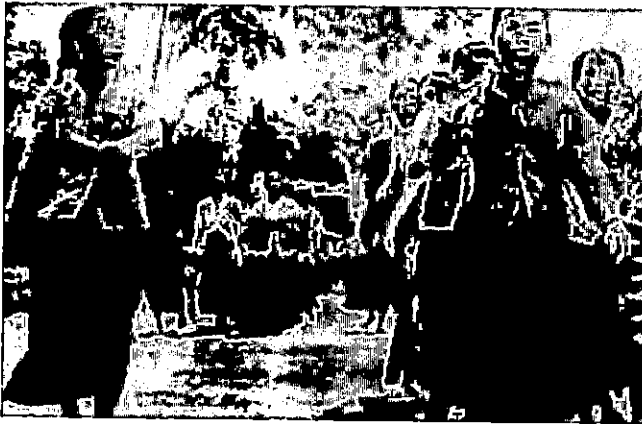


Ilustrasi Keibodan

Fungsi lain dari Seinendan adalah membantu tugas dari Polisi Jepang. Mereka akan berpatroli dan melakukan aksi-aksi kombatan yang sangat hebat. Keibodan dibentuk Jepang di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Selain di Indonesia, Jepang juga membuat pasukan semimiliter ini Tiongkok dengan nama Kakyou Keibotai.

5. Fujinkai, Pasukan Wanita

Wanita juga berperan besar bagi pertahanan Jepang di Indonesia saat Perang Dunia ke-II. Jepang membuat sebuah organisasi bernama Fujinkai yang berisi wanita-wanita berusia minimal 15 tahun. Mereka akan dilatih oleh Jepang untuk membangun kesejahteraan masyarakat serta memberikan kursus-kursus bermanfaat meski dalam lingkup terbatas.



Fujinkai

Pada situasi yang sangat darurat. Fujinkai akhirnya dilatih perang menggunakan senjata oleh Jepang. Mereka akan ditugaskan dalam peperangan jika kaum pria tak kuat menghalau serangan yang sangat kuat dari sekutu. Pasukan terkenal dari Fujinkan diberi nama Pasukan Srikandi dan dibentuk sekitar tahun 1944.

Inilah lima organisasi militer Indonesia bentukan Jepang yang dikenal sangat gahar di masa lalu. Meski Cuma bentukan Jepang dengan maksud terselubung. Satuan militer ini menjadi cikal-bakal tentara di Indonesia.

Sumber: <https://www.boombastis.com/organisasi-militer-jepang/71397>

BAB VII

BEBERAPA HASIL PENELITIAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP ORGANISASI PEREMPUAN

Hubungan negara dan perempuan di belahan dunia ketiga, khususnya di Asia Tenggara memperlihatkan keunikan tersendiri. Karena itu, bagaimanakah persisnya bentuk hubungan tersebut bila dilihat dalam kasus “Fujinkai” di Indonesia, terutama bagaimana pemerintah Jepang mengontrol dan mengakomodir organisasi ini untuk kepentingan penguasa saat itu.

Fujinkai adalah organisasi perempuan yang jika ditinjau dari struktur kekuasaan dan ideologi dari pemerintahan Jepang terlihat bagaimana negara itu mengakomodir organisasi ini. Dengan demikian maka buku ini sebenarnya ingin mengumpulkan dan menganalisis data yang berkenaan dengan organisasi perempuan *Fujinkai* ini dari sudut pandang struktur dan ideologi pemerintah Jepang. Gunanya untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai hubungan negara dan perempuan di dunia ketiga, khususnya Indonesia dalam kasus *Fujinkai*.

Dari studi-studi yang telah dilakukan, terdapat beberapa tulisan dan hasil penelitian yang berdekatan dengan topik buku ini, terutama yang berhubungan dengan *Fujinkai*. Misalnya sebuah hasil penelitian dari skripsi yang berjudul, “Jakarta Tokubetsu Shi Fujinkai (Perkumpulan Wanita di Jakarta 1943–1945)”.¹

¹ Rita Lubis, “Jakarta Tokubetsu Shi Fujinkai” (Perkumpulan Wanita di

Skripsi ini lebih banyak bersifat informatif dan deskriptif. Karena itu, penulis beranggapan bahwa tulisan ini sangat membantu dalam penulisan buku ini. Kemudian, sebuah tesis yang berjudul "Indonesian Women's Organizations during the Japanese Occupation 1942-1945",² ditulis oleh F A Rachmat-Ishaya dari *Fakulteit der Letteren Uni model teit Van Amsterdam*. Penelitian ini terdiri dari lima bab, namun hanya satu bab yang menyinggung tentang organisasi perempuan pada masa Jepang, yaitu pada Bab IV.

Tidak jauh berbeda dengan tulisan yang pertama, buku ini lebih banyak menyajikan informasi-informasi umum yang bersifat deskriptif. Beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab dari kedua hasil penelitian ini antara lain adalah bagaimana (1) sistem rekrutmen keanggotaan, (2) bagaimana pandangan masyarakat Jepang terhadap kedudukan dan peran-peran perempuan, (3) bagaimana dialektis antara budaya tradisional Jepang dengan tradisi Indonesia dalam memosisikan perempuan, (4) bagaimanakah benturan yang terjadi ketika Jepang memaksakan hadirnya *Fujinkai*, (5) sementara diketahui sebelumnya telah berdiri berbagai organisasi perempuan pada masa pergerakan. Meskipun demikian, kedua tulisan ini sangat berharga bagi penulis terutama sekali dalam memberikan sumber inspirasi bagi timbulnya pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas.

Namun, penulis beranggapan bahwa pertanyaan kedua dan ketiga sebagian sudah terjawab pada Bab III dan Bab IV pada buku ini yang menjelaskan situasi budaya Jepang dan kolonial saat itu.

Tulisan lain, yang membantu untuk menjelaskan situasi ini adalah hasil penelitian penulis sendiri yang berjudul "Women's Organizations during the Japanese Occupation (1942-1945): A comparative Study in Indonesia and Malaysia"³. Tulisan ini mencoba

Jakarta 1943-1945)", skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1988.

² F. A. Rachmat-Ishaya, "Indonesian Women's Organizations during the Japanese Occupation 1942-1945", tesis, *Moderne Aziatische Geschiedenis, Faculteit der Letteren, Universiteit van Amsterdam*, 1990.

³Fatimah, Siti, *Women's Organizations during the Japanese Occupation*

memperbandingkan keberadaan organisasi perempuan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dan Malaysia. Pembahasan studi ini lebih banyak menekankan kepada aspek gender dan perbedaan kebijakan Jepang terhadap perempuan di kedua negara ini. Ketika hampir seluruh kaum pria dikirim ke medan perang, di sini posisi dan kedudukan perempuan mulai berubah. Sebagian besar pekerjaan dan posisi yang dilakukan pria digantikan kaum perempuan.

Selain itu, juga terdapat sebuah artikel yang menarik dalam jurnal *Indonesia* terbitan *Cornell*, yang berjudul "Two Stories of the Japanese Occupation: Fujinkai & Och. Och. Och."⁴ Tulisan ini adalah sebuah artikel yang berisikan dua cerita tentang pengalaman pada masa pendudukan Jepang, di antaranya tentang situasi dalam sebuah rapat *Fujinkai*.

Di samping melakukan studi literatur, penulis juga melakukan studi kearsipan. Sangat disadari bahwa arsip-arsip atau dokumen-dokumen pada masa Jepang sangat sulit ditemukan, karena dokumen-dokumen tersebut tidak dapat diselamatkan dari kebiadaban perang. Meskipun demikian, surat-surat kabar, majalah-majalah sezaman, yang sekarang pada umumnya sudah berbentuk mikrofilm cukup mewakili mendukung penulisan buku ini.

Selain majalah dan surat kabar, di Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional terdapat sekumpulan peraturan pemerintah (*Kan-Po*) pada masa pemerintahan Jepang. Kemudian sebuah kumpulan arsip dari beberapa peristiwa yang dapat diselamatkan, yang berjudul *Djawa Baroe*, baru saja diterbitkan beberapa tahun belakangan ini berkat kerja sama antara Indonesia dan Jepang. Berita-berita yang ada dalam *Djawa Baroe* ini terdiri dari dua bahasa, Indonesia dan Jepang. Sumber tertulis lain adalah *the Nisjima Collection* dari *Wesada Uni model ty*, Tokyo, Jepang yang sudah dipindahkan ke Gedung Joang Angkatan '45, Jl. Menteng Raya, no. 56, Jakarta.

(1942-1945): A comparative Study in Indonesia and Malaysia

⁴ Idrus, "Two Stories of the Japanese Occupation: Fujinkai & Och...Och...Och", diterjemahkan oleh S. U. Nababan, *Indonesia*, no. 2. (Oktober 1966).

Di sini cukup dan banyak sekali tersedia informasi tentang berbagai peraturan dan perundang-undangan yang dibuat pemerintahan militer Jepang pada masa itu. Sumber lain yang tak kalah pentingnya adalah sumber lisan (*oral history*), yaitu melalui wawancara.

Arsip Nasional Jakarta telah menerbitkan beberapa sumber tentang pengalaman-pengalaman aktor pada masa pendudukan Jepang, di samping mengejar para pelaku yang masih hidup untuk dikorek pengalaman masa lalunya. Penulis juga memanfaatkan sumber-sumber lisan yang sudah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya.

Untuk memahami hubungan negara dengan organisasi pada masa Jepang ini, memang terdapat beberapa literatur. Namun, penulis melihat belum terdapat kajian yang memfokuskan pada bagaimana hubungan negara dan perempuan. Sehubungan dengan topik ini sebagaimana tergolong ke dalam penelitian sejarah kontemporer, yang dapat diinterpretasikan sebagai *die Epoche der Mittlebanden und wissenschaftliche Behandlung*, yang berarti sejarah kontemporer adalah zaman dari mereka yang hidupnya bersamaan, yakni bersamaan dengan kita, baik pembaca maupun sejarawannya, serta penggarapannya dilakukan secara ilmiah,⁵ maka tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan metode wawancara kepada tokoh-tokoh yang masih hidup saat penulisan buku ini.

Memang untuk menulis buku ini akan banyak terdapat kesulitan terutama dalam hal acuan metode sejarah dan seleksi data terhadap sumber yang ditemukan. Khusus untuk sumber dokumen dikenal dengan kritik eksternal dan internal, sementara sumber lisan memiliki acuan tersendiri.⁶

⁵ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Jakarta: Inti Idayi Press, 1984), hlm. 6.

⁶ Kritik terhadap sumber lisan dapat dilakukan sebagai berikut: *pertama*, membandingkan informasi yang diperoleh dengan sumber-sumber tertulis; *kedua*, melakukan wawancara dengan topik yang sama kepada informan yang berbeda; *ketiga*, melakukan wawancara dengan topik yang sama kepada informan yang sama dalam jangka waktu yang agak berbeda; *keempat*, menetap lebih lama di lapangan. Acuan ini disarikan dari Baum, Willa K. (1977)

Transcribing and Editing Oral Hirstory, Penerbit: Rowman Altamira.

Tidak salah pula jika dalam memahami topik ini penulis meminjam atau menggunakan teori ilmu sosial (politik), khususnya menggunakan teori-teori yang relevan misalnya teori gender dan feminisme, teori negara korporatif untuk membedahi dan menganalisis berbagai aspek dan dimensi dalam peristiwa sejarah sebagai proses yang akan dikonstruksikan. Sebagaimana halnya penelitian sejarah, penelitian ini bertitik tolak kepada dua jenis sumber penting, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sebagai tambahan, maka telaah untuk penulisan buku ini pada periode Jepang, juga diperoleh dari Perpustakaan dan Arsip Jepang melalui Prof. Dr. Aiko Kurasawa dan dari kearsipan di Belanda dibantu oleh teman-teman yang ada di Belanda. Di samping itu, juga telah tersedia kumpulan arsip *the Nisjima Collection* dari Wesada Uni model ty, Tokyo, Jepang, di Gedung Joang Angkatan '45, Menteng, Jakarta. Sumber yang lain pada umumnya terdiri dari berupa hasil tulisan terdahulu.

Berangkat dari fakta-fakta yang diperoleh dalam hasil studi literatur maka terdapat beberapa hal yang unik dan menarik untuk dikemukakan. Misalnya, penulis menduga organisasi perempuan di zaman Jepang ini dapat memiliki beberapa kesamaan secara struktur dan ideologi dengan organisasi pemerintah yang dibuat semasa Soeharto atau Orde Baru, walaupun kedua organisasi ini berada dalam dua periode dan pemerintahan yang berbeda. *Fujinkai* berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Jepang, sementara Dhârma Wanita berada di bawah pemerintahan yang sudah merdeka, yang dalam sejarah lebih dikenal dengan pemerintahan Orde Baru.

BAB VIII

PENUTUP

Buku ini mencoba melahirkan satu perspektif bagaimana sebuah negara/penguasa menghimpun kekuatannya melalui organisasi perempuan yang dibentuk oleh negara atau penguasa itu sendiri untuk mencapai tujuan pragmatis (politik) dari negara atau penguasa tersebut.

Dalam uraian buku ini terlihat bagaimana pemerintah Jepang menempatkan perempuan (*Great's Women Assciation*) di bawah enam Kementerian Jepang. Oleh karena itu, terlihat bahwa secara struktur maupun ideologi organisasi perempuan ini bersifat sentralistik militeristik. Organisasi ini bukan tumbuh dari bawah (*bottom up*), melainkan dengan sengaja dilahirkan oleh penguasanya (*top down*) untuk mendukung kepentingan negara yang berkuasa.

Sejalan dengan ciri sentralistik, Negara Jepang dipenuhi dengan ideologi patriarkis yang mengutamakan nilai-nilai ketimuran. Perempuan dikonstruksikan sebagai ibu yang baik, istri yang patuh terhadap suami, mengasuh anak, mengatur rumah tangga, sopan santun, dan sebagainya.

Meskipun secara struktur dan ideologi organisasi *Fujinkai* berada di bawah satu pemerintahan yang bersifat fasis, militeristik, dan otoriter. Kebijakan Jepang terhadap organisasi perempuan yang sarat dengan ideologi, nilai-nilai dan simbol-simbol patriarki ketimuran, antara lain sebagai berikut. Tuntutan perang telah melahirkan sesuatu yang berbeda (lihat Box vi-1)

Perempuan yang dikonstruksikan sebagai ibu yang baik, mendidik anak, mengurus rumah tangga, mengasuh bayi dan

sebagainya, telah mampu mengambil alih pekerjaan-pekerjaan dan menggantikan tenaga laki-laki yang selama ini dianggap bukan milik perempuan (sawah, ladang, kantor, bahkan berada di belakang garis depan). Ini telah dibuktikan dengan tidak sedikitnya perempuan yang berada di luar rumah untuk melakoni berbagai pekerjaan tertentu, seperti yang telah dijelaskan pada bagian bab-bab sebelumnya. Perempuan telah memberikan kontribusi nyata dalam memenuhi kebutuhan perang Jepang, terutama dalam mengisi kebutuhan-kebutuhan ekonomi perang.

Pada masa Jepang ini dapat dikatakan sebagai sebuah periode gerakan tanpa perlawanan (*without resistance movement women*) dalam konstelasi sejarah pergerakan perempuan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. W. (2007). *Seabad Kontroversi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Adji, K. B. (2018). *Istri-istri Raja Jawa*. Yogyakarta: Arska Publisher.
- Alignment to Common Core Standards*. (t.thn.). Dipetik 4 April, 2019, dari UCLA HISTORY:
<https://phi.history.ucla.edu/nchs/alignment-common-core-standards/>
- Alwi, A. (1981). *Jawaban Terhadap Alam Fikiran Barat yang Keliru Tentang Islam*. Bandung: CV Diponegoro,.
- Amiruddin, M. (8 Maret 2013). "Perempuan dan Partai Politik: Fenomena Kuota 30%", *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*.
- Anita, S. (2006). *Gerakan Perempuan: Tinjauan Sejarah (Sebagai Pengantar Diskusi Lingkar Studi Perempuan)*. Jakarta.
- Ardanareswari, I. (2 September 2019). *Barisan Srikandi: Laskar yang Lahir dari Propaganda Jepang*. Dipetik 2019 4 November, dari Tirto: <https://tirto.id/barisan-srikandi-laskar-yang-lahir-dari-propaganda-jepang-ehhf>
- Aripurnami, S. (t.thn.). "Peranan Negara pada Masa Orde Baru dalam Mengatur Partisipasi Perempuan di tingkat publik dan prifat."
- Arnicun, A. (Penyunt.), (1991), (1991), *Lima GBHN (1973;1978;1983; 1988; 1993)* Jakarta: Gramedia.
- Aryono. (t.thn.). *Siapakah Sebenarnya Nyi Roro Kidul?* Dipetik 4, April 2019, dari Historia: <https://historia.id/kuno/articles/siapakah-sebenarnya-nyi-ro-ro-kidul-vVeVp>
- Azra, Z. (2008). *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Kemasyarakatan*. Bandung: Angkasa.

- Bamberger, & Shams. (1991). *Community Participation in Project Management, The Asia Experience*. Malaysia: Asian and Pacific Development Center.
- Basti, N. P. (2014, Februari 28). *Nyai Dan Pergundikan: Realitas Sosial Di Era Kolonialisme*. Dipetik 4 April, 2019, dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/nisabasti/54f8370aa33311625f8b4759/hak-dan-kedudukan-para-perempuan-indonesia-di-era-masa-kolonial>
- Baswedan, N. B. (1975, Agustus 22). (A. Lapijan, & J. Chaniago, Pewawancara)
- Baum, W. K. (1977). *Transcribing and Editing Oral History*. Penerbit: Rowman Altamira.
- Benda, H. J. (1980). *Bulan Sabit dan Mata Hari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang, (terj.)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Boutilier, B. (2000, 10 November). *Women's History: Concept and Approches*. Universitas Indonesia, Program Pascasarjana. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita.
- Budiman, K. (1992). Subordinasi perempuan dalam bahasa Indonesia. Dalam A. B. Susanto, *Citra Wanita dan Kekuasaan* (hal. 72- 73). Yogyakarta: Kanisius.
- Bullock, J. (2015, November 19). *Historical Thinking*. Dipetik 4, April, 2019, dari Haiku Deck: <https://www.haikudeck.com/historical-thinking-uncategorized-presentation-9MKNpl1yp9#slide4>
- Burhanuddin, J. & Fathurrahman, O. (Penyunt.). (2004). *Perempuan Islam dan Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gama Media.
- Carry, L. (1995). *Community Development as a Process*. Columbia: University of Missouri Press.
- Chodijah, I. (1986). *Rintihan Kartini*. Jakarta: Ikhwan.
- Davis, K., & Newstrom, J. (1989). *Human Behavior at Work. Organization*. Singapore: Mc. Graw-Hill. International.
- de-Stuers, C. V. (1960). *Te Indonesian Women Struggle and Achievements*. Mouton: The Hague.

- Dewantara, K. H., Dewantara, N. K., & Dewantara, B. (1984). *Nyi Ki Hadjar Dewantara*. Jakarta: Gunung Agung.
- Djoedjoeran, & Saparsih. (1942). Kaoem Perempoean Jepang di saat Perang Asia Timur Raya". *Majalah Pandji Poestaka*, No.8, 2602.
- Djohan, B., Adam, N. S., & Dipoyo, D. (1928). *Laporan Kongres Pemuda Indonesia I (1928): 67-84*.
- Dobbin, C. (1990). The Search for Women in Indonesia. Dalam *Kartini Centenary Indonesian Women Then and Now* (hal. 66). Australia: Monash University.
- Donnell, G. A. *Reflection on the Pattern of Change in the Bureaucratic-Authoritaria State*. Latin American Research Review, vol. XII, no. 1, pp.6-7.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1983). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia (Cet. XII. ed.). Jakarta: Gramedia.
- Fanon, F. (2017). *Black Skin, White Masks*. Pluto Press.
- Fatimah, S. (2002). "Negara dan Perempuan: Studi Kasus Dharma Wanita (1974-1999)", "Negara dan Perempuan: Studi Kasus Dharma Wanita (1974-1999)". Tesis S3, Universitas Indonesia, Jurusan Sejarah, Jakarta.
- Fatimah, S. (30 April 2008). Pentingnya Sejarah Androgynous. *Seminar Nasional P3S*.
- Fatimah, S. *Women's Organizations during the Japanese Occupation (1942-1945): A comparative Study in Indonesia and Malaysia*.
- Frederick, W. (2005). *Pemahaman sejarah Indonesia: sebelum dan sesudah revolusi*. (S. Soeroto, Penyunt.) Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Geertz, H. (1985). *Keluarga Jawa, terj.* Jakarta: Grafiti Pers.
- Gunseikanbu. (1986). *Orang Indonesia yang terkemuka di Jawa*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hadi, K., & Sustianingsih. (2013). *Pahlawan Nasional*. Yogyakarta: Familia.
- Hardi, L. (1984). Sumbangsihku bagi Ibu Pertiwi, Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran". Dalam *Buku IV* (hal. 77). Jakarta: Sinar Harapan, dan Yayasan Wanita Pejuang.

- Hartono, A. B., & Juliantoro, D. (1997). *Derita Paksa Perempuan*. Jakarta: Sinar Harapan, LBH Yogyakarta & Ford Foundation.
- Hatta, M. (1979). *Memoir*. Jakarta.
- Het gebouw van de Kartinschool. (t.thn.). Dipetik 4 April, 2019, dari wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:COLLECTIE_TRO_PENMUSEUM_Het_gebouw_van_de_Kartinschool_geopen_d_op_22_juli_1918_aan_de_Feitweg_in_Buitenzorg_TMnr_60002657.jpg
- Holleman, F. (1971). *Kedudukan hukum wanita Indonesia dan perkembangannya di Hindia Belanda*. (S. Poerbakawatja d, & M. H. Prakosoo, Penerj.) Djakarta : Bhratara.
- Horton, R., & Simmons, S. (2006). *Wanita-wanita yang Mengubah Dunia*. Jakarta: Erlangga.
- Hunt, L. (Penyunt.) (1989). *The New Cultural History*. Berkeley: University of California Press.
- Idrus. (1966). "Two Stories of the Japanese Occupation: Fujinkai & Och...Och...Och", (Vol. No.2), (S. Nababan, Penerj.) Indonesia.
- Idrus, H. A. *Buku Wanita dulu Sekarang dan Esok*. Medan: Penerbit Waspada.
- Jo, H. (t.thn.). *Kisah Nyai dan Para Lelaki Kolonial yang Kesepian*. Dipetik 3 April, 2019, dari Historia: <https://historia.id/kultur/articles/kisah-nyai-dan-para-lelaki-kolonial-yang-kesepian-PKNgZ>
- Joan Wallach Scott. (t.thn.). Dipetik 4 Desember, 2019, dari Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Wallach_Scott
- Kadam, S. R. (1987, September 1). (Penulis, Pewawancara) Jakarta.
- Kanahele, G. S. (1967). *The Japanese occupation of Indonesia, prelude to independence*. N.Y: Cornell University.
- Karima, N. (2019, Juli 16). *Mengkritik Wacana Feminisme Pasca Kolonial di Indonesia*. Dipetik 3 April, 2019, dari Jurnal Perempuan: <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/mengkritik-wacana-feminisme-poskolonial-di-indonesia>

- Kartini, *Pustaka Feminisme Poskolonial yang Terlupakan*. (22, April 2016). Dipetik 4 April, 2019, dari Qureta: <https://www.quareta.com/post/kartini-pustaka-feminisme-poskolonial-yang-terlupakan>
- Kartowijono, S. (1982). *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Kasza, G. J. (1995). *The Conscripted Society: Administreted Mass Organizations*. New Haven and London: Yale University Press.
- Katoppo, A. (1979). *Satu Abad Kartini*. Jakarta: Sinar Harapan.
- KOWANI. (1986). *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurasawa, A. (1993). *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa 1942-1945*. ((anonim), Penerj.) Jsakarta: Gramedia.
- Lapian, A., & Chaniago, J. (1988). *Di bawah Pendudukan Jepang: Kenangan empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya* (Vol. No.4). Jakarta: Penerbitan Sejarah Lisan.
- Lips, H. (1993). *Sex and Gender: An Introduction*. London: My field Publishing Company.
- Lloyd, C. (1993). The Structures of History. Dalam *Methodological Structurism in Historical Explanation*. Cambridge, UK: Oxford & Blackwell.
- Lloyd, S. A., Few, ., & Allen, R. (1990). *Handbook of Feminist Family Studies*. Dalam Ferree.
- Lubis, R. (1988). "*Jakarta Tokubetsu Shi Fujinkai*" (*Perkumpulan Wanita di Jakarta 1943-1945*). Skripsi. Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jurusan Sejarah.
- Majalah Kan po,. (1942, Desember 10). no 8,, p. 3. Majalah Kan po,. (1943, Mei 10-). No.18 .
- Masu, O. (1980). *Peranan Wanita Jepang, Pengantar.Mely G.Tan*. Yayasan Obor Indonesia dan Gajah Mada University Press.
- May, B. (1978). *The Indonesian Tragedy*. London,; Henley and Boston.
- MegawangI, R. (1999). *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru*

tentang Relasi Gender (Cet.I ed.). Bandung: Mizan.

Moore, H. L. (1988). *Feminism and Anthropology*. Cambridge: Polity Press.

Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami* (Cet.I ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nadiroh. (2008). *Prospek dan tantangan civil society di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Keluarga.

Neufeldt, V. (Penyunt.). (1984). *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster's New World Cleveland.

Notosusanto, N. (1984). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Inti Idayi Press.

-----, N. (1979). *Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta.

Nugroho, A. (t.thn.). *Inilah 5 Organisasi Militer Indonesia Bentukan Jepang yang Dikenal Sangat Gahar*. Dipetik Desember 4, 2019, dari Bombastis: Sumber: <https://www.boombastis.com/organisasi-militer-jepang/>

Oakley, P. (1991). *Project with People the Practice of Participation in Rural Development*. General:International Labour Office.

Ortner, S. B. (1974). Is female to male as nature is to culture? dalam M. Z. In Rosaldo, & L. (. Lamphere, *Woman, culture, and society*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Plummer, K. (2013). *Sosiology The Basic*. (N. Martono, & Sisworo, Penerj.) Jakarta: Rajawali Press.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka.

Purwanto, B. (2006). *Gagalnya Historiograf Indonesiasentris*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Rachmad-Ishaya. (1990). *Indonesian Woman Organizations during the Japannese Occupation 1942-1945*. Thesis M.A, University Amsterdam, Amsterdam.

Rahayu, I. R. (2018, Maret 4). *Gerakan-Perempuan Indonesia dalam Belunggu Historiografi Indonesia-Androsentris*. Dipetik

- April 5, 2019, dari Jogloabang: <https://www.jogloabang.com/perempuan/gerakan-perempuan-indonesia-dalam-belunggu-historiografi-indonesia-androsentris>
- Rahayu, R. I. (2007). *Konstruksi Historiografi Feminisme Indonesia dari tutur Perempuan*, (esai). *Simposium Historiografi Nasional*.
- Rahayu, R. I. (1996). Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan sejak tahun 1980-an, *Prisma*, no. 5. *Prisma (Majalah)*.
- Ranke, M., & Kartowidjojo, S. (1983). *Sujatin Kartowidjojo Mencari Makna Hidupku*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Reischauer, E. O. (1982). *Manusia Jepang*. (B. Siregar, Penerj.) Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Ricklefs, M. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*, (terj.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Roosiani, I. (2017). "Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Jepang". *Jurnal Wahana, Volume 1*, 69-79.
- Rosyadi, I. (2010). *R.A Kartini Biografi Singkat 1879-1904*. Yogyakarta: Garasi.
- Rupp, L. J. (1978). *Mobilizing Women For War: German and American Propaganda 1939-1945*. New Jersey: Princeton University Press.
- Sadker, M. P. (t.thn.). *Why Women's History?* Dipetik 3 April, 2018, dari National Women's History: <https://nationalwomenshistoryalliance.org/why-womens-history/>
- Saptari, R., & Hotzer, B. (1997). *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Kalayanamitra.
- Sato, S. (1994). *War Nationalism and Peasants: Java Under the Japanese Occupation 1942-1945*. Asian Studies Association of Australia in association with ALLEN & UNWIN.
- Setiawati, E. (2017, Desember 25). *Partisipasi Perempuan sebagai Buah Transformasi Gender*. Dipetik 3 Desember, 2019, dari medium.com: <https://medium.com/@evisetiawati195/>

partisipasi-perempuan-sebagai-buah-transformasi-gender-247a9c24dbb8

- Showalter, E. (Penyunt.). (1989). *Speaking of Gender*. New York, London: Routledge.
- Sinulingga, R. (2006). Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Agama Kristen. *Jurnal Wawasan*, volume 12, hal 47.
- Soedijat, N. S. (1999, Februari 18). (Penulis, Pewawancara) Yogyakarta:
- Soeroto, S. (1984). *Kartini Sebuah Biograf*. Jakarta: P.T Gunung Agung. Soewito, I. H., & Wahyu, S. R. *Hadi Perjalanan Tiga Zaman*. Jakarta: Gramedia, 1997, hlm. 73.
- Status Wanita Jepang : Dari Masa Edo Hingga Pasca-Perang*. (2015, Desember). Dipetik 4 April, 2019, dari ayatayatadit: <https://ayatayatadit.wordpress.com/2015/12/06/status-wanita-jepang-dari-masa-edo-hingga-pasca-perang/>
- Steurs, C. V. D. (2017). *Sejarah perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaiannya, terj.* Jakarta: Komunitas Bambu.
- Stoller, R. (1968). *Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity*. New York City: Science House.
- Subadio, M. U. (Penyunt.). (1978). *Peranan dan kedudukan wanita Indonesia: bunga rampai tulisan-tulisan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978.
- Surajaya, I. K. (Penyunt.). (2001). *Pengantar Sejarah Sepang*. Jakarta.
- Surat Kabar Djawa Baroe* (Vol. jilid 3, 2604). (1944).
- Surat Kabar Tjahaya,. (1944, Sangatsu (Maret) Sabtoe,4). Jakarta. Surjomihardjo, A. (April 2000). *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta 1880-1930*. Yogyakarta: Yayasan Adikarya dan the Ford Foundation.
- Suryakusuma, J. I. (1987). *State Ibuism the Social Construction of Women Hood in the Indonesian New Order*" Thesis M.A. Thesis, M.A, Den Haag, Holland.
- Suryana. (2010). *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Bandung.

- Tadashi, F. (1989). *Masyarakat Pedesaan di Jepang*. Jakarta: PT Gramedia.
- Taliziduhu, N. (1990). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Taruna. (1987). *Ciri Budaya Manusia Jawa*. Yogyakarta: Kanisius
- Tokura, A. (2000). *The Rise of the Feminist Movement in Japan*. Tokyo: Keio University Press.
- Trimurti, W. d. (1999., Juli 20). (Penulis, Pewawancara) Jakarta. Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, (Cet. I. ed.). Jakarta: Paramadina.
- Urry, J. (2000). "Metaphors". *Sociology beyond societies: mobilities for the twenty-first century*. Routledge.
- Vickers, A. (2012). *Sejarah Indonesia Modern, terj.* Jakarta: Insan Madani.
- Wardani, & Wardani, S. B. (2011). Representasi Politik Perempuan (Masih) Setengah Hati, Analisis Keterpilihan Perempuan Hasil Pemilu 2009 dan Tantangan Advokasi Menuju Pemilu 2014. *Studi Politik, Vol'1 No.2*, 162.
- Yoshimi, Y. (1995). *Comfort Women. Sexual Slavery in The Japanese Military During World War II*. (S. O'Brien, Penerj.)
- ZAMAN MEIJI (1867- 1912) (17 Mei 2014). Diambil kembali dari Face book: https://web.facebook.com/notes/senpai-anissan/zaman-meiji-1867-1912/634912543251929/?_rdc=1&_rdr
- Zed, M. (2005). *Giyugun: cikal-bakal tentara nasional di Sumatera*. Jakarta: LP3S.

GLOSARIUM

- Abad* Masa 100 tahun. Berabad-abad dinomori secara normal dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lainnya.
- Abstrak* Ringkasan sumber teks.
- Anakronisme* Inkonsistensi kronologis, khususnya pengenalan suatu objek, istilah linguistik, teknologi, ide, atau apa pun ke dalam periode waktu di mana ia tidak termasuk.
- Analisis gender* mengakui bahwa gender adalah variabel penting dalam proses pembangunan. Analisis gender dari suatu program pembangunan melibatkan pengidentifikasian isu-isu gender dalam suatu masalah atau situasi, dan dalam hambatan-hambatan untuk kemajuannya sehingga masalah-masalah tersebut dapat diatasi dalam tujuan-tujuan proyek, pilihan strategi intervensi, dan metode-metode pelaksanaan program.
- Antiquarianism* Studi sejarah berfokus pada bukti empiris masa lalu, termasuk manuskrip dan arsip, situs arkeologi dan bersejarah serta artefak. Istilah ini sekarang sering digunakan dalam pengertian yang merendahkan, untuk merujuk pada minat yang terlalu sempit pada hal-hal sepele sejarah, dengan mengesampingkan rasa konteks atau proses sejarah.
- Antropologi* Studi tentang kemanusiaan, secara budaya dan fisik, di segala waktu dan tempat. Antropologi forensik adalah penerapan pengetahuan dan teknik antropologis dalam konteks hukum, untuk mendeteksi kejahatan dan mengidentifikasi penjahat. Ini melibatkan pengetahuan rinci tentang osteologi.
- Arkeologi* Studi tentang sejarah manusia dan prasejarah melalui penggalian situs dan analisis sisa-sisa fisik.
- Arkontologi* *sejarah seni*, Studi tentang objek seni dalam konteks sejarah dan gaya mereka.

<i>Artefak</i>	Objek material apa pun yang terkait dengan suatu budaya, seperti alat, barang, pakaian atau makanan siap saji.
<i>Autobiografi</i>	Catatan atau riwayat hidup seseorang tentang kehidupannya sendiri.
<i>Barang antik</i>	Seorang sejarawan yang mempelajari benda-benda kuno atau benda-benda di masa lalu, seringkali dengan perhatian khusus pada artefak, arsip, manuskrip, atau situs arkeologi dari sejarah kuno, yang bertentangan dengan sejarah yang lebih baru. Dalam arti yang lebih luas, barang antik juga bisa menjadi orang yang hanya kolektor atau penggemar artefak tersebut dan tidak harus seorang sejarawan profesional.
<i>Barbar</i>	Sebuah kata Yunani yang diadopsi oleh orang Romawi untuk merujuk kepada orang yang tidak mengadopsi cara hidup orang Romawi. Dikatakan berasal dari suara "bar-bar", yang, menurut orang-orang Yunani, seharusnya menjadi suara yang dibuat orang ketika berbicara bahasa asing.
<i>Bibliografi</i>	Daftar karya, termasuk buku, jurnal dan esai, tentang topik tertentu.
<i>Biografi</i>	Akun tentang kehidupan seseorang, terutama yang ditulis oleh seseorang selain dari individu yang ditampilkan dalam akun.
<i>Boei Giyugun</i>	Tentara Tambahan Indonesia (PETA).
<i>Boeitai</i>	Angkatan Pertahanan.
<i>Bogodan</i>	Organisasi Pertahanan Sipil (Sumatra)
<i>Bolshevik</i>	Kelompok kecil Marxis revolusioner yang terorganisasi dengan ketat pada awal abad ke-20 Rusia yang memisahkan diri dari gerakan Sosialis Rusia pada tahun 1903 dan dipimpin oleh Vladimir Lenin. Pada November 1917, selama apa yang disebut Revolusi Oktober, kaum Bolshevik ("Mayoritas") mengambil kendali atas Rusia yang kacau, menjadi penguasa <i>de facto</i> setelah perang saudara berikutnya. Mereka kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Uni Soviet (CPSU).

Borjuis	Kelas kapitalis yang kemudian dikenal sebagai kelas menengah, antara aristokrasi dan kelas pekerja. Kelas menengah baru pedagang dan pengusaha makmur di seluruh Eropa dari abad ke-16, dan terutama di Inggris, yang digambarkan Napoleon sebagai "negara pemilik toko". Di zaman modern, istilah <i>borjuis</i> sering digunakan secara <i>derogatory</i> untuk menggambarkan sesuatu yang dianggap membosankan, tidak imajinatif dan/atau materialistis egois.
Budanco	Sebutan untuk komandan regu.
Buranji	Kronik tertulis dari Ahom, kerajaan abad pertengahan Assam, India.
Chudanco	Komandan regu pasukan, pangkat setingkat Letnan.
Chuo Sang In	Badan pertimbangan pusat.
Craton Kongo	Lempeng benua terpisah yang dipecah dari Rodinia superkontinen di Late Precambrian. Isinya sebagian besar dari apa yang sekarang disebut Afrika utara-tengah.
Cuo Seinen	Lembaga Pusat Pelatihan Pemuda.
Kunrensyo	
Dai Toa	Asia Timur Raya.
Daidan	batalion (PETA).
Daidancho	Komandan Batalion, pangkat setingkat Kapten.
Daidanki	Panji-panji/bendera batalion, pataka (PETA).
Disiplin	Studi, atau praktik, subjek tertentu menggunakan serangkaian metode, istilah, dan pendekatan tertentu. Sejarah adalah disiplin, demikian pula arkeologi, kimia, dan biologi.
Dokuritsu junbi cosakai	Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Dokuritsu junbi inkai	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
Domei	nama kantor berita Jepang.
Epigrafi	Studi tentang prasasti kuno.
Euramerica	Sebuah benua super yang ada di Siluria Akhir melalui Devonian, dibentuk oleh tabrakan Baltica, Laurentia, dan Avalonia. Itu termasuk apa yang sekarang Amerika Utara, Greenland, Skandinavia, dan Eropa. Kadang-kadang juga disebut sebagai "Benua Merah Tua" untuk warna merah dari endapan teroksidasi.

<i>Faleristik</i>	Studi tentang perintah militer, dekorasi dan medali.
<i>Feodalisme</i>	Tatanan hukum dan sosial yang berlaku di sebagian besar Eropa abad pertengahan, di mana masyarakat terstruktur di sekitar seperangkat kewajiban hukum dan militer timbal balik.
<i>Filateli</i>	Studi tentang perangko.
<i>Filologi sejarah politik</i>	Studi tentang peristiwa politik, ide, gerakan dan pemimpin masa lalu.
<i>Fujinkai</i>	Fujinkai merupakan barisan wanita pada masa pendudukan Jepang yang menjadi anggotanya adalah wanita berusia 15 tahun ke atas. Tugasnya adalah penyedia makanan.
<i>Fusimban</i>	Penjaga malam.
<i>Gender</i>	Perbedaan budaya dan sosial antara perempuan dan laki-laki. Ini termasuk berbagai atribut, status, peran, tanggung jawab, peluang dan hak istimewa yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki serta akses mereka dan kontrol atas sumber daya dan manfaat. Semua perbedaan ini dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat dan iklim pembangunan.
<i>Giyugun</i>	Tentara Sukarela (di Sumatra).
<i>Gondwana</i>	Sebuah benua super yang ada dari Kambria ke Jurassic, terutama terdiri dari apa yang sekarang menjadi Amerika Selatan, Afrika, Madagaskar, India, Antartika, dan Australia.
<i>Hagiografi</i>	Biografi orang suci atau orang suci, atau lebih luas lagi biografi di mana penulisnya tidak kritis atau hormat terhadap subjek.
<i>Hak akses</i>	Informasi tentang siapa yang dapat mengakses sumber daya atau indikasi status keamanannya.
<i>Heiho</i>	Barisan pembantu prajurit Jepang. Anggotanya terdiri dari pemuda yang berusia 18–25 tahun.
<i>Heraldik</i>	Studi tentang perangkat persenjataan.
<i>Hermeneutika</i>	Teori dan metodologi penafsiran teks.
<i>Hinomaru</i>	bendera Jepang.
<i>Historisme</i>	Cara penyelidikan sejarah yang menegaskan bahwa masa lalu harus dipahami dengan istilahnya sendiri.

- Historisitas* Penulisan sejarah, 1. Studi tentang metodologi dan pengembangan sejarah sebagai suatu disiplin ilmu. 2. Tubuh karya sejarah tentang topik tertentu.
- Hormat des fonds* Suatu prinsip kearsipan yang mengusulkan bahwa koleksi catatan arsip harus dipesan dan disimpan sesuai dengan administrasi, organisasi, individu, atau entitas yang dengannya mereka dibuat atau dari mana mereka diterima.
- Ian-jo* Rumah bordil tempat *jugun ianfu*.
- Iapetus Ocean* Lautan yang relatif kecil yang ada di antara benua Laurentia, Baltica, dan Avalonia dari Late Precambrian ke Devonian.
- Ilmu bantu sejarah* Serangkaian disiplin ilmu spesialis yang membantu mengevaluasi dan menggunakan sumber-sumber sejarah, dan yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian sejarah:
- Ilmu kearsipan, arsip* Akumulasi dokumen dan catatan sejarah, atau repositori fisik tempat mereka berada.
- Ilmu numismatik* Studi tentang koin.
- Interdisipliner* Studi atau praktik subjek yang menerapkan metode dan pendekatan dari beberapa disiplin ilmu. Misalnya, sementara sejarah, sastra, dan arkeologi adalah disiplin ilmu yang terpisah, mereka dapat digabungkan dalam pendekatan interdisipliner.
- Interior Seaway Barat Cretaceous,* Juga disebut sebagai *Western Interior Seaway*, Laut epicontinental yang terbentuk sebagai perairan laut dari utara tersebar di Amerika Utara dari sekitar 130 hingga 70 juta tahun yang lalu (Ma). Pada puncaknya di Kapur Tengah (~90 Ma), itu meluas dari Utah sekarang ke Appalachian dan dari Arktik ke Teluk Meksiko.
- Jawa Simbukai* Badan Pengawasan Surat Kabar.
- Jembatan Bering Land,* disebut juga *Beringia* Dataran tundra luas yang terpapar sebagai jembatan darat antara benua Asia dan Amerika Utara selama Maksimum Es Terakhir, sekitar 21.000 tahun yang lalu. Ini berteori telah menjadi rute migrasi bagi orang, hewan, dan tanaman selama beberapa ribu tahun sebelum sekali lagi tenggelam di bawah permukaan laut yang naik.

<i>Jibakutai</i>	Pasukan bunuh diri.
<i>Johobu</i>	Seksi intelijen.
<i>Jurnal</i>	Berkala ilmiah, sering berfokus pada tema sejarah tertentu.
<i>Kaigun Heiho</i>	Badan lokal Indonesia di bawah Angkatan Laut Jepang
<i>Kaigun</i>	Angkatan Laut pada masa Pendudukan Jepang di Indonesia.
<i>Kaiten</i>	Torpedo berisi manusia (misi bunuh diri).
<i>Kakyo Soakai</i>	Perkumpulan Golongan Tionghoa.
<i>Kalender</i>	Daftar deskriptif dari dokumen kearsipan, terkadang dikompilasi dengan cukup detail sehingga dapat digunakan sebagai pengganti dokumen asli.
<i>Kebijakan akrual</i>	Kebijakan yang mengatur penambahan item ke koleksi.
<i>Kebutuhan gender praktis</i>	Mengacu pada sumber daya atau fasilitas yang dibutuhkan orang untuk melakukan peran mereka saat ini dengan lebih mudah, efektif atau efisien. Kebutuhan seperti itu biasanya dapat diidentifikasi oleh masyarakat sendiri—misalnya, mendapatkan air atau bahan bakar. Langkah-langkah untuk mengatasi kebutuhan ini dapat mempertahankan atau memperkuat hubungan gender tradisional.
<i>Kebutuhan gender strategis</i>	Di sisi lain, dirancang untuk menantang posisi bawahan perempuan dan laki-laki di masyarakat, dan untuk mengubah peran dan hubungan mereka yang ada. Contoh kebutuhan strategis termasuk hak reproduksi, suara politik yang lebih besar, dan aksi kekerasan terhadap perempuan. Kebutuhan seperti itu seringkali menantang posisi hierarkis, dan biasanya jangka panjang.
<i>Keibitai</i>	Tentara pengawal, satuan garnisun
<i>Keibodan</i>	Barisan pembantu polisi. Anggotanya terdiri dari pemuda yang berusia 23-25 tahun.
<i>Keimpeicho</i>	Asisten/kaki tangan kempetai (Kenpeicho).
<i>Keisatsu</i>	Polisi.
<i>Kempetai</i>	Merupakan satuan polisi militer Jepang yang ditempatkan di seluruh wilayah Jepang termasuk daerah jajahan.

<i>Kencö</i>	bupati.
<i>Kliometrik</i>	Aplikasi sistematis teori ekonomi, teknik ekonometrik, dan metode formal atau matematika lainnya untuk studi sejarah; sejarah ekonomi kuantitatif.
<i>Kodikologi</i>	Studi kodeks atau buku naskah sebagai objek fisik, khususnya bahan dan teknik yang digunakan untuk membuat buku, termasuk permukaan tulisan (seperti perkamen atau velum), pigmen, tinta, <i>binding</i> , tulisan tangan, <i>marginalia</i> , <i>glosses</i> , dan sebagainya.
<i>Kodomo</i>	anak
<i>Konteks</i>	Dalam arkeologi, lokasi fisik yang terpisah, dapat dibedakan dari konteks lain, yang membentuk salah satu unit penyusun situs arkeologi secara keseluruhan. Konteks di mana artefak ditemukan memberikan bukti penting untuk interpretasinya.
<i>Kronik</i>	Catatan sejarah tentang fakta dan peristiwa yang disusun dalam urutan kronologis.
<i>Kronologi</i>	Studi tentang urutan peristiwa masa lalu.
<i>Kutipan</i>	Referensi ke sumber yang diterbitkan atau tidak dipublikasikan untuk pernyataan atau argumen.
<i>Legenda hitam</i>	Serangan kilat, Bahasa Jerman untuk "perang kilat". Strategi militer yang digunakan oleh Angkatan Darat Jerman pada awal Perang Dunia II untuk mencapai kemenangan melalui serangkaian serangan cepat, terutama di Belgia, Belanda dan Prancis. Strategi ini melibatkan pengeboman awal yang berat, diikuti dengan mobilisasi baju besi yang cepat dan infanteri bermotor untuk memecahkan bagian terlemah dari garis musuh.
<i>Linimasa</i>	Ilmu nama tempat, Studi tentang nama tempat.
<i>Masa, zaman</i>	Setiap rentang waktu yang ditentukan untuk keperluan kronologi atau historiografi. Dalam kronologi, era adalah tingkat organisasi tertinggi untuk pengukuran waktu, seperti yang digunakan dalam mendefinisikan era kalender untuk kalender tertentu dan era pemerintahan dalam sejarah monarki. Istilah ini juga digunakan dalam waktu geologis, di mana suatu zaman adalah pembagian dari zaman.

- Masalah gender* Dicitrakan oleh diskriminasi gender, di mana satu jenis kelamin dirugikan karena yang lain disukai, atau penindasan gender, di mana satu jenis kelamin mendominasi yang lain secara tidak adil atau bahkan kejam melalui penggunaan kekuasaan dan dominasi. Praktik-praktik semacam itu menciptakan kesenjangan gender, yang melaluinya - sebagai akibat praktik adat, bias agama, asumsi sosial, mitos atau tabu—satu gender didiskriminasi sedemikian rupa sehingga ia dicegah mendapatkan bagian sumber daya atau layanan yang adil.
- Metode akrual* Metode dimana item ditambahkan ke koleksi.
- Mikado* Kaisar
- Mitologi* Kumpulan mitos yang dikumpulkan bersama oleh budaya atau sekelompok orang, atau studi akademis tentang mitos tersebut.
- Monarki absolut* Sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja sebagai satu-satunya sumber kekuatan, mengendalikan semua fungsi negara.
- Naskah kuno, (pl.) Kodeks* Sebuah buku yang dibangun dari sejumlah lembaran kertas, velum, papirus, perkamen, atau bahan serupa, terutama buku naskah dengan konten tulisan tangan dan diformat sehingga setiap halaman ditumpuk dan diperbaiki menjadi tulang belakang di satu sisi.
- Naskah* Setiap dokumen yang ditulis dengan tangan, sebagai lawan dari yang dicetak atau direproduksi dengan cara lain.
- Osamu Seirei* Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenam Belas, tentara pendudukan Jepang.
- Paleografi* Studi tentang tulisan tangan tua.
- Pangea* Dieja juga *Pangaea*.
- Pannotia* Sebuah benua super yang ada di Late Precambrian dan memunculkan benua Gondwana, Laurentia, Siberia dan Baltica di Cambrian.
- Pekerjaan referensi* Sebuah teks, biasanya dalam bentuk kamus atau ensiklopedia, yang berisi fakta dan informasi tetapi biasanya bukan diskusi.

<i>Pekerjaan reproduksi</i>	Mengacu pada perawatan dan pemeliharaan rumah tangga dan anggota-anggotanya, termasuk menanggung dan merawat anak-anak, menyiapkan makanan, mengumpulkan air dan bahan bakar, belanja, rumah tangga dan perawatan kesehatan keluarga. Meskipun pekerjaan reproduksi sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, jarang dianggap 'pekerjaan nyata'. Di komunitas miskin, pekerjaan reproduksi biasanya padat karya dan memakan waktu. Itu hampir selalu menjadi tanggung jawab perempuan dan anak perempuan.
<i>Pencerahan</i>	Sebuah gerakan budaya dan intelektual dari akhir abad ke-17 hingga akhir abad ke-18 yang menekankan akal dan individualisme daripada tradisi, terutama di antara budaya Eropa Barat tetapi juga di bagian lain dunia.
<i>Peran gender</i>	Peran yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, di mana klasifikasi bersifat sosial dan bukan biologis. Membesarkan anak dapat diklasifikasikan sebagai peran perempuan, tetapi ini adalah peran gender perempuan dan bukan peran seks perempuan, karena membesarkan anak dapat dilakukan oleh pria atau wanita.
<i>Peran seks</i>	Merujuk pada fungsi biologis yang terbatas pada satu jenis kelamin tertentu. Misalnya, kehamilan adalah peran seks perempuan karena hanya perempuan yang bisa melahirkan anak.
<i>Periodisitas akrual</i>	Frekuensi item ditambahkan ke koleksi.
<i>PEŦA</i>	Pembela Tanah Air
<i>Piagam</i>	Pemberian kuasa atau hak yang sah.
<i>Presentisme</i>	Penerapan gagasan dan perspektif masa kini untuk penggambaran atau interpretasi masa lalu.
<i>Prosopografi</i>	Penyelidikan kelompok sejarah individu melalui studi kolektif kehidupan mereka.
<i>Rikugun</i>	Merupakan angkatan laut Jepang.

<i>Rodinia</i>	Superkontinen yang ada selama Late Precambrian sebelum superkontinen Pannotia, dan superkontinen tertua yang para ilmuwan memiliki catatan yang baik. Nama <i>Rodinia</i> adalah bahasa Rusia untuk "tanah air".
<i>Romantisisme</i>	Sebuah gerakan budaya dan intelektual dari akhir abad ke-18 hingga pertengahan ke-19 yang menekankan emosi dan sentimen daripada logika, terutama di antara budaya Eropa Barat tetapi juga di bagian lain dunia.
<i>Romukyoku</i>	Kantor Urusan Pekerja (romusa).
<i>Romusha</i>	pekerja paksa masa pendudukan Jepang (yang dipekerjakan adalah orang-orang Indonesia mereka dipekerjakan untuk membuat fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan dll. serta dipekerjakan di pabrik dan pertambangan seperti timah dll. yang berguna untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya).
<i>Saeculum</i>	Lamanya waktu yang kira-kira sama dengan potensi masa hidup manusia atau, yang setara, dengan waktu yang dibutuhkan untuk sepenuhnya meregenerasi populasi manusia dengan individu baru yaitu, durasi antara saat di mana suatu peristiwa terjadi (seperti endirian sebuah kota) dan titik waktu di mana setiap individu yang hidup pada saat pertama meninggal.
<i>Saikeirei</i>	penghormatan ke arah istana Kaisar Jepang, dari sikap bersiap membungkukkan badan dalam.
<i>Samudra Panthalassic,</i>	Juga disebut Panthalassa.
<i>Sanyo</i>	penasihat (orang Indonesia).
<i>Segel</i>	Alat untuk membuat kesan, biasanya dalam bentuk lilin, atau kesan yang terbentuk, secara historis digunakan untuk mengotentikasi dokumen.
<i>Seikerei</i>	Upacara penghormatan kepada kaisar Jepang yang dianggap dewa. Caranya adalah dengan membungkukkan badan kearah timur laut.
<i>Seinendan</i>	Organisasi semi militer yang didirikan oleh Jepang. Orang-orang yang boleh mengikuti organisasi ini adalah pemuda yang berumur 14-22 tahun.

- Sejarah alam* Sebuah domain penyelidikan yang melibatkan organisme termasuk hewan, jamur dan tanaman di lingkungan alami mereka yang lebih condong ke arah metode penelitian observasional daripada eksperimental.
- Sejarah ekonomi* Studi tentang ekonomi atau fenomena ekonomi di masa lalu.
- Sejarah komparatif* Perbandingan berbagai masyarakat yang ada selama periode waktu yang sama atau memiliki kondisi budaya yang sama.
- Sejarah kontrafaktual* Suatu bentuk historiografi yang berupaya mengeksplorasi sejarah dengan mengekstrapolasi garis waktu di mana peristiwa-peristiwa utama terjadi dengan cara-cara selain cara-cara di mana mereka memang terjadi.
- Sejarah kuantitatif*
- Sejarah kuno* Juga zaman dahulu.
- Sejarah lokal* Studi tentang sejarah wilayah geografis kecil, komunitas lokal, atau insiden lokal tren nasional atau internasional yang lebih luas. Jika dilakukan dengan maksud untuk menyoroti pertanyaan-pertanyaan sejarah yang lebih besar, sejarah lokal dapat dianggap sebagai cabang dari sejarah mikro.
- Sejarah makro* Studi tentang tren jangka panjang yang besar dalam sejarah dunia, dilakukan untuk mengungkap pola-pola pamungkas yang melintasi detail yang lebih spesifik dari beragam budaya historis.
- Sejarah manusia, humanisme* Gerakan intelektual Renaissance terkait dengan penemuan kembali ide-ide klasik.
- Sejarah mikro* Investigasi historis yang intensif dari unit penelitian kecil dan sempit (suatu peristiwa, komunitas atau individu), umumnya dilakukan dengan maksud untuk menyoroti pertanyaan-pertanyaan sejarah yang lebih luas. Sejarah lokal dapat dianggap sebagai cabang dari sejarah mikro.

<i>Sejarah militer</i>	Studi tentang sejarah konflik bersenjata dan dampaknya terhadap masyarakat. Ini bisa berkisar dari studi tindakan militer tertentu dan keterlibatan untuk pemeriksaan perang yang lebih luas sebagai alat politik.
<i>Sejarah publik</i>	Berbagai kegiatan dilakukan oleh orang-orang dengan beberapa pelatihan dalam disiplin sejarah, tetapi yang umumnya bekerja di luar pengaturan akademik khusus.
<i>Sejarah sosial</i>	Cabang sejarah yang mempelajari pengalaman orang-orang biasa di masa lalu.
<i>Sejarah</i>	Catatan sejarah fakta dan peristiwa berkisar dalam urutan kronologis, tahun ke tahun.
<i>Sejarah</i>	Studi tentang masa lalu seperti yang dijelaskan dalam dokumen tertulis; peristiwa yang terjadi sebelum catatan tertulis umumnya dianggap prasejarah. Meskipun umumnya digunakan untuk merujuk pada serangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya, sejarah dalam studi akademik dianggap sebagai produk dari upaya kita untuk memahami masa lalu, bukan masa lalu itu sendiri. Sejarah berkaitan dengan peristiwa masa lalu serta ingatan, penemuan, koleksi, organisasi, presentasi dan interpretasi informasi tentang peristiwa ini.
<i>Sejarawan</i>	Seorang sarjana yang mempelajari atau menulis tentang sejarah.
<i>Sensitivitas gender</i>	Kemampuan untuk mengenali isu-isu gender khususnya berbagai persepsi dan minat perempuan yang muncul dari lokasi dan peran gender mereka.
<i>Siberia, juga disebut Angaraland</i>	Angara atau Angarida. Lempeng benua terpisah yang ada dari Precambrian Terbaru hingga Karbon, terdiri dari sebagian besar dari apa yang sekarang menjadi Rusia tengah, yaitu wilayah Siberia modern.
<i>Silsilah</i>	Studi tentang hubungan keluarga.
<i>Statistik</i>	Studi tentang pengumpulan, organisasi, dan interpretasi data (historis).

- Stereotip gender* Terjadi ketika pria dan wanita dianggap sesuai dengan pemikiran yang kaku tentang harapan sosial dan budaya gender mereka-daripada pertimbangan yang lebih fleksibel dari kapasitas dan potensi individu mereka.
- Stratigrafi* Dalam arkeologi, konsep kunci dalam menafsirkan situs melalui penetapan kronologi relatif dari konteks fisiknya yang terpisah.
- Sumber sekunder* Materi yang dibuat oleh seseorang dikeluarkan dari acara yang sedang dipelajari; yaitu seseorang yang sezaman dengan peristiwa itu tetapi tidak secara fisik hadir untuk menyaksikannya, atau yang bekerja dari periode waktu setelah peristiwa itu terjadi. Semua buku teks sejarah, misalnya, adalah sumber sekunder. Kontras sumber primer.
- Sumber utama* Materi dari atau terkait langsung dengan masa lalu. Istilah ini biasanya merujuk pada catatan dan dokumen yang dibuat selama periode yang sedang dipelajari, seperti buku harian, surat, dokumen hukum, akun, foto, laporan berita, dan artefak. Kontras sumber sekunder.
- Syudanco* Sebutan untuk komandan peleton
- Tanggal* Titik atau periode waktu tertentu.
- Teleologi* Modus penafsiran historis yang menyatakan bahwa peristiwa bergerak ke arah kondisi atau tujuan akhir yang pasti.
- Teori koherensi kebenaran* Sebuah teori yang menganggap pernyataan sebagai benar jika mereka koheren dalam beberapa set kalimat, proposisi, atau keyakinan tertentu.
- Teori korespondensi kebenaran* Sebuah teori yang menganggap pernyataan sebagai benar jika mereka sesuai dengan dunia yang kita kenal dengan persepsi.
- Terran Cathaysian* Seperangkat daratan kecil yang berkembang di garis lintang tropis ke subtropis di sisi timur Pangea selama Permian dan Trias, terdiri dari apa yang sekarang menjadi Tiongkok Utara (Sino-Korea), Tiongkok Selatan (Yangtze), Qiangtang Timur, Tarim, dan Indochina.

- Terran Cimmerian*,
Disebut juga *Cimmeria* Kepulauan-kepulauan kecil yang berkembang di garis lintang tropis dan subtropis di sisi timur Pangea selama Trias. Blok yang terdiri itu termasuk apa yang sekarang Turki, Iran, Afghanistan, Tibet, dan Malaysia.
- Tethys Ocean* Lautan kecil yang ada dari Triassic hingga Jurassic. Ketika Pangea terpecah menjadi Gondwana dan Laurasia di Jurassic, sebuah lengan berkembang ke arah barat yang disebut *Tethys Seaway* atau Laut Tethys.
- Tipologi* Dalam arkeologi, klasifikasi artefak, bangunan dan monumen lapangan sesuai dengan karakteristik fisiknya; alat penting untuk mengelola sejumlah besar data arkeologi.
- Tonarigumi* Merupakan sebutan untuk rukun tetangga masa pendudukan Jepang.
- Toyo* Nama Perdana Menteri Jepang masa itu. Ia kemudian dihukum mati oleh Sekutu.
- Tradisi klasik*
Klasik, . Disebut juga studi klasik
- Transhistorisitas* Kualitas konsep atau entitas yang bertahan sepanjang sejarah manusia dan tidak diatur atau ditentukan oleh kerangka acuan waktu dan tempat tertentu.
- Ulasan buku* Pemeriksaan kritis atas sebuah teks, biasanya termasuk ringkasan karya dan pandangan yang berlawanan.
- Waktu* Kemajuan terus-menerus yang tak terbatas dari keberadaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suksesi yang tampaknya tidak dapat dibalikkan dari masa lalu, melalui masa kini, ke masa depan.
- Zaman perunggu* Di Inggris, periode dari sekitar 2300 hingga 700 SM ketika logam pertama kali mulai digunakan secara luas, mungkin sebagai akibat dari peningkatan kontak dengan daratan Eropa. Namun, berbagai jenis batu, terutama batu, tetap sangat penting lama setelah logam tersedia. Zaman Perunggu melihat diperkenalkannya kremasi orang mati dan penguburan di gerobak bundar. Fase-fase konstruksi selanjutnya (dan paling terkenal) di Stonehenge juga berasal dari periode ini.

INDEKS

A

Abad 92, 103, 105, 129, 187
Abstrak 187
Anakronisme 187
Analisis gender 187
analisis sejarah komparatif 125
Antiquarianism 187
Antropologi 187
Arkeologi 187
Artefak 188
Asua Raya 151
Autobiografi 188

B

Barbar 188
Baswedan, 138, 154
Benda 129
Benedict 13
Bibliografi 188
Biografi 92, 94, 188, 190
Boei Giyugun 188
Bogodan 188
Boutilier 14
Bringmans 156
Budanco 189
Budiman 13
Buranji 189

C

Chudanco 189
Chuo-Sang In 189
CONGRES PEREMPOEAN
INDONESIA 100

D

Daidan 189
Daidanki 189
Djoedjoeran 119
Djohan 101
Dobbin, 13
Dokuritsu jumbi cosakai 189
Dokuritsu jumbi i-inkai 189
Domei 189

E

Echols 25, 27
Epigrafi 189

F

Fatimah 127, 130
Feminisme vi, 39, 41, 42, 43, 44,
46, 48, 49, 50, 51
Feodalisme 48, 49, 190
Frederick 3, 4
Fujinkai x, xi, 110, 113, 119,
121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130,

- 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 171, 172, 173, 175, 176, 190
- Fusimban 190
- G**
- Gender dan Politik 53
- Giyugun 190
- Gunseikanbu 113, 114, 115, 126, 128, 154
- H**
- Hardi, 108, 134, 135, 136, 153
- Hartono 14, 111
- Hatta, 109, 110, 129, 146
- Heiho 190, 192
- Herkusumo, 115
- Hermeneutika 190
- Hinomaru 151, 190
- Historiografi 1, 2
- Historisisme 190
- Hunt 14
- I**
- Ian-jo 191
- Idrus 86, 93, 99, 173
- Ilmu kearsipan 191
- Indonesia ii
- Interpretasi Sejarah 15
- J**
- Jawa Shinbun 159
- Jawa Sinbunkai 191
- Johobu 192
- K**
- Kajian Tentang Gender* 27
- Kajian Tentang Perempuan* 12
- Kalyanamitra 93
- Kan po 155, 157
- Karima 48
- Kartowijoyo 102, 103
- Kasza 119
- Keibitai 192
- Keimpeiho 192
- Kesetaraan Gender 31
- Kolonialisme* 48
- KOWANI 103, 105, 129
- L**
- Lapian 112, 114, 133, 139, 154, 160, 161
- Linimasa 193
- Lips 25, 26
- Lloyd, 15
- Lubis 133, 142, 161, 171
- M**
- Marxis 188
- May, 107
- Megawangi, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 44, 45
- Metodologi* 8
- Moore 17, 60, 61
- Mulia 25, 107

N

Neufeldt 25
 Notosusanto 107, 174

P

Peran Perempuan 1, 15
Pewarta Selebes 159
 Purwanto 2, 6

R

Rachmat-Ishaya 145, 166, 172
 Rahayu 2, 5
 Ranke 124
 Riechlefs 112
 Romusha 144, 147, 153, 154,
 158, 163, 196
 Rupp 118

S

Scott 7, 8
 Seinendan x, 113, 121, 123, 149,
 154, 155, 156, 158, 160, 196
 Sejarah komparatif 197
 Sejarah lokal 197
Sejarah Perempuan 6
 Sejarah publik 198
Sejarah tentang Perempuan 10
 seni rupa xii
 Shigeru Sato 121
 Showalter 25
 S.K. Trimurti 103, 124, 130, 135
 Soeara Asia 139
 Soebagijo 124
 Soewito 106
 Standar berpikir historis, 18

Sumber sekunder 199

Suparta 153
 Surjomihardjo 102

T

Teori Ekofeminisme 44, 46
Teori Konflik 36
Teori Partisipasi Sosial 28
Teori Struktural-Fungsional 33,
 46
The History of Women 10
Tjahaya 105, 162, 166
 Tokura 116

U

Umar 25, 35, 36, 38, 39, 45

W

Women's History 6, 14